



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 8 TAHUN 2018**



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD)
KABUPATEN BREBES TAHUN 2017 - 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2018**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 8 TAHUN 2018**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(R P J M D)
KABUPATEN BREBES TAHUN 2017-2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2018**



BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BREBES TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 88);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2009 Nomor 94);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2011 Nomor 2);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2013 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
dan
BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BREBES TAHUN 2017-2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Brebes.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPERLITBANGDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
9. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, Kejaksaan, akademisi, Lembaga Sosial Masyarakat/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
10. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
11. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
12. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

13. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
14. Forum Perangkat Daerah adalah forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/ kota.
15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018.
19. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.

21. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
22. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.
23. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
25. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
26. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2010-2030 yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi.
27. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
28. Isu-Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

29. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
30. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
31. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
32. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
33. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
34. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
35. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
36. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah.
Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
37. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
38. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
39. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
40. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

41. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
42. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.
43. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
44. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
45. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah sampai dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.
46. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasi, mengadministrasi, serta mengolah data pembangunan daerah.
47. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
48. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku

kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

49. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
50. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
51. Evaluasi Rancangan Perda adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Perda RPJPD dan RPJMD untuk mengetahui kesesuaian dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
52. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
53. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
54. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
55. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

56. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
57. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
58. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
59. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.
60. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
61. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian outcome beberapa program.
62. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
63. Delegasi adalah perwakilan yang disepakati peserta musrenbang untuk menghadiri musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi.
64. Kabupaten/kota sekitar adalah kabupaten/kota lainnya yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.
65. Hari adalah hari kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan RPJMD adalah untuk memberikan arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022 dan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022.
- (2) Tujuan penyusunan RPJMD adalah:
- a. Menjabarkan visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan daerah di Kabupaten Brebes selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud;
 - b. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Brebes selama kurun waktu 2017-2022;
 - c. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi, dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap dan tindakan;
 - d. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan;
 - e. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintrah Kabupaten Brebes dengan daerah sekitar, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat; dan
 - f. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

BAB III

RPJMD

Pasal 3

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD Provinsi dan Nasional.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat arah dan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan, disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :
 - a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022;
 - b. Bahan penyusunan dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah dengan memperhatikan tugas dan kewenangan Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran pembangunan Kabupaten Brebes yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022;
 - c. Pedoman Pemerintah Kabupaten Brebes dalam menyusun RKPD.

Pasal 4

RPJMD wajib dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

BAB IV SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 5

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis;
 - e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
 - f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan;
 - g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Daerah;
 - h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - i. BAB IX : Penutup.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi RPJMD meliputi:
- a. Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan RPJMD;
 - b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. Evaluasi terhadap hasil RPJMD.

- (3) Dalam hal pengendalian dan evaluasi RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan Kepala Baperlitbangda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (4) Kepala Baperlitbangda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi RPJMD kepada Bupati.
- (5) Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi RPJMD kepada Gubernur.
- (6) Tata cara pengendalian dan evaluasi RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 8

RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

Pada saat RPJMD Tahun 2022-2027 belum tersusun, maka penyusunan RKPD tahun 2023 berpedoman pada RPJMD Tahun 2017-2022 dan RPJPD Tahun 2005-2025 serta mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMN.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes

pada tanggal 4 Juni 2018

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI



PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
BREBES TAHUN 2017-2022

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu disusun RPJMD selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJMN serta RPJMD Provinsi Jawa Tengah, memuat arah dan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan RPJMD dilakukan dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip: keterkaitan, konsistensi, kelengkapan dan kedalaman, dan keterukuran. Disamping itu secara terpadu juga menerapkan pendekatan-pendekatan: partisipatif (bottom up), top down, teknokratis, politis, dan

inovatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan RPJMD dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. RPJMD digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra-PD, Renja PD dan RKPD pada setiap tahun anggaran.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 8

DAFTAR ISI

	DAFTAR ISI	i
	DAFTAR TABEL	iii
	DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I	PENDAHULUAN	I - 1
1.1	Latar Belakang	I - 1
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	I - 2
1.3	Hubungan antar Dokumen	I - 4
1.4	Maksud Dan Tujuan	I - 13
1.5	Sistematika Penulisan	I - 14
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II - 1
2.1	Aspek Geografi dan Demografi	II - 1
2.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II - 22
2.3	Aspek Pelayanan Umum	II - 41
BAB III	GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN	III - 1
3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu	III - 1
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III - 19
3.3	Kerangka Pendanaan	III - 25
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	IV - 1
4.1	Permasalahan Pembangunan	IV - 1
4.2	Isu Strategis	IV - 11
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V - 1
5.1	Visi	V - 1
5.2	Misi	V - 2
5.3	Tujuan Dan Sasaran	V - 4

BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI - 1
6.1	Strategi	VI - 1
6.2	Arah Kebijakan	VI - 7
6.3	Program Pembangunan Daerah	VI - 17
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII - 1
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VIII - 1
BAB IX	PENUTUP	IX - 1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Keselarasan Dokumen RPJMD Dengan RPJPD	I - 5
Tabel 1.2	Keselarasan Dokumen RPJMD Dengan RPJMN	I - 7
Tabel 1.3	Keselarasan Dokumen RPJMD Dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah	I - 11
Tabel 2.1	Luas Erosi dan Abrasi di Wilayah Pesisir Kabupaten Brebes Tahun 2003-2015	II - 17
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Brebes Tahun 2012-2016	II - 19
Tabel 2.3	Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Brebes Tahun 2012-2016	II - 20
Tabel 2.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Menurut Kecamatan Di Kabupaten Brebes Tahun 2015	II - 22
Tabel 2.5	Jumlah Penduduk Kabupaten Brebes Usia 10 Tahun Keatas Berdasarkan Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan Tahun 2012-2015	II - 23
Tabel 2.6	Distribusi PDRB Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016 (Persen)	II - 24
Tabel 2.7	Distribusi PDRB Kabupaten Brebes Atas Dasar Hara Konstan Menurut Pengeluaran Tahun 2012-2016 (Persen)	II - 25
Tabel 2.8	PDRB Kabupaten Brebes Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012 – 2016 Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Ruiah)	II - 27
Tabel 2.9	PDRB Kabupaten Brebes Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012 – 2016 Atas Dasar Harga Konstan (Juta Ruiah)	II - 28
Tabel 2.10	Indikator Kemiskinan di Kabupaten Brebes	II - 33
Tabel 2.11	Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Brebes Tahun 2012-2016	II - 39
Tabel 2.12	Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Brebes Tahun 2012-2016	II - 39
Tabel 2.13	Angka Pendidikan Yang Ditamatkan Berdasarkan Penduduk Usia Kerja (15-64 Tahun) Kabupaten Brebes Tahun 2012-2016	II - 40
Tabel 2.14	Indikator Pembentuk Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Brebes Tahun 2011-2015	II - 43
Tabel 2.15	Perkembangan Jumlah Kelompok Kesenian dan Gedung Kesenian Kabupaten Brebes Tahun 2012- 2016	II - 44
Tabel 2.16	Banyaknya Karang Taruna Menurut Kecamatan Di Kabupaten Brebes Tahun 2012-2016	II - 45
Tabel 2.17	Perkembangan Olahraga Kabupaten Brebes Tahun 2012-2016	II - 45
Tabel 2.18	Perkembangan APS Kabupaten Brebes Tahun 2012- 2015	II - 42

Tabel 2.19	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Brebes Tahun 2015.....	II	-	46
Tabel 2.20	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah di Kabupaten Brebes Tahun 2012-2015	II	-	43
Tabel 2.21	Rasio Ketersediaan Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Brebes Tahun 2015	II	-	48
Tabel 2.22	Rasio Guru/Murid Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Brebes Tahun 2012-2015	II	-	50
Tabel 2.23	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Jenjang Pendidikan Usia Dini (TK) Di Kabupaten Brebes Tahun 2014-2015	II	-	50
Tabel 2.24	Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Usia Dini (TK) di Kabupaten Brebes Tahun 2014-2015	II	-	51
Tabel 2.25	Jumlah Sarana Pendidikan di Kabupaten Brebes Tahun 2012-2015	II	-	51
Tabel 2.26	Sarana Kesehatan Kabupaten Brebes Tahun 2012-2016	II	-	52
Tabel 2.27	Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan di Kabupaten Brebes Tahun 2012-2016	II	-	53
Tabel 2.28	Perkembangan Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Kabupaten Brebes Tahun 2012-2016	II	-	54
Tabel 2.29	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin di Kabupaten Brebes Tahun 2012-2016	II	-	56
Tabel 2.30	Jenis Prasarana Irigasi/Pengairan di Kabupaten Brebes Tahun 2013-2015	II	-	57
Tabel 2.31	Persampahan di Kabupaten Brebes Tahun 2013-2015	II	-	57
Tabel 2.32	Kondisi Panjang Jalan Menurut Tingkat Kerusakan di Kabupaten Brebes Tahun 2012-2016	II	-	58
Tabel 2.33	Kondisi Jalan Menurut Jenis Permukaan di Kabupaten Brebes Tahun 2012-2016	II	-	58
Tabel 2.34	Kondisi Jembatan Di Kabupaten Brebes Tahun 2012-2016	II	-	59
Tabel 2.35	Perkembangan Jumlah Aparat Pamong Praja, Jumlah Aparat Linmas dan Jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 Dalam 24 Jam di Kabupaten Brebes Tahun 2012-2016	II	-	63
Tabel 2.36	Kondisi Keamanan dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Brebes Tahun 2012-2016 (Kasus)	II	-	63
Tabel 2.37	Jumlah Penduduk Penyandang Masalah Sosial dan Penanganan PMKS Kabupaten Brebes Tahun 2012-2016	II	-	64
Tabel 2.38	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Di Kabupaten Brebes Tahun 2012-2016	II	-	66
Tabel 2.39	Keluarga Menurut Tingkat Kesejahteraan Kabupaten Brebes Tahun 2012-2016	II	-	67
Tabel 2.40	Perkembangan Ketenagakerjaan Di Kabupaten Brebes Tahun 2012-2016	II	-	68
Tabel 2.41	Jumlah Lahan Persawahan Di Kabupaten Brebes Tahun 2012-2016	II	-	69

Tabel 2.42	Perkembangan Pertanahan Di Kabupaten Brebes Tahun 2012-2016	II	-	65
Tabel 2.43	Jumlah Kawasan Lindung, Plasma Nutfah Dilindungi dan Endemik, Hutan Bakau dan Kerusakan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Brebes Tahun 2012-2016	II	-	66
Tabel 2.44	Data Kependudukan dan Catatan Sipil Di Kabupaten Brebes Tahun 2014-2015	II	-	68
Tabel 2.45	Jumlah UED-SP dan BKM Menurut Kecamatan Di Kabupaten Brebes Tahun 2014-2015	II	-	69
Tabel 2.46	Jumlah Peserta Program KB Aktif, Jumlah Akseptor KB, Jumlah Pasangan Usia Subur dan Jumlah Pasangan Usia Subur Ber KB Di Kabupaten Brebes Tahun 2012-2016	II	-	70
Tabel 2.47	Perkembangan Pelayanan Jenis Transportasi Darat Di Kabupaten Brebes Tahun 2012-2016	II	-	72
Tabel 2.48	Perkembangan Koperasi Di Kabupaten Brebes Tahun 2012-2016	II	-	74
Tabel 2.49	Jumlah Proyek PMA, PMDN Dan Investasi Di Kabupaten Brebes Tahun 2012-2016 (Juta Rupiah)	II	-	75
Tabel 2.50	Jumlah Klub Olahraga, Sarana Olahraga dan Organisasi Kepemudaan Di Kabupaten Brebes Tahun 2013-2015	II	-	77
Tabel 2.51	Banyaknya Kelompok Kesenian dan Sarana Kesenian Menurut Kecamatan Di Kabupaten Brebes Tahun 2014-2015	II	-	80
Tabel 2.52	Perkembangan Perpustakaan Di Kabupaten Brebes Tahun 2012-2016	II	-	81
Tabel 2.53	Kinerja Pelayanan Kearsipan Kabupaten Brebes Tahun 2012-2016	II	-	81
Tabel 2.54	Jumlah Obyek Wisata, Pengunjung dan Pendapatan Di Kabupaten Brebes Tahun 2012-2015	II	-	84
Tabel 2.55	Produksi Hasil Pertanian Kabupaten Brebes Tahun 2012-2016	II	-	85
Tabel 2.56	Produktivitas Hasil Pertanian Kabupaten Brebes Tahun 2012-2016	II	-	86
Tabel 2.57	Perkembangan Jenis Tanaman Hortikultura Andalan Kabupaten Brebes (Bawang Merah) Tahun 2012-2016 .	II	-	86
Tabel 2.58	Populasi Ternak Di Kabupaten Brebes Tahun 2012-2016	II	-	88
Tabel 2.59	Perkembangan Sarana Perdagangan Di Kabupaten Brebes Tahun 2012-2016	II	-	89
Tabel 2.60	Perkembangan Industri Di Kabupaten Brebes Tahun 2012-2016	II	-	89
Tabel 2.61	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Penduduk Di Kabupaten Brebes Tahun 2014-2015	II	-	91
Tabel 2.62	Rasio Ketergantungan Kabupaten Brebes Tahun 2012-2016	II	-	93
Tabel 3.1	Rata-Rat Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupten Brebes Tahun 2012-2017	III	-	4
Tabel 3.2	Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2012-2017 ..	III	-	7

Tabel 3.3	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2012-2016	III - 9
Tabel 3.4	Realisasi Belanja Per Urusan Tahun 2012-2016 (Dalam Juta Rupiah)	III - 10
Tabel 3.5	Rincian Pembiayaan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2012-2017	III - 14
Tabel 3.6	Neraca Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2012-2016 (Dalam Ribuan Rupiah)	III - 15
Tabel 3.7	Perhitungan Neraca Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2012-2016	III - 17
Tabel 3.8	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Brebes	III - 20
Tabel 3.9	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Brebes Tahun 2014-2016	III - 23
Tabel 3.10	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Brebes Tahun 2014-2016	III - 23
Tabel 3.11	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Brebes	III - 24
Tabel 3.12	Proyeksi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022	III - 27
Tabel 3.13	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022	III - 29
Tabel 3.14	Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022	III - 30
Tabel 3.15	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022	III - 31
Tabel 3.16	Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022	III - 32
Tabel 5.1	Tujuan dan Sasaran Misi 1	V - 4
Tabel 5.2	Tujuan dan Sasaran Misi 2	V - 5
Tabel 5.3	Tujuan dan Sasaran Misi 3	V - 7
Tabel 5.4	Tujuan dan Sasaran Misi 4	V - 9
Tabel 5.5	Tujuan dan Sasaran Misi 5	V - 10
Tabel 5.6	Tujuan dan Sasaran Misi 6.....	V - 11
Tabel 6.1	Tujuan, Sasaran, dan Strategi Misi 1	VI - 1
Tabel 6.2	Tujuan, Sasaran, dan Strategi Misi 2	VI - 2
Tabel 6.3	Tujuan, Sasaran, dan Strategi Misi 3	VI - 3
Tabel 6.4	Tujuan, Sasaran, dan Strategi Misi 4	VI - 4
Tabel 6.5	Tujuan, Sasaran, dan Strategi Misi 5	VI - 5
Tabel 6.6	Tujuan, Sasaran, dan Strategi Misi 6	VI - 5
Tabel 6.7	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022	VI - 8
Tabel 6.8	Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Pada Misi 1	VI - 17
Tabel 6.9	Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Pada Misi 2	VI - 39
Tabel 6.10	Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Pada Misi 3	VI - 45
Tabel 6.11	Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu	

	Indikatif Pada Misi 4	VI	-	55
Tabel 6.12	Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Pada Misi 5	VI	-	60
Tabel 6.13	Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Pada Misi 6	VI	-	65
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017-2022 Kabupaten Brebes	VI	-	3
Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2017-2022 Kabupaten Brebes	VII	-	4
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Brebes	VIII	-	2
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	VIII	-	4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan	I	-	4
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Brebes	II	-	1
Gambar 2.2	Peta Kemiringan Lahan Kabupaten Brebes	II	-	2
Gambar 2.3	Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Brebes	II	-	7
Gambar 2.4	Struktur Penduduk Kabupaten Brebes Tahun 2016 .	II	-	19
Gambar 2.5	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Brebes Tahun 2012-2016 (%)	II	-	24
Gambar 2.6	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bbrebes dan Kabupaten/Kota Sekitarnya Tahun 2016 (%)	II	-	24
Gambar 2.7	Inflasi Kabupaten Brebes dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016 (%)	II	-	27
Gambar 2.8	PDRB Per Kapita Kabupaten Brebes Tahun 2012- 2016 (Juta Rupiah)	II	-	28
Gambar 2.9	Indeks Gini Kabupaten Brebes Tahun 2011-2015 ...	II	-	28
Gambar 2.10	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Brebes dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016	II	-	29
Gambar 2.11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Brebes dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016	II	-	31
Gambar 2.12	Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Brebes Tahun 2012-2016 (Tahun)	II	-	32
Gambar 2.13	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Brebes Tahun 2012-2016 (Tahun)	II	-	32
Gambar 2.14	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Brebes Tahun 2012-2016 (Tahun)	II	-	33
Gambar 2.15	Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Brebes Tahun 2012-2016 (Ribuan Rupiah)	II	-	34
Gambar 2.16	Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Brebes Tahun 2012-2016	II	-	37
Gambar 2.17	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Brebes Tahun 2012-2016	II	-	37
Gambar 2.18	IPG Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2011-2015	II	-	38
Gambar 2.19	IDG Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2011-2015	II	-	39
Gambar 2.20	Produksi Padi Sawah dan Jagung Di Kabupaten Brebes Tahun 2012-2016	II	-	64
Gambar 2.21	Produksi Kacang Hijau, Kacang Tanah dan Ubi Kayu Kabupaten Brebes Tahun 2012-2016	II	-	65
Gambar 2.22	Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Brebes Tahun 2012-2016 (Ton)	II	-	82
Gambar 2.23	Produksi Garam dan Rumput Laut Di Kabupaten Brebes Tahun 2012-2015 (Ton)	II	-	83
Gambar 4.1	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Brebes Tahun 2012-2016	II	-	9
Gambar 4.2	Perbandngan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016	II	-	10

Gambar 3.1	Proporsi PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Total Pendapatan Daerah	III	-	2
Gambar 3.2	Proporsi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah Terhadap Total PAD	III	-	3
Gambar 3.3	Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2012-2017 (Dalam Milyar Rupiah)	III	-	6
Gambar 3.4	Proporsi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2012-2017	III	-	6
Gambar 3.5	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2012-2016 (Dalam Milyar Rupiah)	III	-	8
Gambar 3.6	Proporsi Ralisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2012-2016	III	-	10
Gambar 3.7	Penerimaan Pembiayaan Daerah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2012-2017 (Dalam Milyar Rupiah)	III	-	12
Gambar 3.8	Pengeluaran Pembiayaan Daerah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2012-2017 (Dalam Milyar Rupiah)	III	-	13
Gambar 3.9	Perkembangan Rasio Likuiditas dan Solvabilitas Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2012-2016	III	-	18
Gambar 3.10	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Brebes (%)	III	-	20
Gambar 3.11	Proporsi Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah	III	-	21
Gambar 3.12	Rasio SILPA terhadap Total Belanja Daerah	III	-	25
Gambar 5.1	Kolerasi Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2012-2022 Dengan Visi RPJPD Kabupaten Brebes, RPJMN, dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah	V	-	2
Gambar 5.2	Keterkaitan Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019-2022	V	-	3
Gambar 6.1	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022	VI	-	7

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR : 8 TAHUN 2018

TANGGAL : 4 JUNI 2018

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BREBES TAHUN 2017-2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022 dimulai sejak dilantikannya Bupati Idza Priyanti, S.E., M.Hum dan Wakil Bupati Narjo, S.H., pada tanggal 4 Desember 2017. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Brebes berkewajiban menyusun dan menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik.

RPJMD adalah perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022 merupakan tahap ketiga dan keempat RPJPD Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025. Dan merupakan tahap lanjutan dari RPJMD Tahun 2012-2017. Visi pembangunan Kabupaten Brebes yang akan dicapai di tahun 2022 adalah “Menuju Brebes Unggul, Sejahtera, dan Berkeadilan”. Visi ini selaras dengan visi RPJPD yaitu “Kabupaten Brebes Yang Madani, Maju dan Sejahtera”.

RPJMD Kabupaten Brebes juga merupakan satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi Jawa Tengah. Untuk itu RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022 ini juga berpedoman pada RPJMN Tahun 2014-2019 dan memiliki keselarasan dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018. Perumusan kebijakan dan program pembangunan daerah Kabupaten Brebes dalam lima tahun kedepan adalah juga untuk mendukung pada pencapaian target pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

Isu pembangunan daerah Kabupaten Brebes yang saat ini masih perlu diperhatikan untuk terus diupayakan penyelesaiannya dalam lima tahun kedepan antara lain terkait dengan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia, serta perekonomian daerah. Sumber daya manusia sebagai penggerak utama pembangunan perlu untuk ditingkatkan kualitas dan kapasitasnya, terutama di level pendidikan, tingkat keterampilan, dan kompetensinya, agar mampu bersaing dengan daerah lain, dan terserap sebagai tenaga kerja terampil dan ahli di daerah dan nasional. Di sisi lain, perekonomian daerah juga akan tetap didorong percepatannya dengan berbasis ekonomi kerakyatan.

RPJMD Tahun 2017-2022 yang disusun selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022 ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

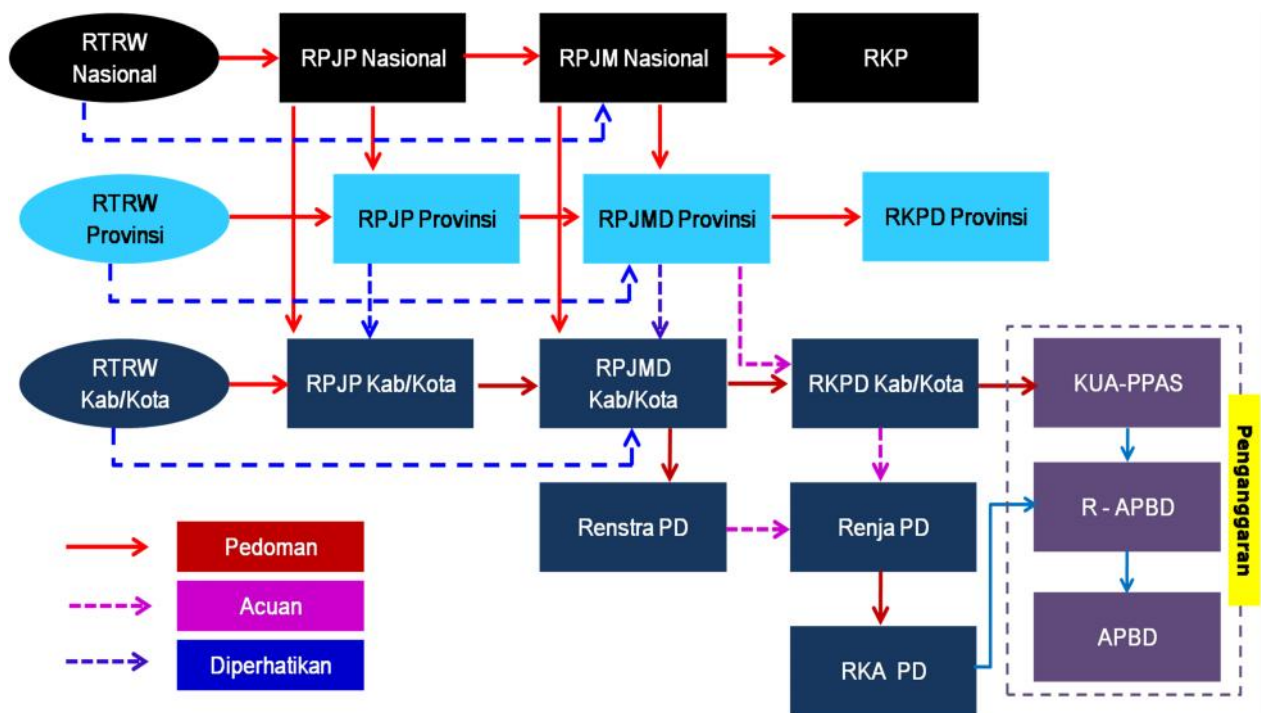
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 88);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2009 Nomor 94);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2011 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022 sejalan dan selaras dengan dokumen perencanaan strategis dan sektoral lainnya, baik nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota lainnya yang berbatasan. Dokumen RPJMD disusun dengan mempedomani RPJPD dan RPJMN, serta memperhatikan RPJMD Provinsi, RPJMD Kabupaten/Kota lainnya yang berbatasan, dan RTRW Kabupaten Brebes. RPJMD yang disusun akan menjadi pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dan dijabarkan tiap tahun dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dokumen RKPD akan menjadi pedoman penyusunan KUA/PPAS untuk menyusun Rancangan APBD setiap tahunnya, serta menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Gambaran keterkaitan RPJMD dengan dokumen lainnya dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 1.1.
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

Keselarasan amanat dalam RPJPD, RPJMN, dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah dalam RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022 dijabarkan sebagai berikut:

1. RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Brebes

RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022 tidak terlepas dari tahapan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari visi dan misi pembangunan RPJMD yang mendukung pada visi dan misi pembangunan RPJPD, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 1.1.
Keselarasan Dokumen RPJMD Dengan RPJPD

No	RPJPD Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025	RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022
VISI		
	Brebes Yang Madani, Maju, dan Sejahtera	Menuju Brebes Unggul, Sejahtera, dan Berkeadilan
MISI		
1	Mewujudkan pengalaman nilai-nilai agama dan kearifan lokal.	Misi 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas, sehat dan berdaya saing tinggi berbasis pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa melalui pendidikan dan kesehatan.
2	Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia.	Misi 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas, sehat dan berdaya saing tinggi berbasis pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa melalui pendidikan dan kesehatan.
		Misi 6. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, serta pemenuhan hak anak, dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta mewujudkan perlindungan sosial.
3	Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis, dan partisipatif.	Misi 4. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, efektif dan efisien, serta menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban daerah.
		Misi 5. Memantapkan tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi desa yang maju dan mandiri.
4	Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal.	Misi 3. Meningkatkan pengembangan pertanian, ekonomi kerakyatan dengan memperkuat inovasi daerah dan investasi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis kearifan lokal.

No	RPJPD Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025	RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022
5	Mewujudkan peningkatan dan pemerataan pembangunan prasarana dan sarana daerah.	Misi 2. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai rencana tata ruang dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
6	Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.	Misi 2. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai rencana tata ruang dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

2. RPJMD Kabupaten Brebes dengan RPJMN

RPJMN merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional jangka menengah tahun 2015-2019 yang dipedomani dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022. Keselarasan RPJMN dan RPJMD adalah pada misi daerah yang mendukung Nawacita sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 1.2.

Keselarasn Dokumen RPJMD Dengan RPJMN

No	RPJMN		RPJMD Kabupaten Brebes 2017-2022
	VISI		VISI
	Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong		Menuju Brebes Unggul, Sejahtera, dan Berkeadilan
	MISI	NAWACITA	MISI
1	Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.	1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.	Misi 4. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, efektif dan efisien, serta menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban daerah.
2	Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.	2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.	Misi 4. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, efektif dan efisien, serta menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban daerah.
3	Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.	3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.	Misi 5. Memantapkan tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi desa yang maju dan mandiri.
4	Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang	4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan	Misi 6. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, serta pemenuhan hak anak, dan partisipasi

No	RPJMN		RPJMD Kabupaten Brebes 2017-2022
	tinggi, maju, dan sejahtera.	reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.	perempuan dalam pembangunan, serta mewujudkan perlindungan sosial.
5	Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.	5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.	Misi 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas, sehat dan berdaya saing tinggi berbasis pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa melalui pendidikan dan kesehatan.
6	Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.		Misi 6. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, serta pemenuhan hak anak, dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta mewujudkan perlindungan sosial.
7	Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.	6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.	Misi 3. Meningkatkan pengembangan pertanian, ekonomi kerakyatan dengan memperkuat inovasi daerah dan investasi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis kearifan lokal.
			Misi 2. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai rencana tata ruang dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
		7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.	Misi 3. Meningkatkan pengembangan pertanian, ekonomi kerakyatan dengan memperkuat inovasi daerah dan investasi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis kearifan lokal.
			Misi 2. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai

No	RPJMN		RPJMD Kabupaten Brebes 2017-2022
			rencana tata ruang dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
		8. Melakukan revolusi karakter bangsa.	Misi 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas, sehat dan berdaya saing tinggi berbasis pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa melalui pendidikan dan kesehatan.
		9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.	Misi 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas, sehat dan berdaya saing tinggi berbasis pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa melalui pendidikan dan kesehatan.

3. RPJMD Kabupaten Brebes dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah

Penyusunan RPJMD Kabupaten Brebes juga tidak terlepas dari RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018. Keselarasannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.3.

Keselarasan RPJMD Dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah

No	RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018	RPJMD Kabupaten Brebes 2017-2022
	VISI	
	Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari <i>"Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi"</i>	Menuju Brebes Unggul, Sejahtera, dan Berkeadilan
	MISI	
1	Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan.	Misi 4. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, efektif dan efisien, serta menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban daerah. Misi 3. Meningkatkan pengembangan pertanian, ekonomi kerakyatan dengan memperkuat inovasi daerah dan investasi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis kearifan lokal.
2	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran.	Misi 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas, sehat dan berdaya saing tinggi berbasis pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa melalui pendidikan dan kesehatan. Misi 3. Meningkatkan pengembangan pertanian, ekonomi kerakyatan dengan memperkuat inovasi daerah dan investasi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis kearifan lokal. Misi 6. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, serta pemenuhan hak anak, dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta mewujudkan perlindungan sosial.
3	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan	Misi 4. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, efektif dan

No	RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018	RPJMD Kabupaten Brebes 2017-2022
	Transparan, “ <i>Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi</i> ”.	efisien, serta menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban daerah.
		Misi 5. Memantapkan tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi desa yang maju dan mandiri.
4	Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan.	Misi 5. Memantapkan tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi desa yang maju dan mandiri.
5	Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak.	Misi 4. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, efektif dan efisien, serta menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban daerah.
		Misi 6. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, serta pemenuhan hak anak, dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta mewujudkan perlindungan sosial.
6	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat.	Misi 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas, sehat dan berdaya saing tinggi berbasis pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa melalui pendidikan dan kesehatan.
7	Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.	Misi 2. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai rencana tata ruang dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

4. RPJMD Kabupaten Brebes dengan Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Brebes

Renstra PD Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022 disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022. Renstra PD merupakan dokumen perencanaan tiap perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

5. RPJMD Kabupaten Brebes dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes

RKPD merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2017 – 2022 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

6. RPJMD Kabupaten Brebes dengan Rencana Pembangunan Sektoral

Selain memiliki korelasi dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional, provinsi, maupun daerah, RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022 juga memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral di tingkat nasional dan provinsi. Beberapa dokumen rencana tersebut antara lain: 1) Agenda pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDG's), 2) Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG), 3) Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), 4) Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK), 5) *Grand Design* Reformasi Birokrasi, 6) Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Jawa Tengah, 7) RAD Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Tengah, 8) RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Tengah, 9) RAD Pengurangan Resiko Bencana, 10) Pedoman Pelaksanaan PUG di Jawa Tengah, dan 11) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022, adalah sebagai berikut.

a. Maksud

Maksud dari penyusunan RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022 adalah untuk memberikan arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022 dan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022.

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022 adalah:

- a. Menjabarkan visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan daerah di Kabupaten Brebes selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud;
- b. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Brebes selama kurun waktu 2017-2022;
- c. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi, dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap dan tindakan;
- d. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan;
- e. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Brebes dengan daerah sekitar, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat; serta
- f. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dokumen RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022 disusun menurut sistematika yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPJMD.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini berisi gambaran umum kondisi Kabupaten Brebes meliputi gambaran dari aspek geografi, demografi,

kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing, sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, serta menjadi pijakan perumusan target pembangunan dalam lima tahun kedepan.

Bab III **Gambaran Keuangan Daerah**

Bab ini menguraikan gambaran pengelolaan keuangan daerah tahun sebelumnya dan kerangka pendanaan untuk pembangunan lima tahun kedepan.

Bab IV **Permasalahan dan Isu-Isu Strategis**

Pada bab ini menguraikan permasalahan pembangunan daerah terkait dengan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta isu strategis daerah yang prioritas untuk diselesaikan selama lima tahun kedepan, berdasarkan hasil analisis data pada bab gambaran umum daerah.

Bab V **Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran**

Bab ini menjelaskan tentang visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Brebes sesuai dengan visi dan misi yang disampaikan oleh Bupati terpilih, yang kemudian dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan, disertai indikator kinerja dan targetnya.

Bab VI **Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah**

Pada bab ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, dan didukung dengan program pembangunan daerah.

Bab VII **Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, target, pagu indikatif dan perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

Bab VIII **Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Bab ini menjelaskan tentang penetapan indikator kinerja utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan sebagai indikator kinerja kunci (IKK).

Bab IX **Penutup**

Bab ini menguraikan tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan RPJMD.

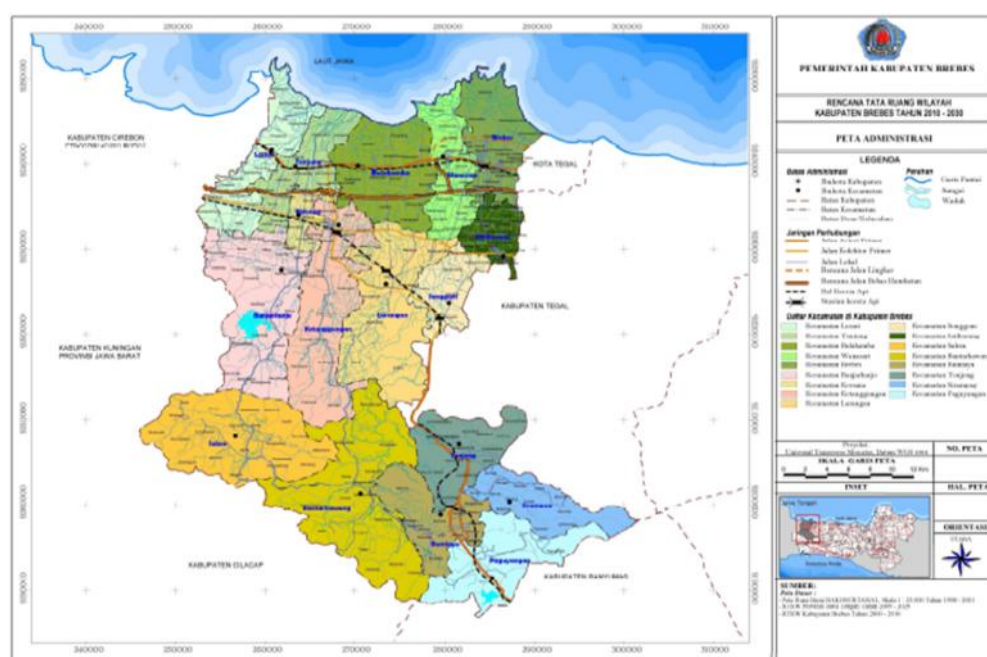
BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Brebes memiliki luas wilayah sebesar 166.296 Ha. Sedangkan berdasarkan data hasil review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Brebes yang dilakukan pada tahun 2016, luas wilayah Kabupaten Brebes mencapai 175.737 ha. Adapun secara administratif, Kabupaten Brebes berada pada posisi ujung barat laut dari Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, laut Jawa di sebelah utara, Kota Tegal dan Kabupaten Tegal di sebelah timur, Kabupaten Banyumas dan Cilacap di sebelah selatan. Kabupaten Brebes terdiri dari 17 kecamatan yang meliputi 292 desa dan 5 kelurahan. Batas wilayah administrasi kecamatan di Kabupaten Brebes dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Sumber: RTRW Kabupaten Brebes Tahun 2010-2030

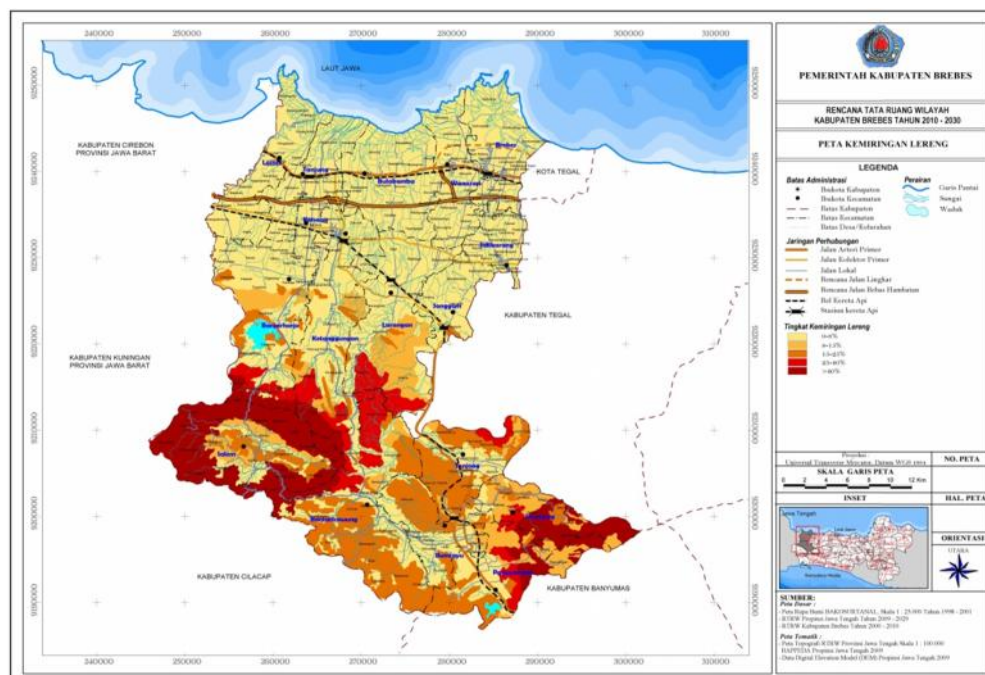
Gambar 2.1.
Peta Administrasi Kabupaten Brebes

2.1.2. Kondisi Geografis

Secara geografis, letak wilayah Kabupaten Brebes berada pada antara 6° 44'-7° 21' Lintang Selatan dan antara 108° - 109° 11' Bujur Timur dengan bentuk memanjang dari utara ke selatan sepanjang 87 km dan dari barat ke timur sepanjang 50 km dan memiliki garis pantai sepanjang 55 km dengan luas wilayah laut 12 mil laut 1.036,80 km².

2.1.3. Kondisi Topografi

Kondisi topografi Kabupaten Brebes, meliputi daerah pegunungan atau dataran tinggi yang berada di 3 kecamatan, dataran rendah yang berada di 9 kecamatan, dan daerah pesisir/pantai berada di 5 kecamatan, dengan ketinggian antara 0-2.000 m di atas permukaan laut. Kemiringan lahan di Kabupaten Brebes bervariasi, meliputi lahan dengan kemiringan 0-2° sebesar 43%, lahan dengan kemiringan 2-15° sebesar 18%, lahan dengan kemiringan 15-40° sebesar 23%, dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40° sebesar 15%. Kemiringan lahan dapat menjadi dasar pertimbangan untuk kesesuaian pemanfaatan dan fungsi penggunaan lahan. Peta kemiringan lahan dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Sumber: RTRW Kabupaten Brebes Tahun 2010-2030

Gambar 2.2.

Peta Kemiringan Lahan Kabupaten Brebes

2.1.4. Kondisi Geologi

Secara geologi, wilayah Kabupaten Brebes termasuk ke dalam bagian daerah geologi pegunungan Pulau Jawa yang dapat dilihat dari bentuk alam, morfologi, dan susunan batuan pembentuknya. Morfologi pegunungan yang terdapat di Kecamatan Paguyangan dan Sirampog dipengaruhi tiga faktor litologi maupun struktur. Kenampakan morfologi wilayah dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Dataran *alluvial* yang merupakan dataran rendah dan berlereng datar, umumnya menempati daerah-daerah endapan;
- b. Daerah perbukitan berlereng sedang umumnya ditempati oleh batuan gamping;
- c. Daerah pegunungan berlereng curam yang dibentuk oleh batuan lava.

Menurut jenis tanahnya, Kabupaten Brebes dibedakan atas 19 jenis dengan sebagian besar jenis tanah di Kabupaten Brebes adalah *alluvial* kelabu yaitu dengan luas 25,53% dari total luas wilayah. Tekstur tanah di Kabupaten Brebes terdiri dari fraksi liat, debu dan pasir pembentuk tanah. Karena karakteristik geologi yang sedemikian itu, maka sebagian besar wilayah Kabupaten Brebes merupakan wilayah yang subur dan cocok untuk pengembangan pertanian.

Sesuai karakteristik geologinya, potensi sumberdaya mineral yang ada merupakan sumberdaya mineral bahan galian golongan C, dengan cadangan tereka meliputi 8 jenis yaitu pasir sungai, tras, batu pasir, andesit, lempung gerabah, *bentonite*, gipsum dan batu gamping. Berdasarkan cadangan tereksplorasi meliputi 3 jenis yaitu pasir sungai, andesit dan lempung gerabah. Sebaran batu pasir berasal dari endapan sungai berada di sepanjang alur sungai Cisanggarung, sungai Pemali, sungai Keruh, sungai Pedes dan sungai lainnya. Batu pasir berasal dari endapan vulkanik berada di wilayah kaki lereng Gunung Slamet. Berdasarkan cadangan terindikasi, Kabupaten Brebes juga memiliki cadangan sumberdaya mineral bahan galian golongan C berupa batu gamping (batu kapur) di Kecamatan Songgom.

Kabupaten Brebes memiliki wilayah dengan kerentanan gerakan tanah yang bervariasi yaitu mulai dari kerentanan rendah, sedang dan tinggi. Berdasarkan data teknik *groundcheck* geologi, wilayah dengan zona kerentanan gerakan tanah rendah ada di sekitar Tonjong, zona kerentanan gerakan tanah sedang di daerah tubuh/kaki Gunung Slamet, dan zona kerentanan gerakan tanah tinggi di wilayah sebelah selatan Tonjong. Gerakan tanah pada kerentanan tinggi masih sangat aktif pada wilayah kelerengan tinggi terutama kalau dipicu oleh intensitas curah hujan yang tinggi atau adanya proses erosi di bagian dasar sungai yang sangat kuat, apalagi jika di atasnya tidak ada vegetasi/tutupan tanah (Badan Geologi, Pusat Sumberdaya Air Tanah dan Geologi Lingkungan, 2011). Kondisi gerakan tanah tersebut berpotensi menyebabkan bencana tanah longsor dan juga berpengaruh terhadap kualitas infrastruktur.

Zona pergerakan tanah di Kabupaten Brebes yang kemungkinan dapat terjadi, yaitu:

a. Zona kerentanan gerakan tanah sangat rendah

Daerah kerentanan gerakan sangat tanah rendah terdapat di bagian utara yaitu pada dataran aluvial dan dataran pantai.

Daerah ini bermorfologi datar, mempunyai kemiringan < 5 % dengan elevasi < 25 m di atas permukaan laut. Secara administratif, daerah ini termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Tanjung, Kersana, Bulakamba, Wanasari, Jatibarang, Ketanggungan, Banjarharjo, dan Songgom.

Daerah ini secara umum tersusun dari endapan aluvial dengan litologi berupa lempung, pasir, dan kerikil. Pada daerah ini tidak terlihat adanya

gejala pergerakan masa tanah, yang terlihat hanya erosi pada dinding sungai dan pada lahan tidak bervegetasi.

b. Daerah kerentanan gerakan tanah rendah

Daerah berkerentanan gerakan tanah rendah menempati dataran bergelombang di bagian tengah dan lembah antar bukit di bagian tengah dan selatan daerah penyelidikan. Secara administratif daerah ini terdapat di wilayah Kecamatan Banjarharjo, Ketanggungan, Larangan, Salem, Tonjong, Bantarkawung, Bumiayu, dan Paguyangan.

Daerah ini terdapat pada morfologi dataran bergelombang, berkemiringan lereng 5 – 8 %, tersusun dari batuan sedimen dan batuan gunung api . Litologi penyusunnya terdiri atas batu lempung, napal, batu lempung pasiran, dan endapan lahar.

Pada daerah ini secara umum tidak menunjukkan adanya pergerakan masa tanah yang membahayakan, yang terlihat hanya longsoran kecil pada dinding sungai akibat erosi.

c. Daerah kerentanan gerakan tanah sedang

Daerah kerentanan gerakan tanah sedang terutama terdapat di bagian tengah, selatan dan tenggara daerah penyelidikan. Secara administratif daerah ini terdapat di wilayah Kecamatan Bantarharjo, Larangan, Tonjong, Bantarkawung, dan Sirampog.

Daerah ini terdapat pada perbukitan landau hingga sedang, umumnya berkemiringan lereng 15 % hingga 30 %.

Daerah ini secara umum tersusun dari batuan sedimen dan batuan gunung api. Batuan sedimen berlitologi perselingan batu lempung, napal dan batu pasir, batuan gunung api berupa tufa dan endapan lahar, Pada daerah berkerentanan gerakan tanah sedang ini di samping terlihat adanya longsoran pada tebing sungai, juga terlihat adanya longsoran-longsoran kecil pada tanah lapukan yang tebal pada lereng yang agak terjal.

d. Daerah kerentanan gerakan tanah tinggi

Daerah berkerentanan gerakan tanah tinggi terdapat pada perbukitan terjal. Gejala gerakan tanah yang terjadi berupa longsoran pada tebing curam dan pada beberapa tempat dijumpai adanya jatuhnya batuan (*rock fall*) pada lereng terjal.

Daerah berkerentanan gerakan tanah tinggi ini tersusun dari batuan gunung api dengan litologi terdiri atas breksi, lava, konglomerat dan tufa. Tanah lapukan yang cukup tebal dan kemiringan lereng terjal merupakan faktor utama banyak terjadinya gerakan tanah di daerah ini.

Secara administratif, daerah berkerentanan gerakan tanah tinggi terutama terdapat di wilayah Kecamatan Kecamatan Salem dan Kecamatan Sirampog.

Selain itu di beberapa titik terdapat wilayah dengan patahan lapisan tanah berupa sesar naik di bentangan sepanjang:

a. Malahayu – Pamedaran – Pasirpanjang – Jalawastu (Gunung Peunteur);

- b. Cikuya - Cikeusal Kidul - Cikeusal Lor - Kamal-Wlahar;
- c. Buara – Cikeusal Lor – Pamulihan;
- d. Cibendung – Cikakak – Tiwulandu – Parereja – Karangbandung – Buara;
- e. Sindangheula – Blandongan; dan
- f. Kalijurang.

Penyebaran sesar turun terdapat di desa Wlahar mengarah ke Bantarkawung dan penyebaran sesar geser (horisontal) di desa Pamulihan dan Blandongan. Penyebaran antiklin berada di desa Blandongan dan sepanjang desa Kamal-Wlahar-perbatasan Bantarkawung.

2.1.5. Kondisi Hidrologi

Kondisi hidrologis Kabupaten Brebes berada pada wilayah cekungan air tanah (CAT) Tegal – Brebes dengan luas CAT bebas 248×10^6 m³/tahun atau 7.864 liter/detik dan air tertekan 11×10^6 m³/tahun atau 349 liter/detik. Wilayah penyebaran air tanah di Kabupaten Brebes berdasarkan akuifer meliputi:

- a. Kecamatan wilayah pantura, Songgom, sebagian Banjarharjo, Ketanggungan, dan Larangan bagian utara dengan akuifer produktif dimana muka air tanah sangat dangkal dengan debit 5 – 10 lt/detik;
- b. Kecamatan Salem dengan akuifer produktif setempat dengan ciri muka air tanah dalam sehingga sulit untuk dimanfaatkan. Disamping itu terdapat mata air setempat dengan debit kecil dan akuifer produktif kecil setempat dengan air tanah dalam jumlah terbatas dapat dijumpai di daerah lembah;
- c. Kecamatan Bantarkawung, Sirampog, Bumiayu, Paguyangan, Tonjong, sebagian Kecamatan Banjarharjo, Ketanggungan, dan Larangan bagian selatan, dengan akuifer produktif kecil setempat, dengan jumlah air tanah terbatas dijumpai di daerah lembah.

Jumlah mata air yang sudah teridentifikasi sebanyak 15 buah di wilayah Kecamatan Sirampog, 19 buah di wilayah Kecamatan Paguyangan dan 1 buah di wilayah Kecamatan Bumiayu. Pemanfaatan sumber mata air (tuk) di antaranya adalah untuk air minum (PDAM, perpipaan perdesaan), air bersih dan irigasi. Mata air dengan debit lebih dari 100 liter/detik meliputi mata air Kaligiri (786 liter/detik), Tuk Sirah (300 liter/detik), Bulakan (200 liter/detik), Cipayo (200 liter/detik), Tuk Sridadi (178 liter/detik), Singkup (140 liter/detik), Lengkrang (110 liter/detik), Tuk Podol (100 liter/detik). Berdasarkan Atlas Air Pulau Jawa (2011), di Kecamatan Ketanggungan terdapat mata air dengan debit >100 liter/detik yaitu mata air Cihandeuleum.

Jumlah sungai di Kabupaten Brebes sebanyak 22 buah, danau alam 1 buah (Telaga Ranjeng) dan jumlah bendungan ada 2 yaitu bendungan Malahayu dan bendungan Penjalin yang pemanfaatan airnya adalah untuk irigasi. Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada di Kabupaten Brebes dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

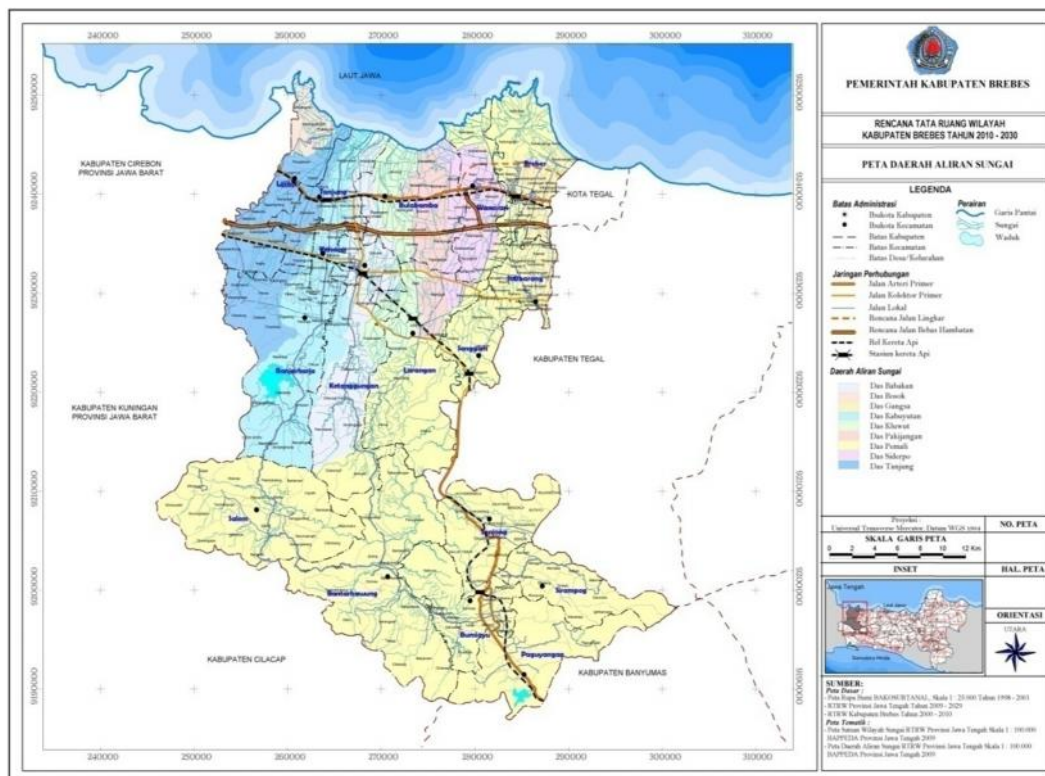
- a. DAS Kabuyutan terdiri dari 6 Sub DAS yaitu Kabuyutan Hulu, Kabuyutan Hilir, Babakan, Kluwut, Pakijangan, Tanjung;
- b. DAS Pemali terdiri dari 5 Sub DAS yaitu Cigunung, Pemali, Keruh, Glagah dan Kumisik;
- c. DAS Gangsa terdiri dari 1 Sub DAS yaitu Gangsa.

DAS Kabuyutan termasuk kedalam wilayah pengelolaan Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung, sedangkan DAS Pemali dan Gangsa menjadi kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali – Juana.

DAS Pemali mempunyai karakter yang sangat spesifik dengan bentuk DAS memanjang. Morfologi Daerah Aliran Sungai (DAS) Pemali secara umum di bagian hulu adalah daerah pegunungan dengan topografi bergelombang dan membentuk cekungan di beberapa tempat yang berfungsi sebagai penampung air. Di bagian hulu DAS Pemali terdapat CAT buatan yaitu bendungan Penjalin yang terletak di Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan, dengan luas genangan 1,25 km² dan kapasitas tampungnya 9,5 juta m³ yang mempunyai nilai hujan tahunan yang cukup besar yaitu sekitar 4.000 mm per tahun.

Tutupan lahan di daerah hulu yang sebagian merupakan hutan cukup memprihatinkan. Lahan kritis maupun hutan gundul ini mempengaruhi siklus tata air di daerah tangkapan air maupun resapan air. Kondisi yang kritis tersebut menyebabkan pada musim hujan dengan curah hujan dan intensitas hujan yang sangat tinggi, berpotensi menyebabkan bencana longsor, banjir bandang dan rusaknya alur sungai akibat tingginya debit air yang masuk sungai.

Bagian tengah DAS Pemali mempunyai curah hujan mencapai 3.000 mm per tahun, sedangkan di bagian hilir 2.000 mm per tahun. Merupakan areal perbukitan dengan vegetasi hutan produksi dan kebun campuran dan pedataran berupa lahan sawah dan lahan kering. Pada bagian hilir Sungai Pemali, kondisi daerahnya tergolong relatif datar yang sebagian besar berupa sawah, ladang dan tambak. Peta daerah aliran sungai dapat dilihat pada Gambar 2.3.



Sumber: RTRW Kabupaten Brebes Tahun 2010-2030

Gambar 2.3.
Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Brebes

2.1.6. Kondisi Klimatologi

Iklim di Kabupaten Brebes termasuk dalam kategori iklim tropis basah. Pada tahun 2015, suhu udara di Kabupaten Brebes berkisar 25°C - 33°C dengan kelembaban udara berada pada kisaran 60% - 95%. Menurut data dari Dinas Pengairan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Brebes, untuk tahun 2015 rata-rata curah hujan tertinggi tercatat di Kecamatan Paguyangan yaitu 270 mm, sedangkan jumlah hari hujan tertinggi di Kecamatan Bumiayu yaitu 15 hari hujan. Dan rata-rata curah hujan menurut bulan tertinggi terjadi pada Bulan Januari 2015 yaitu mencapai 449 mm dengan hari hujan tertinggi terjadi pada Bulan Januari dan Bulan Maret 2015 yaitu mencapai 19 hari hujan.

2.1.7. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Brebes secara umum terbagi menjadi penggunaan lahan sawah dan lahan bukan sawah. Berdasarkan data BPS Tahun 2016, luas lahan sawah sebesar 63.382 ha terdiri dari sawah beririgasi 47.482 hektar, sawah tadah hujan 15.900 hektar. Sedangkan luas lahan bukan sawah sebesar 103.108,31 hektar terdiri dari hutan 48.621 hektar, perkebunan Negara 1.164 hektar, permukiman/ pekarangan 18.988,78 hektar, tambak/kolam 7.643 hektar, danau/telaga 20 hektar,

kebun campuran 9.418 hektar, waduk buatan 700 hektar, bangunan lain 75,53 hektar, dan penggunaan lain 4.391 hektar.

2.1.8. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2010 – 2030, pola ruang wilayah Kabupaten Brebes dibedakan menjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Sedangkan Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Kawasan lindung Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut:

1. Kawasan hutan lindung
Kawasan hutan lindung di Kabupaten Brebes ditetapkan seluas kurang lebih 6.261 Ha. Sebagian besar terdapat di wilayah selatan Kabupaten Brebes, yaitu Kecamatan Paguyangan, Sirampog, Salem, Bantarkawung dan di wilayah tengah Kabupaten Brebes yaitu Kecamatan Ketanggungan dan Banjarharjo.
2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya
Kawasan ini berfungsi untuk melindungi kawasan dibawahnya sehingga dapat menjamin terselenggaranya fungsi hidrolis bagi kegiatan pemanfaatan lahan. Kawasan ini meliputi kawasan resapan air. Di Kabupaten Brebes, kawasan resapan air dengan luas kurang lebih 21.564,1 Ha meliputi:
 - a. Kecamatan Banjarharjo ($\pm$ 1.170 Ha);
 - b. Kecamatan Bantarkawung ($\pm$ 2.813 Ha);
 - c. Kecamatan Bumiayu ($\pm$ 0,1 Ha);
 - d. Kecamatan Ketanggungan ($\pm$ 1.043 Ha);
 - e. Kecamatan Larangan ($\pm$ 372 Ha);
 - f. Kecamatan Paguyangan ($\pm$ 2.041 Ha);
 - g. Kecamatan Salem ($\pm$ 10.550 Ha);
 - h. Kecamatan Sirampog ($\pm$ 3.375 Ha);
 - i. Kecamatan Tonjong ($\pm$ 200 Ha).
3. Kawasan perlindungan setempat
Kawasan ini terdiri dari:
 - a. Sempadan pantai
Terdapat di sepanjang pantai utara dari Kecamatan Brebes sampai Kecamatan Losari dengan luas areal $\pm$ 497 Ha;
 - b. Sempadan sungai
Dengan luas areal $\pm$ 10.626 Ha yang tersebar di sepanjang sungai – sungai di Kabupaten Brebes;

- c. Pengelolaan kawasan sempadan waduk
Berada di Waduk Malahayu Kecamatan Banjarharjo dengan luas $\pm$ 925 Ha dan Waduk Penjalin Kecamatan Paguyangan dengan luas $\pm$ 125 Ha;
- d. Ruang Terbuka Hijau
Proporsi ruang terbuka hijau kawasan perkotaan paling sedikit 30% dari luas perkotaan. Di Kabupaten Brebes untuk ruang terbuka hijau meliputi Kecamatan Losari, Tanjung, Bulakamba, Wanasari, Brebes, Jatibarang, Kersana, Ketanggungan, dan Bumiayu dengan luas kurang lebih 3.247 Ha. Yang termasuk ruang terbuka hijau adalah 30% dari luas tersebut yaitu sekitar kurang lebih 974 Ha;
- e. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya
 - 1) Kawasan cagar alam
Kawasan cagar alam di Kabupaten Brebes ditetapkan di Telaga Ranjeng yang berlokasi di Desa Pandansari Kecamatan Paguyangan dengan luas kurang lebih 48,50 Ha;
 - 2) Kawasan muara sungai (estuari)
Kawasan muara sungai yang ditetapkan di Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut:
 - a) Muara Sungai Kaligangsa dan muara Sungai Pemali di Kecamatan Brebes;
 - b) Muara Sungai Balaikambang dan muara Sungai Luwungmalang di Kecamatan Wanasari;
 - c) Muara Sungai Bangsri, muara Sungai Pakijangan, muara Sungai Kluwut di Kecamatan Bulakamba;
 - d) Muara Sungai Babakan, muara Sungai Kabuyutan, muara Sungai Sinung, muara Sungai Tanjung di Kecamatan Tanjung;
 - e) Muara Sungai Bancang dan muara Sungai Cisanggarung di Kecamatan Losari;
 - 3) Kawasan pantai berhutan bakau
Berfungsi sebagai penahan dan pemecah ombak untuk mengurangi dampak abrasi air laut. Pengembangan kawasan pantai berhutan bakau di Kabupaten Brebes terletak di sepanjang pesisir pantai meliputi Kecamatan Brebes, Wanasari, Bulakamba, Tanjung, dan Losari;
 - 4) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan
Tersebar di beberapa kecamatan, seperti Pendopo Kabupaten dan Masjid Agung Brebes di Kecamatan Brebes, Makam Bupati Brebes dan Makam Mbah Rubi di Kecamatan Wanasari, Fosil Kalijurang di Kecamatan Tonjong, dan masih banyak lainnya.

Selanjutnya kawasan budidaya di Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut:

1. Kawasan peruntukan hutan produksi

Kawasan hutan produksi di Kabupaten Brebes yaitu hutan yang berada dalam pengawasan KPH Pekalongan Barat dan KPH Balapulang, serta hutan rakyat. Kawasan hutan produksi di Kabupaten Brebes mencapai kurang lebih 42.620,13 Ha atau 26,04% dari luas wilayah Kabupaten Brebes di bawah pengawasan KPH. Untuk pengembangan kawasan hutan produksi tetap di Kabupaten Brebes kurang lebih seluas 20.282,57 Ha, sementara kawasan hutan produksi terbatas kurang lebih seluas 22.337,56 Ha.

2. Kawasan peruntukan pertanian

Terbagi menjadi pertanian lahan basah, pertanian lahan kering dan pertanian hortikultura. Untuk pertanian lahan basah karena didukung oleh kondisi topografi tanah yang sesuai dengan tujuan untuk memanfaatkan potensi lahan dalam menghasilkan produksi pangan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Dilakukan di seluruh kecamatan se Kabupaten Brebes dengan luas lahan kurang lebih 60.634 Ha. Sedangkan untuk pertanian lahan kering dibutuhkan penanganan yang optimal dengan menonjolkan tanaman pertanian lahan kering yang menjadi andalan Kabupaten Brebes. Luas lahan pengembangan mencapai kurang lebih 23.561 Ha. Dan untuk pertanian hortikultura yang didasarkan pada luas lahan dan produktifitasnya, dikembangkan pada semua kecamatan di Kabupaten Brebes dengan rencana pengembangan seluas kurang lebih 17.632 Ha.

3. Kawasan peruntukan perkebunan

Luas areal kawasan perkebunan di Kabupaten Brebes mencapai luas kurang lebih 529,55 Ha dimana seluas 529,53 Ha merupakan perkebunan milik PT Perkebunan Negara (PTPN) dan hanya 0,02 Ha merupakan perkebunan rakyat yang berlokasi di Kecamatan Sirampog. Komoditas utama perkebunan di Kabupaten Brebes yang merupakan milik PT. Perkebunan Negaramerupakan perkebunan teh.

4. Kawasan peruntukan perikanan

Dibedakan menjadi kawasan perikanan tangkap dan kawasan budidaya perikanan. Kawasan perikanan tangkap merupakan salah satu mata pencaharian utama penduduk wilayah pesisir Kabupaten Brebes, dimana diharapkan mampu mendorong tingkat perekonomian wilayah. Sedangkan untuk kawasan budidaya perikanan terbagi menjadi budidaya perikanan tambak dan budidaya perikanan air tawar. Untuk budidaya perikanan tambak berada di sepanjang pantai wilayah pesisir Kabupaten Brebes yang terbentang di 5 kecamatan pesisir dengan luas areal kurang lebih 12.748 Ha. Untuk budidaya perikanan air tawar dengan luas kolam kurang lebih 114 Ha berada di Kecamatan Salem, Bantarkawung, Banjarharjo, Bumiayu, Ketang-gungan, Paguyangan, Sirampog, dan Tonjong.

5. Kawasan peruntukan peternakan

Kawasan peternakan di Kabupaten Brebes merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi peternakan dan atau padang penggembalaan ternak untuk berbagai jenis hewan ternak, yaitu ternak besar dan ternak kecil. Kawasan ini berada hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Brebes.

6. Kawasan peruntukan pertambangan

Kawasan pertambangan di Kabupaten Brebes mencakup:

- a. Eksploitasi bahan galian berupa pasir sungai, trass, batu pasir, andesit, lempung grabah, *bentonit*, *gypsum* dan batu gamping. Tersebar hampir merata di wilayah kecamatan se Kabupaten Brebes.
- b. Studi dan eksplorasi tambang batu gamping meliputi Kecamatan Songgom dan Larangan. Emas, perak, dan platina di Kecamatan Salem, minyak bumi dan pirit (Fes) di Kecamatan Bantarkawung, batubara di Kecamatan Salem dan Bantarkawung, serta pasir besi di Kecamatan Brebes.
- c. Eksplorasi dan eksploitasi panas bumi di Kecamatan Sirampog, Paguyangan, Bumiayu dan Bantarkawung.

7. Kawasan peruntukan industri

Pengembangan industri di Kabupaten Brebes dengan membentuk kawasan atau zona sebagai berikut:

- a. Kawasan industri menengah dan besar yang dikembangkan di sepanjang jalan Arteri Primer Pantura yang mencakup wilayah Kecamatan Losari, Tanjung, Bulakamba, dan Wanasari dan dengan pengembangan di jalan kolektor primer meliputi Kecamatan Kersana, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Ketanggungan, dan Kecamatan Larangan.
- b. Kawasan industri menengah dengan sifat kegiatan agro industri sekitar jalan arteri Kecamatan Paguyangan dengan pengawasan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL) yang ketat.
- c. Pembentukan sentra-sentra industri kecil seperti industri rebana di Desa Kaliwadas Kecamatan Bumiayu, batik tulis di Desa Bentar dan Desa Bentarsari Kecamatan Salem, keramik dan tembikar di Desa Malahayu Kecamatan Banjarharjo, telur asin di beberapa desa di bagian pantai utara Kabupaten Brebes dan lain sebagainya.

8. Kawasan peruntukan pariwisata

Beberapa potensi pariwisata di Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut:

- a. Potensi pariwisata alam, meliputi:
 - 1) Telaga Renjeng, di Kecamatan Paguyangan;
 - 2) Waduk Penjalin, di Kecamatan Paguyangan;
 - 3) Waduk Malahayu dan Bukit Cawiri di Kecamatan Banjarharjo;
 - 4) Bukit Panenjoan dan Body Rafting Ranto Canyon di Kecamatan Salem

- 5) Wana wisata Kalibaya dan Wana Wisata Panenjoan di Kecamatan Salem
- 6) Air Terjun Curug Cantel, Air Terjun Curug Puteri dan Sumur Penganten, di Kecamatan Sirampog;
- 7) Pantai Randusanga Indah, Ekowisata Mangrove Desa Kaliwlingi di Kecamatan Brebes; dan
- 8) Kawasan perkebunan teh Kaligua di Kecamatan Paguyangan.

b. Potensi pariwisata buatan, meliputi:

- 1) Pemandian air panas Cipanas Buaran di Kecamatan Bantarkawung;
- 2) Pemandian air panas Tirta Husada Kedungoleng di Kecamatan Paguyangan.

c. Potensi pariwisata budaya, meliputi:

- 1) wisata budaya Masjid Agung Brebes di Kecamatan Brebes;
- 2) wisata budaya Makam Bupati Brebes dan Makam Mbah Rubi di Kecamatan Wanasari;
- 3) wisata budaya Makam Mbah Junet di Randusanga Kecamatan Brebes;
- 4) wisata budaya Makam Pangeran Angka Wijaya di Kecamatan Losari;
- 5) wisata budaya Makam Dawa, Makam Panembahan Syeh Padalangu, dan Makam Keluarga Bupati Raja Urip di Kecamatan Tonjong;
- 6) wisata budaya Gedong Jimat di Kampung Adat Jalawastu Kecamatan Ketanggungan; dan
- 7) wisata budaya Candi Jimat dan Candi Kyai di Kecamatan Tonjong.

9. Kawasan peruntukan permukiman

Kawasan permukiman di alokasikan pada lahan-lahan yang kurang produktif dan memiliki kemiringan lereng dibawah 15°. Kawasan ini tersebar di seluruh wilayah baik di pedesaan maupun perkotaan.

Rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah meliputi kegiatan-kegiatan yang memiliki skala pelayanan lokal hingga regional. Pengembangan sistem pusat pelayanan di kabupaten Brebes dipengaruhi hal-hal sebagai berikut:

1. Kota-kota di sepanjang jalur pantai utara meliputi ibukota-ibukota kecamatan di Brebes, Wanasari, Tanjung, Bulakamba, dan Losari memerlukan rencana yang terpadu sehingga dapat mengoptimalkan potensi yang ada;
2. Struktur kota-kota berbentuk linier dengan mengikuti jalur perhubungan sebagai berikut:
 - a. Jalur yang membentang dari timur ke barat (atau sebaliknya)
 - 1) Jaringan utama jalur regional Pantai utara;
 - 2) Jalur Jatibarang-Ketanggungan-Kersana-Ciledug;
 - 3) Jalur Bumiayu – Bantarkawung – Salem.

- b. Jalur yang membentang dari Utara ke Selatan (atau sebaliknya)
 - 1) Jalur Tengah Utama: Tanjung – Ketanggungan – Larangan – Taonjong – Bumiayu – Paguyangan;
 - 2) Jalur Brebes – Jatibatang – Songgom;
 - 3) Jalur Brebes – Larangan;
 - 4) Jalur Tanjung – Kersana – Banjarharjo – Salem.
 - 5) Peranan ibukota kecamatan sebagai pusat pemerintahan kecamatan dan pusat pelayanan dalam pembangunan.

Wilayah pembangunan Kabupaten Brebes dibagi menjadi 3 satuan wilayah pembangunan yaitu:

1. SWP Utara terdiri dari Kecamatan Brebes, Wanasari, Bulakamba, Tanjung, dan Losari. Kecamatan-Kecamatan yang masuk dalam SWP Utara pada dasarnya merupakan wilayah kecamatan yang mendapatkan pengaruh langsung dari Jalan Arteri Primer Pantura, pusat dari SWP Utara adalah Perkotaan Brebes. Berdasarkan karakter perkembangannya kawasan SWP Utara dibagi menjadi 2 (dua) Sub Satuan Wilayah Pembangunan (SSWP), yaitu:
 - a. *SSWP Utara-Timur*: meliputi wilayah Kecamatan Brebes, Wanasari, Bulakamba. Pengembangan kawasan ini diarahkan pada usaha keterpaduan antar fungsi (terutama pemerintahan, perdagangan-jasa, permukiman industri, permukiman perkotaan, pertanian, dan pelestarian kawasan pesisir) dalam kawasan perkotaan. Pusat pelayanan SSWP Utara-Timur adalah di Perkotaan Brebes.
 - b. *SSWP Utara-Barat*: meliputi wilayah Kecamatan Tanjung dan Losari. Arah kegiatan SSWP ini adalah kegiatan perdagangan-jasa, transportasi, pengelolaan-konservasi kawasan pesisir dan pertanian. Pusat pelayanan SSWP Utara-Barat adalah di Perkotaan Tanjung.
2. SWP Tengah terdiri atas Kecamatan Jatibarang, Songgom, Larangan, Ketanggungan, Kersana, dan Banjarharjo. Kecamatan-Kecamatan yang masuk dalam SWP Tengah pada dasarnya merupakan wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Brebes bagian tengah, pusat dari SWP Tengah adalah Perkotaan Ketanggungan. Berdasarkan karakter perkembangannya kawasan SWP Tengah dibagi menjadi 2 (dua) Sub Satuan Wilayah Pembangunan (SSWP), yaitu:
 - a. *SSWP Tengah-Timur*: meliputi wilayah Kecamatan Jatibarang, Songgom, Larangan. Arah kegiatan SSWP Tengah-Timur adalah kegiatan pertanian lahan basah, agrobisnis, industri kecil, hutan produksi. Pusat pelayanan SSWP Tengah-Timur adalah di Perkotaan Jatibarang.
 - b. *SSWP Tengah-Barat*: meliputi wilayah Kecamatan Ketanggungan, Kersana, Banjarharjo. Arah kegiatan SSWP Tengah-Barat adalah kegiatan perdagangan-jasa, transportasi, industri kecil, pertanian

lahan basah, hutan produksi, konsevasi sumberdaya air. Pusat pelayanan SSWP Tengah-Barat adalah di Perkotaan Ketanggungan.

3. SWP Selatan terdiri atas Kecamatan Tonjong, Bumiayu, Sirampog, Paguyangan, Bantarkawung, dan Salem. Kecamatan-Kecamatan yang masuk dalam SWP Selatan pada dasarnya merupakan wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Brebes bagian selatan, pusat dari SWP Selatan adalah Perkotaan Bumiayu. Berdasarkan karakter perkembangannya kawasan SWP Selatan dibagi menjadi 2 (dua) Satuan Wilayah Pembangunan (SSWP), yaitu:
 - a. *SSWP Selatan-Timur*: meliputi wilayah Kecamatan Tonjong, Bumiayu, Sirampog, Paguyangan. Arah kegiatan SSWP Selatan-Timur adalah kegiatan perdagangan-jasa, transportasi, konservasi alam, konservasi sumber daya air, pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, perkebunan, agribisnis, hutan rakyat, industri (termasuk agro industri), dan konservasi alam. Pusat pelayanan SSWP Selatan-Timur adalah di Perkotaan Bumiayu.
 - b. *SSWP Selatan-Barat*: meliputi wilayah Kecamatan Bantarkawung dan Salem. Arah kegiatan SSWP Selatan-Barat adalah kegiatan pertanian lahan kering, agro industri, konservasi alam, konsevasi sumberdaya air. Pusat pelayanan SSWP Selatan-Barat adalah di Perkotaan Salem.

Pengembangan wilayah Kabupaten Brebes juga dengan mengembangkan pusat pelayanan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan daerah yang meliputi upaya memantapkan peran PKL sebagai pusat perkotaan yang didukung sektor perdagangan dan jasa, mengembangkan peran PPK sebagai pusat pelayanan untuk pertumbuhan ekonomi daerah, dan mengembangkan peran PPL sebagai pusat pelayanan pengembangan pertanian. Dilain pihak pengembangan wilayah juga dilakukan melalui pengembangan prasarana dan sarana daerah, meliputi:

1. penambahan jaringan jalan untuk mendukung efisiensi pemasaran hasil produksi daerah;
2. peningkatan kelas jalan yang menghubungkan antara simpul-simpul kawasan produksi dengan kawasan pusat pemasaran;
3. bekerjasama membangun terminal transportasi pelabuhan dan darat;
4. meningkatkan pelayanan sistem energi dan telekomunikasi;
5. mengembangkan sistem prasarana sumber daya air;
6. mengembangkan sistem jaringan limbah kawasan;
7. mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana alam; dan
8. mengembangkan sistem sanitasi lingkungan.

2.1.9. Potensi Pemekaran Wilayah

Berdasarkan hasil kajian daerah rencana pemekaran wilayah Kabupaten Brebes pada tahun 2017 yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomika

dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, bahwa berdasarkan analisis yang telah dilakukan secara mendalam dan komprehensif terhadap rencana pemekaran wilayah Kabupaten Brebes yang mencakup 6 (Enam) Kecamatan Yaitu : Kecamatan Salem (21 Desa), Kecamatan Bantarkawung (18 Desa), Kecamatan Bumiayu (15 Desa), Kecamatan Peguyangan (12 Desa), Kecamatan Sirampog (13 Desa), serta Kecamatan Tonjong (14 Desa) yang seluruhnya merupakan cakupan wilayah Kabupaten Brebes bagian selatan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis persyaratan dasar yang mencakup persyaratan dasar yang mencakup persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan dasar kapasitas Daerah diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Persyaratan dasar kewilayahan :

- 1) Berdasar perhitungan diketahui bahwa luas wilayah minimal untuk Calon Daerah Otonom Baru di Provinsi Jawa Tengah adalah seluas 473,8 km² . Sementara itu luas Calon Daerah Otonom Baru yang meliputi Kecamatan Salem, Bantarkawung, Bumiayu, Paguyangan, Sirampog, Dan Tonjong memiliki luas wilayah 684,01 km² . Berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Calon Daerah Otonom Baru memiliki luas wilayah minimal untuk calon daerah otonom baru di Provinsi Jawa Tengah (473,8 km²).
- 2) Calon Daerah Otonom Baru yang meliputi Kecamatan Salem, Bantarkawung, Bumiayu, Paguyangan, Sirampog, Dan Tonjong memiliki jumlah penduduk 478.850 jiwa. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa Calon Daerah Baru memiliki jumlah penduduk yang berada sedikit di bawah jumlah penduduk minimal untuk Calon Daerah Otonom Baru di Provinsi Jawa Tengah (542.880 jiwa).
- 3) Mengacu ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 35 ayat (4) huruf b, syarat minimal untuk pembentukan Daerah Kabupaten baru adalah 6 (enam) kecamatan yakni : Salem, Bantarkawung, Bumiayu, Paguyangan, Sirampog, Dan Tonjong. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Calon Daerah Otonom memenuhi persyaratan minimal untuk pembentukan daerah Kabupaten baru.
- 4) Pada persyaratan batas usia minimal kecamatan yang menjadi cakupan Wilayah Daerah Kabupaten minimal adalah 5 (lima) tahun

terhitung sejak pembentukan. Sementara itu, calon Daerah Otonom baru yang diusulkan pada kajian ini yakni mencakup: Kecamatan Salem, Bantarkawung, Bumiayu, Paguyangan, Sirampog, dan Tonjong seluruh kecamatan telah berusia diatas 5 (lima) tahun. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa calon daerah otonom memenuhi persyaratan batas usia minimal untuk pembentukan daerah kabupaten baru.

- b. Persyaratan dasar kapasitas daerah yang mencakup parameter geografi, demografi, keamanan, sosial politik, adat dan tradisi, potensi ekonomi, keuangan daerah, dan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan, maka dapat disimpulkan bahwa calon daerah otonom baru yang diusulkan pada kajian ini yakni mencakup : Kecamatan Salem, Bantarkawung, Bumiayu, Paguyangan, Sirampog, dan Tonjong memenuhi persyaratan untuk pembentukan Daerah Kabupaten Baru.
2. Terkait Dengan persyaratan administratif, karena beberapa hal hingga saat ini belum ada keputusan Musyawarah Desa yang akan menjadi Cakupan wilayah Daerah Kabupaten, persetujuan bersama DPRD Kabupaten Induk dengan Bupati Daerah Induk, serta Persetujuan bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan Gubernur Jawa Tengah sebagai Kepala Daerah Provinsi yang akan dibentuk.
3. Atas dasar hasil keseluruhan analisis sebagaimana diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa keenam kecamatan di wilayah kabupaten brebes bagian selatan tersebut memiliki potensi untuk dilakukan Pemekaran wilayah.

2.1.10. Wilayah Rawan Bencana

Kondisi geologis, topografis, klimatologis, hidrologis dan letak geografis Kabupaten Brebes menyebabkan terdapat kawasan-kawasan yang berpotensi terdampak peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan masyarakat dan berakibat timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2010-2030, kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Brebes dapat diidentifikasi ke dalam 5 kawasan, yaitu:

1. Kawasan rawan bencana banjir
Meliputi kecamatan yang berada di pesisir pantai utara dan sebagian Kecamatan Ketanggungan dengan luas kurang lebih 703 Ha.

2. Kawasan bencana tanah longsor
Termasuk kawasan ini adalah Kabupaten Brebes bagian selatan seperti Tonjong, Sirampog, Paguyangan, Bantarkawung, Salem dan wilayah Brebes Tengah yaitu Kecamatan Banjarharjo dengan total luas areal kurang lebih 901 Ha.
3. Kawasan letusan gunung berapi
Adalah kawasan yang mendapat dampak atau pengaruh bahaya aktifitas Gunung Slamet seluas kurang lebih 1.430 Ha yang meliputi Kecamatan Sirampog dan Paguyangan.
4. Kawasan bencana kekeringan
Kawasan bencana kekeringan terutama terjadi pada wilayah atau daerah irigasi yang sebagian besar terjadi di Kabupaten Brebes bagian utara dan tengah.
5. Kawasan bencana gelombang pasang dan abrasi
Terjadi di wilayah pesisir Kabupaten Brebes yaitu meliputi Kecamatan Brebes, Wanasari, Bulakamba, Tanjung, dan Losari.

Berdasarkan Peta Citra Satelit Landsat tahun 2013 sampai 2015 menunjukkan data erosi pantai di 5 (lima) kecamatan pesisir utara Kabupaten Brebes adalah 656,22 Ha dengan laju erosi 54,69 Ha per tahun.

Tabel 2.1.
Luas Erosi dan Abrasi di Wilayah Pesisir
Kabupaten Brebes Tahun 2003-2015

Kabupaten Brebes Tahun 2003-2015				
No	Kecamatan	Desa	Erosi Pantai Tahun 2003-2015	
			Erosi Pantai (Ha)	Laju Erosi (Ha/Thn)
1.	Losari	Prapag Kidul	31,40	2,62
		Prapag Lor	49,88	4,16
		Karangdempel	74,25	6,19
		Limbangan	32,90	2,74
2.	Tanjung	Krakahan	22,59	1,88
		Pengaradan	39,53	3,29
3.	Bulakamba	Bangsri	-	-
		Pulogading	27,28	2,27
		Grinting	6,68	0,56
4.	Wanasari	Sawojajar	50,63	4,22
5.	Brebes	Kaliwlingi	209,15	17,43
		Randusanga Kulon	86,42	7,20
		Randusanga Wetan	25,51	2,13
Total			656,22	54,69

Sumber: Hasil Analisis Citra Satelit Landsat 2003-2015

2.1.11. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Brebes dalam kurun waktu tahun 2012-2016 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 jumlah penduduk Kabupaten Brebes mencapai 1.788.880 jiwa terdiri dari 50,25% (898.877 jiwa) penduduk laki laki dan 49,75% (890.003 jiwa) penduduk perempuan. Jumlah rumah tangga sebanyak 462.950 rumah tangga dengan ukuran keluarga sebesar 3,9 jiwa. Konsentrasi penduduk terpusat pada wilayah Brebes Utara. Jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Bulakamba (169.542 jiwa) dan tersedikit di Kecamatan Kersana (59.027 jiwa). Dilihat dari distribusi penduduk menurut kecamatan, menunjukkan bahwa kecamatan dengan penduduk paling banyak yaitu Kecamatan Bulakamba sejumlah 169.542 jiwa (9,55 persen), selanjutnya Kecamatan Brebes 160.050 jiwa (8,94 persen), dan Kecamatan Wanasari 149.644 jiwa (8,46 persen). Perkembangan jumlah penduduk menurut kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Jumlah penduduk Kabupaten Brebes hasil Sensus Penduduk tahun 2010 adalah sebanyak 1.736.782 jiwa dan pada tahun 2016 meningkat menjadi sebanyak 1.788.880 jiwa, atau bertambah sebanyak 52.098 jiwa atau dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 0,60 persen, dengan laju pertumbuhan paling tinggi di Kecamatan Wanasari (1,23 persen). Adapun laju pertumbuhan penduduk per tahun dari tahun 2015 ke tahun 2016 adalah sebesar 0,42 persen, dengan laju pertumbuhan paling tinggi di Kecamatan Wanasari (0,93 persen).

Dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Jawa Tengah, jumlah penduduk Kabupaten Brebes pada tahun 2016 merupakan yang terbesar, dengan rasio ketergantungan 49,55% pada usia produktif, potensi sumber daya manusia ini perlu dioptimalkan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja sebagai pemanfaatan bonus demografi.

Tabel 2.2.
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Brebes
Tahun 2012-2016

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)						Pertumbuhan (%)	
		2010	2012	2013	2014	2015	2016	2010-2016	2015-2016
1.	Salem	56.982	57.797	58.018	58.343	59.288	59.706	0,96	0,71
2.	Bantarkawung	87.675	88.276	89.265	88.792	88.974	89.158	0,34	0,21
3.	Bumiayu	96.348	96.676	98.039	98.580	97.777	97.980	0,34	0,21
4.	Paguyangan	96.444	97.691	97.923	98.393	99.847	100.454	0,83	0,61
5.	Sirampog	61.797	61.912	62.753	63.051	63.659	63.982	0,71	0,51
6.	Tonjong	65.330	66.083	66.557	66.948	66.301	66.437	0,34	0,21
7.	Larangan	137.034	139.364	139.304	140.017	139.414	139.771	0,40	0,26
8.	Ketanggungan	133.991	133.708	136.241	136.939	137.069	137.573	0,53	0,37
9.	Banjarharjo	118.267	119.661	120.625	121.360	121.105	121.574	0,56	0,39
10.	Losari	120.541	121.318	122.474	123.073	122.328	122.581	0,34	0,21
11.	Tanjung	91.829	93.032	93.115	93.511	95.213	95.819	0,87	0,64
12.	Kersana	57.943	58.394	58.826	59.107	58.890	59.027	0,37	0,23
13.	Bulakamba	162.773	162.509	165.023	165.710	168.518	169.542	0,83	0,61
14.	Wanasari	140.954	141.191	142.787	143.367	148.269	149.644	1,23	0,93
15.	Songgom	68.475	67.895	69.615	69.983	69.491	69.633	0,34	0,20
16.	Jatibarang	83.014	84.954	84.377	84.798	85.517	85.949	0,71	0,51
17.	Brebes	157.385	158.039	159.706	160.407	159.719	160.050	0,34	0,21
	Kab. Brebes	1.736.782	1.748.510	1.764.648	1.773.379	1.781.379	1.788.880	0,60	0,42

Sumber: BPS Kabupaten Brebes, 2017

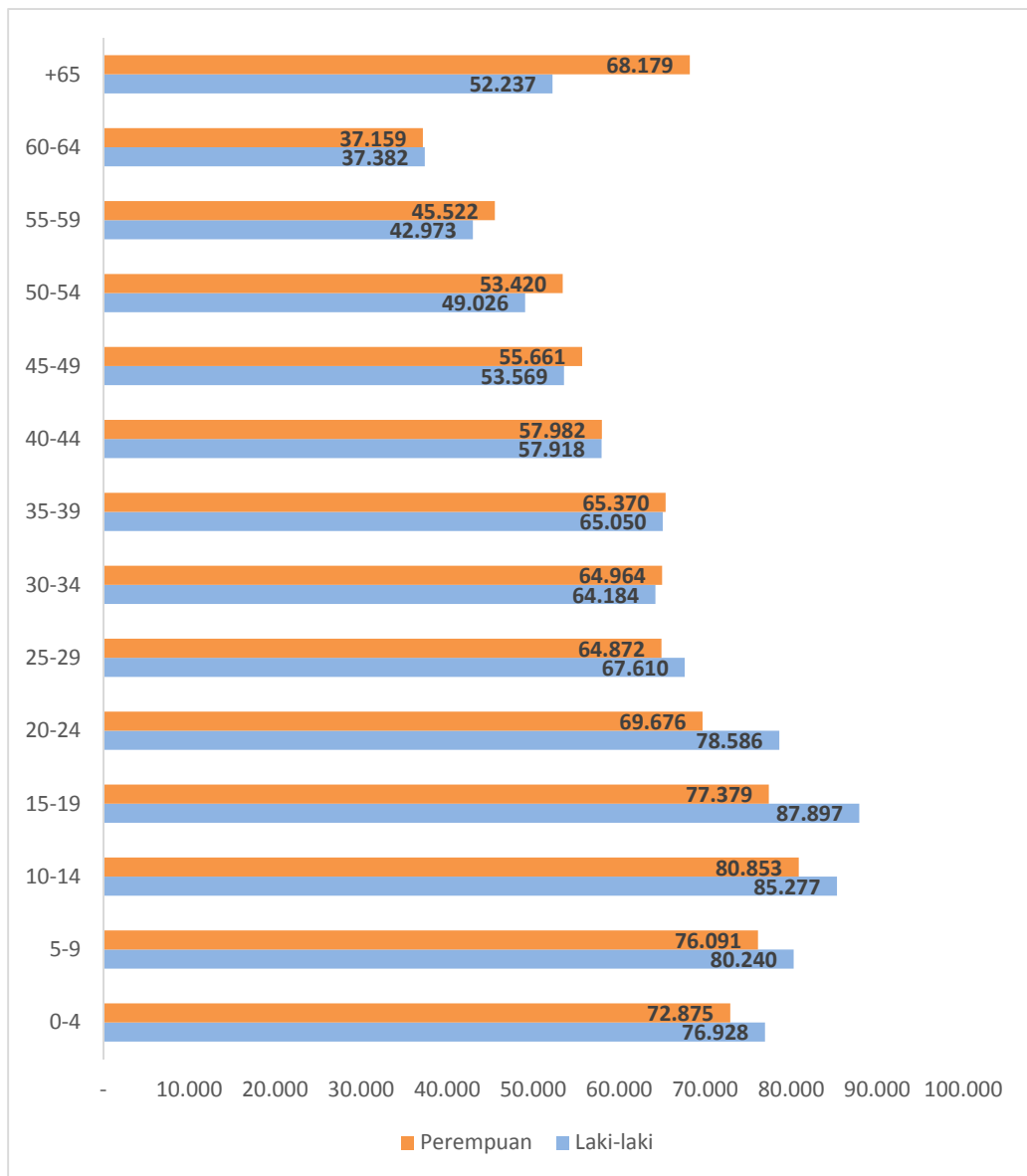
Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Brebes tahun 2012-2016 selalu meningkat, dan data terakhir tahun 2016 adalah sebesar 1.076 jiwa/km², dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Jatibarang (2.443 jiwa/km²) dan terendah di Kecamatan Salem (393 jiwa/km²). Hal ini disebabkan karena semakin banyaknya jumlah penduduk sedangkan luas wilayah relatif tetap. Data selengkapnya sebagaimana Tabel 2.3.

Tabel 2.3.
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Brebes Tahun 2012-2016

No	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Salem	380	381	384	390	393
2.	Bantarkawung	431	435	438	434	435
3.	Bumiayu	1.312	1.330	1.338	1.327	1.330
4.	Paguyangan	931	933	938	951	957
5.	Sirampog	924	936	941	950	955
6.	Tonjong	813	819	824	816	818
7.	Larangan	846	846	850	847	849
8.	Ketanggungan	897	914	919	919	923
9.	Banjarharjo	853	860	865	863	967
10.	Losari	1.357	1.369	1.376	1.368	1.371
11.	Tanjung	1.373	1.375	1.380	1.406	1.415
12.	Kersana	2.314	2.332	2.343	2.334	2.340
13.	Bulakamba	1.579	1.603	1.610	1.637	1.647
14.	Wanasari	1.897	1.918	1.926	1.992	2.010
15.	Songgom	1.385	1.420	1.427	1.417	1.420
16.	Jatibarang	2.415	2.398	2.410	2.431	2.443
17.	Brebes	1.952	1.973	1.981	1.973	1.977
	Jumlah	1.051	1.061	1.066	1.071	1.076

Sumber: BPS Kabupaten Brebes, 2017

Dilihat dari struktur penduduk Kabupaten Brebes tahun 2016, penduduk kelompok umur 0-14 tahun sebanyak 472.264 jiwa (26,40%), kelompok umur 15-64 tahun sebanyak 1.196.200 jiwa (66,87%) dan kelompok umur 65 tahun ke atas sebanyak 120.416 jiwa (6,73%). Rasio ketergantungan tahun 2016 sebesar 49,55 atau setiap 100 penduduk usia produktif menanggung beban 49 penduduk usia non produktif. Gambaran distribusi penduduk Kabupaten Brebes berdasarkan kelompok umur di tahun 2016 per kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.4.



Sumber: BPS Kabupaten Brebes, 2017

Gambar 2.4.
Struktur Penduduk Kabupaten Brebes Tahun 2016

Tabel 2.4.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Brebes Tahun 2016

No	Kecamatan	Kelompok Umur Tahun 2016 (jiwa)			
		0-14	15-64	65+	Jumlah
1.	Salem	13.091	42.682	4.120	59.893
2.	Bantarkawung	21.376	68.668	6.581	96.625
3.	Bumiayu	25.150	76.696	6.649	108.495
4.	Paguyangan	25.304	74.827	6.220	106.351
5.	Sirampog	15.928	48.899	3.367	68.194
6.	Tonjong	16.582	53.234	4.532	74.348
7.	Jatibarang	18.727	61.805	4.651	85.183
8.	Wanasari	35.877	110.298	6.252	152.427
9.	Brebes	40.485	126.273	7.731	174.489
10.	Songgom	17.096	60.805	4.120	82.174
11.	Kersana	14.014	45.836	3.207	63.057
12.	Losari	29.496	96.174	5.864	131.534
13.	Tanjung	24.014	71.269	4.549	99.832
14.	Bulakamba	42.251	134.096	7.107	183.454
15.	Larangan	31.274	109.117	6.642	147.033
16.	Ketanggungan	29.212	99.714	6.027	134.953
17.	Banjarharjo	27.662	93.322	7.217	128.201
Jumlah 2016		427.539	1.373.868	94.836	1.896.243

Sumber: Dindukpil Kabupaten Brebes, 2017

Sedangkan gambaran kondisi penduduk Kabupaten Brebes berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan dapat dilihat pada Tabel 2.5. Tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Brebes di tahun 2016 terbanyak adalah tamat SD/ sederajat. Kondisi ini perlu mendapat perhatian, karena akan mempengaruhi daya saing sumber daya manusia Kabupaten Brebes di masa depan.

Tabel 2.5.
Jumlah Penduduk Kabupaten Brebes
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan
Tahun 2016

No	Kecamatan	Tidak/ Belum Sekolah	Belum Tamat SD/ Sederajat	Tamat SD/ Sederajat	SLTP / Sederajat	SLTA / Sederajat	D I/II	D III	D IV/ S-1	S-2	S-3	Jumlah
1.	Salem	8.947	5.738	27.090	10.924	5.585	252	262	1.057	36	2	59.893
2.	Bantarkawung	16.910	11.619	47.658	10.890	7.726	265	367	1.142	36	12	96.625
3.	Bumiayu	15.427	11.160	33.700	21.932	21.613	407	1.035	3.102	114	5	108.495
4.	Paguyangan	17.962	11.911	42.585	19.354	12.379	249	458	1.388	57	8	106.351
5.	Sirampog	12.075	8.578	23.076	13.810	8.982	231	343	1.060	36	3	68.194
6.	Tonjong	12.036	8.202	22.891	14.897	14.364	244	425	1.261	27	1	74.348
7.	Jatibarang	15.772	10.213	30.623	14.187	11.850	334	533	1.605	62	4	85.183
8.	Wanasari	27.213	17.223	67.426	22.380	14.860	396	867	1.965	93	4	152.427
9.	Brebes	31.653	23.612	59.497	23.949	26.640	682	2.168	5.949	319	20	174.489
10.	Songgom	13.881	10.038	37.623	13.559	6.166	151	231	487	32	6	82.174
11.	Kersana	9.478	8.835	28.565	8.992	5.794	221	298	896	43	5	63.057
12.	Losari	20.327	20.661	57.980	19.016	11.135	255	609	1.475	74	2	131.534
13.	Tanjung	16.478	13.241	45.834	14.531	7.999	150	440	1.111	41	7	99.832
14.	Bulakamba	32.407	22.535	85.447	22.796	16.679	378	811	2.293	92	16	183.454
15.	Larangan	28.251	23.476	57.719	21.534	13.233	254	588	1.890	57	31	147.033
16.	Ketanggungan	21.558	16.519	67.035	16.205	10.907	322	553	1.791	55	8	134.953
17.	Banjarharjo	27.151	18.532	59.130	14.559	6.780	309	545	1.148	41	6	128.201
	Jumlah Tahun 2016	327.526	242.093	793.879	283.445	202.692	5.100	10.533	29.620	1.215	140	1.896.243

Sumber: Dindukpil Kabupaten Brebes, 2017

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Dilihat dari sisi lapangan usaha, PDRB Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 periode tahun 2012-2016 mengalami peningkatan dari Rp. 22.482 milyar rupiah pada tahun 2012 menjadi Rp. 27.867 milyar rupiah pada tahun 2016. PDRB Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Berlaku periode tahun 2012-2016 juga mengalami peningkatan dari Rp. 24.668 milyar rupiah pada tahun 2012 menjadi Rp. 37.340 milyar rupiah pada tahun 2016. Perkembangan PDRB menurut kategorinya dapat dilihat pada Tabel 2.6 dan Tabel 2.7.

Dilihat dari distribusinya, PDRB Kabupaten Brebes tahun 2012-2016 didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menyumbang lebih dari 40 persen terhadap perekonomian Kabupaten Brebes, akan tetapi cenderung mengalami penurunan. Sektor lainnya yang dominan adalah sektor perdagangan yang cenderung menurun setiap tahunnya, dan sektor industri pengolahan yang cenderung meningkat setiap tahunnya.

Tabel 2.6
Distribusi PDRB Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2016 (Persen)

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	41,83	41,98	41,37	40,97	40,52
Pertambangan dan Penggalian	1,94	1,92	2,12	2,30	2,29
Industri Pengolahan	12,69	13,06	13,90	14,58	14,92
Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,06	0,05	0,06
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06
Konstruksi	4,05	3,98	4,07	4,37	4,06
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,80	17,29	16,50	16,01	16,03
Transportasi dan Pergudangan	2,56	2,63	2,74	2,75	2,71
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,08	3,92	3,93	3,93	4,08
Informasi dan Komunikasi	2,81	2,74	2,83	2,81	2,81
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,88	1,83	1,75	1,73	1,80
Real Estate	1,14	1,14	1,15	1,14	1,14
Jasa Perusahaan	0,22	0,24	0,24	0,24	0,26
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,38	2,30	2,17	2,11	2,10
Jasa Pendidikan	3,85	4,15	4,36	4,27	4,37
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,73	0,75	0,76	0,75	0,77
Jasa lainnya	1,92	1,95	2,00	1,93	2,03
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Brebes, 2017

Dilihat dari sisi pengeluaran, PDRB Kabupaten Brebes tahun 2012-2016 didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan kontribusi lebih dari 75 persen dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sekitar 12 persen, akan tetapi cenderung menurun setiap tahunnya. Sedangkan selisih ekspor dan impor cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini diharapkan dapat meningkatkan kondisi perekonomian daerah.

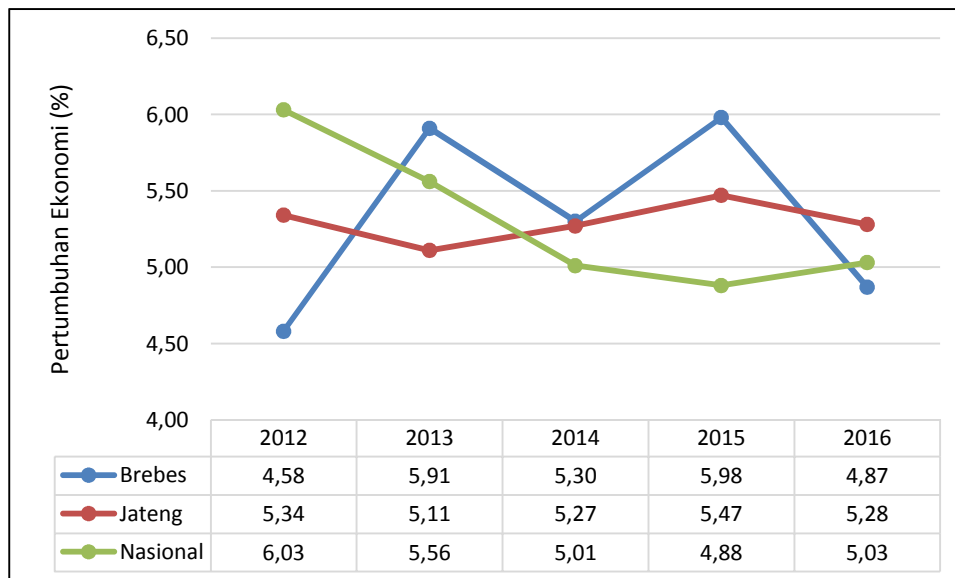
Tabel 2.7
Distribusi PDRB Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Pengeluaran Tahun 2010-2016 (Persen)

Jenis Pengeluaran	2012	2013	2014	2015	2016
Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	81.09	81.34	78.53	76.38	75.17
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.22	1.25	1.29	1.25	1.26
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6.99	7.11	7.08	7.08	6.98
Pembentukan Modal Tetap Bruto	14.1	13.4	12.99	12.77	12.66
Perubahan Inventori	6.32	4.94	2.1	2.22	2.12
Ekspor Barang dan Jasa	40.75	40.89	44.08	46.57	47.51
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	50.47	48.93	46.07	46.27	45.69
Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Brebes, 2017

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes selama kurun waktu tahun 2012-2016 cenderung berfluktuatif, pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes sebesar 4,58 persen, meningkat menjadi 5,91 persen pada tahun 2013, mengalami perlambatan pada tahun 2014 menjadi 5,30 persen, meningkat lagi menjadi 5,98 persen pada tahun 2015, dan mengalami perlambatan pada tahun 2016 menjadi 4,87 persen. Kondisi ini dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global, nasional, dan regional yang ada dalam kondisi ketidakpastian ekonomi.

Dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2012-2016, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes pada tahun 2013-2015 relatif lebih tinggi, akan tetapi pada tahun 2012 dan 2016 relatif lebih rendah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, dan nasional dalam lima tahun dapat dilihat pada Gambar 2.5.

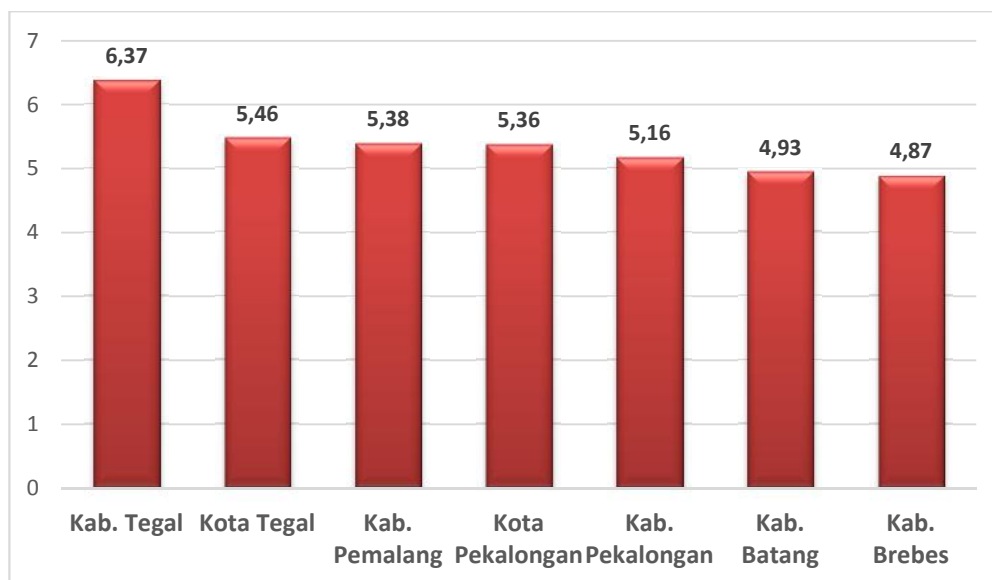


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Gambar 2.5.

Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Brebes Tahun 2012 – 2016 (%)

Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota lainnya se-eks Karesidenen Pekalongan pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes menempati posisi terendah (4,87%), Kabupaten Batang (4,93%), Kabupaten Pekalongan (5,16%), Kota Pekalongan (5,36%), Kabupaten Pemalang (5,38%), Kota Tegal (5,46%) dan Kabupaten Tegal (6,37%).



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Gambar 2.6.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Brebes dan Kabupaten/Kota Sekitarnya Tahun 2016 (%)

Tabel 2.8.
PDRB Kabupaten Brebes Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012 – 2016
Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10.317.770,58	11.517.290,57	12.781.821,08	14.113.780,26	15.128.930,56
B	Pertambangan dan Penggalian	478.056,82	527.058,32	654.267,75	792.514,56	855.105,39
C	Industri Pengolahan	3.130.950,15	3.584.284,90	4.296.143,62	5.022.197,10	5.573.059,29
D	Pengadaan Listrik dan Gas	14.383,34	15.241,98	17.209,20	18.613,40	20.699,49
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17.610,75	17.709,92	18.768,11	19.843,78	20.715,84
F	Konstruksi	1.000.275,29	1.092.515,54	1.257.523,52	1.506.916,93	1.515.614,18
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.390.192,02	4.744.943,10	5.097.031,91	5.513.985,77	5.986.182,68
H	Transportasi dan Pergudangan	631.059,94	721.792,80	847.570,89	947.212,79	1.011.672,79
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.006.895,08	1.075.261,70	1.213.419,78	1.353.199,43	1.524.987,42
J	Informasi dan Komunikasi	692.043,95	751.449,94	874.942,09	967.781,54	1.049.111,43
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	463.027,04	500.751,09	539.716,00	595.381,21	673.296,11
L	Real Estate	282.022,28	313.934,31	356.189,95	392.362,52	425.693,47
M,N	Jasa Perusahaan	53.282,42	64.901,63	73.941,95	83.958,04	96.344,32
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	587.375,71	632.416,81	671.060,41	726.076,81	783.998,07
P	Jasa Pendidikan	950.647,93	1.138.063,99	1.346.913,38	1.469.391,02	1.631.539,47
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	180.056,67	204.762,64	234.464,80	258.757,17	286.874,15
R,S,T,U	Jasa lainnya	472.608,23	535.167,89	618.937,28	665.107,08	756.995,85
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		24.668.258,21	27.437.547,11	30.899.921,71	34.447.079,42	37.340.820,52

Sumber: BPS Kabupaten Brebes, 2017

Tabel 2.9.
PDRB Kabupaten Brebes Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012 – 2016
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (Juta Rupiah)

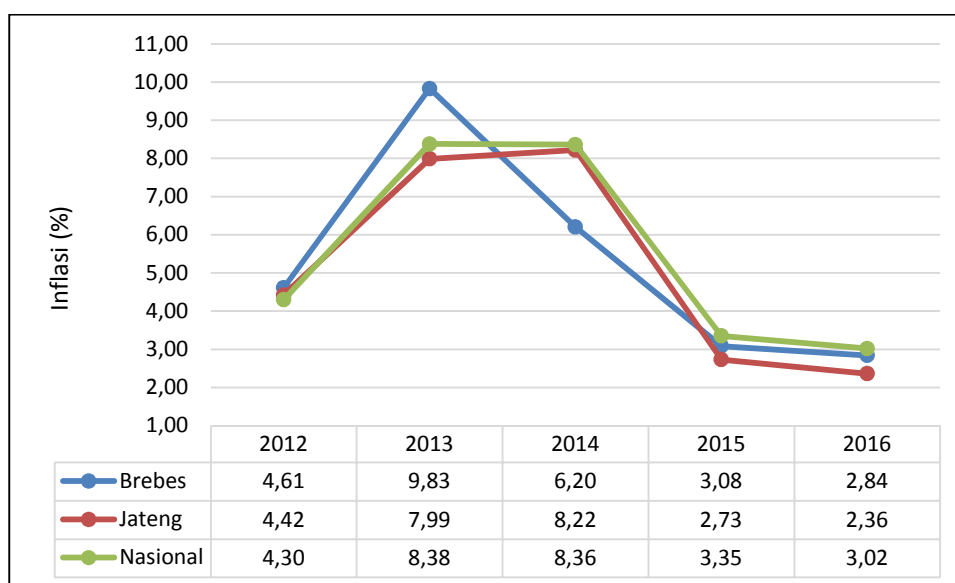
Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.352.734,44	9.602.926,95	9.626.940,50	10.014.534,43	10.375.354,28
B	Pertambangan dan Penggalian	445.656,19	478.242,76	518.029,55	549.195,79	572.633,50
C	Industri Pengolahan	2.691.237,22	3.054.225,25	3.423.339,51	3.748.057,67	3.964.030,53
D	Pengadaan Listrik dan Gas	14.486,05	16.078,00	17.233,43	17.997,20	18.466,41
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17.542,97	17.223,16	17.930,73	18.307,57	18.705,38
F	Konstruksi	909.257,62	963.572,72	1.027.466,41	1.179.077,48	1.167.505,71
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.178.625,15	4.406.120,12	4.629.032,13	4.830.483,57	5.081.962,96
H	Transportasi dan Pergudangan	625.131,23	703.388,78	783.048,86	837.524,46	893.513,73
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	963.168,61	994.399,51	1.075.624,34	1.135.103,45	1.212.253,12
J	Informasi dan Komunikasi	706.047,65	788.178,49	948.155,15	1.069.687,23	1.158.541,90
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	394.319,09	409.999,58	421.559,60	445.190,28	488.659,95
L	Real Estate	274.925,51	302.126,13	330.161,87	351.421,41	375.300,68
M,N	Jasa Perusahaan	47.899,17	56.018,77	62.213,99	67.215,12	74.355,27
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	511.329,60	528.026,29	532.406,08	553.768,11	566.885,79
P	Jasa Pendidikan	744.340,21	827.441,19	933.835,76	996.723,45	1.072.845,71
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	152.489,60	165.492,30	183.751,25	195.231,05	214.479,21
R,S,T,U	Jasa lainnya	453.072,35	498.596,91	543.442,33	563.316,63	611.877,16
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		22.482.262,67	23.812.056,92	25.074.171,51	26.572.834,89	27.867.371,33

Sumber: BPS Kabupaten Brebes, 2017

2.2.2. Inflasi

Inflasi di Kabupaten Brebes mengalami penurunan dalam kurun waktu 2013-2016, data terakhir tahun 2016 yaitu 2,84 persen. Kondisi inflasi ini sama dengan kondisi inflasi secara nasional maupun provinsi, yang dipengaruhi oleh terjaganya pasokan dan ketersediaan barang yang mampu memenuhi permintaan, pengendalian stabilitas harga yang baik, serta terjaganya harga beberapa komoditas pangan. Dilihat relevansinya dari tahun 2012-2016, perkembangan inflasi di Kabupaten Brebes masih sejalan dengan perkembangan inflasi nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

Inflasi di Kabupaten Brebes tahun 2016 terjadi terutama disebabkan adanya kenaikan harga yang ditunjukkan dengan terjadinya kenaikan indeks pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 1,27 persen, kelompok bahan makanan sebesar 0,82 persen, kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,33 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,12 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,12 persen, kelompok sandang 0,1 persen, dan kelompok transport, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,08 persen.

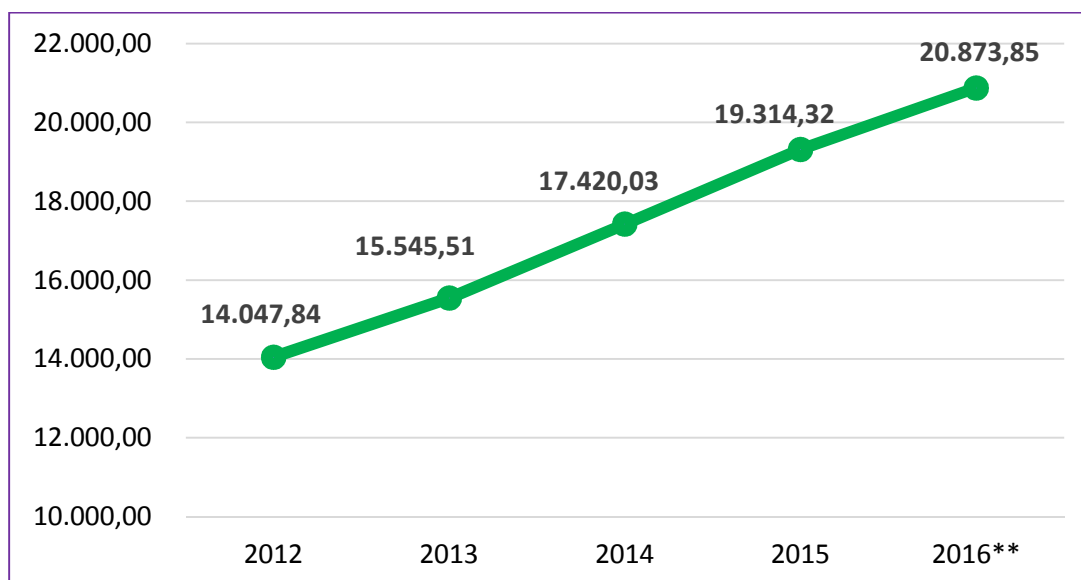


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2017

Gambar 2.7.
Inflasi Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, dan
Tahun 2012 – 2016 (%)

2.2.3. PDRB per Kapita

PDRB perkapita Kabupaten Brebes atas dasar harga berlaku tahun 2012-2016 mengalami peningkatan, dari Rp. 14.047.840,- pada tahun 2012 menjadi Rp. 20.873.850,- pada tahun 2016. Kondisi ini menggambarkan kondisi ekonomi per penduduk Kabupaten Brebes yang semakin baik dari tahun ke tahun.



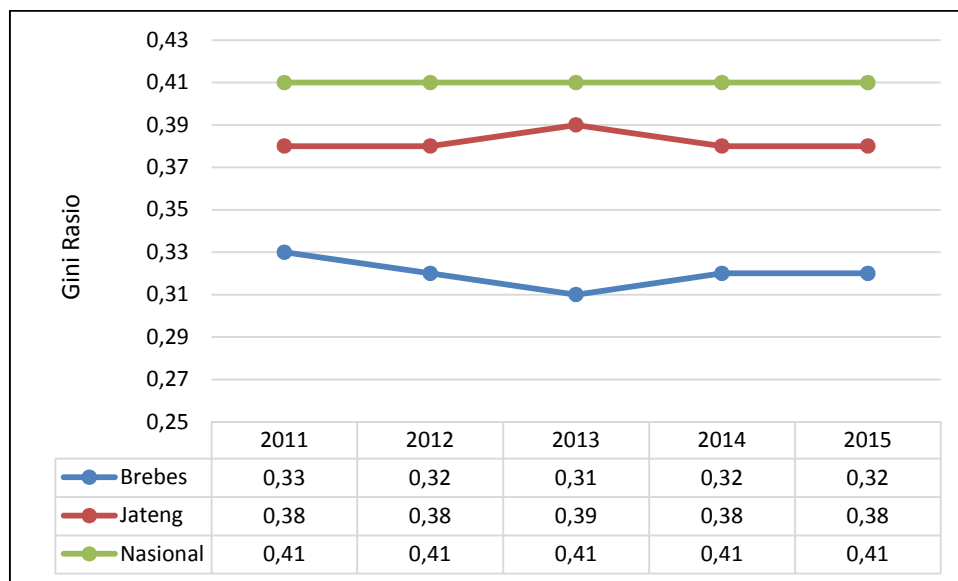
Sumber: BPS Kabupaten Brebes, 2017

Keterangan : **) angka sementara

Gambar 2.8.
PDRB Per Kapita Kabupaten Brebes
Tahun 2012 – 2016 (Ribu Rupiah)

2.2.4. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan satu ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan antar masyarakat. Indeks Gini tahun 2011 sebesar 0,33 menurun menjadi 0,32 pada tahun 2015. Indeks ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat Kabupaten Brebes semakin menurun, yang artinya kondisi ini merupakan kondisi yang baik. Indeks Gini Kabupaten Brebes pada tahun 2011-2015 relatif lebih rendah dibandingkan dengan Indeks Gini nasional dan Provinsi Jawa Tengah.



Sumber: BPS Kabupaten Brebes, 2017

Gambar 2.9.

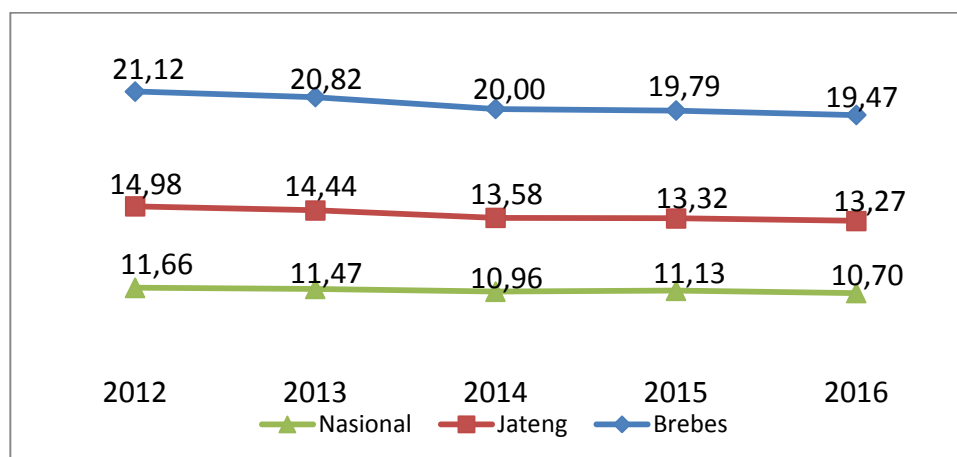
**Indeks Gini Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan
Kabupaten Brebes Tahun 2011 – 2015**

2.2.5. Indeks Williamson

Indeks Williamson merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan antar wilayah. Semakin rendah angka Indeks Williamson menggambarkan tingkat pemerataan pendapatan antar wilayah semakin baik. Berdasarkan perhitungan Indeks Williamson antar wilayah Kecamatan di Kabupaten Brebes tahun 2011-2013 berturut-turut sebesar 0,3402; 0,3227; 0,3441 menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan antar wilayah kecamatan di Kabupaten Brebes termasuk dalam kategori rendah ($<0,35$).

2.2.6. Penduduk Miskin

Berdasarkan data kemiskinan makro BPS, persentase penduduk miskin di Kabupaten Brebes tahun 2012-2016 mengalami penurunan dari tahun ke tahun, dan terakhir pada tahun 2016 adalah sebesar 19,47 persen, masih di atas persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah sebesar 13,27 persen, dan nasional sebesar 10,70 persen.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2017

Gambar 2.10.
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Brebes,
Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2012 - 2016

Persentase dan jumlah penduduk miskin ditentukan oleh besarnya garis kemiskinan, dimana garis kemiskinan menggambarkan batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan. Garis kemiskinan Kabupaten Brebes pada tahun 2016 adalah sebesar sebesar Rp. 364.059,- per kapita per bulan, lebih tinggi dibandingkan dengan garis kemiskinan Provinsi Jawa Tengah yang sebesar Rp. 322.748,- per kapita per bulan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Brebes pada tahun 2012 sebesar 3,07 meningkat menjadi menjadi 3,96 pada tahun 2016. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pengurangan kesenjangan pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Brebes harus lebih ditingkatkan.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Ukuran ini memberikan informasi saling melengkapi pada kasus kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Brebes pada tahun 2012-2014 cenderung mengalami penurunan dari 0,77 pada tahun 2012 menjadi 0,66 pada tahun 2014, akan tetapi mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi sebesar 0,93 dan pada tahun 2016 sebesar 1,16. Berikut Tabel Indikator Kemiskinan di Kabupaten Brebes.

Tabel 2.10.
Indikator Kemiskinan di Kabupaten Brebes

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
Persentase Penduduk Miskin (%)	21,12	20,82	20,00	19,79	19,47
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	371.362	367.905	355.100	352.010	347.980
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	3,07	3,33	2,93	3,52	3,96
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,77	0,76	0,66	0,93	1,16
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita)	281.601	307.238	327.452	340,538	364,059

Sumber: BPS Kabupaten Brebes, 2017

Berdasarkan data kemiskinan mikro, Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (PPFM) bersumber dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang memuat jumlah rumah tangga dan individu miskin dan rentan miskin dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 40% terendah, di Kabupaten Brebes ada sebanyak 263.979 rumah tangga yang terinci menjadi 1.032.521 jiwa, dengan sebaran tertinggi di Kecamatan Wanasari dengan 23.190 rumah tangga (98.059 jiwa) dan terendah di Kecamatan Sirampog dengan 8.023 rumah tangga (32.028 jiwa). Rumah tangga atau individu miskin dan rentan miskin tersebut merupakan sasaran program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Brebes, agar dapat lebih meningkat kesejahtraannya.

Tabel 2.11.
Jumlah Rumah Tangga dan Individu, menurut Kecamatan dan Status Kesejahteraan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Kabupaten Brebes

Nama Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga					Jumlah Individu				
	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Total	Desil 1	Desil 2	Desil 3 *)	Desil 4 *)	Total
Salem	4,136	2,255	1,764	547	8,702	18,025	7,240	4,227	1,331	30,823
Bantar kawung	7,857	3,107	2,038	799	13,801	36,892	10,445	5,258	1,912	54,507
Bumia yu	5,952	2,804	2,424	969	12,149	27,962	9,337	5,855	2,301	45,455
Paguyangan	8,166	3,538	2,607	936	15,247	39,831	12,248	7,048	2,379	61,506
Siram pog	4,802	1,731	1,128	362	8,023	22,559	5,603	2,894	972	32,028
Tonjong	5,429	2,399	1,826	664	10,318	25,082	7,734	4,478	1,701	38,995
Larang an	8,240	5,591	5,224	2,582	21,637	40,432	20,133	14,642	6,442	81,649
Ketang gunga	10,200	5,760	5,301	1,909	23,170	49,697	19,838	13,688	5,052	88,275

Nama Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga					Jumlah Individu				
	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Total	Desil 1	Desil 2	Desil 3 *)	Desil 4 *)	Total
n										
Banjarnegara	6,189	4,477	4,365	2,124	17,155	30,338	15,764	11,741	5,111	62,954
Losari	8,185	4,951	4,715	2,559	20,410	41,628	18,693	14,194	6,864	81,379
Tanjungsari	7,334	3,787	3,293	1,536	15,950	37,280	13,902	9,703	3,792	64,677
Kersana	3,570	2,310	2,217	1,040	9,137	16,420	8,042	6,009	2,380	32,851
Bulakamba	8,879	5,643	5,465	3,156	23,143	46,429	22,655	17,623	8,560	95,267
Wanasari	8,717	5,982	5,391	3,100	23,190	46,963	24,428	18,021	8,647	98,059
Songgomangrove	4,890	2,981	2,891	1,340	12,102	24,073	10,489	7,333	3,022	44,917
Jatibarang	4,147	2,473	2,522	1,131	10,273	20,645	8,659	6,318	2,689	38,311
Brebes	6,529	4,667	4,771	3,605	19,572	35,367	19,138	16,211	10,152	80,868
Jumlah	113,222	64,456	57,942	28,359	263,979	559,623	234,348	165,243	73,307	1,032,521

Keterangan :

Desil 1 : Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah

Desil 2 : Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan diatas 10% - 20% terendah

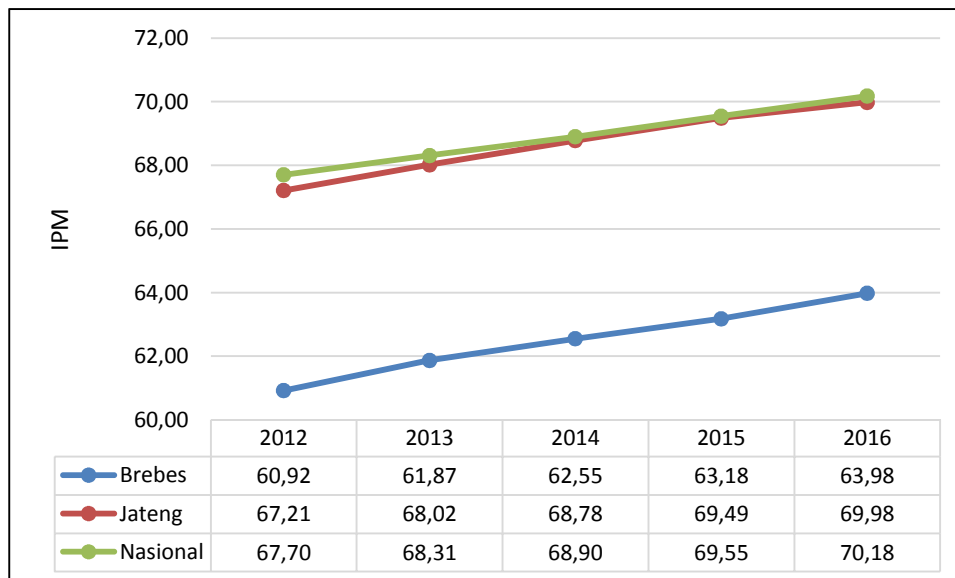
Desil 3 : Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan diatas 20% - 30% terendah

Desil 4 : Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan diatas 30% - 40% terendah

2.2.7. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk meliputi dimensi kesehatan yaitu Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH); dimensi pendidikan yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS); serta dimensi pengeluaran yaitu pengeluaran per kapita.

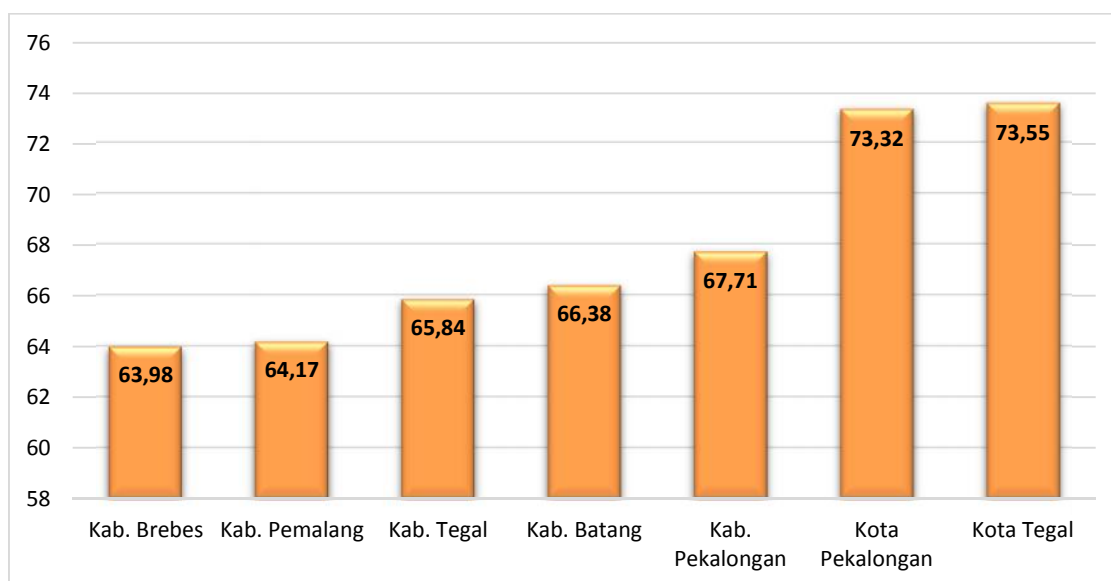
Perkembangan IPM Kabupaten Brebes terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2012 sebesar 60,92 meningkat menjadi 63,98 pada tahun 2016. Namun demikian, IPM Kabupaten Brebes masih dibawah IPM nasional dan Provinsi Jawa Tengah, dan apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya se Jawa Tengah berada pada posisi terakhir.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2017

Gambar 2.11.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Brebes Tahun 2012-2016



Gambar 2.12

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2016

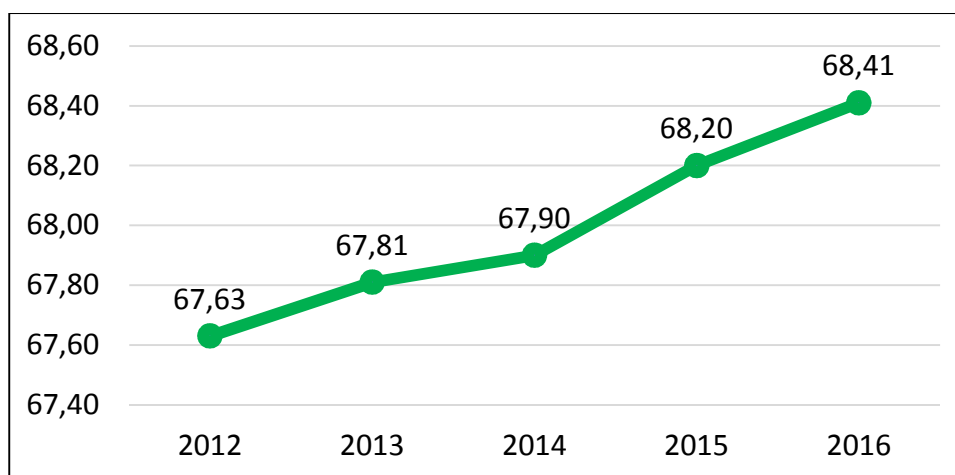
Berdasarkan Gambar 2.12 di atas, IPM Kabupaten Brebes tahun 2016 berada pada posisi terendah, dibandingkan dengan IPM kabupaten/kota lainnya se-Eks Karesidenan Pekalongan.

Gambaran indikator pembentuk IPM secara lengkap dapat dijabarkan berikut ini.

1. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan ukuran terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk umumnya dan derajat kesehatan pada khususnya. Kualitas kesehatan masyarakat dikatakan semakin membaik berdasarkan rata-rata harapan hidup yang semakin panjang. Dengan menggunakan AHH, pemerintah dapat mengevaluasi kinerja pemerintahan dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Dalam kurun waktu tahun 2012-2016, AHH di Kabupaten Brebes pada tahun 2012 sebesar 67,63 tahun meningkat menjadi 68,41 tahun pada tahun 2016.

Kabupaten Brebes menduduki peringkat terakhir untuk capaian AHH di tingkat Provinsi Jawa Tengah. AHH penduduk Kabupaten Brebes pada tahun 2016 mencapai 68,41 tahun, sementara rata-rata AHH Provinsi Jawa Tengah mencapai 74,02 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak permasalahan dan tantangan di bidang kesehatan yang harus diselesaikan bersama, mulai dari perilaku hidup bersih dan sehat, sanitasi lingkungan, kelayakhunian tempat tinggal, fasilitas pelayanan kesehatan, kualitas dan kapasitas pelayanan kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan, kecukupan gizi, tingkat kejadian penyakit, layanan pendampingan kesehatan ibu dan anak, serta tidak kalah pentingnya adalah peran serta masyarakat dalam membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat.

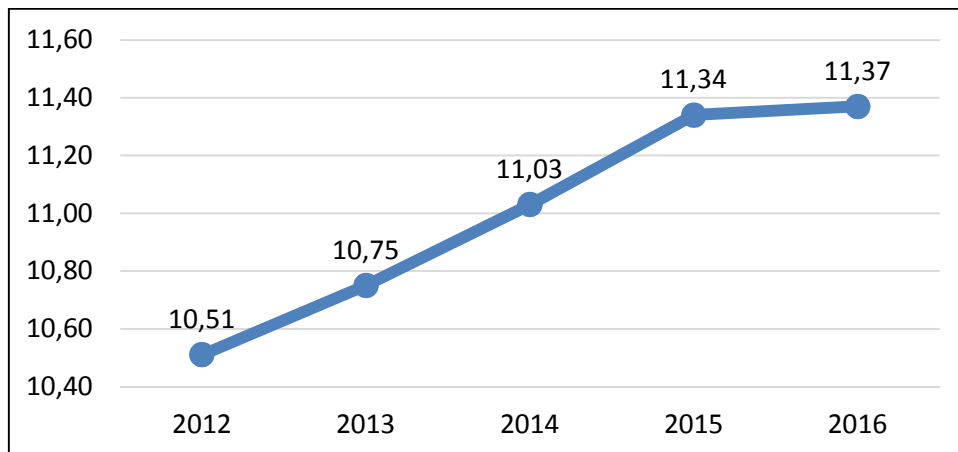


Sumber: BPS Kabupaten Brebes, 2017

Gambar 2.13.
Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Brebes
Tahun 2012-2016 (Tahun)

2. Harapan Lama Sekolah (HLS)

HLS adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan bidang pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Pada tahun 2016, angka HLS Kabupaten Brebes mencapai 11,37 tahun, cenderung mengalami perlambatan dibandingkan kenaikan tahun-tahun sebelumnya.

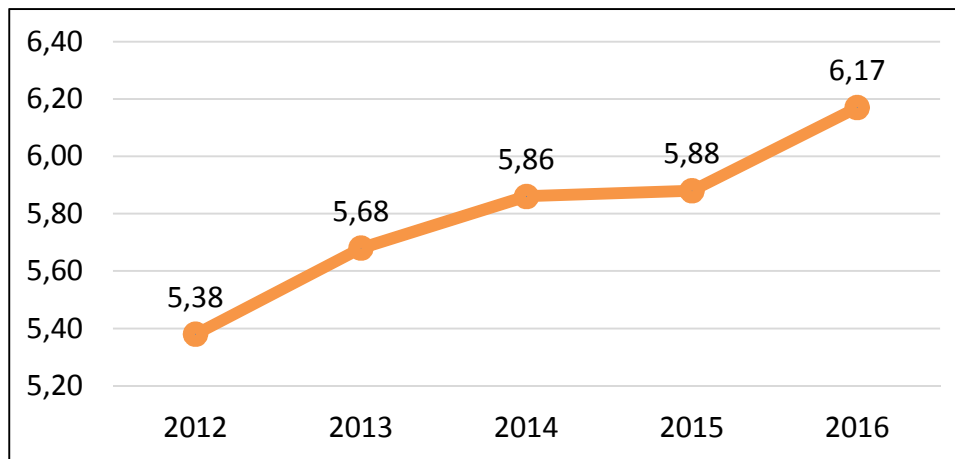


Sumber: BPS Kabupaten Brebes, 2017

Gambar 2.14.
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Brebes
Tahun 2012-2016 (Tahun)

3. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

RLS menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Untuk Kabupaten Brebes pada tahun 2016 mencapai 6,17 tahun dan menduduki peringkat ke 33 se Jawa Tengah. Angka 6,17 tahun menunjukkan rata-rata pendidikan yang ditempuh baru sampai selesai di Sekolah Dasar. Hal ini sangat memprihatinkan, karena angka tersebut masih jauh di bawah capaian di tingkat Provinsi Jawa Tengah (7,15 tahun). Melihat angka tersebut, maka diperlukan upaya percepatan peningkatannya antara lain dengan program wajib belajar 9 tahun dan rintisan wajib belajar 12 tahun dengan permasalahan dan tantangan yang berat.

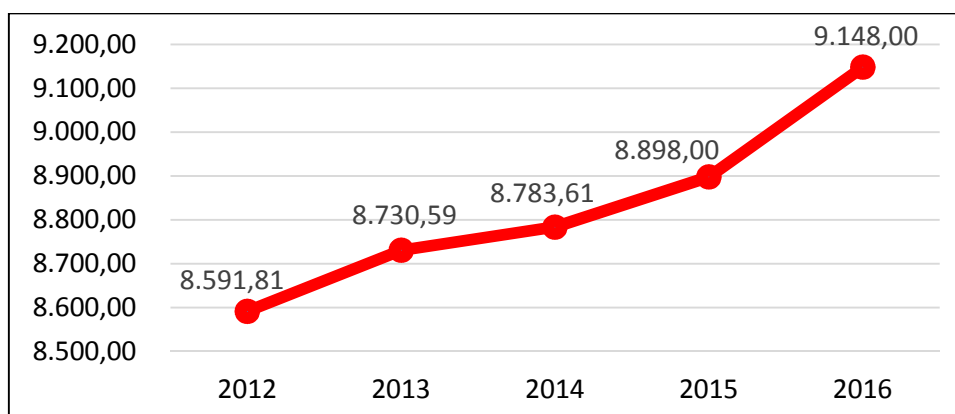


Sumber: BPS Kabupaten Brebes, 2017

Gambar 2.15.
Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah
Kabupaten Brebes Tahun 2012-2016 (Tahun)

4. Pengeluaran Per Kapita (Disesuaikan)

Pengeluaran Per Kapita (disesuaikan) di Kabupaten Brebes meningkat dalam kurun waktu 2012-2016 yaitu dari Rp. 8.591.810,- pada tahun 2012 menjadi Rp. 9.148.000,- pada tahun 2016. Capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Brebes mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan taraf hidup masyarakat Kabupaten Brebes.



Sumber: BPS Kabupaten Brebes, 2017

Gambar 2.16.
Perkembangan Pengeluaran Per Kapita
Kabupaten Brebes Tahun 2012-2016 (Ribuan Rupiah)

2.2.8. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan salah satu indikator dalam aspek pemerataan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan. Rumus yang digunakan adalah jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu dibagi jumlah penduduk dengan kelompok usia sesuai dengan jenjang pendidikan

tersebut dikalikan seratus persen. Perkembangan APK jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA di Kabupaten Brebes dapat dilihat pada Tabel 2.9 berikut.

Tabel 2.12.
Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Brebes
Tahun 2012-2016

No.	Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1.	SD/MI	%	101,53	111,73	112,53	106,75	112,74
2.	SMP/MTs	%	91,00	79,95	77,94	91,10	94,12
3.	SMA/SMK/MA	%	51,10	55,18	67,70	65,92	63,88

Sumber : BPS Kabupaten Brebes, 2017

Berdasarkan data BPS, APK SD/MI di Kabupaten Brebes pada tahun 2012-2016 cenderung meningkat dari 101,53% pada tahun 2012, menjadi 112,74% pada tahun 2016, sudah termasuk tinggi. APK untuk jenjang pendidikan SMP/MTs juga meningkat, dari 91,00% pada tahun 2012, menjadi 94,12% pada tahun 2016, sudah termasuk cukup tinggi. Sedangkan untuk APK jenjang pendidikan SMA/SMK/MA juga meningkat dari 51,10% pada tahun 2012, menjadi 63,88% pada tahun 2016, namun masih termasuk relatif rendah.

Rendahnya APK SMA/MA disebabkan beberapa hal, antara lain biaya pendidikan relatif tinggi, letak geografis SMA/SMK/MA relatif jauh dari pemukiman penduduk terdekat dan kurangnya sarana dan prasarana terutama untuk SMK.

2.2.9. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan angka yang menggambarkan partisipasi anak usia sekolah dalam mengikuti jenjang pendidikan yang sesuai. Perkembangan APM jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA di Kabupaten Brebes dapat dilihat pada Tabel 2.10 berikut.

Tabel 2.13.
Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Brebes
Tahun 2012-2016

No.	Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1.	SD/MI	%	92,31	97,27	97,54	93,00	94,40
2.	SMP/MTs	%	73,57	68,78	70,54	73,71	79,51
3.	SMA/SMK/MA	%	41,27	43,26	52,58	44,26	51,88

Sumber : BPS Kabupaten Brebes, 2017

Berdasarkan data BPS, APK SD/MI di Kabupaten Brebes pada tahun 2012-2016, cenderung meningkat dari 92,31% pada tahun 2012, menjadi 94,40% pada tahun 2016, sudah termasuk tinggi. APM untuk jenjang pendidikan SMP/MTs juga meningkat, dari 73,57% pada tahun 2012, menjadi 79,51% pada tahun 2016, masih relatif rendah. Sedangkan untuk APM jenjang pendidikan SMA/SMK/MA juga meningkat dari 41,27% pada tahun 2012, menjadi 51,88% pada tahun 2016, namun masih termasuk relatif rendah.

APM SMA/SMK/MA tersebut masih rendah, sehingga menjadi perhatian untuk meningkatkannya guna kesinambungan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun menuju Wajib Belajar 12 Tahun.

2.2.10. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan

Sejalan dengan capaian angka rata-rata lama sekolah, angka pendidikan yang ditamatkan merupakan indikator untuk mengukur kualitas SDM pada suatu wilayah. Data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes, angka pendidikan yang ditamatkan hanya pada kurun waktu 2012 – 2014. Untuk Tahun 2015 – 2016, belum diperoleh data dimaksud. Selama kurun waktu 2012 – 2014 jumlah penduduk yang berpendidikan/lulusan SD mencapai 44,20% (Tahun 2012), meningkat menjadi 53,22% (Tahun 2014). Untuk tingkat pendidikan penduduk Tahun 2014 mencapai 16,66% dan tingkat pendidikan SMA mencapai 11,42%. Tantangan ke depan adalah upaya meningkatkan jumlah penduduk yang berkualifikasi pendidikan menengah. Dengan kata lain perlu peningkatan Angka Partisipasi SMA/SMK/MA dengan meminimalkan Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA.

Tabel 2.14.
Angka Pendidikan Yang Ditamatkan
Berdasarkan Penduduk Usia Kerja (15 – 64 Tahun)
Kabupaten Brebes Tahun 2012-2016

No	Tahun	SD	SMP	SMA/SMK
1.	2012	44,20	14,27	8,22
2.	2013	44,20	14,27	8,20
3.	2014	53,22	16,66	11,42
4.	2015	*	*	*
5.	2016	*	*	*

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kemenag Kab. Brebes, 2017

*Keterangan: *Data semester satu; •Data tidak tersedia*

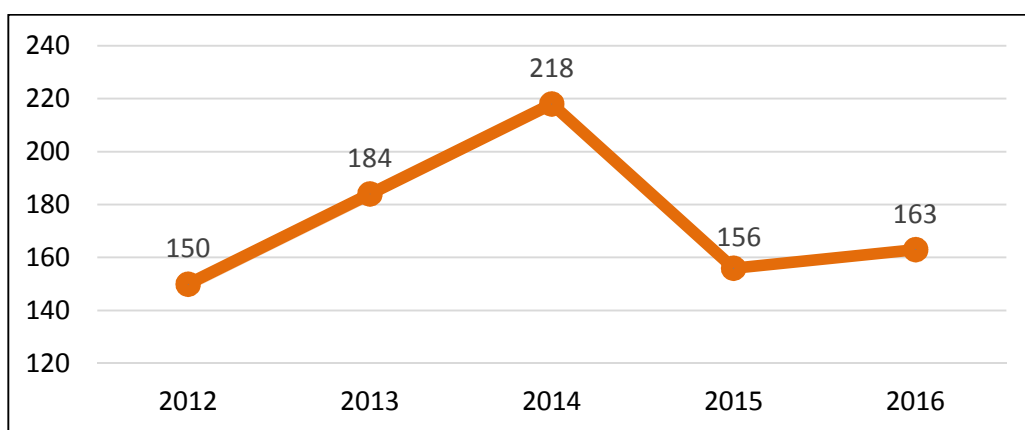
2.2.11. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya ibu yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan)

tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Ibu melahirkan di Kabupaten Brebes dalam kurun waktu lima tahun cenderung mengalami peningkatan dari 150 per 100.000 kelahiran hidup (51 kasus) pada tahun 2012 menjadi 163 per 100.000 kelahiran hidup (54 kasus) pada tahun 2016, bahkan pada tahun 2014 mencapai 218 per 100.000 kelahiran hidup (73 kasus). Capaian ini masih di atas target RPJMD yaitu sebesar 101 per 100.000 kelahiran hidup, serta Kabupaten Brebes menempati peringkat tertinggi di Jawa Tengah terkait AKI dalam beberapa tahun terakhir. Upaya penurunan AKI yang sudah dilaksanakan antara lain melalui pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan ibu hamil resiko tinggi, terutama oleh keluarga, kader kesehatan, dan masyarakat.

Penyebab tertinggi kematian ibu antara lain, hipertensi, pendarahan, masih rendahnya deteksi dini kehamilan risiko tinggi oleh masyarakat dan masih kurangnya kesiapsiagaan keluarga dalam rujukan persalinan pada kehamilan risiko tinggi. Kondisi ini menggambarkan derajat kesehatan masyarakat khususnya status kesehatan ibu masih perlu ditingkatkan terutama di wilayah-wilayah dengan kasus kematian ibu yang tinggi.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, 2017

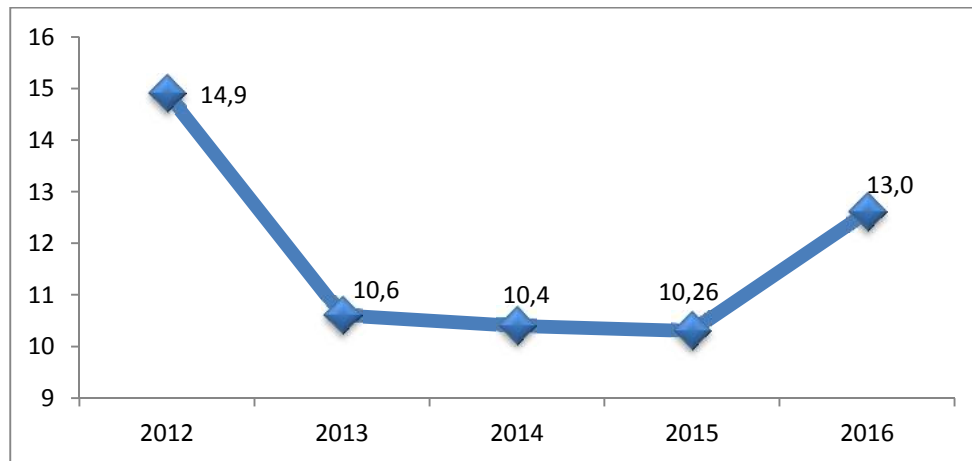
Gambar 2.17.
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Brebes Tahun 2012 – 2016

2.2.12. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun, dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. Capaian AKB dalam kurun waktu lima tahun menurun dari 14,90 per 1.000 kelahiran hidup (508 kasus) pada tahun 2012 menjadi 13,0 per 1.000 kelahiran hidup (444 kasus) pada tahun 2016. Namun capaian ini masih di atas target RPJMD yaitu sebesar 8,2 per 1.000 kelahiran hidup.

Penyebab kematian bayi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu penyebab kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan

antara lain kehamilan risiko tinggi, berat badan lahir bayi rendah serta penyakit konginetal dan penyebab kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun, antara lain karena masih rendahnya pemberian ASI Eksklusif, penyakit infeksi serta belum optimalnya pola asuh bayi dan balita.

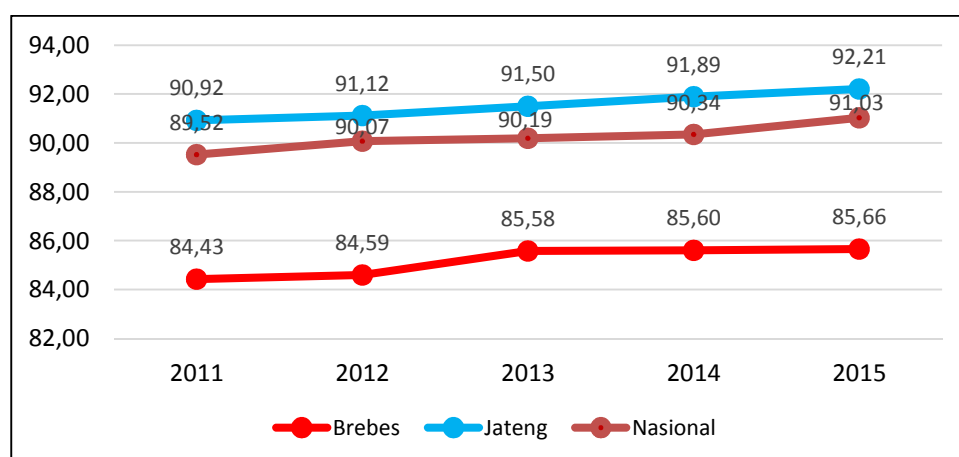


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, 2017

Gambar 2.18.
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Brebes Tahun 2012 – 2016

2.2.13. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

IPG pada dasarnya sama dengan IPM tetapi dilakukan pemilahan gender untuk masing-masing komponennya. Perkembangan IPG Kabupaten Brebes dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2011-2015) menunjukkan perkembangan yang positif namun masih jauh dibawah Jawa Tengah maupun nasional.



Sumber: BPS Kabupaten Brebes, 2016

Gambar 2.19.
IPG Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional
Tahun 2011 – 2015

Secara rinci, perkembangan indikator pembentuk IPG Kabupaten Brebes dapat dilihat pada Tabel 2.12. Dalam kurun waktu 2011 sampai dengan 2015, IPG di Kabupaten Brebes ini menunjukkan peningkatan, namun demikian kualitas hidup perempuan masih jauh dibawah kualitas hidup laki-laki. Dengan kata lain keberpihakan pembangunan terhadap kaum perempuan melalui pengarusutamaan gender masih belum optimal dan harus ditingkatkan lagi.

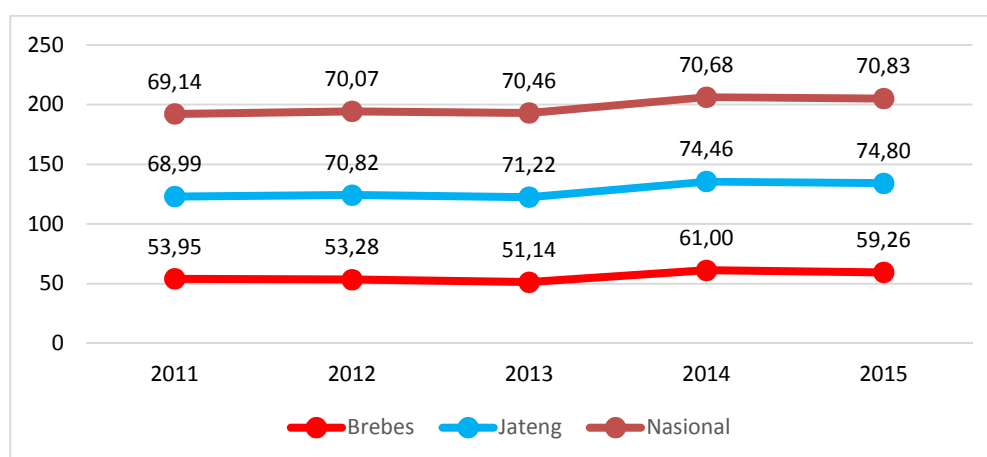
Tabel 2.15.
Indikator Pembentuk Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Di Kabupaten Brebes Tahun 2011 – 2015

Indikator / Indeks		2011	2012	2013	2014	2015
AHH	Laki-laki	65,58	65,75	65,92	66,01	66,31
	Perempuan	69,23	69,41	69,59	69,68	69,98
Pengetahuan	HLS (laki-laki)	10,23	10,51	10,52	10,95	11,13
	HLS (perempuan)	10,51	10,52	11,09	11,34	11,47
	RLS (laki-laki)	5,88	6,08	6,41	6,63	6,64
	RLS (perempuan)	4,53	4,71	4,74	4,77	4,81
Pengeluaran (Rp.000,-)	Laki-laki	12.445,9	12.718,3	12.979,0	13.124,4	13.180,0
	Perempuan	5.447,4	5.728,5	6.024,0	6.298,7	6.340,0

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2016

2.2.14. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

IDG merupakan indeks yang mengkaji lebih jauh peranan perempuan dalam pengambilan keputusan. IDG dibentuk berdasarkan tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, dan teknisi, serta sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Pada tahun 2015 IDG Kabupaten Brebes tercatat 59,26, menurun jika dibandingkan tahun 2014 yang sebesar 61,00, serta masih di bawah capaian IDG Provinsi Jawa Tengah sebesar 74,80.



Sumber: BPS Kabupaten Brebes, 2016

Gambar 2.20.
IDG Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional
Tahun 2011 – 2015

2.2.15. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan keseluruhan gagasan, perilaku, dan karya cipta manusia yang dapat menuntun kehidupan manusia agar lebih bermartabat. Pembangunan kebudayaan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya baru di era globalisasi, namun demikian harus tetap berpijak pada nilai – nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, sehingga terwujud karya-karya seni budaya yang memiliki kepribadian. Disisi lain kesenian merupakan hasil karya yang mengacu pada nilai keindahan (estetika) dan mewujudkan dari proses pengendapan makna relasi antar manusia dan manusia dengan lingkungan hidupnya.

Berkaitan dengan aktivitas seni budaya di Kabupaten Brebes, terlihat bahwa dalam kurun waktu 2012– 2016 jumlah kelompok kesenian meningkat dari 199 (Tahun 2013) menjadi 922 (Tahun 2016). Untuk jumlah gedung kesenian dalam kurun waktu 2013 – 2016 stabil yaitu sebanyak 2 (dua) buah dan berada pada Kecamatan Paguyangan 1 (satu) buah, Kecamatan Losari 1 (satu) buah, dan Kecamatan Kersana 1 (satu) buah.

Tabel 2.16.
Perkembangan Jumlah Kelompok Kesenian dan Gedung Kesenian
Kabupaten Brebes Tahun 2012– 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Kelompok Kesenian	*	199	922	922	922
2.	Jumlah Gedung Kesenian	*	2	2	2	2

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Olahraga Kab. Brebes, 2017

2.2.16. Pemuda dan Olahraga

Pemuda sebagai motor penggerak pembangunan mempunyai peran serta dan arti penting bagi pelaksanaan pembangunan. Pembangunan kepemudaan dan olahraga merupakan salah satu upaya penting dalam peningkatan terhadap kualitas sumber daya manusia yang seutuhnya. Upaya pembangunan kepemudaan dilakukan melalui pembinaan kepemudaan terhadap lembaga/organisasi kepemudaan, kepelajaran, kemahasiswaan yang secara keseluruhan. Karang Taruna adalah organisasi kepemudaan di Indonesia. Karang Taruna merupakan wadah pengembangan generasi muda non partisan, yang tumbuh atas kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat khususnya generasi muda di wilayah Desa/Kelurahan atau komunitas sosial sederajat, yang terutama bergerak di bidang kesejahteraan sosial. Sebagai organisasi sosial kepemudaan Karang Taruna merupakan wadah pembinaan dan pengembangan serta pemberdayaan dalam upaya mengembangkan kegiatan ekonomis produktif

dengan pendayagunaan semua potensi yang tersedia di lingkungan baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang telah ada. Jumlah Karang Taruna di Kabupaten Brebes cenderung tetap yaitu sebanyak 297 karang taruna. Berikut gambaran karang taruna menurut kecamatan.

Tabel 2.17.
Banyaknya Karang Taruna Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Brebes Tahun 2012 – 2016

No	Kecamatan	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Salem	21	21	21	21	21
2.	Bantarkawung	18	18	18	18	18
3.	Bumiayu	15	15	15	15	15
4.	Paguyangan	12	12	12	12	12
5.	Sirampog	13	13	13	13	13
6.	Tonjong	14	14	14	14	14
7.	Larangan	11	11	11	11	11
8.	Ketanggungan	21	21	21	21	21
9.	Banjarharjo	25	25	25	25	25
10.	Losari	22	22	22	22	22
11.	Tanjung	18	18	18	18	18
12.	Kersana	13	13	13	13	13
13.	Bulakamba	19	19	19	19	19
14.	Wanasari	20	20	20	20	20
15.	Songgom	10	10	10	10	10
16.	Jatibarang	22	22	22	22	22
17.	Brebes	23	23	23	23	23
	Jumlah	297	297	2.997	297	297

Sumber: Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kab. Brebes, 2017

Jumlah klub olahraga di Kabupaten Brebes cenderung stabil yaitu 588 klub, dan untuk jumlah gedung olahraga juga tetap yaitu 42 buah.

Tabel 2.18.
Perkembangan Olahraga
Kabupaten Brebes Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Klub Olahraga	*	588	588	588	588
2.	Jumlah Gedung Olahraga	*	42	42	42	42

Sumber: Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kab. Brebes, 2017

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Pembangunan pendidikan memiliki fungsi strategis untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Keberhasilan pembangunan pendidikan akan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya insan yang mandiri dan bermartabat. Pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kompetensi masyarakat terutama kemampuan memecahkan masalah.

1. Angka Partisipasi Sekolah

APS merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Capaian APS SD/MI di Kabupaten Brebes tertuang pada Tabel 2.16.

Tabel 2.19.
Perkembangan APS Kabupaten Brebes Tahun 2012-2016

No	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
1.	APS SD/MI	89,86	95.68	92.85	89.14	92,56
2.	APS SMP/MTs	58,23	77.65	81.33	84.46	60,49

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes, 2017

APS di tingkat Pendidikan dasar di wilayah kecamatan sangat bervariasi. Pada tingkat SD/MI, capaian APS tertinggi berada di Kecamatan Sirampog (100,15%) dan capaian terendah berada di Kecamatan Songgom (82,98%). Pada tingkat SMP/MTs, APS tertinggi berada di Kecamatan Sirampog (126,01%) dan terendah di Kecamatan Banjarharjo.

Di wilayah kecamatan yang APS-nya masih rendah, perlu dikaji penyebabnya terutama terkait dengan aksesabilitas, keterjangkauan dan ketersediaan fasilitas pendidikan, kesadaran masyarakat dan faktor-faktor lain yang ikut berpengaruh. Demikian pula dalam menentukan lokasi program pendidikan dasar yang terkait dengan upaya mendorong meningkatnya rata-rata lama sekolah yang semakin merata antar wilayah, APS dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan lokasi prioritas program, sehingga terjadi pemerataan aksesabilitas dan keterjangkauan pelayanan pendidikan dasar di seluruh wilayah Kabupaten Brebes.

Tabel 2.20.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Berdasarkan Kecamatan
Kabupaten Brebes Tahun 2016

No.	Kecamatan	APS	
		SD/MI (usia 7-12 tahun)	SMP/MTs (Usia 13-15 tahun)
1	Salem	95.35	96.65
2	Bantarkawung	87.36	86.14
3	Bumiayu	102.28	115.33
4	Paguyangan	88.12	98.73
5	Sirampog	106.55	117.65
6	Tonjong	95.20	90.87
7	Larangan	95.27	96.58
8	Ketanggungan	90.66	78.46
9	Banjarharjo	94.73	56.15
10	Losari	95.94	67.71
11	Tanjung	93.92	73.62
12	Kersana	91.09	107.76
13	Bulakamba	94.06	70.28
14	Wanasari	93.33	59.29
15	Songgom	89.17	82.35
16	Jatibarang	95.98	77.93
17	Brebes	101.78	100.41
Rata-rata Kab.		94,78	84.82

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes, 2017

2. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk adalah jumlah sekolah jenjang pendidikan tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan sejauh mana ketersediaan sekolah dapat menampung seluruh penduduk usia sekolah. Rasio ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Brebes pada tahun 2012 – 2015 tertuang pada Tabel 2.18.

Tabel 2.21.
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
di Kabupaten Brebes Tahun 2012 - 2016

No.	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
1.	SD/MI					
1.1.	Jumlah Sekolah	1.090	1.092	1.092	1.099	1.103
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7 – 12 tahun	219.078	215.202	213.910	210.662*	194.081
1.3	Rasio sekolah/ 10.000 pddk usia 7-12 thn	50	51	51	52	57
2.	SMP/MTs					
2.1	Jumlah Sekolah	215	221	235	238	243
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13 – 15 tahun	116.636	103.074	103.585	105.178*	100.690
2.3	Rasio sekolah/10.000 pddk usia 13-15 thn	18	23	23	22	24

Sumber: Dinas Pendidikan, Kantor Kemenag dan BPS Kabupaten Brebes, BPS Provinsi Jateng, 2017 (diolah)

*Keterangan: *) angka perkiraan sementara*

Perkembangan rasio ketersediaan sekolah pada jenjang SD/MI menunjukkan peningkatan meskipun sedikit, dan capaian angkanya mendekati rasio ideal yaitu 52,08. Sedangkan pada jenjang Pendidikan SMP/MI, rasio ketersediaan sekolah fluktuatif dan masih jauh dibawah rasio yang ideal. Dari aspek kewilayahan, rasio ketersediaan sekolah pada jenjang pendidikan dasar pada tahun 2016 tertuang pada Tabel 2.19. Rasio tingkat ketersediaan SD/MI terbanyak di Kecamatan Salem (86) dan tersedikit di Kecamatan Bulakamba (42). Pada tingkat SMP/MTs, rasio ketersediaan sekolah terbanyak di Kecamatan Salem (47) dan terendah di Kecamatan Wanasari (14).

Rasio ketersediaan sekolah sebaran kecamatan hendaknya dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengalokasikan program pembangunan sekolah/ruang kelas baru dimana wilayah kecamatan dengan rasio rendah (kurang dari 50%) menjadi prioritas program. Perhatian yang lebih besar supaya diberikan kepada program pembangunan gedung/ruang kelas baru di jenjang SMP/MTs untuk mendukung tercapainya program wajib belajar 9 tahun yang belum tercapai.

Tabel 2.22.
Rasio Ketersediaan Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar Berdasarkan
Kecamatan Kabupaten Brebes Tahun 2016

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah sekolah	Jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun*	Rasio sekolah/ 10 rb pddk usia 7-12 thn	Jumlah sekolah	Jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun*	Rasio sekolah/10 rb pddk usia 13-15 thn
1	Salem	53	6.150	86	14	2.965	47
2	Bantarkawung	71	10.326	69	17	4.821	35
3	Bumiayu	76	11.098	68	24	5.854	41
4	Paguyangan	64	11.352	56	15	5.686	26
5	Sirampog	47	7.572	62	20	4.599	43
6	Tonjong	60	7.295	82	14	3.917	36
7	Larangan	77	14.721	52	16	7.305	22
8	Ketanggungan	74	14.341	52	16	7.488	21
9	Banjarharjo	72	11.962	60	12	6.212	19
10	Losari	72	13.957	52	11	6.916	16
11	Tanjung	51	10.685	48	10	5.640	18
12	Kersana	40	6.615	60	6	3.276	18
13	Bulakamba	77	18.345	42	21	9.747	22
14	Wanasari	74	16.106	46	12	8.453	14
15	Songgom	47	7.499	63	12	4.530	26
16	Jatibarang	50	8.595	58	7	4.428	16
17	Brebes	98	17.462	56	16	8.853	18
Jumlah		1.103	194.081	57	243	100.690	24

Sumber: Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, Dinas Dukcapil Kabupaten Brebes, 2017 (diolah)

Keterangan: *)angka sementara

3. Rasio Guru Terhadap Murid

Rasio guru dan murid menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar serta melihat mutu pengajaran di kelas. Semakin tinggi nilai rasio berarti semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid, sehingga dapat mempengaruhi mutu pengajaran. Rasio guru dan murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan jumlah tenaga pengajar. Tabel 2.19 menyajikan rasio jumlah guru dan murid di Kabupaten Brebes pada jenjang pendidikan dasar.

Tabel 2.23.
Rasio Guru/Murid Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Brebes
Tahun 2012 – 2016

No	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
1.	SD/MI					
1.1	Jumlah Guru	10.171	10.045	10.026	9.852	9.735
1.2	Jumlah Murid	209.192	203.650	202.876	198.857	193.020
1.3	Rasio Guru/ Murid	1 : 21	1 : 20	1 : 20	1 : 20	1 : 20
2.	SMP/MTs					
2.1	Jumlah Guru	5.107	5.338	5.668	5.750	5.727
2.2	Jumlah Murid	84.539	88.243	90.994	89.342	88.129
2.3	Rasio Guru/ Murid	1 : 17	1 : 17	1 : 16	1 : 16	1 : 15

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kantor Kemenag Kab.Brebes, 2017 (diolah)

4. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

PAUD merupakan upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir hingga usia enam tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. APK Kabupaten Brebes pada jenjang pendidikan usia dini pada tahun 2015 sebesar 73,32%, meningkat dibandingkan APK tahun 2014 sebesar 60,87%. Perkembangan ini cukup signifikan, menandakan bahwa kesadaran masyarakat untuk memberikan pendidikan sejak usia dini semakin meningkat. Rasio ketersediaan sekolah di jenjang pendidikan usia dini dapat dilihat pada Tabel 2.21, dimana tingkat ketersediaan sekolah per 10.000 penduduk usia 4-6 tahun sebesar 58. Rasio guru murid pada jenjang pendidikan anak usia dini (TK) dapat dilihat pada Tabel 2.22, dimana rasio guru murid di jenjang TK besarnya sama yaitu 1 : 18.

Tabel 2.24.
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Jenjang Pendidikan Usia Dini (TK) di Kabupaten Brebes
Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Sekolah	N/A	N/A	492	497	538
2.	Jumlah Penduduk Usia TK (4-6 tahun)	N/A	N/A	94.173*	95.554*	92.001
3.	Rasio sekolah/10.000 pddk usia 4-6 tahun	N/A	N/A	52	52	58

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes, 2017 (diolah)

*Keterangan: *) angka proyeksi*

Tabel 2.25.
Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Usia Dini (TK)
di Kabupaten Brebes Tahun 2014-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Guru	N/A	N/A	1.485	1.520	1.416
2	Jumlah Murid	N/A	N/A	21.177	21.925	25.932
3	Rasio Guru/Murid	N/A	N/A	1 : 14	1 : 14	1 : 18

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes, 2017 (diolah)

5. Fasilitas Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Brebes didukung oleh ketersediaan fasilitas pendidikan sejak tingkat pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi. Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Brebes tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah, tetapi pihak swasta pun ikut berperan serta didalamnya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya sekolah yang diselenggarakan oleh swasta dari jenjang pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi. Peran swasta terutama mendominasi dalam penyelenggaraan pendidikan di lingkungan kementerian agama/non umum (sejak RA/ABA sampai dengan MA), sekolah kejuruan (SMK) dan perguruan tinggi.

Tabel 2.26.
Jumlah Sarana Pendidikan di Kabupaten Brebes
Tahun 2012 – 2016

Tingkat Pendidikan	2012		2013		2014		2015		2016	
	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S
TK/RA/ABA	3	476	5	486	5	492	3	521	3	535
SDLB	1	-	1	-	1	-	1	-	1	1
SD	874	14	874	15	872	17	872	17	872	21
MI	7	195	7	196	7	203	7	203	7	203
SMP	80	48	78	49	87	58	82	60	81	65
MTs	4	88	4	90	4	92	4	92	4	93
SMA	17	15	17	15	17	15	17	15	17	15
SMK	4	54	4	54	4	69	4	77	6	85
MA	2	23	2	24	2	25	2	25	2	26
PT/Akademi	-	6	-	7	-	6	-	6	-	6

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kemenag Kab.Brebes; PT/Akademi di Brebes, 2017

Keterangan: N : Negeri, S: Swasta

Kelayakan fasilitas pendidikan sampai dengan tahun 2015 pada jenjang pendidikan usia dini sebanyak 92,82%, pendidikan dasar SD/MI 78,29% dan SMP/MTs 94,12%, pendidikan menengah dan kejuruan sebanyak 96,61%. Dari data tersebut nampak bahwa, pada jenjang pendidikan dasar

terutama SD negeri masih memerlukan prioritas penanganan berupa perbaikan fasilitas gedung sekolah. Sedangkan untuk fasilitas pendidikan di jenjang pendidikan usia dini, SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat tingkat kelayakannya masih cukup tinggi.

2. Kesehatan

Pelayanan kesehatan berperan penting dalam menentukan kualitas SDM di suatu daerah. Semakin baik pelayanan kesehatan dan keterjangkauan masyarakat dalam memanfaatkan sarana kesehatan yang disediakan akan berdampak pada peningkatan kualitas SDM di suatu daerah. Kinerja pelayanan kesehatan masyarakat dapat dinilai dari ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan yang tersedia, akses masyarakat dalam memanfaatkan semua fasilitas kesehatan di suatu daerah serta sistem pelayanan kesehatan yang baik. Hasil dari kinerja pelayanan kesehatan yang baik akan mendorong derajat kesehatan penduduk yang semakin baik dan akan bermuara kepada angka harapan hidup yang semakin baik.

a. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Brebes terdiri dari fasilitas pelayanan kesehatan dasar yaitu Puskesmas dan jaringannya dan fasilitas kesehatan rujukan. Disamping pelayanan kesehatan oleh Pemerintah, partisipasi sektor swasta juga semakin meningkat terutama dalam pelayanan kesehatan rujukan. Fasilitas pelayanan kesehatan mulai dari Puskesmas Induk, Pustu, PKD, BP swasta, RS Khusus, Rumah Bersalin, RSUD Pemerintah dan RSUD Swasta.

Tabel 2.27.

Sarana Kesehatan Kabupaten Brebes Tahun 2012 – 2016

No	Jenis Sarana (unit)	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Posyandu	1.673	1.731	1.789	1.759	1.770
2.	Polindes	222	230	228	232	232
3.	Puskesmas					
	- Induk	38	38	38	38	38
	- Pembantu	59	59	60	60	60
	- Keliling	52	56	56	56	56
	- Poliklinik	222	230	228	232	232
4.	RSUD					
	- Tipe B	-	1	1	1	1
	- Tipe C	1	-	-	-	-
	- Tipe D	-	1	1	1	1
5.	Rumah Sakit Swasta					
	- Tipe C	1	1	1	1	1
	- Tipe D	5	6	6	6	6

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Brebes, 2017

b. Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Brebes pada tahun 2016 terdiri dari tenaga medis dan paramedis. Tingkat ketersediaan tenaga kesehatan dibanding dengan kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar Kementerian Kesehatan dapat dilihat pada Tabel 2.25. Dari angka yang diperoleh, sesungguhnya ketersediaan tenaga kesehatan di Kabupaten Brebes masih sangat kurang.

Tabel 2.28.
Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan di Kabupaten Brebes
Tahun 2012 – 2016

Tenaga Kesehatan	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Dokter Umum	125	165	69	78	79
Dokter Spesialis	25	23	23	23	23
Dokter Gigi	16	10	10	12	13
Perawat	571	217	218	271	534
Bidan	670	620	624	616	756
Ahli Penyehatan Lingkungan	31	30	28	32	41
Ahli Kesehatan masy.	31	4	5	5	12
Apoteker	66	10	10	11	11
Ahli Gizi	43	33	35	33	33
Analisis Laboratorium	47	20	21	22	22
Ahli Rontgen	15	2	4	3	3
Bidan Desa	455	448	452	441	441

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Brebes, 2017

c. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit

Acute Flacid Paralysis (AFP) adalah semua anak berusia kurang dari 15 tahun dengan kelumpuhan yang sifatnya *flacid* (layuh) terjadi secara akut (mendadak) dan bukan disebabkan oleh rudapaksa. Kasus AFP non polio adalah kasus AFP yang pada pemeriksaan spesimennya tidak ditemukan virus polio liar atau AFP yang ditetapkan oleh tim ahli sebagai kasus AFP non polio dengan kriteria tertentu.

Penemuan pasien baru TB BTA positif adalah penemuan pasien TB melalui pemeriksaan dahak sewaktu pagi dan sewaktu (SPS) dan diobati di unit pelayanan kesehatan dalam suatu wilayah kerja pada waktu tertentu. Pasien baru adalah pasien yang belum pernah diobati dengan OAT atau sudah pernah menelan OAT kurang dari satu bulan (30 dosis) harian. Diobati adalah pemberian pengobatan pada pasien TB BTA positif dengan OAT selama 6 bulan.

Demam Berdarah *Dengue* (DBD) adalah penyakit yang ditandai dengan panas mendadak berlangsung terus menerus selama 2-7 hari tanpa sebab yang jelas, tanda-tanda perdarahan (sekurang-kurangnya uji Torniquet positif) yang disertai dengan pembesaran hati (hepatomegali), trombosit $\leq 100.000/\mu\text{l}$ dan peningkatan hematokrit $\geq 20\%$.

Tabel 2.29.
Perkembangan Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit
Kabupaten Brebes Tahun 2012 – 2016

No	Jenis Penyakit	2012	2013	2014	2015	2016
1.	TBC BTA					
	1. Jumlah penderita baru TBC BTA yang ditemukan dan diobati.	914	1.042	817	421	342
	2. Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA.	1.857	1.751	1.925	2.484	1.487
2.	Demam Berdarah Dengue					
	1. Jumlah penderita baru DBD yang ditemukan dan diobati.	205	662	464	630	1.052
	2. Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA.	205	662	464	630	1.052
3.	Acute Flacid Paraly					
	1. Jumlah penderita baru AFP yang ditemukan dan diobati.	13	8	10	12	10
	2. Jumlah perkiraan penderita baru AFP.	13	8	10	12	10
4.	Penyakit lainnya					
	1. Jumlah penderita baru penyakit lainnya yang ditemukan dan diobati.	-	-	-	-	-
	2. Jumlah perkiraan penderita baru penyakit lainnya.	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Brebes, 2017

Perkembangan penyakit AFP, TB BTA dan DBD di Kabupaten Brebes cenderung menurun. Untuk kasus AFP, pada tahun 2012 menurun dari 914 orang menjadi 342 orang oada tahun 2016. Sedangkan untuk kasus Demam Berdarah Dengue cenderung fluktuatif. Pada tahun 2012 jumlah penderita DBD dilaporkan 205 orang, dan meningkat pada tahun 2013 yaitu 662 orang. Kemudian menurun pada tahun 2014 menjadi 464 orang penderita dan meningkat kembali tahun 2015 yaitu 630 orang penderita, dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 1.052 orang penderita. Penyakit Acute Flacid Paral, pada tahun 2012 dilaporkan 13 orang penderita dan jumlah tersebut menurun menjadi 6 orang penderita pada tahun 2016.

d. Status Gizi Ibu Hamil dan Balita

Status gizi sangat berpengaruh terhadap derajat kesehatan penduduk terutama bagi ibu hamil dan balita. Ibu hamil dengan status gizi buruk dapat memicu meningkatnya AKI dan AKB. Demikian pula status gizi balita yang buruk dapat menyebabkan penyakit akibat kekurangan gizi dan meningkatkan angka kematian balita. Tahun 2015 terdapat kasus kurang gizi pada ibu hamil dan balita sebanyak 2.612 jiwa. Angka ini mengalami penurunan yang cukup berarti dibandingkan dengan kondisi tahun 2014 yang mencapai 3.079 jiwa. Jumlah balita kurang gizi pada tahun 2015 sebanyak 992 jiwa dan balita gizi buruk 368 jiwa. Dibandingkan angka tahun 2014, mengalami penurunan cukup berarti. Jumlah balita kurang gizi dan gizi buruk pada tahun 2014 sebanyak 2.679 jiwa dan 419 jiwa.

Berdasarkan hasil pemantauan status gizi pada tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Kemenkes, jumlah balita stunting (kekurangan gizi yang ditandai tubuh pendek) di Kabupaten Brebes adalah sebesar 28,5%, di atas batas standar WHO sebesar 20%. Untuk itu, perlu penanganan yang holistik untuk mengatasi masalah stunting ini.

Permasalahan gizi kurang dan gizi buruk memerlukan penanganan yang menyeluruh. Tidak hanya memperhatikan cara-cara penanganan yang bersifat kuratif, tapi juga penanganan preventif melalui gerakan penyadaran kepada masyarakat agar sadar gizi. Pendampingan ibu dalam mengelola kehamilan dan pola pengasuhan balita perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui lembaga/mitra kesehatan di desa seperti PKD, Posyandu dan kader yang jumlahnya sudah cukup memadai.

e. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin.

Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin adalah jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata pertama di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu. Sedangkan sarana kesehatan strata pertama adalah tempat pelayanan kesehatan yang meliputi antara lain puskesmas, balai pengobatan pemerintah dan swasta, praktek bersama dan perorangan.

Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strategis dalam kurun waktu 2012 – 2016 tercatat meningkat. Pada Tahun 2012, data Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes sebesar 32.505 orang dan meningkat pada tahun 2016 (semester 1) menjadi 275.433 orang. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin pada tahun 2012 sebesar 50,25% dan meningkat menjadi 50,32%. Walaupun pada tahun 2014 menurun yaitu menjadi sebesar 18,16%. Perkembangan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin dapat dilihat pada Tabel 2.30.

Tabel 2.30.

**Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin
Di Kabupaten Brebes Tahun 2012 – 2016**

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strategis (orang)	32.505	49.403	194	550.865	683.832
2.	Pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin (%)	50,25	62,53	18,16	50,32	63

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Brebes, 2017

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum yang harus ditangani sesuai kewenangan Kabupaten meliputi sumber daya air, air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi, dan penataan ruang.

a. Sumber Daya Air

Sumberdaya air di Kabupaten Brebes disuplai dari berbagai sumber, mulai dari mata air, sungai, bendungan, air tanah, air permukaan dan cekungan air tanah baik alam maupun buatan dan air laut. Pemanfaatan sumberdaya air adalah utamanya untuk air baku yang dimanfaatkan untuk irigasi, air bersih dan air minum. Jumlah infrastruktur sumberdaya air diantaranya bangunan bendungan (Malahayu dan Penjalin) dengan luas 700 ha dan embung 98 buah.

Daerah irigasi (DI) di Kabupaten Brebes sebanyak 461 DI dengan cakupan layanan 67.283 ha terdiri dari 2 DI menjadi kewenangan Kementerian PU dengan cakupan layanan 39.810 ha, kewenangan pemerintah provinsi 1 DI dengan cakupan layanan 1.742 ha dan kewenangan pemerintah kabupaten 458 DI dengan cakupan layanan 25.731 ha. Jaringan irigasi teknis terdiri atas 3 jenis yaitu primer (16.162 meter), sekunder (417.329 meter) dan tersier (39.400 meter) dengan luas irigasi mencapai 65.560 ha. Jaringan irigasi setengah teknis dengan kapasitas sawah terairi seluas 10.897 ha dan jaringan irigasi sederhana dengan kapasitas sawah terairi seluas 7.321 ha. Berikut jenis prasarana irigasi atau pengairan yang ada di Kabupaten Brebes.

Tabel 2.31.
Jenis Prasarana Irigasi/Pengairan di Kabupaten Brebes
Tahun 2013 - 2016

No	Jenis Prasarana	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Irigasi Non Teknis (meter)	17.091	17.091	17.091	17.091	17.091
2.	Irigasi Teknis (m)					
	- Primer	16.162	16.162	16.162	16.162	16.162
	- Sekunder	417.329	417.329	452.390	452.390	452.390
	- Tersier	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
3.	Luas irigasi (m ²)	67.283	67.283	67.283	67.283	67.283
4.	Luas irigasi dalam kondisi baik (m ²)	29.450	30.750	31.345	32.650	33.850
5.	Luas sawah non irigasi (m ²)	17.091	17.091	17.091	17.091	17.091

Sumber: Dinas ESDM Kabupaten Brebes, 2017

b. Persampahan

Dalam rangka penyehatan lingkungan permukiman yang berkelanjutan, perlu dilakukan pengembangan sistem pengelolaan persampahan yang ramah lingkungan. Permukiman yang sehat dengan lingkungan yang bersih sangat diperlukan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia sehingga masyarakat dapat menjadi lebih produktif.

Jumlah tempat pembuangan sampah dari tahun 2012 sampai 2016 sebanyak 36 unit. Untuk jumlah daya tampung TPS menurun walaupun tidak terlalu besar, sedangkan tempat pengolahan sampah terpadu sebanyak 10 unit. Volume sampah yang diangkut dari jumlah sampah yang dihasilkan semakin meningkat, namun masih jauh dari ideal. Pada tahun 2012 jumlah sampah yang dihasilkan 4.371 m³/hari dan diangkut ke TPA sejumlah 120 m³/hari (2,75%), dan pada 2017 dari sampah yang dihasilkan sejumlah 4.497 m³/hari diangkut ke TPA sejumlah 581 m³/hari (12,92%), masih perlu kerja keras untuk penanganan persampahan dengan teknologi atau membangun TPA baru.

Tabel 2.32.
Persampahan di Kabupaten Brebes Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah TPS	Unit	36	36	36	38	36	36
2.	Jumlah Daya Tampung TPS	ton/m ³	2.093	2.093	2.079	2.079	2.079	2.079
3.	Tempat Pembuangan Akhir	Unit	2	2	2	2	2	2

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
4.	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu	Unit	10	10	10	10	10	10
5.	Volume sampah yang diangkut	M ³ /hari	120	172	242	349	559	581
6.	Jumlah sampah	M ³ /hari	4.371	4.411	4.433	4.453	4.472	4.497

Sumber: DLHPS Kabupaten Brebes, 2018

c. Jalan

Panjang jalan di Kabupaten Brebes sampai dengan tahun 2017 terdiri dari jalan nasional 96,24 km, jalan provinsi 149,26 km, jalan kabupaten 710,19 km, jalan desa 1.705,35 km dan jalan tol 33,18 km. Kondisi panjang jalan berdasarkan kondisi di Kabupaten Brebes sebagai berikut.

Tabel 2.33.
Kondisi Panjang Jalan Menurut Tingkat Kerusakan
Di Kabupaten Brebes Tahun 2012 - 2017

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (km) / Tahun											
		2012	%	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%
1.	Baik	496.42	55	485.21	53	497.7	55	638.32	66	730.00	76	577.73	60
2.	Sedang	215.58	24	151.43	17	94.69	10	70.44	7	49.87	5	136.31	14
3.	Rusak Ringan	129.69	14	141.16	16	150.81	17	84.34	9	97.36	10	115.80	12
4.	Rusak Berat	67.48	7	131.37	14	165.98	18	169.43	18	78.36	8	125.75	13
	Jumlah	909.17	100	909.17	100	909.18	100	962.53	100	955.59	100	955.59	100

Sumber: DPU Kabupaten Brebes, 2017

Tabel 2.34.
Kondisi Jalan Menurut Jenis Permukaan di Kabupaten Brebes
Tahun 2012 - 2017

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (km) / Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Aspal	954,47	1.004,89	1.019,16	1.097,56	1.168,80	1.474,16
2.	Berbatu	767,14	634,75	596,64	548,86	506,46	69,29
3.	Hotmix	314,3	457,68	530,38	556,85	581,48	592,13
4.	Cor beton	12,98	12,98	40,29	169,52	234,20	474,87
5.	Kerikil	152,35	126,75	95,68	72,50	51,72	35,70
6.	Tanah	426,26	390,45	345,35	255,76	151,56	48,07

Sumber: DPU Kabupaten Brebes, 2017

Jumlah jembatan yang ada di Kabupaten Brebes pada ruas jalan kabupaten sampai dengan tahun 2017 sebanyak 518 buah dengan panjang 6.367,7 meter dan sebagian besar dalam kondisi baik. Gambaran jaringan jembatan yang ada di Kabupaten Brebes sebagai berikut.

Tabel 2.35.**Kondisi Jembatan di Kabupaten Brebes Tahun 2012 - 2017**

No	Uraian	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Panjang (m)	6.140,7	6.140,7	6.140,7	6.367,7	6.367,7	6.367,7
2.	Jumlah (buah)	504	504	504	518	518	518

Sumber: DPU Kabupaten Brebes, 2017

d. Drainase

Berdasarkan data dari DPU Taru, panjang total drainase primer di Kabupaten Brebes pada Tahun 2014 adalah 84,5 km dan kondisi tersebut tetap sampai dengan tahun 2016, terdapat diseluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Brebes. Drainase terpanjang berada di wilayah Kecamatan Brebes dengan panjang 20,14 km, dan Kecamatan Bumiayu dengan panjang 14.00 km. Drainase dalam kondisi baik sebanyak 80%. Permasalahan yang umum terjadi di sektor drainase adalah fungsinya yang tidak optimal, sehingga sering menyebabkan genangan di kawasan permukiman terutama di perkotaan Brebes pada musim hujan. Fungsi sistem jaringan drainase yang tidak optimal disebabkan oleh dimensi drainase yang belum seluruhnya memenuhi syarat, peninggian jalan raya, penyempitan dan pendangkalan drainase, drainase yang dipenuhi sampah dan sebagainya. Kondisi demikian dapat memicu timbulnya kekumuhan dan penyakit akibat sanitasi lingkungan yang buruk. Panjang dan kondisi drainase di kawasan perkotaan di Kabupaten Brebes dapat dilihat pada Tabel 2.33 dan Tabel 2.34 berikut.

Tabel 2.36.**Panjang Drainase Kawasan Kota Brebes Tahun 2012 - 2016**

No	Jenis	Panjang (km) / Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Primer	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5
2	Sekunder	48,18	48,18	48,18	48,18	48,18
3	Tersier	91,04	91,04	91,04	91,04	91,04
	Jumlah	223,72	223,72	223,72	223,72	223,72

Sumber: DPU Kabupaten Brebes, 2017

Tabel 2.37.**Kondisi Drainase Kawasan Kota Brebes Tahun 2012 - 2016**

No	Kondisi	Panjang (km)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Baik	111,86	123,05	134,23	145,42	156,60
2.	Sedang	22,37	26,85	20,13	15,66	17,90
3.	Rusak	89,49	73,83	69,35	62,64	49,22
	Jumlah	223,72	223,72	223,72	223,72	223,72

Sumber: DPU Kabupaten Brebes, 2017

e. Penataan Ruang

Aspek pelayanan umum pada urusan penataan ruang dapat diindikasikan dengan telah diterbitkannya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Brebes Tahun 2010 – 2030, yang selanjutnya dijabarkan dalam rencana rinci berupa rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten, yang akan dijadikan pedoman oleh pemerintah kabupaten dan masyarakat dalam implementasi rencana pembangunan, termasuk untuk pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya.

Adapun pelaksanaan Perda RTRW dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) yang merupakan badan *ad hoc* dalam memfasilitasi pemangku kepentingan dalam melaksanakan kebijakan penataan ruang. BKPRD bekerja terutama memberikan rekomendasi kebijakan kepada Kepala Daerah dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Agenda kegiatan BKPRD yang telah dilaksanakan cukup dinamis, pada tahun 2012 dilaksanakan 7 rakor, tahun 2013 dilaksanakan 6 rakor, tahun 2014 sebanyak 6 rakor dan tahun 2015 sebanyak 8 rakor.

Dari aspek perencanaan, sampai dengan tahun keempat pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2015, belum ada satupun Perda RDTR ditetapkan. Jumlah rancangan Perda RDTR yang sudah tersusun sebanyak 13 dari 17 kecamatan (76,47%), dan semuanya belum diajukan persetujuan substansi kepada Gubernur. Pada tahun 2015, dalam rangka mewujudkan LPPB, telah dilaksanakan audit lahan pertanian. Hasil audit ini akan digunakan sebagai bahan penetapan LPPB dan review RTRW pada tahun 2016.

Dari aspek pengendalian pemanfaatan ruang, didapatkan kasus pelanggaran tata ruang hingga tahun keempat pelaksanaan ruang (2015) terdapat 17 kasus, namun belum ada upaya penindakan yang berarti. Pelanggaran pada umumnya adalah penggunaan sempadan sungai, sempadan irigasi dan jalan untuk bangunan. Jumlah keterangan kesesuaian ruang yang ada dikeluarkan oleh DPUR tahun 2014 sebanyak 78 surat meliputi kesesuaian ruang untuk apotik/klinik, permukiman, usaha, kantor dan menara/BTS. Tahun 2015 meliputi kesesuaian ruang untuk apotik/klinik/laboratorium, permukiman, usaha, kantor/sekolah/RS, menara/BTS, Koperasi, Aset bekas milik asing/tionghoa, pembangunan jalan TOL/nasional, Depo PT KAI.

Dari aspek pelaksanaan SPM penataan ruang, yang telah dicapai 100% adalah sosialisasi RTRW dan implementasinya sampai ke tingkat desa, penyebaran Perda RTRW melalui *website bappeda.brebeskab.go.id*, pemasangan papan informasi dan pembagian serta pemasangan peta analog kecamatan di setiap kantor kecamatan. Jumlah ruang terbuka hijau perkotaan di Kabupaten Brebes sampai dengan tahun 2015 baru tercapai sebanyak 2,54 ha atau sebesar 0,26% dari rencana pembangunan 18 ha.

Terkait perijinan mendirikan bangunan, jumlah bangunan ber- IMB di Kabupaten Brebes setiap tahun mengalami perkembangan yang berfluktuasi. Pada tahun 2013 jumlah penerbitan IMB sebanyak 1.121 unit dan tahun 2015 jumlah penerbitan IMB sebanyak 816 unit. Sedangkan jumlah ijin prinsip yang dikeluarkan pada tahun 2015 sebanyak 56 unit dan ijin usaha yang dikeluarkan 1.918 unit.

4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

a. Perumahan

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, memiliki fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang, serta merupakan pengejawantahan jati diri. Kebutuhan perumahan di kawasan perkotaan cenderung meningkat dengan pesat karena semakin meningkatnya jumlah penduduk. Kebutuhan masyarakat akan perumahan dan permukiman semakin tinggi sebagai dampak dari pertumbuhan penduduk, dinamika kependudukan dan tuntutan-tuntutan sosial ekonomi yang semakin berkembang. Luas areal pemukiman di Kabupaten Brebes menurut data Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes pada Tahun 2014, untuk daerah pedesaan adalah 17.568,54 m² dan perkotaan 2.635,98 m². Sedangkan pada Tahun 2013, untuk pedesaan seluas 16.130,60 m² dan perkotaan 2.389,42 m². Artinya meningkat 8,9% untuk wilayah pedesaan dan 10,31% untuk wilayah perkotaan.

Jumlah rumah tangga yang tinggal di rumah tidak layak huni (berlantai tanah) berdasarkan SP 2010 sebanyak 101.381 dari 452.608 rumah tangga atau 22,40% dan jumlah rumah tangga yang belum memiliki tempat tinggal sendiri sebanyak 83.080 dari 452.608 rumah tangga atau 18,36%. Jumlah bantuan peningkatan kualitas RTLH selama 4 tahun (2012-2015) yang terealisasi sebanyak 12.767 unit. Dari hasil penyusunan *database* RTLH pada tahun 2012-2013 masih terdapat 56.501 RTLH yang perlu mendapatkan program peningkatan kualitas. Jumlah RTLH yang mendapatkan penanganan tahun 2013 – 2015 total sebanyak 7.688 unit, sampai dengan awal tahun 2016 diperkirakan masih terdapat RTLH sekitar 48.813 unit.

Jumlah RTLH yang cukup tinggi ikut andil dalam menyumbang kekumuhan kawasan permukiman. Luas kawasan kumuh yang telah teridentifikasi 94,84 ha. Untuk pemukiman yang termasuk dalam kategori berbahaya atau pemukiman di bawah SUTET, menurut data dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes pada Tahun 2016 (semester 1) ada 5.076 jiwa atau 846 Kepala Keluarga.

Untuk memenuhi kebutuhan *backlog* perumahan, sudah banyak pengembang yang masuk ke Kabupaten Brebes (kurang lebih 17 pengembang) namun tidak serta merta menyelesaikan pemenuhan kebutuhan perumahan terutama bagi MBR karena harga rumah yang tidak terjangkau oleh MBR.

Pada tahun 2015, data real estate di Kabupaten Brebes mencapai 49 unit klaster tersebar hampir di seluruh wilayah kecamatan, dengan jumlah terbanyak berada di Kecamatan Brebes yang mencapai 18 klaster. Backlog perumahan pada tahun 2015 (data DPUTR) sebesar 65.702 unit rumah (14,38%) atau jumlahnya menurun sebesar 3,98% dibandingkan kondisi backlog perumahan hasil SP 2010. Pada tahun 2016 jumlah kawasan pemukiman/*real estate* yang tercatat sejumlah 49 kawasan, dengan sebaran paling tinggi ada di Kecamatan Brebes yaitu sejumlah 18 kawasan. Penyediaan perumahan oleh real estate sebanyak 238 unit, sedangkan pembangunan oleh perorangan sebanyak 190 unit.

b. Akses Air Minum

Layanan air minum di Kabupaten Brebes terbagi menjadi 2 yaitu layanan air minum perkotaan (oleh PDAM) dan perdesaan (oleh masyarakat). Akses air minum tahun 2015 sebesar 87,22% terdiri dari layanan perpipaan sebesar 25,96% dan non perpipaan sebesar 61,25%. Akses air minum perdesaan sebesar 87,29% terdiri dari akses terhadap jaringan perpipaan sebesar 15,39% dan akses terhadap jaringan non perpipaan sebesar 86,58%. Akses air minum perdesaan melalui beberapa cara, yaitu secara individu (sumur, bor), badan pengelola sarana prasarana air minum di tingkat desa, komunitas/kelompok, dan lain-lain. Akses air minum perkotaan sebesar 87,12% terdiri dari akses jaringan perpipaan sebesar 63,01% dan jaringan non perpipaan sebesar 45,53,%. Jumlah pelanggan yang terlayani PDAM untuk di Kabupaten Brebes pada tahun 2015 sebanyak 22.205 pelanggan. Dari 17 kecamatan masih ada 2 (dua) kecamatan yang sampai saat ini belum terlayani PDAM yaitu Kecamatan Bulakamba dan Kecamatan Losari.

c. Akses Sanitasi

Sanitasi merupakan faktor penting yang cukup menentukan dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan kesehatan. Derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh kondisi kesehatan lingkungan karena banyak penyakit yang timbul akibat dari kesehatan lingkungan yang buruk. Akses sanitasi (jamban) yang layak dan berkelanjutan di Kabupaten Brebes sampai dengan tahun 2016 tercapai sebesar 62,58 %. Meningkat dari tahun 2012 sebanak 45%, peningkatan sejumlah 17,58%. Sedangkan untuk persentase rumah tangga mengakses air bersih pada tahun 2012 sebanyak 70% menjadi 88,97 % pada tahun 2017, atau meningkat sebanyak 18,97%.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya oleh pelanggaran hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat. Perkembangan jumlah aparat yang menangani ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan kasus pelanggaran K3 dan kondisi ketertiban umum di Kabupaten Brebes disajikan pada Tabel 2.38 dan Tabel 2.39.

Tabel 2.38.

Perkembangan Jumlah Aparat Pamong Praja, Jumlah Aparat Linmas dan Jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 Dalam 24 Jam di Kabupaten Brebes Tahun 2012 – 2017

No	Uraian	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Aparat PP	155	166	168	172	172	172
2.	Jumlah Aparat Linmas	9.292	9.582	9.473	9.604	9.604	9.604
3.	Jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 Dalam 24 Jam	155	166	168	172	172	172
4.	Jumlah pelanggaran K3 (kasus)	26	20	14	94	18	97

Sumber: Satpol PP Kabupaten Brebes, 2018

Tabel 2.39.

Kondisi Keamanan dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Brebes Tahun 2012 – 2017 (Kasus)

No	Kasus Kriminalitas	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah kriminalitas	322	332	240	247	230	228
2.	Pertikaian Antar Warga						
	1) Antar Etnis	-	-	-	-	-	-
	2) Antar Wilayah	1	1	1	-	-	-
	3) Antar Agama	-	-	-	-	-	-
	4) Antar Simpatisan Parpol	-	-	-	-	-	-
	5) Antar Pelajar	-	-	-	-	-	-
3.	Jumlah Unjuk Rasa	11	24	23	42	38	35

Sumber: Polres Kabupaten Brebes, 2018

6. Sosial

Pembangunan sosial dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat baik melalui kebijakan pada aspek sosial maupun aspek lainnya seperti teknologi dan sumber daya ekonomi. Target pembangunan sosial diarahkan pada pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial mencakup 2 (dua) komponen penting yaitu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Tabel 2.40.
Jumlah Penduduk Penyandang Masalah Sosial dan Penanganan PMKS
Kabupaten Brebes Tahun 2012 – 2016

No	Penduduk Penyandang Masalah Sosial dan Jumlah PMKS (jiwa/orang)	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016*
1.	Penduduk rawan sosial dan sarana					
	1) Anak jalanan	-	72	109	59	87
	2) Penderita sakit jiwa	-	649	649	616	596
	3) Gepeng	511	497	294	221	227
	4) Jumlah penderita HIV/AIDS	-	1	9	9	12
	5) Jumlah pecandu narkoba	-	23	19	55	23
	6) Sarana rehabilitasi social	-	-	-	1	1
	7) Fakir Miskin	303.031	247.080	243.448	114.133	91.702
	8) Bayi terlantar	518	452	448	147	109
	9) Anak terlantar	1.453	1.010	808	264	262
	10) Lanjut usia terlantar	5.612	4.090	3.625	1.271	1.188
	11) Komunitas adat terpencil	-	758	791	791	818
	12) Penyandang cacat	11.854	8.797	5.540	4.274	3.569
	13) Penyandang tuna netra	-	1.469	1.448	412	241
	14) Penyandang tuna rungu	-	428	418	299	291
	15) Penyandang tuna wicara	-	943	925	600	462
	16) Penyandang tuna wicara rungu	-	1.371	1.344	1.053	903
	17) Penyandang tuna daksa	-	2.726	-	908	632
	18) Penyandang tuna grahita	-	767	311	136	129
	19) Penyandang cacat jiwa	-	649	661	616	544
	20) Penyandang cacat ganda	-	444	433	250	267
	21) Pengungsi dan korban bencana	-	62	-	59	59
	22) Tuna susila	-	114	42	19	29
	23) Bekas narapidana	-	494	-	228	216
	24) Pengidap HIV/AIDS	1	1	9	9	12
	25) Korban penyalahgunaan NAPZA	-	23	22	20	23

No	Penduduk Penyandang Masalah Sosial dan Jumlah PMKS (jiwa/orang)	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016*
2.	Jumlah Panti Asuhan					
	1) Panti Asuhan Anak	-	10	11	11	11
	2) Panti Tresna Werda	1	1	1	1	1
	3) Panti Rehabilitasi	-	1	1	1	1
	4) Pusat Rehabilitasi Narkoba	-	-	-	2	2
	5) Rumah Singgah	-	-	-	1	1
3.	Jumlah PMKS					
	1) PMKS yang tertangani	-	31.527	143.899	99.544	56.491
	2) PMKS yang seharusnya menerima bantuan	-	264.481	261.208	118.407	98.836
	3) PMKS yang diberikan bantuan	-	31.527	143.899	99.544	56.491

Sumber: Dinsosnakertrans dan BNK Kabupaten Brebes, 2017

Keterangan: *) Data semester 1

Penanganan PMKS tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi. Dalam kaitan ini panti sosial milik pemerintah memiliki peran strategis sebagai ujung tombak yang bersentuhan dalam penanganan PMKS melalui sistem kelembagaan serta mendorong munculnya produk-produk operasional pelayanan kesejahteraan sosial. Penanganan PMKS di Kabupaten Brebes dalam kurun waktu Tahun 2012 – 2016 mengalami penurunan dibandingkan jumlah pada tahun tahun sebelumnya. Jumlah anak balita terlantar pada semester 1 (satu) tahun 2016 sebanyak 109 balita menurun 25,85% dibanding tahun 2015. Untuk jumlah anak terlantar tahun 2016 juga mengalami penurunan dari 264 jiwa menjadi 262 jiwa atau mengalami penurunan sebesar 0,75 %.

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Brebes selama kurun waktu 2012 – 2016 mengalami peningkatan walaupun tidak begitu signifikan dan ada yang cenderung stabil. Untuk jumlah karang taruna tetap yaitu 297 buah, untuk tenaga kesejahteraan sosial masyarakat pada tahun 2015 meningkat menjadi 1.841 orang dibandingkan 2 tahun sebelumnya yaitu 1.831 orang. Dan untuk jumlah organisasi sosial menurun pada tahun 2015 yaitu dari 29 menjadi 14 buah. Berikut gambaran perkembangan PSKS di Kabupaten Brebes Tahun 2012 – 2016.

Tabel 2.41.
Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Di Kabupaten Brebes Tahun 2012 – 2016

No	PSKS	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016*
1.	Karang Taruna	Buah	297	297	297	297	297
2.	Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM)	Orang	1.831	1.831	1.831	1.841	1.841
3.	Organisasi Sosial	Buah	29	29	29	14	14
4.	Lembaga Swadaya Masyarakat	Buah	62	74	72	72	77

Sumber: Dinsosnakertrans Kabupaten Brebes, 2017

Tingkat kesejahteraan masyarakat sangat erat kaitannya dengan kemampuan anggota masyarakat (keluarga) dalam memenuhi kebutuhannya baik itu kebutuhan dasar (primer) maupun kebutuhan sosial psikologis. Perbedaan tingkat kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut menjadi dasar penggolongan kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat (keluarga) yang terbagi 5 (lima) pentahapan yaitu Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I, Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III dan Keluarga Sejahtera III Plus .

Menurut data tahun 2016 dari Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Brebes untuk Jumlah Keluarga Pra Sejahtera mencapai 151.207 KK (27,39%), Keluarga Sejahtera tahap I sebesar 125.480 KK (22,73%), Keluarga sejahtera tahap 2 sebesar 156.317 KK (28,32%), Keluarga sejahtera tahap 3 sebesar 98.379 KK (17,82%) dan keluarga sejahtera tahap 3 plus sebesar 20.665 KK (3,74%), dengan jumlah keluarga di Kabupaten Brebes sebanyak 552.048 KK.

Tabel 2.42.
Keluarga Menurut Tingkat Kesejahteraan
Kabupaten Brebes Tahun 2012 – 2016

No	Keluarga Menurut Tingkat Kesejahteraan (KK)	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Keluarga Prasejahtera	152.205	152.369	150.262	152.908	151.207
2.	Keluarga Sejahtera Tahap 1	123.260	124.342	127.311	127.225	125.480
3.	Keluarga Sejahtera Tahap 2	142.635	145.334	148.606	157.282	156.317
4.	Keluarga Sejahtera Tahap 3	89.494	91.546	96.236	98.800	98.379
5.	Keluarga Sejahtera Tahap 3 Plus	19.681	19.896	19.485	21.370	20.665
	Jumlah	527.275	533.487	541.900	557.585	552.048

Sumber : BKBPP Kabupaten Brebes, 2017

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Ketenagakerjaan

Berdasarkan data Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Brebes diperoleh informasi bahwa jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Brebes tahun 2014 di Kabupaten Brebes mencapai 1.294.882 jiwa. Sedangkan jumlah angkatan kerja pada Tahun 2014 sebanyak 844.001 orang, meningkat daripada tahun sebelumnya yang mencapai angka 802.643 orang. Jumlah pencari kerja yang mendaftar pada tahun 2015 menunjukkan angka 12.386 orang, meningkat 31,11% dari jumlah 9.447 orang pada tahun 2014. Begitu pula dengan jumlah pencari kerja yang ditempatkan pada semester satu tahun 2016 menunjukkan angka 1.322 orang. Sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 2.746 orang.

Berdasarkan data BPS tahun 2015, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Brebes sebesar 6,49%, menurun dibandingkan tahun 2014 yang sebesar 9,53%, dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 62,81%. Sedangkan dilihat dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2012-2016 semakin meningkat, dari Rp. 775.000,- pada tahun 2012 menjadi Rp. 1.310.000,-, diharapkan dapat lebih meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Tabel 2.43.
Perkembangan Ketenagakerjaan di Kabupaten Brebes
Tahun 2012 – 2016

No	Ketenagakerjaan	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016*
1.	Penduduk 15 tahun ke atas						
	1) Menurut jenis kegiatan	Orang	1.166.871	1.246.165	1.294.882	-	-
	2) Menurut lapangan pekerjaan utama	Orang	748.905	736.795	763.581	-	-
	3) Menurut status pekerjaan utama	orang	748.905	736.795	763.581	-	-
2.	Angkatan Kerja	orang	816.021	802.643	844.001	-	-
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	8,22	9,61	9,53	6,49	N/A
4.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	64,20	73,03	65,18	62,81	N/A

No	Ketenaga- kerjaan	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016*
5.	Jumlah pencari kerja yang mendaftarkan	Orang	7.959	11.013	9.447	12.386	6.693
6.	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	orang	-	-	-	2.746	1.322
7.	Jumlah pengangguran						
	1) Pengangguran terselubung	orang	-	-	-	-	-
	2) Setengah menganggur	orang	-	-	-	-	-
	3) Pengangguran terbuka	orang	67.116	90.045	80.420	-	-
8.	Upah Minimum Kabupaten (UMK)	rupiah	775.000	859.000	1.000.000	1.166.850	1.310.000

Sumber: Dinsosnakertrans dan BPS Kabupaten Brebes, 2017

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Perlindungan anak di Kabupaten Brebes menunjukkan kinerja yang baik, terlihat dari beberapa langkah kemajuan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Brebes. Di Kabupaten Brebes telah dilakukan *Launching* Kabupaten Brebes Menuju Kabupaten Layak Anak. Telah dilaksanakan pula sosialisasi KLA ke seluruh lapisan masyarakat, dan pengembangan rintisan desa layak anak di 50 dari 297 desa intervensi kesehatan dan pendidikan. Di Kabupaten Brebes juga terdapat Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak “TIARA”.

Namun demikian bukan berarti tidak ada masalah kekerasan terhadap anak lagi. Menurut data BKBPP Kabupaten Brebes selama tahun 2015 telah terjadi 47 kasus kekerasan dalam rumah tangga, serta 9 % persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur (5 – 14 tahun). Mungkin masih banyak lagi kasus yang belum terungkap dikarenakan keengganan para korban tindak kekerasan untuk melapor karena pertimbangan antara pelaku dan korban masih ada hubungan keluarga. Perkembangan kekerasan dalam rumah tangga dari tahun 2013 semakin meningkat. Pada Tahun 2013 jumlah kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Brebes menunjukkan angka 4 kasus dan pada Tahun 2015 menjadi 47 kasus.

3. Pangan

Pembangunan pangan pada dasarnya merupakan bagian dari ketahanan bangsa. Sesuai dengan kesepakatan global yang dituangkan dalam *Millenium Development Goals* (MDGs) yang terdiri atas 8 tujuan, 18 target dan

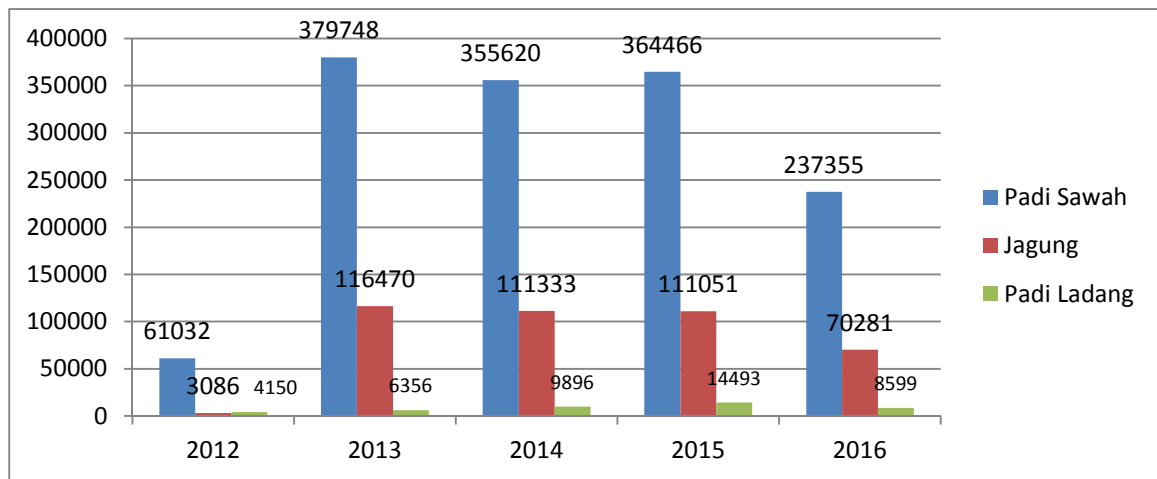
48 indikator menegaskan bahwa pada tahun 2015, setiap negara telah menurunkan kemiskinan dan kelaparan separuh dari kondisi tahun 1990. Untuk mencapai tujuan tersebut, Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi ke IX, 2008, merekomendasikan perlunya mengoptimalkan bahan pangan lokal yang memenuhi kebutuhan gizi penduduk setempat dengan mempertimbangkan keseimbangan gizi (*nutritional balance*) didukung oleh cita rasa (*palatability*), daya cerna (*digestability*), daya terima masyarakat (*acceptability*), kualitas dan kemampuan daya beli (*affordability*). Untuk menjaga ketersediaan pangan telah dilakukan upaya untuk mempertahankan luas lahan sawah sebagaimana yang tertera pada Tabel 2.44.

Tabel 2.44.
Jumlah Lahan Persawahan di Kabupaten Brebes
Tahun 2012 – 2016

No	Luas Lahan Persawahan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Sawah Irigasi	48.101	48.954	48.953	47.482	46.837
2.	Sawah Tadah Hujan / Non Irigasi	14.599	13.746	13.740	15.900	16.626
3.	Sawah Pasang Surut	-	-	-	-	-
4.	Sawah Lainnya	148	-	65	65	406

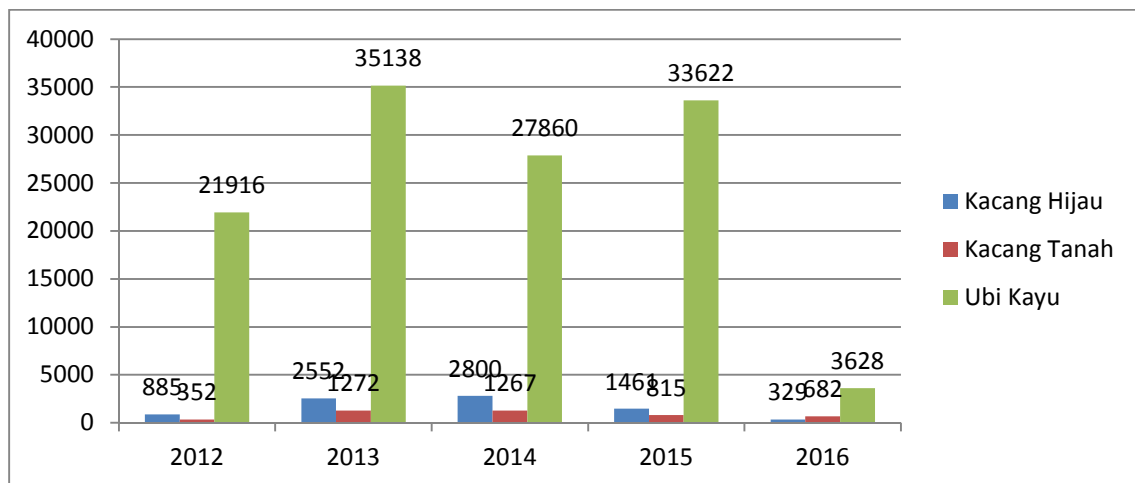
Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Brebes, 2017

Luas perubahan penggunaan lahan sawah menjadi perumahan masih menjadi yang tertinggi diantara perubahan lahan sawah menjadi industri maupun perusahaan/perkantoran. Untuk perubahan lahan sawah menjadi perumahan bersifat fluktuatif. Pada Tahun 2012 luas perubahan menjadi perumahan seluas 10,47 Ha dan pada semester 1 (satu) Tahun 2016 seluas 2,59 Ha. Akan tetapi sempat mengalami kenaikan pada Tahun 2014 yaitu 16,47 Ha dan Tahun 2015 yaitu 11,28 Ha. Sedangkan untuk perubahan lahan sawah menjadi industri terjadi pada Tahun 2014 seluas 15,97 Ha, dan perubahan lahan sawah menjadi perusahaan/perkantoran tertinggi pada Tahun 2015 yaitu 1,91 Ha. Seiring dengan peningkatan produksi bahan pangan, produksi ketersediaan komoditas pangan nabati selama Tahun 2012 – 2016 mengalami peningkatan seperti Gambar 2.21.



Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Brebes, 2016

Gambar 2.21.
Produksi Padi Sawah dan Jagung di Kabupaten Brebes
Tahun 2012 – 2016



Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Brebes, 2016

Gambar 2.22.
Produksi Kacang Hijau, Kacang Tanah dan Ubi Kayu
Kabupaten Brebes Tahun 2012 – 2016

4. Pertanahan

Pelayanan umum kepada masyarakat di urusan pertanahan, bertujuan untuk mempertahankan kelestarian lahan dan lingkungan. Pembangunan urusan pertanahan mencakup administrasi pertanahan, penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, penyelesaian konflik-konflik pertanahan, dan pengembangan sistem informasi pertanahan. Pembangunan pertanahan diarahkan untuk menjamin kepastian hukum akan penggunaan tanah untuk berbagai kepentingan, baik yang bersifat kepentingan pribadi, keperluan usaha, maupun kepentingan masyarakat umum. Perkembangan jumlah tanah yang disertifikatkan di wilayah Kabupaten Brebes menurut Data BPN Kabupaten Brebes disajikan pada Tabel 2.45.

Tabel 2.45.
Perkembangan Pertanahan di Kabupaten Brebes
Tahun 2012-2016

No	Jenis	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Bangunan/Gedung bersertifikat.					
	1) Hak Milik					
	-Jumlah (Bidang)	-	5.161	4.978	4.459	1.943
	-Luas (Ha)	-	146,68	168,01	203,96	48
	2) Hak Guna Bangunan					
	-Jumlah (Bidang)	-	625	802	204	254
	-Luas (Ha)	-	16,98	9,78	14,66	0,01
	3) Hak Pakai					
	-Jumlah (Bidang)	-	17	43	50	36
	-Luas (Ha)	-	3,36	5,11	38,64	0,58
2.	Jumlah tanah yang bersertifikat (buah)					
	1) Hak Milik	3.822	5.736	5.580	2.189	3.820
	2) Hak Guna Bangunan	186	825	802	99	254
	3) Hak Guna Usaha	-	-	-	-	-
	4) Hak Pakai	47	17	43	36	36
	5) Girik	-	-	-	-	-
3.	Bangunan / Gedung					
	1) Sertifikat Bangunan/Gedung (buah)	-	6.003	5.823	-	2.233
	2) Tanah Sertifikat (Ha)	-	167,03	182,57	-	52,92
4.	Tanah pertanian / Perkebunan / Ladang Bersertifikat					
	-Jumlah (Bidang)	-	575	608	-	1.877
	-Luas (Ha)	-	78,17	42,46	-	398,80

Sumber: BPN Kabupaten Brebes, 2017

Berdasarkan data dari Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes, tingkat kerusakan lingkungan hidup disebabkan oleh intrusi air laut mencapai 85 ha, abrasi pantai mencapai 640,45 ha, erosi 25 ha, dan banjir 70 ha, tingkat penggundulan hutan atau deforestasi mencapai 50 ha, dan area penambangan liar mencapai 27 ha. Pada tahun 2016 untuk pelestarian lingkungan hidup Pemerintah Kabupaten Brebes telah melaksanakan kegiatan reboisasi di berbagai wilayah kecamatan dengan mencapai luas 10 ha. Kemudian jumlah penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air mencapai 10 ha. Dan sebagai sarana pengendalian lingkungan, Kabupaten Brebes telah memiliki laboratorium penelitian lingkungan sebanyak 1 unit. Jumlah kawasan lindung berupa cagar alam mencapai 48,5 Ha, hutan lindung 3.821 Ha, dan taman hutan rakyat 59 buah. Berikut perkembangan jumlah

kawasan lindung, plasma nutfah dilindungi dan endemik, hutan bakau dan kerusakan lingkungan hidup.

Tabel 2.46.

**Jumlah Kawasan Lindung, Plasma Nutfah Dilindungi dan Endemik, Hutan Bakau dan Kerusakan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Brebes
Tahun 2012 – 2016**

No	Lingkungan Hidup dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016*
1.	Lingkungan Hidup					
	1) Jumlah Kawasan Lindung					
	a. Cagar Alam (Ha)	1	1	1	48,5	48,5
	b. Hutan Suaka Alam (bh)	1	1	1	-	-
	c. Hutan Lindung (Ha)	6	6	6	3.820,8	3.821
	d. Cagar Budaya (bh)	11	30	30	59	59
	2) Pencemaran Tanah (Ha)	-	-	-	12.214,9	-
	3) Plasma Nutfah Dilindungi					
	a. Hewan (jenis)	7	10	10	2	2
	b. Tumbuhan (jenis)	11	3	3	3	-
	4) Plasma Nutfah Endemik					
	a. Hewan (jenis)	-	10	10	2	2
	b. Tumbuhan (jenis)	-	3	3	-	-
	5) Kondisi Hutan Bakau (Baik/Ha)	-	-	-	1.179,01	210,28
2.	Kerusakan Lingkungan Hidup (Ha)					
	1) Intrusi Air Laut	-	-	-	85	85
	2) Abrasi Pantai	-	640,45	640,45	640,45	640,45
	3) Erosi	-	-	-	25	-
	4) Banjir	-	-	-	70	-

Sumber: Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes, 2017

5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil menjadi salah satu sasaran utama dalam pembangunan. Keberadaan penduduk yang merupakan salah satu modal utama pembangunan perlu mendapatkan perhatian agar penerapan administrasi kependudukan berjalan sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku.

Penerapan sistem informasi administrasi kependudukan seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil serta Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara

Nasional, memerlukan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang kependudukan dan catatan sipil yang baik antara Pemerintah Pusat, Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Implementasi sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) *on line* perlu mendapatkan dukungan dengan peningkatan kapasitas SDM dalam rangka pengoperasiannya termasuk pelatihan pemeliharaan peralatan jaringan SIAK *on line*.

Pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Brebes yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil antara lain pelayanan KTP, KK, Akta kelahiran, akta perkawinan dan perceraian. Pelayanan ini harus diberikan kepada semua masyarakat dan juga ada beberapa jenis pelayanan yang telah mempunyai standar pelayanan minimal (SPM) yang harus dicapai.

Persentase kepemilikan KTP pada penduduk wajib KTP mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sampai tahun 2016 data dari Dinas Dukcapil Kabupaten Brebes menunjukkan total penduduk yang wajib KTP mencapai 1.389.420 jiwa. Sedangkan kondisi pada tahun 2016, jumlah penduduk yang memiliki KTP baru mencapai 1.161.073 jiwa., yang terdiri dari laki laki 581.844 jiwa dan perempuan sebanyak 579.229 jiwa.

Meskipun sudah menerapkan penerbitan KTP berbasis NIK namun angka ini masih jauh dibawah target SPM tentang kepemilikan KTP. Pelayanan administrasi kependudukan masyarakat Kabupaten Brebes saat ini sudah dilayani di 17 unit pelayanan yang berada di semua Kecamatan. Semua unit pelayanan ini sudah terhubung secara *on line* sehingga pelayanannya diharapkan akan lebih optimal.

Tabel 2.47.

**Data Kependudukan dan Catatan Sipil
di Kabupaten Brebes Tahun 2014 - 2016**

No	Jenis Data	Tahun	
		2015	2016
1.	Jumlah Penduduk Wajib KTP	1.241.671	1.389.420
2.	Jumlah Penduduk yang memiliki KTP berdasarkan jenis kelamin		
	1) Laki-laki	165.885	581.844
	2) Perempuan	144.296	579.229
3.	Jumlah pasangan nikah berakta nikah	441.995	479.995
4.	Jumlah penduduk yang telah memiliki KK	789.622	562.789
5.	Jumlah penduduk yang telah memiliki akta kelahiran	716.644	800.152
6.	Akta kematian	-	1.052

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Brebes, 2017

6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses kegiatan pembangunan dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat desa, dengan pemberdayaan masyarakat desa diharapkan dapat terwujud masyarakat desa yang berdaya dari aspek kualitas SDM, berdaya dari aspek ekonomi dan berdaya dari aspek lingkungan yang berkualitas. Dengan 3 aspek tersebut terwujud dapat tumbuh kemandirian masyarakat desa dalam menggali potensi untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya.

Pelaksanaan pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat desa bertumpu pada beberapa tujuan yaitu: 1). meningkatkan keberdayaan masyarakat desa, 2). Mengembangkan lembaga-lembaga ekonomi desa, 3). meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana wilayah, proses kelurahan dan institusi kemasyarakatan lainnya agar mampu mengidentifikasi permasalahan dan potensi masyarakat yang ada dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik, serta mampu menjawab permasalahan yang berkembang dalam lingkungannya. 4). meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan 5). Meningkatkan peran serta perempuan kegiatan usaha ekonomi profuktif dan dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Adanya unit kegiatan ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP) dan bebrapa BKM/LKM sangat membantu dalam pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Keberadaan usaha ekonomi desa simpan pinjam dan BKM/LKM ini sangat bergantung dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang ada di Kabupaten Brebes. Berikut jumlah UED-SP dan BKM di Kabupaten Brebes Tahun 2014 dan 2015 masing – masing Kecamatan.

Tabel 2.48.
Jumlah UED-SP dan BKM Menurut Kecamatan di Kabupaten Brebes
Tahun 2014 – 2015

No	Kecamatan	UED-SP		BKM	
		2014	2015	2014	2015
1.	Salem	4	4	-	-
2.	Bantarkawung	3	3	2	2
3.	Bumiayu	2	2	-	-
4.	Paguyangan	1	1	3	3
5.	Sirampog	3	3	1	1
6.	Tonjong	3	3	2	2
7.	Larangan	1	1	-	-
8.	Ketanggungan	1	1	2	2
9.	Banjarharjo	3	3	2	2
10.	Losari	2	2	1	2

No	Kecamatan	UED-SP		BKM	
		2014	2015	2014	2015
11.	Tanjung	-	-	7	7
12.	Kersana	-	-	1	1
13.	Bulakamba	2	2	6	6
14.	Wanasari	2	2	2	2
15.	Songgom	-	-	-	-
16.	Jatibarang	1	1	2	2
17.	Brebes	-	-	-	-
	Jumlah	28	28	31	32

Sumber: BPMDK Kabupaten Brebes, 2017

Disamping itu adanya PKK dan Posyandu juga ikut membantu dalam memberdayakan masyarakat dari sisi kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Di seluruh wilayah Kabupaten Brebes pada tahun 2015 terdapat 297 PKK tingkat desa dan 17 PKK tingkat Kecamatan, sedangkan untuk kepengurusan terdapat 7.248 pengurus tingkat desa dan 427 pengurus tingkat kecamatan. Selain itu dengan adanya Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) yang berembrikan Posyandu sangat membantu Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan masyarakat. Posdaya merupakan bentukan dari mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi seperti UNSOED, STAI, STIE Mangalia, STKIP Bumiayu dll yang telah melaksanakan KKN Posdaya di di berbagai wilayah Kecamatan di Kabupaten Brebes sejak tahun 2010. Posdaya merupakan program dari yayasan Damandiri untuk pemberdayaan masyarakat yang meliputi empat pilar yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lingkungan hidup. Sampai saat ini diperkirakan sudah ratusan posdaya terbentuk, namun jumlah pasti belum bisa tercatat karena sampai saat ini belum ada SKPD yang menjadi penanggung jawab utama akan pembinaan posdaya.

7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Menurut data dari BKBPP Kabupaten Brebes selama tahun 2016 jumlah peserta program KB aktif mencapai 306.996 jiwa yang terdiri dari laki laki mencapai 8.635 jiwa sedangkan untuk perempuan 298.361 jiwa. Jumlah tersebut menurun dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 314.522 jiwa. Sedang untuk jumlah peserta akseptor KB sebanyak 53.947 jiwa yang terdiri dari laki-laki mencapai 1.808 jiwa dan perempuan mencapai 52.139 jiwa. Jumlah tersebut juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 59.630 jiwa.

Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) pada tahun 2016 sebanyak 377.653 pasang, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015 yaitu sebanyak 392.991 pasang. Sedangkan jumlah pasangan usia subur (PUS) ber KB pada tahun 2016 mencapai 306.996 pasang, menurun dibandingkan tahun 2015 yaitu sebanyak 314.522 pasang. Berikut jumlah peserta program

KB aktif, jumlah akseptor KB, jumlah pasangan usia subur dan jumlah pasangan usia subur ber KB.

Tabel 2.49.

Jumlah Peserta Program KB Aktif, Jumlah Akseptor KB, Jumlah Pasangan Usia Subur dan Jumlah Pasangan Usia Subur ber KB Di Kabupaten Brebes Tahun 2012-2016

No	Jenis		Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Peserta Program KB Aktif (jiwa)		315.003	327.775	244.024	314.522	306.996
	1)	Laki-laki	8.304	10.186	9.631	9.000	8.635
	2)	Perempuan	306.699	317.589	233.892	305.522	298.361
2.	Jumlah Akseptor KB (jiwa)		71.154	75.032	31.905	59.630	53.947
	1)	Laki-laki	3.500	3.020	1.128	2.499	1.808
	2)	Perempuan	67.654	72.012	30.777	57.131	52.139
3.	Jumlah Pasangan Usia Subur (pasang)		379.360	386.547	394.624	392.991	377.653
4.	Jumlah Pasangan Usia Subur ber KB (pasang)		315.458	327.775	315.871	314.522	306.996

Sumber : BKBPP Kabupaten Brebes, 2017

8. Perhubungan

Wilayah Kabupaten Brebes secara keseluruhan adalah daratan sehingga moda transportasi darat merupakan moda utama dalam rangka mendukung kelancaran arus lalu lintas penumpang, barang dan jasa. Kabupaten Brebes memiliki 3 terminal tipe B dan 4 terminal tipe C untuk mendukung pengaturan sarana transportasi darat khususnya jasa penumpang orang, masing masing berada di kecamatan Bumiayu, Ketanggungan, Tanjung. Dari ketiga terminal tipe B tersebut terminal Bumiayu merupakan terminal terbesar di Kabupaten Brebes yang dibangun di lintasan jalur lingkaran selatan Bumiayu. Sedangkan untuk Tipe C berada di Kec. Brebes, Kec. Banjarharjo, Kec. Jatibarang dan Kec. Larangan. Selama tahun 2015 jumlah penumpang yang dilayani melalui terminal tersebut menurut data dari Dishubkominformasi Kabupaten Brebes mencapai 1.143.067 orang. Namun pada tahun 2016 terminal tipe B menjadi 2 yaitu Bumiayu dan Tanjung.

Sebagai upaya mengatur penggunaan kendaraan terutama muatan barang dengan tonase yang melampaui beban jalan, di Kecamatan Tanjung terdapat sarana jembatan timbang. Jembatan timbang tersebut untuk

mengatur kendaraan-kendaraan muatan yang melalui jalan negara baik dari arah barat maupun timur. Disamping itu, untuk mengatur lalu lintas kendaraan yang mengangkut barang Kabupaten Brebes juga telah membangun terminal bongkar muat barang di Kecamatan Brebes yang sampai saat penggunaannya masih belum optimal. Perlu kebijakan dan regulasi tegas terhadap kendaraan-kendaraan yang khusus mengangkut barang agar pembangunan terminal barang yang telah menghabiskan dana ratusan juta dapat dimanfaatkan dan mampu memberikan *multiplier effect* khususnya bagi perbaikan perekonomian masyarakat sekitar.

Sedangkan stasiun kereta api yang berada di Kabupaten Brebes berjumlah 10 unit. Tersebar hampir di beberapa kecamatan. Berikut perkembangan jenis transportasi darat yang ada di Kabupaten Brebes yang tertuang dalam Tabel 2.50.

Tabel 2.50.
Perkembangan Pelayanan Jenis Transportasi Darat di Kabupaten Brebes
dan Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes
Tahun 2012-2017

No	Transportasi Darat	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Angkutan Darat						
	a. Kendaraan Roda 2	210.773	228.889	258.577	284.677	148.982	
	b. Kendaraan Roda 4	12.142	13.208	16.177	19.077	10.163	
	c. Jumlah Penumpang	-	-	3.852.711	1.143.067	253.987	
2.	Terminal						
	1) Kelas A	-	-	-	-	-	-
	2) Kelas B	3	3	3	3	2	2
	3) Kelas C	-	5	5	5	5	6
3.	Jumlah Jembatan Timbang	1	1	1	1	1	1
4.	Stasiun Kereta Api	-	10	10	10	10	
5.	Jumlah pemasangan rambu-rambu	-	1177	1177	1201	NA	
6.	Jumlah Trayek						
	a. Jumlah Trayek AKAP	407	407	407	407	407	526
	b. Jumlah Trayek AKDP	285	285	285	285	285	254
	c. Jumlah Trayek Angkudes	778	918	908	790	780	761
7.	Jumlah Uji KIR	6.012	6.646	7.086	7.781	8.405	8.933

Sumber: Dinhub Kabupaten Brebes, 2018

Transportasi laut di Kabupaten Brebes memiliki 2 pelabuhan yang berada di Kecamatan Bulakamba. Pelabuhan kecil yang hanya berfungsi sebagai dermaga kapal kapal nelayan ukuran kecil. Untuk membantu agar para nelayan tidak tersesat arah, beberapa lokasi di pesisir pantai utara telah dilengkapi dengan menara mercusuar. Ada 6 unit mercusuar yang tersebar di berbagai kecamatan yaitu 1 unit di Kecamatan Losari, 2 unit Kecamatan Tanjung dan 3 unit di Kec. Bulakamba. Untuk transportasi laut yang tidak diusahakan di Kabupaten Brebes terdiri dari pendaratan ikan sebanyak 1 unit yang berada di Kecamatan Bulakamba dan 456 unit kapal. Jumlah tersebut mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 tidak mengalami perubahan.

Pada tahun 2015 jumlah trayek angkutan umum sebanyak 1.674 unit, kondisi ini meningkat cukup tajam dibandingkan pada tahun 2014 yang hanya mencapai 445 unit. Sementara data jumlah ijin trayek yang dikeluarkan hanya pada tahun 2015 yaitu mencapai 283 unit dengan jumlah Uji KIR yang masuk 15.639 unit. Adapun untuk lama uji KIR adalah 1 hari kerja.

Untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas telah terpasang rambu-rambu lalu lintas di Kabupaten Brebes. Pada tahun 2015 telah terpasang 1201 unit rambu-rambu lalu lintas yang tersebar di sepanjang jalan yang ada di wilayah Kabupaten Brebes. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengamanatkan bagi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu stakeholder untuk menyediakan sarana dan prasarana LLAJ untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Pos merupakan salah satu sarana dalam komunikasi yang dari tahun ke tahun mengalami pergeseran fungsi. Dimana seiring dengan meningkatnya kemajuan teknologi, masyarakat banyak yang melakukan komunikasi melalui jaringan internet. Adapun jumlah kantor pos di Kabupaten Brebes adalah 17 unit dan tersebar di masing – masing kecamatan. Sedangkan untuk fasilitas warnet sebanyak 42 SST dan berada di Kecamatan Bumiayu, Ketanggungan, Tanjung, Bulakamba, dan Brebes.

9. Komunikasi dan Informatika

Salah satu media yang semakin mempermudah komunikasi di masyarakat adalah telepon. Kepemilikan *handphone* saat ini tidak semata mata untuk memenuhi gaya hidup namun lebih dari itu sudah merupakan suatu kebutuhan. Hampir sebagian besar keluarga pasti memiliki peralatan tersebut dengan kuantitas lebih dari satu. Data dari Dishubkominfo Kabupaten Brebes, sampai tahun 2015 untuk jaringan telekomunikasi di Kabupaten Brebes kapasitas sentral mencapai 13.548 SST, kapasitas terpasang 16.044 SST dan kapasitas terpakai 11.355 SST.

Keterbukaan informasi di bidang pemerintahan saat ini menjadi salah satu indikator dari tata pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good*

governance). Untuk menjamin ketersediaan dan kemudahan akses lembaga yakni Komisi Informasi Daerah yang mempunyai fungsi mengawal keterbukaan informasi sektor publik di daerah. Hal tersebut seperti yang diatur dalam UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam UU tersebut jelas disebutkan bahwa semua orang mempunyai hak untuk mengakses dan mendapatkan informasi publik yang tidak dikecualikan.

Pemerintah daerah juga diwajibkan untuk mencapai target-target yang ada dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Komunikasi dan informasi seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22/Per/M.Kominfo/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika Di Kabupaten/Kota, maka setiap pemerintah kabupaten/kota wajib melakukan kegiatan Diseminasi Informasi Nasional. Kegiatan Diseminasi Informasi ini harus dilakukan paling tidak 12 kali dalam satu tahun melalui media massa (cetak maupun elektronik), *website*, media tradisional (pertunjukan kesenian rakyat), media interpersonal (sarasehan, ceramah, workshop, dan lain-lain), dan melalui media luar ruang seperti brosur, spanduk baliho, dan lain-lain. Satu hal lain yang juga menjadi indikator dalam SPM bidang komunikasi dan Informasi adalah pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat kecamatan yang ada. Sampai tahun 2010 belum ada satupun kecamatan yang telah mempunyai kelompok informasi masyarakat ini, padahal menurut SPM pada tahun 2014 sekurang-kurangnya 50% dari seluruh kecamatan harus sudah memiliki KIM.

Untuk menjembatani hubungan antara pemerintah dengan masyarakat luas saat ini pemerintah Kabupaten Brebes juga telah mempunyai website resmi yaitu *www.brebeskab.go.id*. Melalui *website* ini masyarakat luas dapat memperoleh semua informasi mengenai Kabupaten Brebes yang sifatnya publik. Keberadaan website tersebut memang masih belum optimal karena belum semua SKPD yang ada mempunyai website yang resmi. Sampai tahun 2017 baru ada 22 SKPD yang mempunyai *website* resmi yang bisa diakses dari 63 SKPD yang ada di Kabupaten Brebes.

10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi memiliki peran yang penting dalam perekonomian Kabupaten Brebes. Kinerja koperasi dapat diukur dari tingkat keaktifan koperasi, dan tingkat kesehatan koperasi khususnya pada unit Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Secara umum tingkat keaktifan koperasi dipengaruhi oleh keaktifan pengurus dalam melakukan pengelolaan koperasi. Perkembangan Koperasi Unit Desa di Kabupaten Brebes secara umum tidak begitu menggembirakan. Hal ini merupakan rentetan imbas dari dicabutnya semua subsidi Pemerintah melalui kredit – kredit program untuk beberapa kegiatan seperti pengadaan pupuk, pangan dan lain lain. Untuk dapat bertahan ditengah persaingan ketat maka salah satu unit usaha yang tetap dipertahankan oleh seluruh KUD

karena dinilai mampu mendatangkan keuntungan adalah Unit Usaha Simpan Pinjam. Walaupun masih ada kegiatan lain seperti Pembayaran rening listrik, agen gas LPG, pengadaan pangan, RMU, pengadaan pupuk, waserda dan lain lain, namun tidak begitu besar karena terbatasnya modal dan banyaknya persaingan.

Jumlah koperasi yang aktif di Kabupaten Brebes dalam krun waktu 2012 – 2016 cenderung meningkat, dari 248 buah pada Tahun 2012 menjadi 285 buah pada Tahun 2016 (semester 1). Perkembangan koperasi di Kabupaten Brebes dapat dilihat pada Tabel 2.51.

Tabel 2.51.
Perkembangan Koperasi di Kabupaten Brebes
Tahun 2012 – 2017

No	Jenis Koperasi	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Koperasi aktif	248	250	260	270	284	292
2.	Koperasi tidak aktif	83	83	75	74	75	74
3.	Koperasi Induk	3	3	3	2	2	2
4.	Koperasi Primer	328	330	332	342	357	364
5.	KUD	26	26	26	26	26	27
6.	Non KUD	305	307	309	318	333	

Sumber: Dinas Kopumdag Kabupaten Brebes, 2018

Untuk jumlah pengusaha kecil di Kabupaten Brebes mengalami kenaikan yang pesat yaitu pada Tahun 2012 mencapai 2.417 orang naik menjadi 27.320 orang pada semester 1 (satu) Tahun 2016. Berbanding terbalik untuk kategori pengusaha menengah, pada Tahun 2012 mencapai 115 orang menurun menjadi 97 orang pada semester 1 (satu) Tahun 2016.

11. Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengamanatkan kepada Kabupaten/Kota dalam hal penanaman modal untuk (1) Menyusun perencanaan penanaman modal; (2) Meningkatkan fasilitasi bagi peningkatan penanaman modal di kab/kota; dan (3) Meningkatkan kinerja perijinan dan pelayanan penanaman modal. Selanjutnya dalam Perpres 27 tahun 2009 tentang Pelayanan satu Pintu Penanaman Modal mengamanatkan kepada Kabupaten/Kota untuk: (1) mengurangi hambatan dalam pelayanan Public dan perjinan usaha bagi penanaman modal di kab/kota; (2) Mekanisme pelayanan perijinan dan penanaman modal di daerah; dan (3) Mengurangi hambatan struktural dan ekonomi biaya tinggi dalam penanaman modal di daerah.

Sebagai bentuk tindak lanjut dari amanat Undang-Undang 25 tahun 2007 dan Perpres 27 tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Brebes berupaya untuk meningkatkan investasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan antara lain kegiatan promosi kerjasama investasi, meningkatkan mutu pelayanan pelayanan perizinan yang yang berorientasi pada kebutuhan klien/pemohon, meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pelayanan perizinan dan mendorong minat investor menginvestasikan usahanya di Kabupaten Brebes.

Sasaran pembangunan pada urusan penanaman modal adalah untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Brebes. Keberhasilan pembangunan di bidang penanaman modal memberikan dampak yang cukup besar terhadap pembangunan ekonomi di Kabupaten Brebes. Peningkatan jumlah investor di Kabupaten Brebes dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja serta dapat meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah. Perkembangan investasi di Kabupaten Brebes dapat dilihat pada Tabel 2.52.

Tabel 2.52.
Jumlah Proyek PMA, PMDN dan Investasi
Di Kabupaten Brebes Tahun 2012 – 2016 (Juta Rupiah)

No	Jumlah Proyek PMA dan Proyek PMDN, Investasi	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Proyek PMA					
	1) Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	-	-	1.200	59.946	59.946
	2) Pertambangan dan penggalian	-	-	-	-	-
	3) Industri pengolahan (migas dan non migas)	-	57.900	86.233	681.384	42.770
	4) Listrik, gas dan air bersih	-	-	-	-	-
	5) Bangunan	-	-	-	-	-
	6) Perdagangan, Hotel dan Restoran	-	-	29.825	-	-
	7) Pengangkutan dan Komunikasi	-	-	-	-	-
	8) Keuangan, Real Estate dan jasa Perusahaan	-	-	-	-	-
	9) Jasa-jasa				5.000	
2.	Jumlah Proyek PMDN	-				
	1) Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	-	500	36.567	14.060	81.087
	2) Pertambangan dan penggalian	-	-	500	-	-
	3) Industri pengolahan (migas dan non migas)	-	-	-	422	1.900
	4) Listrik, gas dan air bersih	-	-	2.500	3.800	1.000
	5) Bangunan	-	-	-	59.735	500
	6) Perdagangan, Hotel dan Restoran	-	56.270	389.335	38.874	28.655

No	Jumlah Proyek PMA dan Proyek PMDN, Investasi	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
	7) Pengangkutan dan Komunikasi	-	-	3.250	3.130	-
	8) Keuangan, Real Estate dan jasa Perusahaan	-	1.000	19.300	11.873	10.031
	9) Jasa-jasa	-	17.973	-	-	-
3.	Investasi					
	1) Total Investasi Pemerintah Pusat	-	82.628	97.975	1.216	1.901
	2) Total Investasi Pemerintah Daerah	-	3.250	3.500	7.271	1.000
	3) Total Investasi Swasta	-	-	-	-	-

Sumber: Bappeda Kabupaten Brebes, 2017

Dari data diatas yang diperoleh dari Bidang Penanaman Modal Bappeda Kabupaten Brebes, jumlah realisasi investasi PMA sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan pada semester I tahun 2016 tercatat Rp. 59.946.000.000,- dan sektor Industri pengolahan (migas dan non migas) tercatat Rp. 42.770.000.000,-. Sedangkan untuk realisasi Investasi PMDN sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan pada semester I tahun 2016 tercatat Rp. 81.087.000.000,-, sektor industri pengolahan (migas dan non migas) Rp. 1.900.000.000,-, Listrik, Gas, dan Air Bersih Rp. 1.000.000.000,-, Bangunan Rp. 500.000.000,-, Perdagangan, hotel dan Restoran Rp. 28.655.000.000,- dan keuangan, Real estate dan jasa perusahaan tercatat Rp. 10.031.000.000,-. Adapun total investasi Pemerintah Pusat sebanyak Rp. 1.901.000.000,- dan total investasi Pemerintah Daerah Rp. 1.000.000.000,-. Dan untuk jumlah investor berskala nasional dari PMDN jenis swasta sebanyak 53 unit. Jumlah proyek PMA dan PMDN di Kabupaten Brebes dapat dilihat pada Tabel 2.53.

Jumlah perusahaan PMA di Kabupaten Brebes selama kurun waktu 2012 – 2015 tercatat 4 perusahaan yang bergerak di bidang pembibitan dan budidaya ayam ras pedaging dan petelur, industri pembuatan sepatu, perusahaan tenaga panas bumi, industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil. Sedangkan jumlah perusahaan PMDN di Kabupaten Brebes kurun waktu 2012 -2015 tercatat 8 perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dalam kaleng dan pertanian tanaman jamur, industri pengeringan jagung dan pakan ternak, pembibitan dan budidaya ayam ras pedaging dan petelur, industri kayu lapis, industri rokok kretek, dan industri percetakan umum.

12. Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan dan pembinaan generasi muda dilakukan melalui organisasi kepemudaan yang ada. Jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Brebes pada tahun 2015 sebanyak 17 organisasi pemuda, sedangkan

organisasi pemuda dibawah koordinasi Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Brebes sebanyak 23 organisasi. Data tersebut sudah terkoreksi oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes dari data tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 324 buah organisasi. Adapun jumlah karang taruna di Kabupaten Brebes pada Tahun 2015 tercatat 297 buah yang tersebar di masing-masing kecamatan.

Pada bidang olahraga jumlah klub olahraga sampai tahun 2015 menurut data Disbudpora Kabupaten Brebes mencapai 588 klub, jumlah tersebut cenderung tetap dari tahun sebelumnya. Sarana dan prasarana olahraga masih diperlukan peningkatan baik jumlah maupun kualitasnya. Sarana olahraga yang ada di Kabupaten Brebes pada Tahun 2015 tercatat 346 unit yang tersebar di seluruh kecamatan se Kabupaten Brebes. Beberapa fasilitas olah raga lain yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes untuk mendukung berbagai aktivitas olah raga masyarakat diantaranya berupa Kolam Renang Tirta Kencana, Stadion Karang Birahi dan GOR Sasana Adhi Karsa. Berikut jumlah klub olahraga, sarana olahraga dan organisasi kepemudaan di Kabupaten Brebes.

Tabel 2.53.

Jumlah Klub Olahraga, Sarana Olahraga dan Organisasi Kepemudaan Di Kabupaten Brebes Tahun 2013 – 2015

Tahun	Jumlah Klub Olahraga	Jumlah Sarana Olahraga	Jumlah Organisasi Kepemudaan
2013	588	346	324
2014	588	346	324
2015	588	346	17

Sumber: Dinparbudpora Kabupaten Brebes, 2017

13. Statistik

Statistik menurut Undang-undang nomor 16 Tahun 2007 adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik. Dalam pemanfaatannya, statistik dibagi menjadi 3 kategori, yaitu: 1) statistik dasar, 2) statistik sektoral, 3) statistik khusus. Upaya penyediaan, penyebarluasan data serta upaya pengembangan ilmu statistik memiliki peranan yang cukup signifikan terhadap Kegiatan perencanaan pembangunan dimana keterkaitan keputusan terhadap suatu kebijakan, program, dan kegiatan sangat bergantung kepada ketersediaan data.

Beberapa dokumen statistik yang disusun oleh Badan Pusat Statistik yang bekerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Brebes antara lain, Brebes Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, PDRB, IHK dan inflasi. Adapun Pemerintah Daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) juga menyusun data statistik yaitu profil daerah yang menggambarkan capaian pembangunan berdasarkan 8 jenis kelompok data,

meliputi: 1) data umum, 2) sosial budaya, 3) sumberdaya alam, 4) infrastruktur, 5) Industri, perdagangan, lembaga keuangan, koperasi, usaha, dan investasi, 6) ekonomi dan keuangan, 7) Politik, hukum dan keamanan, serta 8) Insidensial.

Penyusunan data statistik menurut pasal 2 huruf c Undang-undang Nomor 16 tahun 2007 tentang Statistik, harus menganut asas kemutakhiran dimana dalam penjelasannya menyatakan bahwa data yang tersaji harus dapat menggambarkan fenomena dan atau perubahan menurut keadaan yang terbaru. Oleh karena itu, pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data statistik harus senantiasa diupayakan secara terus menerus, berkesinambungan, dan runtun waktu. Dalam pelaksanaannya, data statistik yang disajikan oleh pemerintah masih mengalami keterlambatan sebanyak 2 tahun dari tahun perencanaan. Disamping itu, masih terdapat *overlapping* data capaian antar institusi yang berwenang melakukan kegiatan pendataan statistik. Keadaan ini muncul akibat dari belum optimalnya koordinasi SKPD dalam menentukan kriteria serta metode pelaksanaan pengumpulan data.

Jenis data statistik yang dimiliki oleh Kabupaten Brebes dan disusun setiap tahun adalah Brebes dalam angka, Kecamatan dalam angka, PDRB, IHK dan Inflasi, dan SIPD Kabupaten Brebes. Berbagai jenis data statistik tersebut digunakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam mengkaji kemajuan pembangunan di Kabupaten Brebes dan menyusun perencanaan pembangunan.

14. Persandian

Keutuhan dan kedaulatan NKRI perlu didukung oleh sistem pengamanan informasi negara yang aman. Untuk itu sistem pengamanan dimaksud perlu ditunjang dengan sistem persandian yang memadai. Tujuan persandian di pemerintahan termasuk juga pemerintah daerah (pemda) sangat penting. Namun demikian permasalahan pengelolaan persandian berdasarkan jenis resiko dan ancaman yang dapat ditimbulkannya. Diantaranya, jenis resiko yang paling dominan yaitu ketersediaan sumber daya manusia (SDM) sandi berkualifikasi ahli sandi yang terbatas. Hal ini terjadi karena regenerasi SDM sandi kurang berjalan dengan baik, minat menjadi SDM sandi yang kurang, dan kualitas calon peserta diklat sandi yang kurang. Hal ini menyebabkan potensi ancaman berupa operasional persandian berhenti atau terganggu sementara.

Petugas persandian di Kabupaten Brebes pada Tahun 2016 masih sangat terbatas, yaitu hanya 7 orang. Jumlah tersebut belum ada yang mempunyai kualifikasi persandian. Dengan luas wilayah Kabupaten Brebes dengan 17 kecamatan dan 297 desa, artinya dengan jumlah petugas 7 orang masih sangat kurang. Untuk petugas persandian di tingkat kecamatan masih dibantu oleh petugas Satpol PP atau satpam.

15. Kebudayaan

Kabupaten Brebes dalam proses pembangunan tidak lepas dari pengaruh budaya dimana asset budaya dapat dijadikan sebagai modal dalam proses pembangunan. Kebudayaan merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur dari akal dan budaya yang melekat dalam kehidupan masyarakat sehari – hari. Akar budaya masyarakat Brebes berasal dari tradisi/adat dan agama. Letak geografis Kabupaten Brebes yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat, ikut berpengaruh terhadap berkembangnya budaya dan seni masyarakat. Kesenian merupakan salah satu peninggalan kebudayaan yang ada di Kabupaten Brebes. Kesenian yang berkembang di Kabupaten Brebes banyak dipengaruhi oleh beberapa unsur budaya daerah, seperti pengaruh budaya sunda, Banyumasan, Cirebonan dan juga pesisiran. Beberapa kesenian yang berkembang di Kabupaten Brebes antara lain, Wayang Golek, Wayang Kulit, Buroq/Orkes Melayu, Sintren, Kuda Lumping, Rebana dan Kuntulan, Singa deprok, Kuda renggong, Digul, Tek-tek, Kecapi Suling, Umbul, dan Ronggeng.

Kegiatan berkesenian di Kabupaten Brebes mengalami peningkatan, tergambarkan dari jumlah Penyelenggaraan Festival seni dan budaya, secara rutin diupayakan sebanyak 6 kali dalam satu tahun. Maksud dan tujuan dari kegiatan festival ini adalah untuk meningkatkan dan melestarikan budaya kesenian yang ada di kabupaten Brebes. Ketersediaan sarana dan prasarana berkesenian bagi masyarakat tergambarkan dari indikator jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya yang memadai. Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan daerah juga tergambarkan dengan semakin meningkatnya jumlah grup kesenian tradisional dan jumlah seniman yang ada di Kabupaten Brebes.

Tabel 2.54.

**Banyaknya Kelompok Kesenian dan Sarana Kesenian
Menurut Kecamatan di Kabupaten Brebes Tahun 2014 – 2015**

No	Kecamatan	Jumlah Kelompok Kesenian	Sarana Kesenian
1.	Salem	16	0
2.	Bantarkawung	49	0
3.	Bumiayu	107	0
4.	Paguyangan	12	1
5.	Sirampog	144	0
6.	Tonjong	26	0
7.	Larangan	40	0
8.	Ketanggungan	11	0
9.	Banjarharjo	86	0
10.	Losari	77	1
11.	Tanjung	20	0

No	Kecamatan	Jumlah Kelompok Kesenian	Sarana Kesenian
12.	Kersana	46	1
13.	Bulakamba	5	0
14.	Wanasari	24	0
15.	Songgom	8	0
16.	Jatibarang	119	0
17.	Brebes	132	0
	Jumlah 2015	922	3
	2014	922	3

Sumber: Dinparbudpora Kabupaten Brebes, 2017

Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes pada Tahun 2015 dari 922 kelompok kesenian dan 3 sarana kesenian, terdapat 77 grup kesenian yang membuat piagam pengesahan, 3 grup seni yang membuat ijin pentas dan 10 pagelaran kesenian yang dipentaskan. Agenda pagelaran seni yang diikuti oleh masyarakat Brebes diantaranya pementasan pagelaran kesenian di TMII dan pagelaran wayang kulit di RRI.

16. Perpustakaan

Perkembangan jumlah perpustakaan kurun waktu Tahun 2012 – 2016 sesuai standar sebagaimana Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan mengalami perkembangan yang fluktuatif. Demikian juga untuk jumlah koleksi perpustakaan pada kurun waktu yang sama senantiasa meningkat. Peningkatan tersebut berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan dari 11.465 orang pada Tahun 2012 menjadi 13.833 orang pada Tahun 2016. Disisi lain meningkatnya jumlah pengunjung juga dikarenakan meningkatnya minat baca masyarakat, meskipun peningkatan tersebut belum optimal jika dikaitkan dengan jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani.

Tabel 2.55.
Perkembangan Perpustakaan di Kabupaten Brebes
Tahun 2012 – 2016

No	Uraian Data	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016*
1.	Jumlah Perpustakaan					
	a. Perpustakaan Umum Kab. Brebes	1	1	1	1	1
	b. Perpustakaan Keliling	2	2	2	2	2
	c. Perpustakaan Sekolah	193	193	193	197	-
	d. Perpustakaan Desa	24	27	31	81	-

No	Uraian Data	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016*
2.	Jumlah Koleksi Perpustakaan	19.777	22.416	24.880	26.409	26.409
3.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	11.465	13.140	14.033	13.833	-

Sumber: Kantor Data, Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Brebes, 2017

Keterangan: *Data semester 1

17. Kearsipan

Pengelolaan kearsipan di lingkungan SKPD Kabupaten Brebes pada kurun waktu Tahun 2012 – 2016 sudah dilakukan secara baku dengan norma dan standar yang ada namun belum optimal. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa kendala antara lain tidak semua SKPD mempunyai tenaga arsiparis/tenaga pengelola kearsipan, belum tersedianya tempat/ruang penyimpanan arsip sesuai dengan standar sebagaimana pada Tabel 2.56.

Tabel 2.56.

Kinerja Pelayanan Kearsipan Kabupaten Brebes Tahun 2012 - 2016

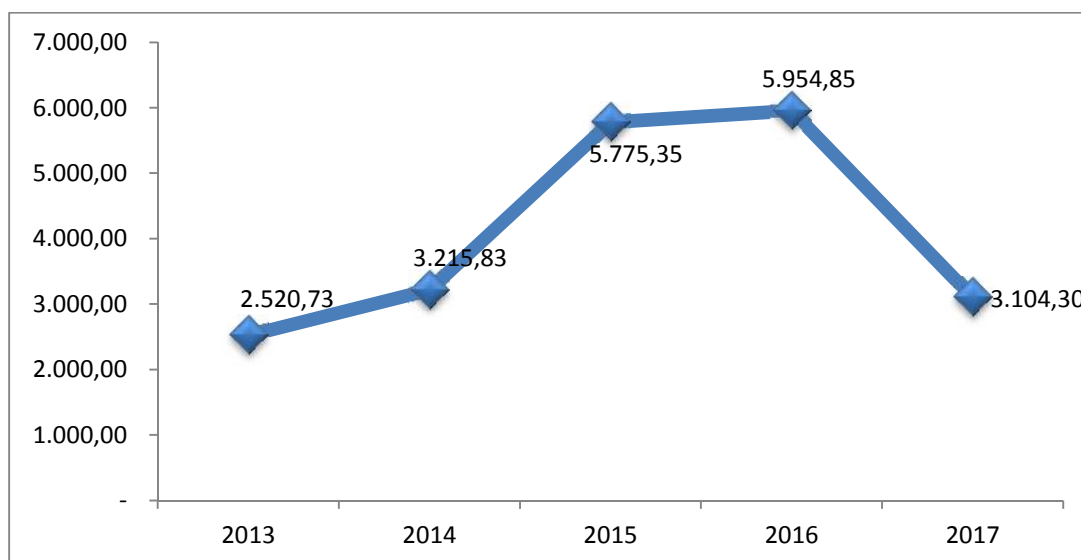
No	Uraian Data	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016*
	Kearsipan					
1.	a. SKPD	9	9	9	18	-
	b. Desa/Kelurahan	15	20	35	35	-
2.	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	50	50	50	100	-
3.	Penarikan Arsip dari Instansi Pemerintah	6	6	4	6	-
	Jumlah Arsip yang Tersimpan					
4.	a. Arsip Tekstul	5.000	12.300	17.144	26.509	-
	b. Kartografi	22	22	28	28	-
	c. Foto	121	141	161	161	-

Sumber: Kantor Data, Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Brebes, 2017

2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Brebes memiliki panjang garis pantai 55 km. Potensi perikanan laut cukup besar, yang tersebar di 5 kecamatan daerah pesisir yakni Kecamatan Brebes, Wanasari, Bulakamba, Tanjung, dan Losari. Dalam kurun waktu lima tahun jumlah tangkapan ikan meningkat dari sebanyak 2.520,73 kg pada Tahun 2013 menjadi sebanyak 3.104,30 kg. Perkembangan produksi perikanan tangkap dapat dilihat pada Gambar 2.23.

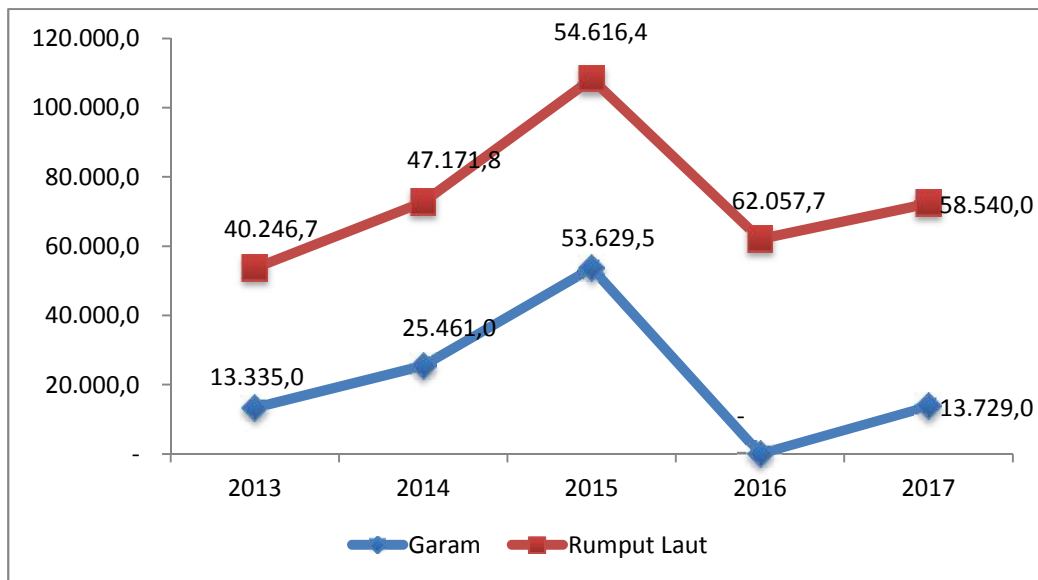


Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Brebes, 2017

Gambar 2.23.
Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Brebes
Tahun 2012-2016 (Ton)

Sedangkan untuk perikanan tambak dengan luas areal 12.748 Ha mencakup udang windu dengan produksi 880,3 ton pada Tahun 2013 dan produksinya semakin menurun pada semester 1 (satu) Tahun 2016 sebesar 192,18 ton. Produksi udang pada Tahun 2013 sebanyak 492,71 ton dan meningkat pada semester 1 Tahun 2016 yakni sebesar 703,55 ton. Ikan patin sebanyak 19,58 ton pada Tahun 2013 menurun menjadi 3,26 ton pada semester 1 Tahun 2016. Sedangkan produksi ikan bandeng meningkat dari 27.050,37 ton pada Tahun 2013 menjadi 55.950,86 ton pada Tahun 2015.

Selain produksi ikan, Kabupaten Brebes juga mempunyai produk unggulan dari hasil laut lainnya seperti garam dan rumput laut. Produksi garam di Kabupaten Brebes pada Tahun 2013 sebanyak 13.335 ton. Jumlah ini semakin meningkat menjadi 13.729 ton. Sedangkan untuk rumput laut, jumlah produksi pada Tahun 2013 sebanyak 40.246,79 ton dan meningkat menjadi 58.540,06 ton pada Tahun 2017. Berikut perkembangan produksi garam dan rumput laut di Kabupaten Brebes.



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Brebes, 2017

Gambar 2.24.

**Produksi Garam dan Rumput Laut di Kabupaten Brebes
Tahun 2012 – 2015 (Ton)**

2. Pariwisata

Perkembangan jumlah objek wisata di Kabupaten Brebes cenderung stabil, terdiri dari wisata marina sebanyak 1 buah, wisata tirta dari 4 buah pada Tahun 2013 meningkat pada Tahun 2016 menjadi 10 buah, wisata sejarah baru ada pada Tahun 2016 sebanyak 4 buah, dan suaka alam sebanyak 1 buah. Sehubungan wisata di Kabupaten Brebes belum berkembang dengan baik maka sangat berpengaruh terhadap jumlah kunjungan wisatawan dan juga masih belum dikenal oleh wisatawan mancanegara. Jumlah wisatawan domestic sebanyak 129.239 orang pada Tahun 2012 dan meningkat pada Tahun 2015 yaitu 339.679 orang.

Jumlah kunjungan wisata tersebut akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Brebes. Dari 6 obyek wisata yang ada di Kabupaten Brebes, jumlah pendapatan yang diperoleh pemerintah Kabupaten Brebes pada Tahun 2012 sebesar Rp. 506.327.630,- dan meningkat 23,15% atau sebesar Rp. 623.537.420,-.

Tabel 2.57.
Jumlah Obyek Wisata, Pengunjung dan Pendapatan di Kabupaten Brebes
Tahun 2012 – 2015

No	Nama Obyek Wisata	Jumlah Pengunjung (org)	Jumlah Pendapatan Penjualan (Rp)	Jumlah Pendapatan lain-lain (Rp)
1.	Pantai Randusanga Indah	62.582	180.025.000	314.740.000
2.	Kolam Renang Tirta Kencana	37.392	186.960.000	20.490.000
3.	Waduk Malahayu Banjarharjo	46.824	128.010.000	75.127.000
4.	Pemandian Air Panas Tirta Husada	25.671	111.197.000	39.674.000
5.	Pemandian Air Panas Cipanas Buaran	28.227	105.273.000	15.862.000
6.	Agrowisata Kaligua Paguyangan	138.983	125.176.930	-
	Jumlah 2015	339.679	836.641.930	465.893.000
	2014	281.888	623.537.420	282.172.500
	2013	266.105	573.419.480	220.360.000
	2012	253.116	506.327.630	164.879.000

Sumber: Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga Kab. Brebes, 2017

Dengan promosi yang gencar dan upaya kelompok masyarakat, beberapa tahun terakhir ini geliat pariwisata di Kabupaten Brebes semakin berkembang terutama wisata alam seperti Telaga Renjeng, di Kecamatan Paguyangan, Waduk Penjalin, di Kecamatan Paguyangan, Waduk Malahayu dan Bukit Cawiri di Kecamatan Banjarharjo, Bukit Panenjoan dan Body Rafting Ranto Canyon di Kecamatan Salem, Wana wisata Kalibaya dan Wana Wisata Panenjoan di Kecamatan Salem, Air Terjun Curug Cantel, Air Terjun Curug Puteri dan Sumur Penganten, di Kecamatan Sirampog, Pantai Randusanga Indah, Ekowisata Mangrove Desa Kaliwlingi di Kecamatan Brebes, dan Kawasan perkebunan teh Kaligua di Kecamatan Paguyangan.

Jumlah kamar penginapan hotel di Kabupaten Brebes mengalami peningkatan dalam kurun waktu Tahun 2013 – 2016. Pada Tahun 2013 jumlah kamar penginapan hotel tercatat 126 unit dan meningkat pada semester 1 (satu) Tahun 2016 yaitu sebanyak 331 unit. Dan jumlah kamar hotel/penginapan yang terisi pada Tahun 2013 sebanyak 120 unit, meningkat menjadi 388 unit pada semester 1 (satu) Tahun 2016, berbanding lurus dengan jumlah dan tingkat hunian kamar penginapan hotel.

3. Pertanian

Pembangunan urusan pertanian mencakup sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan dan peternakan. Dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Brebes tahun 2015 berdasarkan harga konstan enunjukkan bahwa sektor pertanian sampai saat ini masih merupakan sektor dominan. Walaupun terjadi penurunan dari tahun ke tahun namun sektor pertanian masih sebagai penyumbang terbesar dari total nilai PDRB Kabupaten Brebes yaitu sebesar 37,69% (tahun 2015). Angka ini mengalami penurunan bila dibandingkan capaian tahun 2012 yang mencapai 49.4%. Kecenderungan penurunan ini disebabkan karena semakin berkurangnya luas lahan pertanian akibat perluasan pemukiman penduduk dan kegiatan industri bahwa sektor non pertanian (sekunder dan tersier) di Kabupaten Brebes mulai berkembang.

Produk sektor pertanian yang dominan di Kabupaten Brebes adalah padi sawah. Dari Dinas Pertanian Kabupaten Brebes diperoleh data tahun semester 1 (satu) Tahun 2016, untuk padi sawah produktivitasnya mencapai 57,21 kw/ha dengan luas tanam seluas 65.846 ha, luas panen 65.651, produksi gabah 375.562 ton dan produksi beras mencapai 237.355 ton. Sedangkan untuk padi ladang produktivitasnya sebesar 52 kw/ha dengan luas tanam 465 ha, luas panen 1.644 ha produksi gabah 8.599 ton dan produksi berasnya mencapai 5.435 ton.

Disamping padi sawah, komoditas lain yang memiliki produktivitas yang cukup tinggi adalah Jagung. Untuk Jagung produktivitasnya mencapai 57 kw/ha, luas tanam 8.977 ha, luas panen 12.278 ha dengan produksi mencapai 70.281 ton. Sedangkan untuk komoditas lain seperti kacang kedele, kacang hijau, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar jumlah produksinya tidak begitu tinggi. Namun demikian tetap memberikan manfaat bagi para petani sebagai hasil tambahan sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Secara keseluruhan produksi dan produktivitas tanaman pangan dapat dilihat pada Tabel 2.55 dan Tabel 2.56.

Tabel 2.58.

**Produksi Hasil Pertanian Kabupaten Brebes
Tahun 2012 – 2016**

No	Jenis	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Padi Sawah (ton)	112.646	600.867	562.690,62	576.686	572.358
2.	Padi Ladang (ton)	4.150	6.356	9.896	14.493	8.612
3.	Jagung (ton)	3.086	116.470	111.333	111.051	116.255
4.	Kedelai (ton)	98	5.318	2.694	2.630	1.482
5.	Kacang Hijau (ton)	885	2.552	2.800	1.461	5.663

No	Jenis	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
6.	Ubi Kayu (ton)	21.916	35.138	27.860	33.622	26.065
7.	Ubi Jalar (ton)	392	4.352	3.116	3.725	1.933
8.	Kacang Tanah (ton)	352	1.272	1.267	815	915

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Brebes, 2017

Tabel 2.59.

**Produktivitas Hasil Pertanian Kabupaten Brebes
Tahun 2012 – 2016**

No	Jenis	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Padi Sawah (kw/ha)	-	59,93	57,51	57,75	57,11
2.	Padi Ladang (kw/ha)	37,66	42,57	51,68	58,39	52
3.	Jagung (kw/ha)	-	65,7	62,6	62	65,55
4.	Kedelai (kw/ha)	-	14,05	13,28	13,16	9,01
5.	Kacang Hijau (kw/ha)	10,51	11,27	11,40	11,28	12,66
6.	Ubi Kayu (kw/ha)	138,97	194,03	148,83	186,58	217
7.	Ubi Jalar (kw/ha)	217,50	205,26	164,01	210,44	262
8.	Kacang Tanah (kw/ha)	10,35	21,70	21,33	18,19	17

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Brebes, 2017

Produksi pertanian selain tanaman pangan di Kabupaten Brebes adalah tanaman hortikultura. Jenis tanaman hortikultura yang paling besar dalam penyumbang kebutuhan regional maupun kabupaten lain adalah bawang merah. Perkembangan tanaman hortikultura jenis bawang merah di Kabupaten Brebes dapat dilihat pada Tabel 2.57.

Tabel 2.60.

**Perkembangan Jenis Tanaman Hortikultura Andalan Kabupaten Brebes
(Bawang Merah) Tahun 2012 – 2016**

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016*
1.	Luas Arel (Ha)	23.131	24.910	30.945	26.645	15.150
2.	Jumlah Produksi (ton)	259.000	300.955	375.974	300.144	149.718
3.	Jumlah Konsumsi (ton)	1.136	4.224	4.351	4.065	1.955

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Brebes, 2017

Keterangan: *)Data semester 1 Tahun 2016

Kabupaten Brebes juga menghasilkan tanaman perkebunan seperti teh, kopi, kakao, tebu dan lainnya. Hanya saja jumlah produksinya masih sedikit. Untuk teh dengan luas areal 117 Ha dapat menghasilkan 13,10 ton. Akan tetapi jumlah tersebut setiap tahun semakin menyusut. Untuk kopi, dengan luas areal 218 Ha dapat menghasilkan / produksi 464,88 ton.

Jumlah populasi ternak tertinggi di Kabupaten Brebes adalah ayam baik ayam petelur maupun ayam pedaging. Populasi ternak lain yang cukup besar adalah itik, sapi potong, kambing dan domba. Sedangkan ternak dalam populasi kecil meliputi sapi perah, kuda, kerbau, kelinci dll.

Menurut data dari Dinas Peternakan Kabupaten Brebes semester 1 (satu) tahun 2016, jumlah populasi ayam petelur mencapai 1.524.526 ekor dan ayam pedaging sebesar 2.724.804 ekor. Jumlah peternak ayam petelur mencapai 355 orang dengan rata rata kepemilikan per peternak 4.836 ekor sedangkan untuk ayam pedaging jumlah peternak mencapai 723 orang dengan rata rata kepemilikan per peternak 3.770 ekor sedangkan jumlah produksi untuk ayam petelur mencapai 9.283 ton telur dan 2.725 ton daging.

Sementara itu sebagai daerah yang terkenal dengan oleh oleh khasnya telur asin, maka di kabupaten Brebes jumlah peternak itik menempati posisi paling tinggi bila dibandingkan dengan jumlah peternak jenis unggas lainnya yaitu sebesar 1.820 peternak. Namun jumlah populasinya jauh lebih kecil dari populasi ternak ayam yaitu sebesar 491.598 ekor sehingga rata rata kepemilikannya hanya mencapai 284 ekor itik. Dengan jumlah produksi mencapai 2.596 ton telur. Jumlah produksi tersebut ternyata belum dapat memenuhi kebutuhan perajin telur asin yang ada diwilayah Kabupaten Brebes dimana kebutuhan telur perbulan mencapai hampir 12.000.000 butir.

Masyarakat yang umumnya mengandalkan usaha peternakan sebagai usaha utama adalah pada usaha ternak unggas seperti itik dan ayam ras (ayam pedaging dan ayam petelur). Usaha ternak ayam pedaging ini hampir ada di seluruh kecamatan di Kabupaten Brebes sedangkan untuk peternak ayam petelur sebagian besar berada di kecamatan-kecamatan wilayah selatan Kabupaten Brebes seperti Bantarkawung, Bumiayu, Paguyangan, Sirampog, dan Tonjong dengan kecamatan Paguyangan yang memiliki peternakan ayam petelur terbanyak. Kecamatan wilayah utara yang memiliki peternakan ayam petelur adalah di kecamatan Wanasari dan untuk wilayah tengah ada di kecamatan Songgom meskipun populasi hanya sebagian kecil saja. Selain ternak unggas, Kabupaten Brebes juga memiliki potensi untuk pengembangan ternak sapi khususnya sapi potong.

Jumlah populasi sapi potong semester 1 (satu) tahun 2016 mencapai 26.927 ekor sebagian besar berada di wilayah Kec. Ketanggungan, Larangan, Banjarharjo dan Bantarkawung dengan rata rata kepemilikan per peternak adalah 3 ekor. Laju pertumbuhan populasinya mencapai 2%. Untuk jumlah pemotongan per tahun rata rata antara 1.064 ekor per tahun. Dengan demikian kebutuhan akan daging sapi penduduk Kab. Brebes masih dapat

dipenuhi oleh peternak sapi yang ada di Kab.Brebes. Disamping sapi potong, Kabupaten Brebes juga memiliki potensissapi perah namun populasinya masih sangat sedikit hanya 33 ekor sehingga usaha sapi perah belum berkembang dengan baik. Berikut tabel populasi ternak di Kabupaten Brebes. Populasi sapi potong menurun disebabkan karena kebijakan pusat atas larangan impor sapi yang berdampak pada pemenuhan pasar dalam negeri sehingga permintaan akan daging sapi terus meningkat. Sedangkan untuk penurunan ternak itik karena semakin terbatasnya lahan untuk beternak itik dan menurunnya minat generasi muda untuk beternak itik. Sedangkan produksi telur bebek lebih banyak untuk pemenuhan produksi telur asin yang keuntungannya lebih banyak dibandingkan untuk penetasan.

Tabel 2.61.
Populasi Ternak di Kabupaten Brebes
Tahun 2012 – 2016

No	Jenis Ternak (ekor)	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Sapi Potong	39.879	28.031	28.636	28.936	27.542
2.	Sapi Perah	42	48	52	47	21
3.	Ayam Petelur	1.633.040	1.691.558	1.716.931	1.720.414	1.413.960
4.	Ayam Pedaging	1.423.823	6.886.524	6.951.000	6.121.304	6.958.232
5.	Itik	569.755	539.043	519.858	512.586	485.118

Sumber: Dinas Peternakan Kab. Brebes, 2017

4. Perdagangan

Usaha perdagangan yang ada di Kabupaten Brebes, yang tertinggi masih pada level perdagangan menengah. Jumlah unit usaha perdagangan di Kabupaten Brebes sampai dengan semester 1 (satu) tahun 2016 mencapai 20.383 unit usaha dan mampu menyerap tenaga kerja sekitar 53.878 orang. Bila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2012 maka terjadi kenaikan sebesar 31,01 % untuk jumlah unit usaha dan 33,13% untuk peningkatan tenaga kerja yang terserap.

Jumlah pasar tradisional sebagai salah satu sarana untuk menunjang berlangsungnya usaha perdagangan dari tahun ke tahun jumlahnya tidak mengalami kenaikan (60 buah) terdiri atas 26 pasar dengan bangunan permanen dan 34 pasar dengan bangunan semi permanen, namun pada tahun 2017 hanya ada 30 pasar yang dikelola Pemerintah Kabupaten, sisanya merupakan pasar desa yang dikelola oleh Bumdes. Namun untuk sarana belanja modern seperti toko swalayan/supermarket/ plaza mengalami kenaikan dimana pada tahun 2015 hanya 97 unit menjadi 126 unit pada tahun 2017. Peningkatan ini diperkirakan masih akan terjadi pada tahun

tahun mendatang, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kemampuan daya beli masyarakat. Pesatnya perkembangan jumlah pasar swalayan maupun plaza perlu dikaji kembali dengan regulasi yang komprehensif mengingat di beberapa daerah mengalami banyak masalah seperti semakin terjepitnya usaha para pedagang kecil. Hal ini dimaksudkan agar iklim usaha berjalan secara kondusif dimana masing-masing pelaku usaha mampu berusaha secara nyaman serta mampu menikmati keuntungan yang layak dan mampu memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dari sektor perdagangan. Berikut perkembangan sarana perdagangan.

Tabel 2.62.
Perkembangan Sarana Perdagangan
di Kabupaten Brebes Tahun 2012 – 2017

No	Uraian	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pasar Tradisional	59	59	60	60	60	30
2	Pasar Lokal	59	59	60	60	60	30
3	Pasar swalayan/ supermarket/ toserba	72	72	83	97	112	126

Sumber: Dinas Kopumdag Kabupaten Brebes, 2018

*30 dikelola oleh Bumdes karena alih status

5. Perindustrian

Industri yang ada di Kabupaten Brebes dikelompokkan menjadi industri logam, mesin, elektronika dan aneka (LMEA) serta industri kimia agro dan hasil hutan (KAH). Masing-masing dibedakan menjadi industri formal dan non formal, serta digolongkan berdasarkan asset menjadi skala besar, menengah, kecil dan rumah tangga. Jumlah industri kecil di Kabupaten Brebes selalu mengalami kenaikan baik dari sisi jumlah pengusaha, unit usaha, permodalan maupun jumlah penyerapan tenaga kerja. Jumlah industri Kecil di wilayah Kabupaten Brebes sesuai dengan data dari Disperindag Kabupaten Brebes hingga tahun 2014 mencapai 1.837 unit usaha, naik 1.4 % bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 1784 unit usaha. Kemampuan menyerap tenaga kerja sebanyak 5.165 orang dengan nilai produksi sebesar Rp.185.929.200.000,-. Jenisnya meliputi industri kecil kayu, logam, anyaman/gerabah/keramik, kain tenun, makanan dan lain. Jumlah yang terbesar ada pada jenis industri kecil makanan minuman yang tersebar di seluruh kecamatan dengan jumlah terbanyak berada di Kecamatan Brebes. Untuk jumlah terbesar adalah jenis industri kecil makanan dan minuman yang mencapai 609 unit atau 33 persen dari total jumlah industri yang ada.

Tabel 2.63.
Perkembangan Industri di Kabupaten Brebes
Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Industri Kecil					
	a) Unit Kerja	1.674	1.786	1.837	1.874	1.884
	b) Tenaga Kerja	4.273	4.917	5.165	5.348	5.391
2.	Industri Menengah					
	c) Unit Kerja	15.557	1.637	18.944	19.889	20.383
	d) Tenaga Kerja	40.469	44.405	48.089	51.987	53.878
3.	Industri Besar					
	a) Unit Kerja	1	2	1	9	10
	b) Tenaga Kerja	334	994	660	3.754	4.083

Sumber: Dinas Perindag Kabupaten Brebes, 2017

Kecamatan Brebes merupakan kecamatan di mana baik jumlah unit usaha, tenaga kerja maupun nilai produksi untuk industri kecil menempati urutan pertama atau dengan jumlah terbanyak diantara 16 kecamatan lainnya. Secara prosentase hampir 18 % jumlah Industri Kecil berlokasi di wilayah Kecamatan Brebes, sisanya tersebar di 16 kecamatan yang lain.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan propinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional, atau internasional. Peningkatan daya saing antar daerah merupakan agenda yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, inovasi dalam pembangunan yang berjalan secara komprehensif serta terjadinya kolaborasi antar aktor pembangunan merupakan faktor kunci peningkatan daya saing.

Salah satu upaya dalam rangka peningkatan daya saing daerah adalah penguatan sistem inovasi daerah (SIDa) yang merupakan pondasi dalam perencanaan pembangunan di daerah. Elemen kerangka kebijakan inovasi yaitu mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis, memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptekin serta kemampuan absorpsi industri, khususnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi, mendorong budaya inovasi, menumbuhkembangkan keterpaduan atau koherensi pemajuan sistem inovasi di daerah dan klaster industri daerah, serta penyelarasan dengan perkembangan global. Dimana aspek daya saing daerah untuk memperkuat sistem inovasi daerah seperti tercantum di bawah ini.

2.4.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Salah satu indikator untuk mengukur kemampuan ekonomi suatu daerah adalah pengeluaran konsumsi per kapita yang disesuaikan. Indikator ini menunjukkan derajat daya beli masyarakat terhadap barang atau jasa. Rata-rata pengeluaran penduduk Kabupaten Brebes pada tahun 2015 sebesar Rp. 605.576,-.Capaian tersebut masih lebih rendah dari standar yang ditetapkan UNDP. Seperti diketahui, bahwa batas teratas dalam perhitungan indeks daya beli sebesar Rp.732.720,00, sedangkan batas terbawah sebesar Rp.360,000,00. Adapun rata-rata pengeluaran per kapita penduduk di Kabupaten Brebes Tahun 2014 dan 2015 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.64.
Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Penduduk
di Kabupaten Brebes Tahun 2014 dan 2015

Rata-rata Pengeluaran Per kapita /bulan (Rp.)	Tahun	
	2014	2015
Perkotaan	602.657	606.408
Pedesaan	547.768	604.939
Rata-rata	571.508	605.576

Sumber : BPS Kabupaten Brebes, 2017

2.4.2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Ibukota kabupaten Brebes terletak sekitar 177 km sebelah barat Kota Semarang, atau 330 km sebelah timur Jakarta. Kabupaten ini dilalui jalur pantura, dan menjadi pintu masuk utama Jawa Tengah dari sisi barat dari arah Jakarta/Cirebon, sehingga Brebes memiliki posisi yang cukup strategis. Hampir 75 % dari seluruh panjang jalan di Kabupaten Brebes adalah jalan kabupaten yaitu sepanjang 710,19 km, sisanya adalah jalan negara sepanjang 96.24 km, jalan Provinsi sepanjang 149,26 km dan jalan desa sepanjang 1.705,35 km. Disamping itu di wilayah Brebes utara terdapat jalan tol sepanjang 33,18 km melintang mulai dari perbatasan Kec. Losari hingga di desa Kaligangsa Kec. Brebes Dalam peningkatan pelayanan angkutan umum bagi masyarakat, sampai dengan tahun 2017 Kabupaten Brebes memiliki 2 unit terminal tipe B yang berada di Kecamatan Bumiayu dan Tanjung untuk melayani penumpang antar kota antar provinsi dan antar kota dalam provinsi. Terdapat Pula 4 unit terminal tipe C yang diperuntukkan bagi angkutan kota dan angkutan desa. Jumlah angkutan umum yang beroperasi di Kabupaten Brebes sebanyak 445 armada.

Hal lain yang lebih menguntungkan dari sisi kelancaran arus lalu lintas adalah tersedianya jalur tol yang menghubungkan ruas kanci pejalan dan pejalan pemalang dengan 3 pintu keluar tol di Kabupaten Brebes yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan sentra-sentra ekonomi baru yang lebih potensial.

Di Kabupaten Brebes juga terdapat dua jalur rel kereta api dari arah Jakarta/Cirebon, yakni jalur menuju timur (Semarang) dan jalur menuju selatan (Purwokerto), dengan stasiun kereta api utama yaitu Stasiun Brebes.

Fasilitas untuk menunjang aktivitas bisnis dan wisata di Kabupaten Brebes diantaranya adalah Hotel sebanyak 11 unit dengan jumlah kamar sebanyak 240 kamar, Restoran/ Rumah Makan sebanyak 67 unit, pasar retail 72 unit, pasar Induk 1 unit, pasar tradisional 58 unit. Terdapat pula fasilitas perbankan sebanyak 8 kantor bank umum, meliputi Bank Jateng 1 unit, BCA 4 unit, BNI 1 unit, BRI 1 unit, dan Bank Mandiri 1 unit.

2.4.3. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data BPS, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Brebes pada tahun 2016 adalah 63,98 meningkat 3,06 dibandingkan IPM tahun 2012 yang sebesar 60,92.

Dari data IPM Kabupaten Brebes dapat diketahui bahwa komponen pendukung nilai IPM 2016 yang terkait dengan bidang pendidikan yaitu rata rata lama sekolah sedikit mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2012. Rata rata lama sekolah pada tahun 2016 mencapai angka sebesar 6,17 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Brebes tingkat pendidikannya baru tamat Sekolah Dasar atau dengan kata lain penduduk Kabupaten Brebes yang memiliki kesempatan mengenyam pendidikan yang lebih tinggi masih sangat terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Brebes masih rendah.

Rasio Beban Tanggungan merupakan angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk yang tidak produktif dengan banyaknya penduduk yang produktif secara ekonomis. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Berdasarkan data jumlah penduduk tahun 2015, jumlah penduduk menurut kelompok umur usia produktif (15 – 64 tahun) mencapai 1.292.317 jiwa, sedangkan untuk usia non produktif (0 - 14 tahun dan 65 th ke atas) mencapai 587.740 jiwa. Dengan data tersebut maka dapat diketahui rasio beban tanggungan (*dependency ratio*) penduduk usia produktif atas penduduk usia non produktif, yaitu sebesar 45,48%. Angka ini bila dibandingkan dengan capaian tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 15,33%, karena tahun 2012 *dependency ratio*-nya mencapai 60,81%. Nilai ketergantungan pada tahun 2015 ini semakin rendah dikarenakan jumlah penduduk usia produktif semakin meningkat sementara jumlah penduduk usia belum dan tidak produktif semakin menurun jumlahnya.

Dari data tersebut dapat diinterpretasikan bahwa setiap orang 100 penduduk usia produktif di kabupaten Brebes mempunyai tanggungan

sebanyak 45 orang penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Secara rinci perkembangan rasio ketergantungan dapat dilihat pada Tabel 2.68.

Tabel 2.65.
Rasio Ketergantungan Kabupaten Brebes
Tahun 2012 – 2016

No	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Rasio Ketergantungan (%)	60,81	49,67	26,05	45,48	49,55
2.	Penduduk usia 0-14 th (org)	581.639	478.891	262.995	492.826	472.264
3.	Penduduk usia 15-64 th (org)	1.087.310	1.178.995	1.456.273	1.292.317	1.196.200
4.	Penduduk usia +65 th (org)	79.561	106.762	116.356	94.914	120.416

Sumber: BPS Kab. Brebes dan Dinas Dukcapil Kab. Brebes, 2017

2.4.4. Iklim Investasi

Pemerintah Kabupaten Brebes terus berupaya untuk meningkatkan investasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan. Peningkatan investasi di Kabupaten Brebes didorong oleh adanya peningkatan iklim investasi diantaranya kondusifitas daerah, semakin gencarnya promosi dan kerjasama investasi dan kemudahan pelayanan investasi. Promosi peluang penanaman modal yang telah dilakukan di Kabupaten Brebes seperti Pameran Investasi Daerah Expo, Sampan Expo, Brebes Expo, Jateng Fair dan De Syukron 2 Bandung. Dari data yang diperoleh dari Bidang Penanaman Modal Bappeda Kabupaten Brebes, jumlah realisasi investasi PMA sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan pada semester I tahun 2016 tercatat Rp. 59.946.000.000,- dan sektor Industri pengolahan (migas dan non migas) tercatat Rp. 42.770.000.000,-. Sedangkan untuk realisasi Investasi PMDN sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan pada semester I tahun 2016 tercatat Rp. 81.087.000.000,-, sektor industri pengolahan (migas dan non migas) Rp. 1.900.000.000,-, Listrik, Gas, dan Air Bersih Rp. 1.000.000.000,-, Bangunan Rp. 500.000.000,-, Perdagangan, hotel dan Restoran Rp. 28.655.000.000,- dan keuangan, Real estate dan jasa perusahaan tercatat Rp. 10.031.000.000,-. Adapun total investasi Pemerintah Pusat sebanyak Rp. 1.901.000.000,- dan total investasi Pemerintah Daerah Rp. 1.000.000.000,-. Dan untuk jumlah investor berskala nasional dari PMDN jenis swasta sebanyak 53 unit.

Selain dari segi pelayanan perizinan investasi dan kemudahan penanaman modal, indikator yang dapat menarik investasi adalah segi

kemanan. Jumlah kasus pelanggaran hukum yang dilaporkan dari tahun ke tahun menurun yaitu pada tahun 2013 kasus pidana yang dilaporkan sebanyak 247 perkara dan pada tahun 2015 menjadi 153 perkara. Sedangkan untuk kasus perdata pada tahun 2013 menunjukkan angka 1.203 perkara pada tahun 2015 menjadi 32 perkara. Sedangkan jumlah unjuk rasa yang terdata selama 5 tahun juga relatif meningkat yaitu pada tahun 2010 sebanyak 9 kali dan tahun 2015 sebanyak 42 kali. Peningkatan tersebut paling banyak disebabkan karena dampak pembangunan jalan tol yaitu sebanyak 18 kali. Namun demikian kondisi keamanan relatif cukup stabil dan terkendali sehingga tidak mengganggu kondusifitas iklim berinvestasi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Brebes yang bekerjasama dengan pihak terkait sangat optimal dalam menekan dan menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana serta unjuk rasa.

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

SERTA KERANGKA PENDANAAN

Gambaran pengelolaan keuangan daerah mencakup gambaran kinerja dan pengelolaan keuangan daerah masa lalu (2012-2017), serta kerangka pendanaan. Gambaran pengelolaan keuangan daerah memberikan gambaran mengenai kemampuan anggaran daerah untuk membiayai belanja daerah. Kemampuan belanja daerah, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung akan menjadi acuan dalam pengalokasian anggaran pada masing-masing program yang akan dilaksanakan pada 5 (lima) tahun mendatang (tahun 2017-2022).

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki unsur Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Kinerja keuangan daerah dapat diketahui dari kinerja Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah tersebut.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

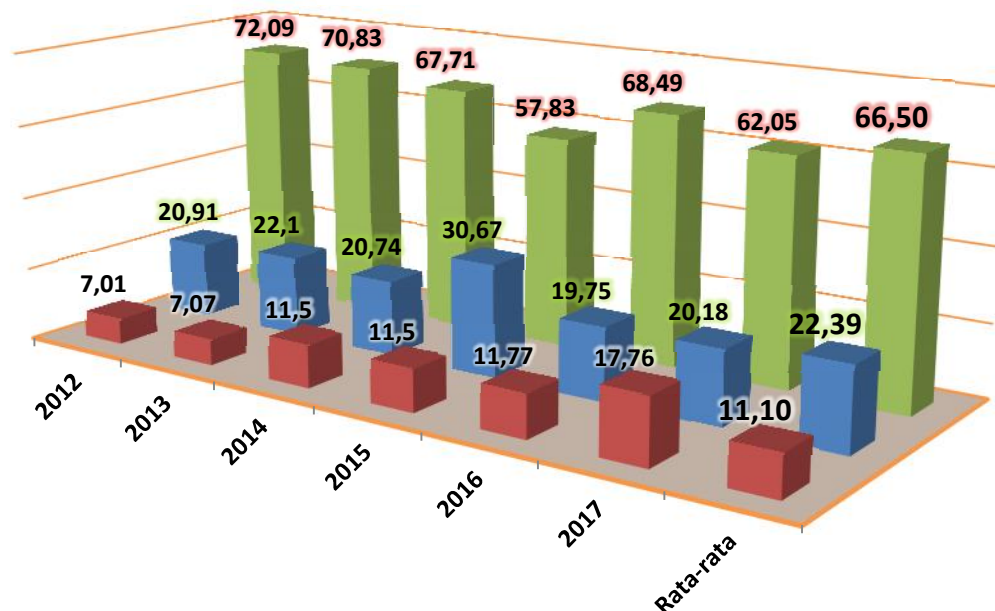
a. Pendapatan Daerah

Analisis pendapatan daerah memberikan gambaran kondisi daerah yang tercermin dalam APBD, meliputi gambaran Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Kinerja pendapatan daerah diukur dengan indikator derajat kemandirian keuangan daerah (desentralisasi fiskal). Indikator ini dihitung dari rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah. Dengan mengetahui kemandirian keuangan daerah ini akan diketahui seberapa besar *local taxing power* suatu daerah, serta seberapa besar kemampuan PAD dalam mendanai belanja daerah yang dianggarkan untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Brebes dalam kurun waktu tahun 2017-2022 tergolong masih rendah, terlihat dari rata-rata proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah hanya sekitar 11,10 %. Kondisi ini

menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Kabupaten Brebes terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah cukup tinggi.

Berikut ini disajikan proporsi PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Total Pendapatan Daerah tahun 2012-2017.



Gambar 3.1.
Proporsi PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Total Pendapatan Daerah

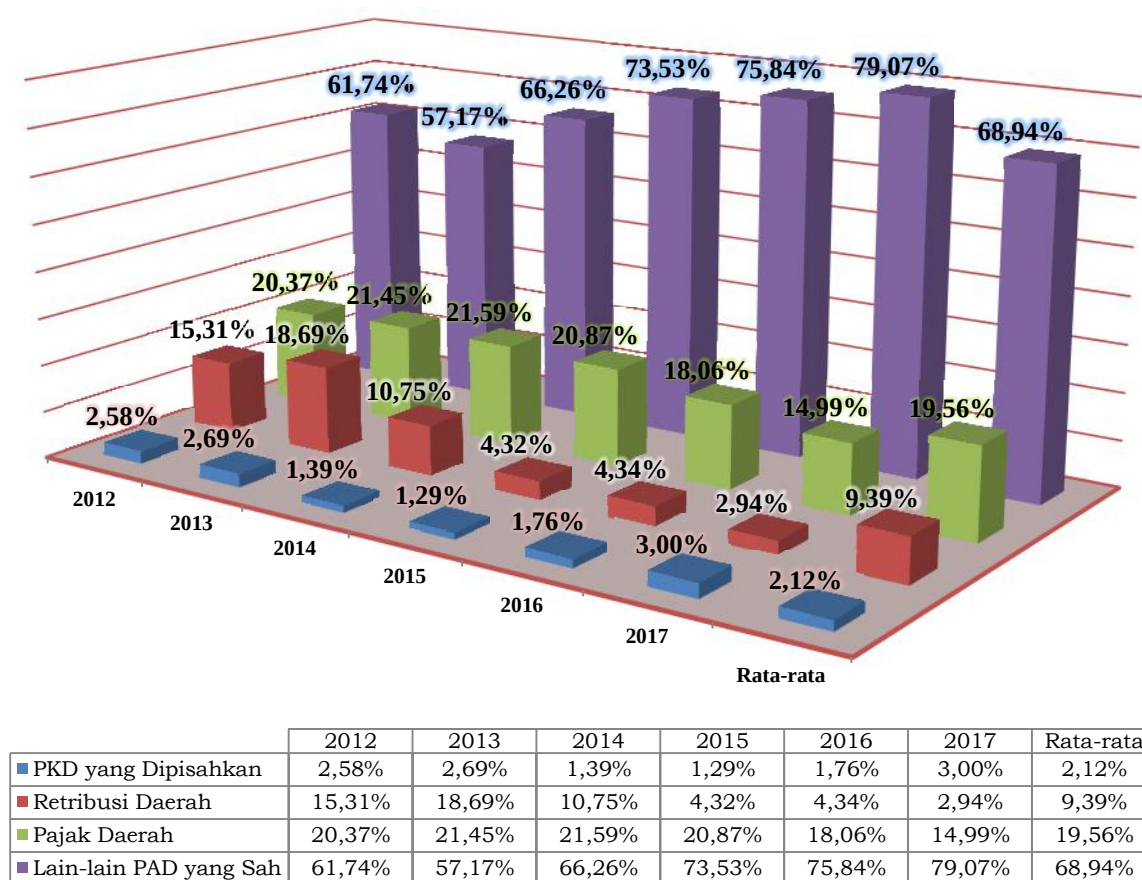
Berdasarkan Gambar 3.1 diketahui bahwa selama kurun waktu 2012-2017 rata-rata rasio Dana Perimbangan memberikan kontribusi yang cukup tinggi yaitu sebesar 66,50 % disusul Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 22,39 % dan rata-rata rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) sebesar 11,10 %.

Dilihat dari perkembangannya, proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) menunjukkan tren kenaikan, begitu pula dengan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sedangkan proporsi Dana Perimbangan menunjukkan penurunan. Apabila trend kenaikan ini bisa dipertahankan bahkan dinaikan, maka tidak menutup kemungkinan proporsi PAD dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah terhadap TPD dapat berada di atas

proporsi Dana Perimbangan, sehingga tingkat ketergantungan terhadap dana transfer menjadi rendah, atau dengan kata lain derajat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Brebes telah masuk dalam kategori tinggi.

Pada pos Pendapatan Asli Daerah, kontribusi rata-rata Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah menjadi sumber pendapatan yang dominan yaitu sebesar 68,94%, disusul oleh Pajak Daerah sebesar 19,56 %, Retribusi Daerah sebesar 9,39% dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 2,12%.

Perbandingan proporsi unsur-unsur PAD tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2.
Proporsi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah terhadap Total PAD

Sementara itu, rata-rata pertumbuhan realisasi dari pos-pos Pendapatan Daerah di Kabupaten Brebes Tahun 2012-2017, yang mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah beserta pos-pos yang menyertainya; dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2012-2017

No	Uraian	Tahun						Rata-rata Pertmbuhan (%)
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	PENDAPATAN	1.570.670.462.000	1.758.507.520.000	1.957.064.095.000	2.432.876.271.000	2.785.284.383.000	2.875.777.806.000	13,06%
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	110.029.341.000	124.303.523.000	226.120.338.000	279.714.597.000	327.746.320.000	510.848.264.000	38,32%
	Pendapatan Pajak Daerah	22.415.050.000	26.660.000.000	48.822.700.000	58.378.300.000	59.207.300.000	76.570.140.000	30,48%
	Hasil Retribusi Daerah	16.846.485.000	23.233.192.000	24.316.210.000	12.070.518.000	14.208.800.000	15.035.372.000	3,15%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.835.422.000	3.346.081.000	3.149.069.000	3.600.138.000	5.769.108.000	15.309.000.000	50,41%
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	67.932.384.000	71.064.250.000	149.832.359.000	205.665.641.000	248.561.112.000	403.933.752.000	47,22%
2	DANA PERIMBANGAN	1.132.274.616.000	1.245.503.267.000	1.325.139.186.000	1.407.033.866.000	1.907.528.758.000	1.784.498.941.000	10,34%
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	66.772.268.000	63.874.857.000	40.194.031.000	45.227.167.000	37.587.811.000	38.794.343.000	-8,51%
	Dana Alokasi Umum	981.051.188.000	1.098.999.510.000	1.186.969.845.000	1.234.338.079.000	1.339.381.605.000	1.317.061.804.000	6,17%
	Dana Alokasi Khusus	84.451.160.000	82.628.900.000	97.975.310.000	127.468.620.000	530.559.342.000	428.642.794.000	68,71%
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	328.366.505.000	388.700.730.000	405.804.571.000	746.127.808.000	550.009.305.000	580.430.601.000	17,18%
	Pendapatan Hibah	2.123.801.000	70.000.000	70.000.000	1.216.341.000	1.901.189.000	5.455.452.000	356,84%
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	62.538.168.000	71.605.311.000	81.732.206.000	159.669.522.000	206.457.285.000	186.111.104.000	28,69%
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	202.690.706.000	240.397.126.000	223.335.448.000	453.374.118.000	33.819.121.000	42.559.517.000	9,56%
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	61.013.830.000	76.628.293.000	100.666.917.000	131.867.827.000	95.445.800.000	75.382.190.000	7,86 %
	Dana Desa	0	0	0	0	212.385.910.000	270.922.338.000	27,56%

Sumber: BPPKAD Kab. Brebes, 2017 - 2022 (data diolah)

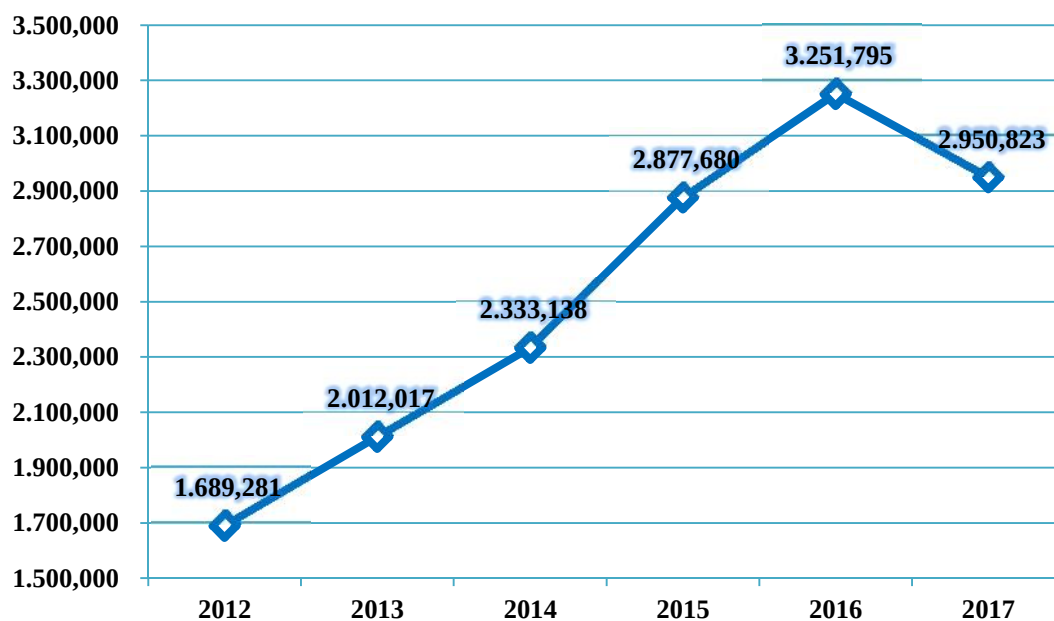
Dari sinkronisasi Tabel 3.1, Gambar 3.1 dan Gambar 3.2 terlihat bahwa Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan rata-rata kontribusi sebesar 11,11% dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 38,32 %. Trend rasio PAD yang terus meningkat mengindikasikan peningkatan desentralisasi fiskal dimana dominasi kontribusi berasal dari lain-lain PAD yang sah dengan rata-rata kontribusi sebesar sebesar 68,94% disusul pajak daerah 19,56 %, Retribusi Daerah 9,39% dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan sebesar 2,12 %.

Dari sisi pertumbuhan, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menunjukkan peningkatan tertinggi sebesar 50,41% disusul lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 47,22%. Rasio pajak dan pertumbuhan pajak yang berkontribusi terhadap rasio dan pertumbuhan PAD terhadap pendapatan daerah yang terus meningkat salah satunya disebabkan oleh adanya kebijakan desentralisasi fiskal pemerintah melalui pelimpahan kewenangan pengelolaan pajak BPHTB ke Pemerintah Daerah tahun 2011 dan pelimpahan kewenangan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaaan Perkotaan (PBBP2) tahun 2013. Dengan adanya pelimpahan kewenangan pengelolaan 2 objek pajak tersebut menyebabkan rasio pajak dan pertumbuhan pajak daerah serta rata-rata pertumbuhan pajak daerah terhadap PAD meningkat.

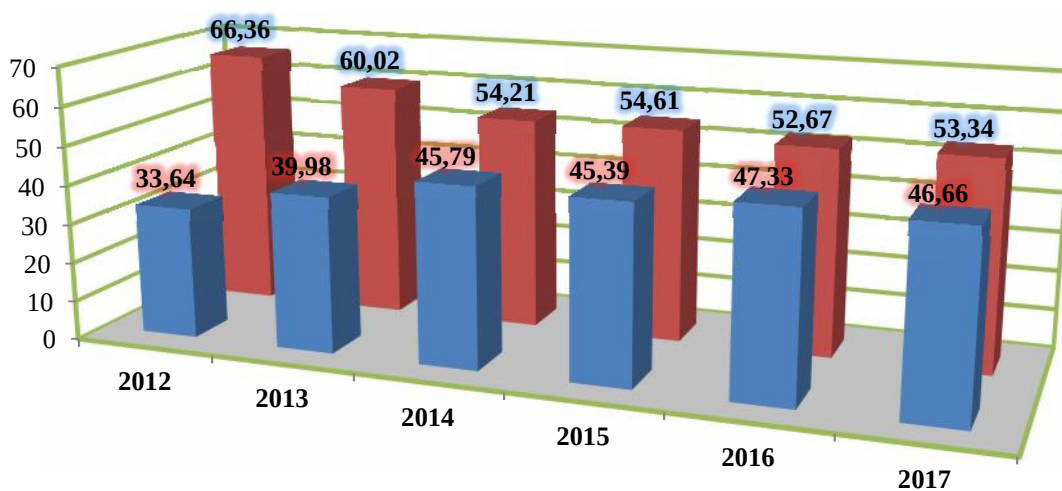
b. Belanja Daerah

Belanja Daerah terdiri atas Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Total Belanja Daerah Kabupaten Brebes dari tahun 2012-2017 mengalami peningkatan. Total Belanja tahun 2012 sebesar Rp. 1.689.281.482.000,- meningkat sebesar 174, 68 % menjadi Rp. 2.950.823.242.000,- pada tahun 2017. Proporsi Belanja Tidak Langsung cenderung mengalami penurunan dari sebesar 70,08% pada tahun 2012 menjadi 62,94% pada tahun 2015, sedangkan Belanja Langsung meningkat dari sebesar 29,92% pada tahun 2009 menjadi sebesar 37,06% pada tahun 2015. Proporsi belanja langsung yang hanya berkisar antara 29,92% hingga 37,06% memberikan gambaran bahwa alokasi anggaran untuk program pembangunan relatif terbatas, sebab lebih rendah dari alokasi belanja tidak langsung.

Pada gambar 3.3 dan gambar 3.4 dibawah menyajikan belanja daerah serta proporsi belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap belanja daerah yang tertuang dalam APBD Kabupaten Brebes kurun waktu 2012 – 2017.



Gambar 3.3.
Belanja Daerah Kab. Brebes Tahun 2012-2017 (dalam milyar rupiah)



	2012	2013	2014	2015	2016	2017
■ Belanja Langsng	33,64	39,98	45,79	45,39	47,33	46,66
■ Belanja Tidak Langsung	66,36	60,02	54,21	54,61	52,67	53,34

Gambar 3.4.
Proporsi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2012 - 2017

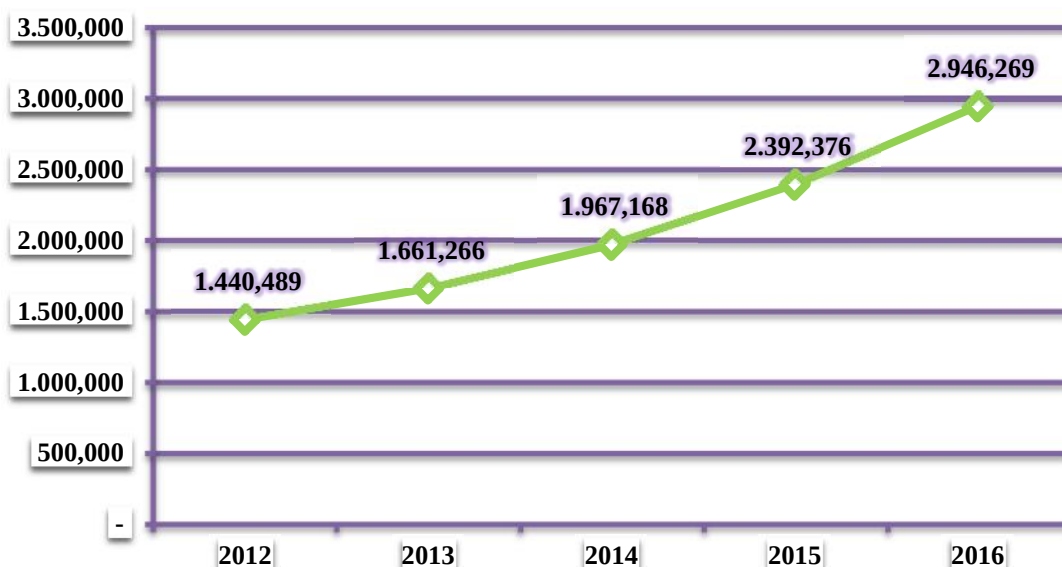
Untuk lebih jelas belanja daerah berdasarkan pos belanja daerah yang tertuang dalam APBD Kabupaten Brebes kurun waktu 2012-2017 disajikan dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2012 – 2017

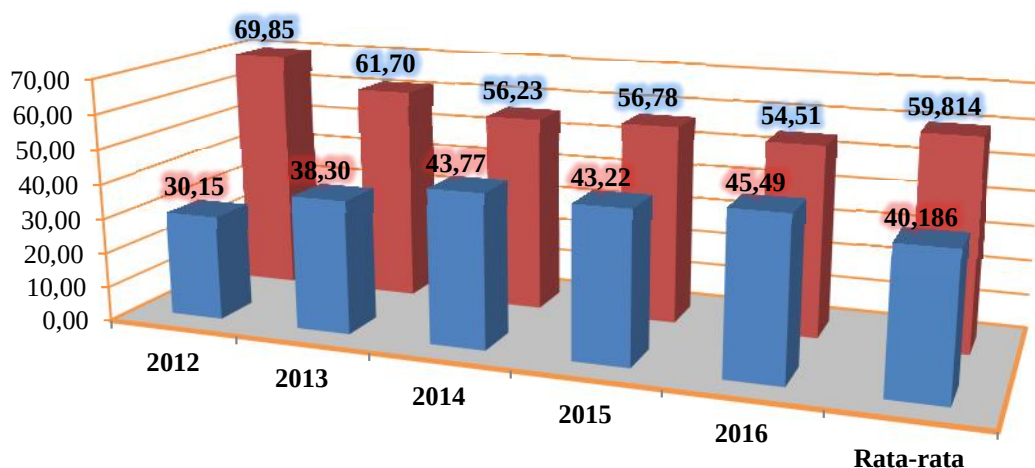
No.	Uraian	Tahun						Rata-rata Pertmbu- han (%)
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	BELANJA	1.689.281.482.000	2.012.017.064.000	2.333.138.846.000	2.877.680.593.000	3.251.795.853.000	2.950.823.242.000	12,43%
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.120.986.599.000	1.207.667.966.000	1.264.884.421.000	1.571.426.017.000	1.712.592.613.000	1.574.029.681.000	7,52%
	Belanja Pegawai	962.918.459.000	1.082.775.328.000	1.121.140.121.000	1.287.598.294.000	1.196.852.264.000	1.068.385.408.000	2,61%
	Belanja Subsidi	125.000.000	0	0	0	0	0	0,00%
	Belanja Hibah	60.256.246.000	27.896.400.000	35.084.550.000	14.958.450.000	83.125.294.000	28.427.700.000	60,92%
	Belanja Bantuan Sosial	31.241.500.000	15.896.612.000	23.836.220.000	16.678.453.000	35.825.400.000	21.421.874.000	9,08%
	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	240.609.000	240.609.000	300.000.000	6.454.802.000	8.112.589.000	11.292.080.000	428,23%
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	56.177.857.000	72.380.495.000	76.498.369.000	239.747.934.000	383.166.066.000	439.502.619.000	64,49%
	Belanja Tidak Terduga	10.026.928.000	8.478.522.000	8.025.161.000	5.988.084.000	5.511.000.000	5.000.000.000	-12,68%
2	BELANJA LANGSUNG	568.294.883.000	804.349.098.000	1.068.254.425.000	1.306.254.576.000	1.539.203.240.000	1.376.793.561.000	20,78%
	Belanja Pegawai	39.263.863.000	55.253.083.000	45.742.153.000	27.071.358.000	29.156.163.000	74.154.418.000	28,95%
	Belanja Barang dan Jasa	237.344.675.000	311.435.368.000	644.106.211.000	665.162.195.000	597.048.486.000	632.545.948.000	27,40%
	Belanja Modal	291.686.345.000	437.660.647.000	378.406.061.000	614.021.023.000	912.998.591.000	670.093.195.000	24,17%

Sumber: BPPKAD Kab. Brebes, 2012 - 2017 (data diolah)

Gambar 3.5 dan Gambar 3.6 menyajikan realisasi belanja daerah serta proporsi realisasi belanja langsung dan belanja tidak langsung Kabupaten Brebes dalam kurung waktu tahun 2012-2016, untuk lebih besaran realisasi belanja daerah berdasarkan pos belanja dan berdasarkan urusan dapat dilihat pada Tabel 3.3 dan 3.4.



Gambar 3.5.
Realisasi Belanja Daerah Kab. Brebes Tahun 2012-2016 (dalam milyar rupiah)



Gambar 3.6.
Proporsi Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2012 - 2016

	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata
■ Belanja Langsung	30,15	38,30	43,77	43,22	45,49	40,186
■ Belanja Tidak Langsung	69,85	61,70	56,23	56,78	54,51	59,814

Tabel 3.3.
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2012 - 2016

No.	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2012	2013	2014	2015	2016	
	BELANJA	1.440.489.255.759	1.661.266.202.697	1.967.168.957.601	2.392.376.921.588	2.946.269.402.281	19,63%
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.006.241.489.977	1.025.012.110.990	1.106.093.863.308	1.358.496.931.062	1.606.153.059.221	12,71%
	Belanja Pegawai	873.677.199.277	915.924.453.388	987.113.177.808	1.096.145.569.645	1.108.319.892.391	6,19%
	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	
	Belanja Hibah	42.029.894.568	23.628.424.000	28.208.080.000	9.181.500.000	81.274.092.900	173,34%
	Belanja Bantuan Sosial	29.151.390.000	11.227.946.500	16.849.270.000	13.572.479.500	32.300.506.500	26,78%
	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	223.861.300	235.149.080	295.190.340	6.381.595.620	6.459.508.140	523,41%
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	53.075.116.186	69.192.869.922	70.421.623.394	231.441.136.800	376.690.846.290	80,89%
	Belanja Tidak Terduga	8.084.028.646	4.803.268.100	3.206.521.766	1.774.649.497	1.108.213.000	-39,01%
2	BELANJA LANGSUNG	434.247.765.782	636.254.091.707	861.075.094.293	1.033.879.990.526	1.340.116.343.060	32,89%
	Belanja Pegawai	35.174.754.887	44.537.111.223	42.826.692.028	17.800.076.747	23.865.032.200	-0,40%
	Belanja Barang dan Jasa	206.089.661.878	265.906.208.172	535.276.002.137	546.495.592.428	531.623.432.484	32,43%
	Belanja Modal	192.983.349.017	325.810.772.312	282.972.400.128	469.584.321.351	784.627.878.376	47,18%

Sumber: BPPKAD Kab. Brebes, 2012 - 2016 (data diolah)

Tabel 3.4.
Realisasi Belanja Per Urusan Tahun 2012-2016 (dalam juta rupiah)

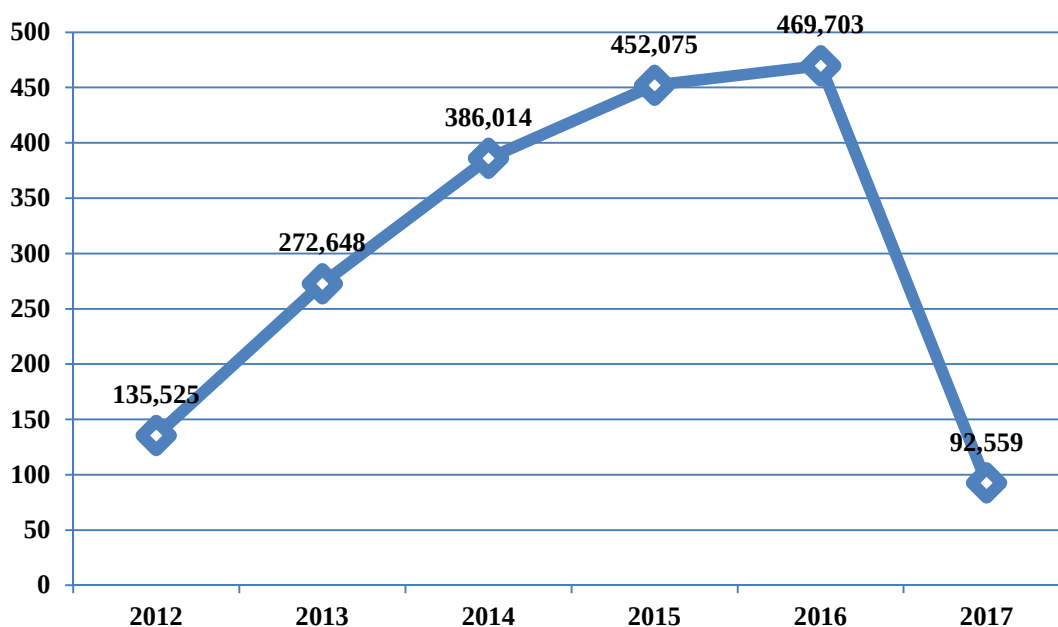
No.	Uraian	TAHUN					Rata-rata Pertmbuhan (%)
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	Urusan Wajib	1.369.399.915.560	1.583.532.445.862	1.867.189.466.473	2.286.689.752.428	2.811.790.857.372	20%
	Pendidikan	730.602.353.763	815.222.570.762	836.332.931.884	908.190.238.962	909.909.152.541	6%
	Kesehatan	141.141.167.519	177.669.270.274	240.205.990.038	305.077.170.946	473.304.977.911	36%
	Pekerjaan Umum	131.092.986.662	223.537.350.698	402.076.860.461	449.870.618.498	579.678.389.322	48%
	Perumahan	1.664.813.750	1.935.445.132	766.183.600	546.937.167	501.882.261	-20%
	Penataan Ruang	-	2.578.776.000	3.446.637.530	4.249.756.546	5.514.431.621	22%
	Perencanaan Pembangunan	10.432.222.391	9.076.170.956	8.893.681.215	9.383.221.010	10.536.856.190	1%
	Perhubungan	8.512.852.553	9.008.174.229	9.283.468.812	9.978.131.946	10.745.995.724	6%
	Lingkungan Hidup	4.901.350.659	6.336.234.249	9.494.132.882	14.237.254.910	18.010.594.553	39%
	Pertanahan	335.710.400	1.305.664.179	887.112.165	2.400.867.850	2.590.069.825	109%
	Kependudukan dan Catatan Sipil	8.328.194.373	5.815.075.395	5.243.925.807	5.525.156.379	6.983.683.424	-2%
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	539.322.000	711.402.900	681.620.329	1.106.492.866	1.546.140.350	32%
	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	11.146.615.047	10.455.944.959	11.596.334.755	11.979.296.083	14.666.820.382	8%
	Sosial	3.812.262.701	3.948.881.264	4.155.077.307	5.123.528.131	5.565.030.226	10%
	Tenaga Kerja	671.544.350	655.679.050	727.042.425	645.859.579	1.009.212.907	13%
	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	3.456.002.382	3.850.136.376	4.100.787.866	4.902.564.002	5.741.790.081	14%
	Penanaman Modal	281.749.675	358.746.875	325.390.560	594.184.575	597.038.935	25%
	Kebudayaan	144.744.700	444.801.200	672.150.750	1.158.704.500	1.112.706.450	82%
	Pemuda dan Olah Raga	290.338.000	1.955.414.000	2.125.571.201	1.952.640.750	3.915.262.400	169%

No.	Uraian	TAHUN					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2012	2013	2014	2015	2016	
	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	11.644.511.565	6.549.860.081	8.994.156.487	11.267.492.359	19.047.100.608	22%
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian	290.862.011.682	290.125.958.028	303.800.398.663	523.369.239.267	723.405.345.629	29%
	Ketahanan Pangan	1.288.078.880	1.544.201.679	1.500.688.173	3.701.175.854	4.689.834.157	48%
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.222.402.342	7.154.886.836	8.455.140.740	7.417.061.257	8.036.648.531	13%
	Statistik	-	-	-	294.249.780	281.305.525	0%
	Kearsipan	1.661.702.575	1.945.004.449	1.776.889.686	1.562.696.915	1.898.063.702	4%
	Komunikasi dan Informatika	1.366.977.591	1.346.796.291	1.647.293.137	1.965.033.287	2.185.539.791	13%
	Perpustakaan	-	-	-	190.179.009	316.984.326	0%
2	Urusan Pilihan	71.089.340.199	77.733.756.835	99.979.491.128	105.687.169.160	134.478.544.909	18%
	Pertanian	27.701.994.038	28.767.340.857	33.665.412.956	37.229.240.715	53.613.417.538	19%
	Kehutanan	4.800.753.799	6.693.262.655	5.209.606.271	7.078.482.654	7.668.342.041	15%
	Energi dan Sumberdaya Mineral	2.161.847.500	3.010.354.500	5.279.593.525	6.808.512.200	7.571.352.938	39%
	Pariwisata	6.317.650.840	5.292.762.086	6.380.894.531	7.325.462.270	17.918.694.982	41%
	Kelautan dan Perikanan	18.185.233.004	20.353.444.748	29.319.685.114	30.590.692.224	24.332.291.315	10%
	Perdagangan	11.178.307.393	12.800.793.224	19.063.674.313	15.586.176.215	22.383.399.431	22%
	Perindustrian	743.553.625	815.798.765	1.060.624.418	1.036.127.982	919.157.985	7%
	Transmigrasi	-	-	-	32.474.900	71.888.679	0%

Sumber: BPPKAD Kab. Brebes, 2012 - 2016 (data diolah)

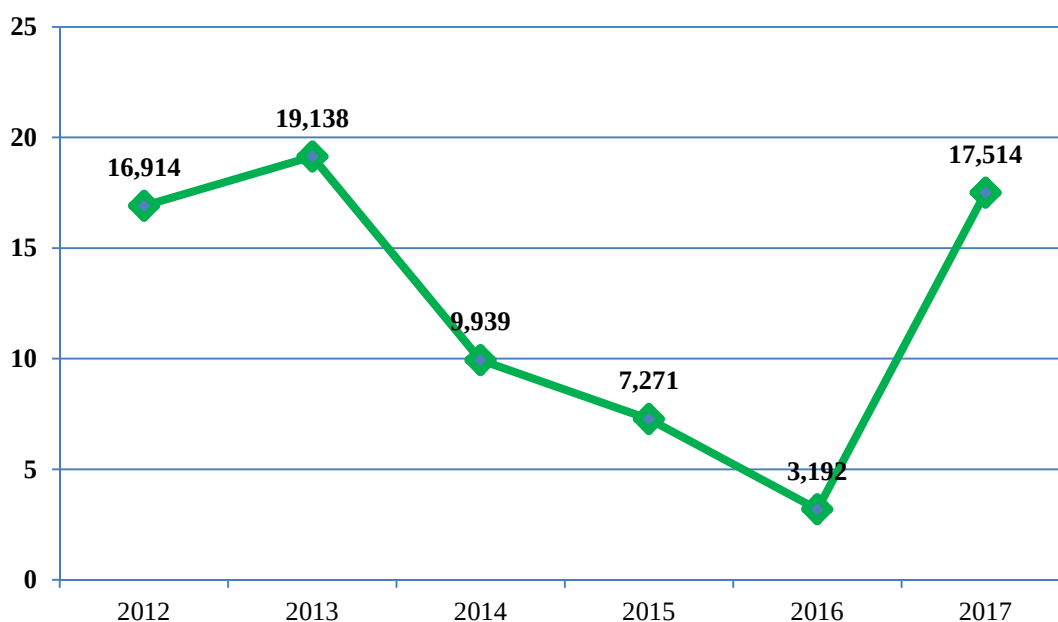
c. Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Trend Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Brebes dari tahun 2012-2016 cenderung naik, yaitu pada tahun 2012 sebesar Rp 135.525.470.000,- meningkat pada tahun 2016 menjadi Rp 469.703.470.000,- terkecuali pada tahun 2017 terjadi penurunan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Brebes sebesar Rp. 92.559.436.000,-. Kontribusi terbesar dari Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, walaupun, pada tahun 2016 sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp. 469.705.470.000,- terjadi penurunan pada tahun 2017 sebesar Rp. 92.529.436.000,- dikarenakan adanya kebijakan pemerintah pusat melalui efisiensi atau pemangkasan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) untuk kabupaten Brebes, sehingga dalam RAPBD Perubahan 2017 terjadi efisiensi anggaran belanja Perangkat Daerah, perkembangan pembiayaan daerah seperti yang tersaji dalam gambar 3.7 dan tabel 3.5.



Gambar 3.7.
Penerimaan Pembiayaan Daerah Daerah Kab. Brebes Tahun 2012-2017
(dalam milyar rupiah)

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah cenderung menurun yaitu pada tahun 2012 sebesar Rp. 16.914.327.000,- menjadi Rp.3.192.000.000,- pada tahun 2016 lalu mengalami peningkatan kembali pada tahun 2017 sebesar Rp. 17.514.000.000,-, dikarenakan meningkatnya pembiayaan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. Sedangkan kontribusi terbesar dari Pengeluaran Pembiayaan Daerah adalah penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD dan pembayaran pokok utang. Kinerja pembiayaan daerah Kabupaten Brebes dalam kurun waktu tahun 2012-017 dapat dilihat pada gambar 3.8 dan Tabel 3.5.



Gambar 3.8.
Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kab. Brebes Tahun 2012-2017 (dalam
milyar rupiah)

Tabel 3.5.
Perincian Pembiayaan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2012-2017

No	Uraian	Tahun						Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	PEMBIAYAAN DAERAH							
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	135.525.347.000	272.648.203.000	386.014.688.000	452.075.322.000	469.703.470.000	92.559.436.000	16,70%
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	118.368.347.000	267.648.203.000	379.650.690.000	451.975.322.000	469.603.470.000	92.529.436.000	22,12%
	Pencairan Dana Cadangan	12.157.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Penerimaan Pinjaman Daerah	2.500.000.000	2.500.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	2.500.000.000	2.500.000.000	6.363.998.000	100.000.000	100.000.000,00	30.000.000	-2,77%
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	16.914.327.000	19.138.659.000	9.939.937.000	7.271.000.000	3.192.000.000	17.514.000.000	66,16%
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.600.000.000	5.750.000.000	3.500.000.000	7.271.000.000	3.192.000.000	17.514.000.000	92,78%
	Pembayaran Pokok Utang	11.314.327.000	13.388.659.000	6.439.937.000	0,00	0,00	0,00	-16,78%

Sumber: BPPKAD Kab. Brebes, 2012 - 2017 (data diolah)

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Laporan Neraca Daerah menjadi salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah yang mempunyai fungsi sebagai alat manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah, dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Analisis Neraca Daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah. Secara rinci perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Brebes terdapat pada Tabel 3-6.

Tabel 3.6.

Neraca Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2012-2016 (dalam ribuan rupiah)

No	URAIAN	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016
	ASET					
1	ASET LANCAR	293.062.482.792	422.818.783.076	595.310.628.999	539.803.729.663	200.032.212.959
2	INVESTASI JANGKA PANJANG	60.639.177.764	66.975.976.727	73.307.671.136	81.021.296.880	90.047.530.333
3	ASET TETAP	1.805.965.996.612	2.171.166.484.138	2.431.072.638.947	1.882.263.529.427	2.480.844.941.054
4	ASET LAINNYA	14.543.789.738	344.513.500	1.889.108.575	1.792.539.325	21.941.520.265
	JUMLAH ASET DAERAH	2.174.211.446.906	2.661.305.757.442	3.101.580.047.657	2.504.881.095.295	2.792.866.204.611
	KEWAJIBAN	10.279.468.428	45.833.026.304	35.970.281.765	42.633.546.881	100.675.347.398
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	10.279.468.428	45.833.026.304	35.970.281.765	42.633.546.881	100.675.347.398
	EKUITAS DANA	2.163.931.978.478	2.615.472.731.138	3.065.609.765.892	2.462.247.548.415	2.692.190.857.213
1	EKUITAS DANA LANCAR	282.783.014.364	376.985.756.772	-	-	-
2	EKUITAS DANA INVESTASI	1.881.148.964.114	2.238.486.974.365	-	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.174.211.446.906	2.661.305.757.442	3.101.580.047.657	2.504.881.095.295	2.792.866.204.611

Sumber: BPPKAD Kab. Brebes, 2012 - 2016 (data diolah)

Kondisi Neraca Daerah Kabupaten Brebes dapat diketahui menggunakan beberapa perhitungan rasio berikut:

a. Rasio Lancar

Rasio lancar merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas yang dimilikinya.

$$\begin{array}{l} \text{Rasio Lancar} \\ \text{(Current Ratio)} \end{array} = \frac{\text{Kas}}{\text{Hutang Jangka Pendek}}$$

b. Rasio Cair

Rasio Cair (*Quick Ratio*) dihitung dengan mengurangi persediaan dari aset lancar, dan hasilnya dibagi dengan hutang jangka pendek. Biasanya aset lancar terdiri atas kas di kas daerah, kas di pemegang kas bagian lancar tagihan penjualan/penerimaan, bagian lancar pinjaman, bagian lancar TPTGR, piutang pajak, piutang lain-lain dan persediaan. Persediaan merupakan unsur aset lancar yang paling tidak likuid sehingga harus dikeluarkan dari perhitungan.

$$\begin{array}{l} \text{Rasio Cair} \\ \text{(Quick Ratio)} \end{array} = \frac{(\text{Aset Lancar} - \text{Persediaan})}{\text{Hutang Jangka Pendek}}$$

c. Rasio Hutang terhadap Aset (*Debt Ratio*)

Rasio hutang terhadap aset adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya menggunakan aset yang dimilikinya. Rasio hutang terhadap total aset dihitung dengan membandingkan total hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan total aset. Kewajiban tersebut terdiri dari Hutang pada pihak ketiga, Hutang Luar Negeri, Hutang pada Pemerintah Pusat dan Hutang Bunga. Analisis ini bertujuan mengukur persentase jumlah dana yang berasal dari kreditor/donatur/pihak ketiga dalam membiayai pembangunan.

$$\begin{array}{l} \text{Rasio Hutang Terhadap} \\ \text{Aset (Debt Ratio)} \end{array} = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Aset}}$$

d. Rasio Ekuitas Dana terhadap Total Aset

Rasio ekuitas dana terhadap Total Aset dihitung dengan membandingkan total ekuitas dana dengan Total Aset yang dikuasai Pemerintah. Ekuitas dana tersebut terdiri atas Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Diinvestasikan, dan Ekuitas Dana Cadangan. Rasio ini merupakan kebalikan dari rasio hutang terhadap Total Aset, sehingga yang diukur adalah jumlah dana yang disediakan dalam membiayai pembangunan.

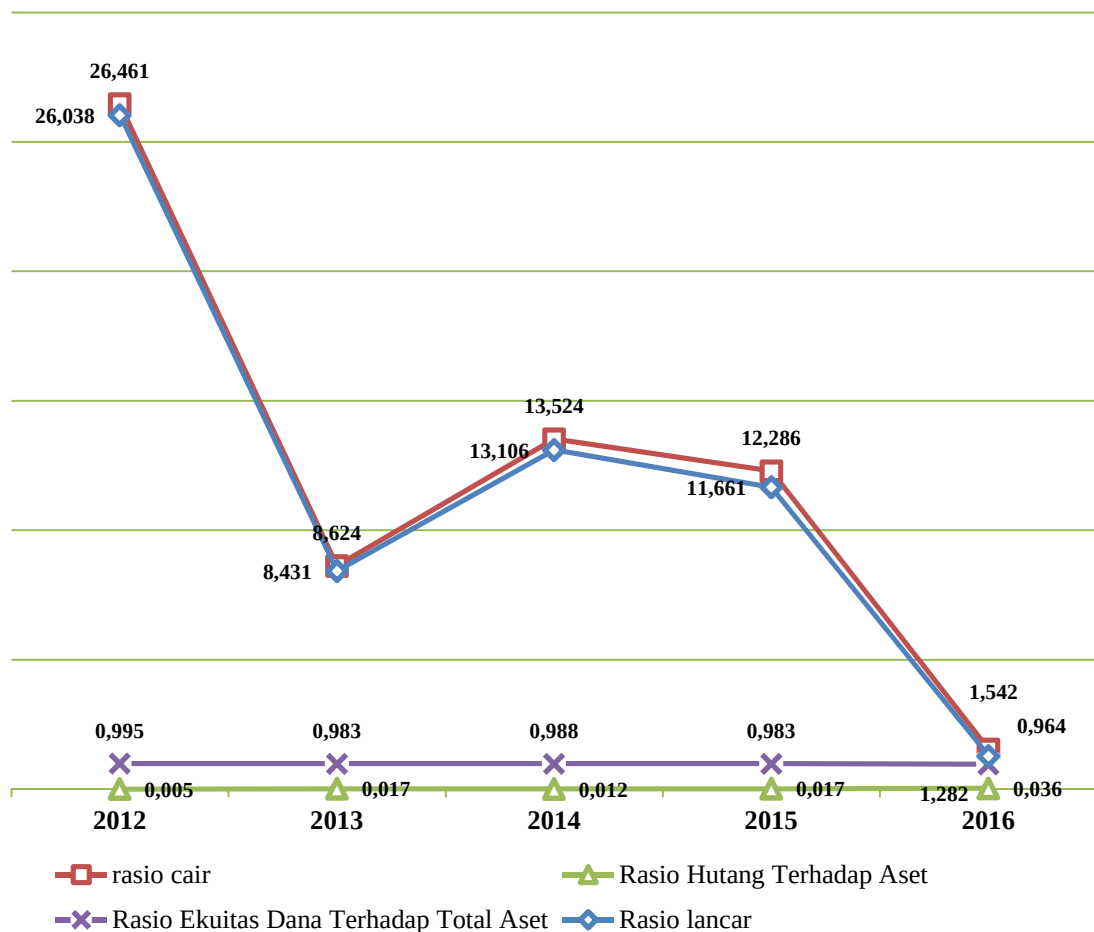
$$\text{Rasio Ekuitas Dana Terhadap Total Aset} = \frac{\text{Total Ekuitas Dana}}{\text{Total Aset}}$$

Hasil penghitungan Neraca Daerah Kabupaten Brebes dalam kurun waktu tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel 3.6 dan Gambar 3.5.

Tabel 3.7.
Penghitungan Neraca Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2012-2016

NO	URAIAN	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016
	Rasio Likuiditas					
1	Rasio Lancar (Kas/Hutang Jangka Pendek)	26,038	8,431	13,106	11,661	1,282
2	Rasio Cair ((Aset Lancar - Persediaan)/Hutang Jangka Pendek)	26,461	8,624	13,524	12,286	1,542
	Rasio Solvabilitas					
1	Rasio Hutang Terhadap Aset (Total Kewajiban/Total Aset)	0,005	0,017	0,012	0,017	0,036
2	Rasio Ekuitas Dana Terhadap Total Aset (Total Ekuitas Dana/Total Aset)	0,995	0,983	0,988	0,983	0,964

Sumber: BPPKAD Kab. Brebes, 2012 - 2016 (data diolah)



Gambar 3.9.
Perkembangan Rasio Likuiditas dan Solvabilitas Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2012 -2016

Dari Tabel 3.7 di atas secara ringkas dapat dilakukan analisis atas kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes sebagai berikut:

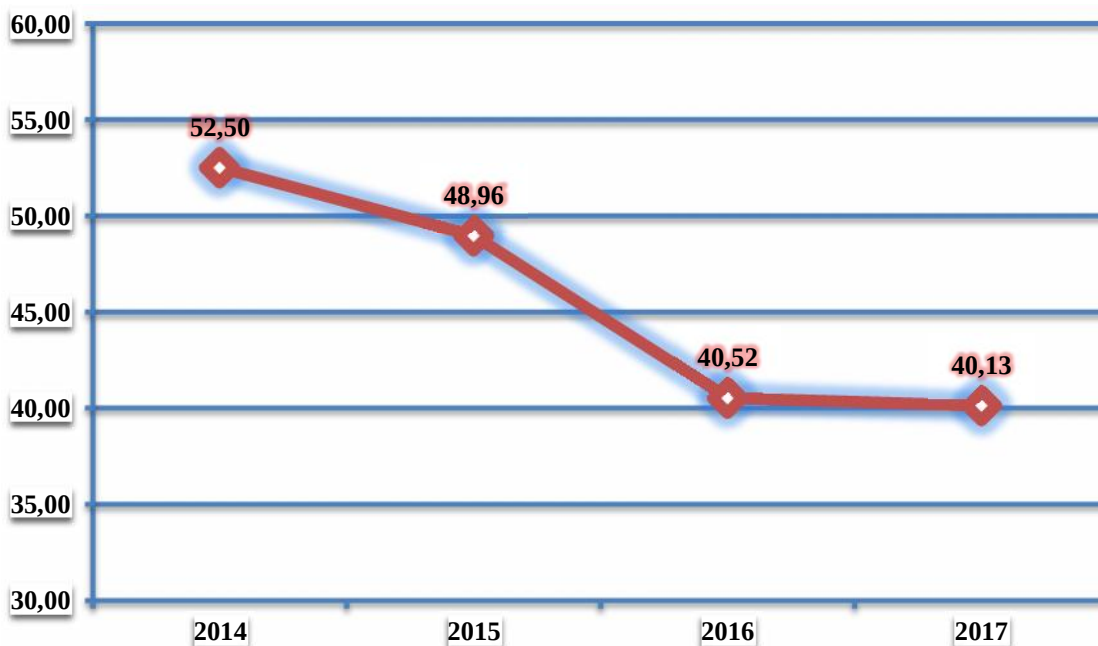
- a. Rasio Lancar (*Current Ratio*) berfluktuatif dari tahun 2012 sebesar 26,038 menjadi 1,282 pada tahun 2016. Hal ini mengindasikan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas yang dimilikinya kurang baik, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Brebes harus menerapkan kebijakan pinjaman daerah dengan sangat hati-hati.
- b. Rasio Cair (*Quick Ratio*) selama lima tahun mengalami fluktuatif, yaitu pada tahun 2012 sebesar 28,129 menjadi sebesar 1,542 pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes dalam menggunakan aktiva lancar untuk menutupi utang lancarnya dalam kondisi baik karena berada diatas angka 1. Idealnya,

- rasio lancar berada pada angka 1:1 atau minimal 0,8:1 karena apabila kurang dari itu, pemerintah daerah dianggap memiliki masalah keuangan.
- c. Rasio Hutang terhadap Aset (*Debt Ratio*) Pemerintah Kabupaten Brebes cenderung rendah sejak tahun 2012 hingga tahun 2016, yaitu sebesar 0,005 pada tahun 2012 dan naik menjadi 0,036 pada tahun 2016, meskipun mengalami fluktuatif pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa solvabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes dalam keadaan yang sehat, yaitu persentase jumlah dana yang berasal dari kreditor/donatur/pihak ketiga dalam membiayai pembangunan adalah rendah.
 - d. Rasio Ekuitas Dana terhadap Total Aset (*Total Debt Equity Ratio*) Pemerintah Kabupaten Brebes selama 5 tahun terakhir cenderung diatas 90%, yaitu sebesar 0,095 pada tahun 2012 dan 0,964 pada tahun 2016. Hal tersebut berarti bahwa jumlah dana yang disediakan dalam membiayai pembangunan sebagian besar bersumber dari kemampuan keuangan sendiri, bukan berasal dari pinjaman kreditor/donatur/pihak ketiga.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah masa lalu juga dapat dilihat dari proporsi belanja dalam memenuhi kebutuhan aparatur terhadap Total Belanja Daerah dan pembiayaan pengeluaran. Rasio ini menggambarkan bahwa semakin tinggi angka rasionya maka semakin besar proporsi APBD yang dialokasikan untuk belanja pemenuhan kebutuhan aparatur. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil angka rasio belanja pemenuhan kebutuhan aparatur maka semakin kecil proporsi APBD yang dialokasikan untuk Belanja belanja pemenuhan kebutuhan aparatur.



Gambar 3.10.

Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Brebes (%)

Perkembangan proporsi belanja pemenuhan aparatur Kabupaten Brebes menunjukkan kecenderungan menurun menjadi 40,13% pada tahun 2017. Perkembangan perkembangan proporsi pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Brebes dapat dilihat pada Gambar 3.10. diatas dan Tabel 3.8 dibawah.

Tabel 3.8.

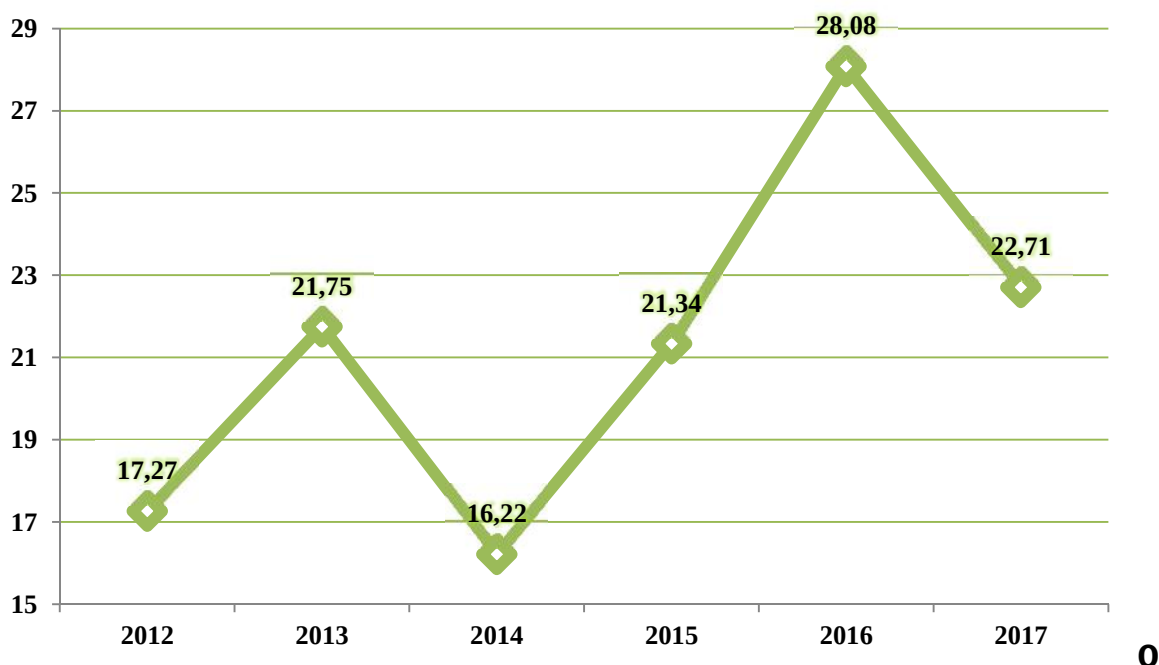
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Brebes

No.	Uraian	Total Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100%
1	TA 2014	1.230.226.831.000	2.343.078.783.000	52,50%
2	TA 2015	1.412.574.781.000	2.884.951.593.000	48,96%
3	TA 2016	1.318.901.197.000	3.254.987.853.000	40,52%
4	TA 2017	1.191.236.518.000	2.968.337.242.000	40,13%

Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah mencerminkan porsi Belanja Daerah yang dibelanjakan untuk membiayai Belanja Modal. Belanja Modal ditambah belanja barang dan jasa merupakan belanja pemerintah daerah yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi suatu daerah, di samping pengaruh dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri. Realisasi Belanja Modal akan memiliki *multiplier effect* dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Oleh karena itu, semakin tinggi angka rasionya, diharapkan akan semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah angkanya, semakin berkurang pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Brebes menunjukkan kecenderungan peningkatan dalam kurun waktu tahun 2012-2017 dari sebesar 12,27% pada tahun 2012 menjadi sebesar 22,71% pada tahun 2017. Perkembangan proporsi Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah dapat dilihat pada Gambar 3.11.



Gambar 3.11.
Proporsi Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu juga dapat dilihat dari ruang fiskal. Ruang fiskal merupakan suatu konsep untuk mengukur fleksibilitas yang dimiliki pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Semakin besar ruang fiskal yang dimiliki maka akan semakin besar pula fleksibilitas yang dimiliki untuk mengalokasikan belanja pada kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas daerah seperti pembangunan infrastruktur daerah. Perhitungan ruang fiskal daerah dihitung dengan mengurangi total Pendapatan Daerah

dengan pendapatan hibah, pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya (*earmarked*) dan belanja yang sifatnya mengikat, yaitu Belanja Pegawai dan Belanja Bunga, kemudian dibagi dengan total pendapatannya.

Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa ruang fiskal daerah Kabupaten Brebes saat ini masih sangat terbatas (kisaran 30-an % dari pendapatan) hal ini dikarenakan sebagian besar anggaran digunakan untuk Belanja Pegawai. Hal ini menjadi tantangan ke depan bagi pemerintah daerah untuk memperbesar kapasitas fiskal daerah. Kapasitas Fiskal yang besar, diharapkan akan mampu mendanai pos-pos Belanja Daerah dalam APBD, khususnya untuk pos Belanja Modal, karena idealnya porsi belanja rutin lebih kecil dari belanja modal. Memperbesar ruang fiskal daerah untuk Belanja Modal sangat penting karena dapat menjadi stimulus perekonomian daerah. Pemerintah Daerah diharapkan dapat membuat kebijakan yang mampu menciptakan iklim perekonomian yang kondusif. Selain itu, efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran di daerah juga dapat mendukung terciptanya ruang fiskal. Hasil perhitungan kapasitas fiskal Kabupaten Brebes dapat dilihat pada Tabel 3.8.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan pendanaan pembangunan daerah diluar kapasitas pendapatan daerah serta kewajiban-kewajiban yang menjadi beban pemerintah daerah. Analisis pembiayaan daerah tidak dapat terlepas dari kondisi defisit yang terjadi dalam APBD sehingga diperlukan pendanaan dari penerimaan pembiayaan daerah. Defisit riil dalam APBD terjadi apabila pendapatan daerah dikurangi dengan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah menimbulkan adanya defisit dalam APBD. Kondisi defisit riil APBD Kabupaten Brebes Tahun 2010 – 2015 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.9. Defisit riil yang terjadi ditutup dengan penerimaan pembiayaan sebagaimana terlihat pada Tabel 3.10.

Tabel 3.9.
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Brebes Tahun 2014-2016

No.	Uraian	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	2.043.920.281.708	2.417.210.235.716	2.572.334.594.629
	Dikurangi realisasi :			
2	Belanja Daerah	1.967.168.957.601	2.392.376.921.588	2.946.269.402.281
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	5.918.481.900	7.271.000.000	3.192.000.000
	Defisit riil	70.832.842.207	17.562.314.128	(377.126.807.652)

Sumber: BPPKAD Kab. Brebes, 2014 - 2016 (data diolah)

Tabel 3.10.
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Brebes Tahun 2014-2016

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil					
		2014		2015		2016	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	Silpa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	379.650.689.317	535,98%	451.975.221.074	2573,55%	469.603.469.902	124,52%
2	Pencairan Dana Cadangan	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	1.141.849.200	1,61%	-	0,00%	-	0,00%
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	349.840.350	0,49%	65.934.700	0,38%	52.771.600	0,01%
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%

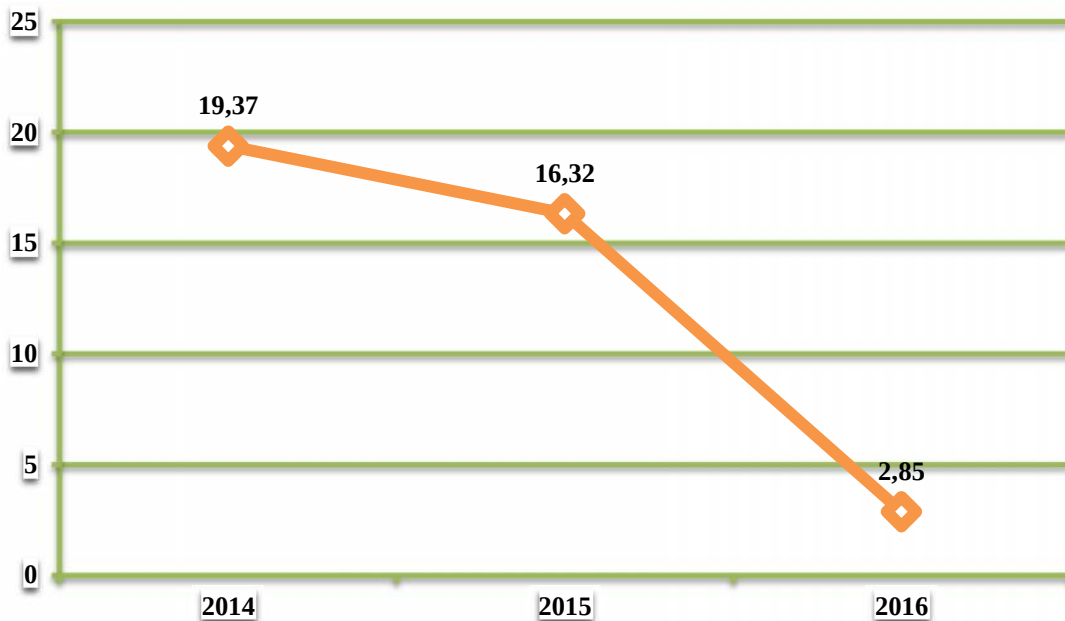
Sumber: BPPKAD Kab. Brebes, 2014 - 2016 (data diolah)

Besarnya SiLPA pada akhir tahun menjadi salah satu sumber pembiayaan pada tahun berikutnya untuk mendanai belanja daerah. Rasio SiLPA terhadap total belanja daerah diharapkan akan semakin turun mengingat tingginya SiLPA yang terjadi bisa menunjukkan rendahnya penyerapan belanja daerah. Namun demikian, besarnya SiLPA juga disebabkan adanya dana dari pusat yang bersifat *earmark* dan tidak dapat terserap pada akhir tahun anggaran dan sisa saldo kas pada BLUD. Rasio SiLPA terhadap total belanja di Kabupaten Brebes Tahun 2014-2016 mengalami kecenderungan menurun, dengan nilai sebesar 19,37% pada tahun 2014 dan 2,85 % pada tahun 2016. Secara umum rasio dan kontribusi SiLPA terhadap Total Belanja Daerah trendnya menurun sebagaimana terlihat pada Tabel 3.11 dan Gambar 3.12.

Tabel 3.11.
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Brebes

No.	Uraian	2014		2015		2016	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1	Jumlah SiLPA	451.975.221.074	100,00%	469.603.469.902	100,00%	2.529.433.850	100,00%
2	Pelampauan penerimaan PAD	23.365.759.000	5,17%	42.650.277.000	9,08%	0	0,00%
3	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	0	0,00%	32.591.228.000	6,94%	0	0,00%
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	428.609.462.074	94,83%	350.468.795.902	74,63%	92.529.433.850	100,00%
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	0,00%	-	0,00%	0	0,00%
7	Kegiatan lanjutan	-	0,00%	43.893.169.000	9,35%	0	0,00%

Sumber: BPPKAD Kab. Brebes, 2014 - 2016 (data diolah)



Gambar 3.12.
Rasio SILPA terhadap Total Belanja Daerah

3.3. Kerangka Pendanaan

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Melihat capaian kinerja Pendapatan Daerah Tahun 2012-2017, kedepan Pendapatan Daerah diharapkan dapat lebih meningkat, yang diikuti dengan berbagai upaya. Beberapa kebijakan pendapatan daerah dirumuskan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah selama Tahun 2017-2022, yaitu sebagai berikut:

- 1). Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
- 2). Pendapatan daerah dikelola secara tertib dan transparan dengan menerapkan basis akrual;
- 3). Intensifikasi Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 4). Kajian-kajian tentang potensi pendapatan daerah;
- 5). Peningkatan kualitas pelayanan pajak/retribusi, melalui pemanfaatan Teknologi Informasi (IT) dan Sarpras;
- 6). Perkuatan basis data dan potensi pajak dan retribusi daerah;
- 7). Peningkatan kualitas SDM aparatur pengelola pajak dan retribusi daerah;

- 8). Optimalisasi kinerja bisnis BUMD yang berdampak terhadap kesehatan dan bagi hasil laba BUMD ke PAD;
- 9). Peningkatan tata kelola BLUD sesuai dengan regulasi yang berlaku dalam rangka mendukung akuntabilitas PPK-BLUD;
- 10). Optimalisasi aset daerah.

Berdasarkan kebijakan tersebut dan dengan mempertimbangkan laju capaian kinerja ekonomi makro daerah, maka proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022 disusun dengan berbasis pada asumsi:

- 1). Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan memperhatikan kinerja realisasi PAD Tahun 2012-2017 dan perilaku dari potensi masing-masing objek pajak dan objek retribusi daerah, kinerja, dan rencana bisnis BUMD dan BLUD serta trend pendapatan PAD lainnya;
- 2). Menyesuaikan kebijakan dana transfer dari pemerintah berdasarkan pada pencapaian Nawa Cita sampai dengan Tahun 2019;
- 3). Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah, utamanya terkait dengan kebijakan hibah dari pemerintah, dana penyesuaian/DID serta kebijakan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah selama Tahun 2017-2022 diformulasikan secara rinci sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12.
Proyeksi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022

Uraian	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PENDAPATAN	2.875.777.806.000	2.908.469.000.000	2.938.365.850.000	2.999.041.400.000	3.090.630.050.000	3.185.053.325.000
PENDAPATAN ASLI DAERAH	350.848.264.000	351.614.000.000	361.820.000.000	372.171.400.000	384.955.050.000	398.208.075.000
Pendapatan Pajak Daerah	76.570.140.000	77.314.000.000	85.000.000.000	89.250.000.000	93.712.500.000	98.398.125.000
Hasil Retribusi Daerah	15.035.372.000	14.000.000.000	15.500.000.000	16.275.000.000	16.763.250.000	17.266.150.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.309.000.000	16.000.000.000	16.320.000.000	16.646.400.000	16.979.300.000	17.318.800.000
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	243.933.752.000	244.300.000.000	245.000.000.000	250.000.000.000	257.500.000.000	265.225.000.000
DANA PERIMBANGAN	1.784.498.941.000	1.783.444.000.000	1.797.000.000.000	1.833.000.000.000	1.887.990.000.000	1.944.629.700.000
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	32.465.473.000	35.000.000.000	35.175.000.000	35.833.750.000	36.765.500.000	37.718.700.000
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	6.328.870.000	6.500.000.000	6.825.000.000	7.166.250.000	7.524.500.000	7.900.000.000
Dana Alokasi Umum	1.317.061.804.000	1.322.465.000.000	1.330.000.000.000	1.340.000.000.000	1.380.200.000.000	1.421.606.000.000
Dana Alokasi Khusus	428.642.794.000	419.479.000.000	425.000.000.000	450.000.000.000	463.500.000.000	477.405.000.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	740.430.601.000	773.411.000.000	779.545.850.000	793.870.000.000	817.685.000.000	842.215.550.000
Pendapatan Hibah	165.455.452.000	167.800.000.000	165.000.000.000	165.500.000.000	170.465.000.000	175.578.950.000
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	186.111.104.000	191.695.000.000	197.445.850.000	203.370.000.000	209.470.000.000	215.754.100.000
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	42.559.517.000	0	0	0	0	0
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	75.382.190.000	70.000.000.000	72.100.000.000	75.000.000.000	77.250.000.000	79.567.500.000
Dana Desa	270.922.338.000	343.916.000.000	345.000.000.000	350.000.000.000	360.500.000.000	371.315.000.000

Sumber: BPPKAD Kab. Brebes, 2017 - 2022 (data diolah)

Belanja daerah sebagai *fiscal tool* dapat digunakan pemerintah daerah untuk memberikan pemerataan belanja daerah dan menggerakkan perekonomian daerah. Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

- 1). Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan publik;
- 2). Belanja yang bersifat wajib dan mengikat diutamakan dengan berprinsip pada asas efisien, efektif, dan akuntabel;
- 3). Belanja dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi prioritas dalam rangka meningkatkan pelayanan publik sesuai kewenangan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4). Belanja pegawai dianggarkan sesuai regulasi yang berlaku dan tunjangan pegawai diarahkan pada kinerja Aparat Sipil Negara (ASN);
- 5). Belanja daerah didasarkan pada anggaran berbasis kinerja, dengan demikian semua belanja daerah harus mempunyai tolok ukur kinerja yang jelas dan terukur;
- 6). Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung secara bertahap diupayakan mencapai komposisi yang ideal dengan tetap memperhatikan regulasi yang berlaku;
- 7). Belanja operasional SKPD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dan belanja pembangunan daerah secara proporsional sesuai kemampuan keuangan daerah;
- 8). Pendanaan pembangunan daerah sesuai dengan penyerahan urusan/kewenangan kepada kabupaten/kota;
- 9). Pendanaan program/kegiatan berdasarkan pada prioritas pembangunan sebagai penjabaran dari visi dan misi kepala daerah terpilih;
- 10). Pemenuhan alokasi anggaran yang bersifat mengikat, diutamakan mendanai belanja aparatur, belanja operasional, dan belanja yang bersifat guna menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.

Secara lengkap, proyeksi kebutuhan Belanja Daerah Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13.
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022

Uraian	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
BELANJA	2.950.823.242.000	2.991.258.323.000	3.125.315.850.000	2.991.818.900.000	3.083.384.375.000	3.187.703.455.000
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.574.029.681.000	1.683.787.163.000	1.671.270.000.000	1.624.053.500.000	1.637.094.575.000	1.651.596.228.000
Belanja Pegawai	1.068.385.408.000	1.083.674.000.000	1.084.520.000.000	1.086.201.000.000	1.088.787.000.000	1.092.349.000.000
Belanja Bunga	0	3.600.000.000	20.700.000.000	15.300.000.000	9.900.000.000	4.500.000.000
Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0
Belanja Hibah	28.427.700.000	34.655.800.000	35.000.000.000	35.000.000.000	36.050.000.000	37.131.500.000
Belanja Bantuan Sosial	21.421.874.000	19.904.750.000	15.000.000.000	20.000.000.000	20.600.000.000	21.218.000.000
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	11.292.080.000	10.247.000.000	10.050.000.000	10.552.500.000	11.047.575.000	11.566.428.000
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	439.502.619.000	526.705.613.000	500.000.000.000	450.000.000.000	463.500.000.000	477.405.000.000
Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	5.000.000.000	6.000.000.000	7.000.000.000	7.210.000.000	7.426.300.000
BELANJA LANGSUNG	1.376.793.561.000	1.307.471.160.000	1.454.045.850.000	1.367.765.400.000	1.446.289.800.000	1.536.107.227.000
Belanja Pegawai	74.154.418.000	49.695.000.000	50.000.000.000	52.000.000.000	53.560.000.000	55.166.800.000
Belanja Barang dan Jasa	632.545.948.000	522.776.160.000	554.045.850.000	560.765.400.000	589.299.800.000	624.475.427.000
Belanja Modal	670.093.195.000	735.000.000.000	850.000.000.000	755.000.000.000	803.430.000.000	856.465.000.000

Sumber: BPPKAD Kab. Brebes, 2017 - 2022 (data diolah)

Proyeksi penerimaan pembiayaan daerah direncanakan secara selektif dan berimbang antara kebutuhan pembiayaan pembangunan dan kapasitas keuangan daerah. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) diproyeksikan sebagai salah satu sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan analisa realisasi SiLPA lima tahun sebelumnya. Dalam lima tahun ke depan direncanakan adanya pinjaman daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan daerah jangka menengah yang direncanakan untuk membiayai infrastruktur pelayanan publik.

Pada sisi pengeluaran pembiayaan, dalam lima tahun kedepan Pemerintah Kabupaten Brebes merencanakan adanya penyertaan modal kepada beberapa BUMD guna meningkatkan kinerja dan penguatan struktur modal BUMD serta pengembalian pinjaman daerah. Gambaran proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2016-2022 dapat dilihat pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14.
Proyeksi Pembiayaan Kab. Brebes Tahun 2017-2022

Uraian	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PEMBIAYAAN DAERAH						
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	92.559.436.000	108.977.323.000	261.950.000.000	70.277.500.000	70.779.325.000	71.215.880.000
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	92.529.436.000	68.947.323.000	61.920.000.000	70.247.500.000	70.748.425.000	71.184.053.000
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	40.000.000.000	200.000.000.000	-	-	-
Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.900.000	31.827.000
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	17.514.000.000	26.188.000.000	75.000.000.000	77.500.000.000	78.025.000.000	68.565.750.000
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	17.514.000.000	16.188.000.000	15.000.000.000	17.500.000.000	18.025.000.000	18.565.750.000
Pembayaran Pokok Utang	-	10.000.000.000	60.000.000.000	60.000.000.000	60.000.000.000	50.000.000.000

Sumber: BPPKAD Kab. Brebes, 2017 - 2022 (data diolah)

3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Guna menghitung kerangka pendanaan ke depan, dilakukan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.15.

Tabel 3.15.

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kab. Brebes Tahun 2017-2022

No .	Uraian	Proyeksi Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pendapatan	2.875.777.806.000	2.908.469.000.000	2.938.365.850.000	2.999.041.400.000	3.090.630.050.000	3.185.053.325.000
2	Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	92.529.436.000	68.947.323.000	61.920.000.000	70.247.500.000	70.748.425.000	71.184.053.000
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	40.000.000.000	200.000.000.000	-	-	-
5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.900.000	31.827.000
	Total Penerimaan Anggaran	2.968.337.242.000	3.017.446.323.000	3.200.315.850.000	3.069.318.900.000	3.161.409.375.000	3.256.269.205.000
	Dikurangi :						
4	Belanja Tak Langsung	1.574.029.681.000	1.744.905.458.000	1.716.050.000.000	1.707.052.500.000	1.758.442.575.000	1.811.383.277.250
5	Pengeluaran Pembiayaan	17.514.000.000	26.188.000.000	75.000.000.000	77.500.000.000	78.025.000.000	68.565.750.000
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1.376.793.561.000	1.246.352.865.000	1.409.265.850.000	1.284.766.400.000	1.324.941.800.000	1.376.320.177.750

Sumber: BPPKAD Kab. Brebes, 2017 - 2022 (data diolah)

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang kemudian akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan proyeksi seperti digambarkan pada Tabel 3.16.

Tabel 3.16.
Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kab. Brebes Tahun 2019-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Total Penerimaan Anggaran	3.017.446.323.000	3.200.315.850.000	3.069.318.900.000	3.161.409.375.000	3.256.269.205.000
	Prioritas 1					
1	Belanja Pegawai	1.083.674.000.000	1.084.520.000.000	1.086.201.000.000	1.088.787.000.000	1.092.349.000.000
2	Belanja Tidak terduga	5.000.000.000	6.000.000.000	7.000.000.000	7.210.000.000	7.426.300.000
3	Penyertaan modal	16.188.000.000	15.000.000.000	17.500.000.000	18.025.000.000	18.565.750.000
4	Belanja Dana Desa	343.916.000.000	345.000.000.000	350.000.000.000	360.500.000.000	371.315.000.000
5	Belanja Bunga	3.600.000.000	20.700.000.000	15.300.000.000	9.900.000.000	4.500.000.000
6	Pembayaran Pokok Utang	10.000.000.000	60.000.000.000	60.000.000.000	60.000.000.000	50.000.000.000
	Prioritas 2					
1	Belanja Bersumber dana DAK	419.479.000.000	425.000.000.000	450.000.000.000	463.500.000.000	477.405.000.000
2	Belanja Bersumber Bantuan Keuangan Provinsi	70.000.000.000	72.100.000.000	75.000.000.000	77.250.000.000	79.567.500.000
3	Belanja Bersumber Dana DBHCHT	6.500.000.000	6.825.000.000	7.166.250.000	7.524.500.000	7.900.000.000
3	Belanja Bagi Hasil	10.247.000.000	10.050.000.000	10.552.500.000	11.047.575.000	11.566.428.000
4	Belanja Program Prioritas dalam rangka pencapaian visi misi Kepala Daerah dan Urusan Pemerintah Daerah	467.576.160.000	605.120.850.000	485.599.150.000	537.515.300.000	599.919.727.000
	Prioritas 3					
1	Belanja Hibah	34.655.800.000	35.000.000.000	35.000.000.000	36.050.000.000	37.131.500.000
2	Belanja Bansos	19.904.750.000	15.000.000.000	20.000.000.000	20.600.000.000	21.218.000.000
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	526.705.613.000	500.000.000.000	450.000.000.000	463.500.000.000	477.405.000.000
	Surplus Anggaran Riil/Berimbang	0	0	0	0	0

Sumber: BPPKAD Kab. Brebes, 2017 - 2022 (data diolah)

3.3.3. Kerangka Regulasi

Keterbatasan keuangan daerah dalam mendukung pembangunan daerah menyebabkan tidak semua rencana program/kegiatan dapat dibiayai dari kerangka pendanaan APBD. Guna mendukung pengelolaan keuangan daerah dan pendanaan pembangunan, maka perlu adanya kerangka regulasi yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan, yaitu:

- 1). Melakukan evaluasi atas Perda tentang Pajak Daerah, Perda tentang Retribusi Daerah, Perda tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan serta Perda tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- 2). Melakukan updating data Obyek Pajak Bumi dan Bangunan dari data eksisting maupun Obyek Pajak Bumi Bangunan yang selama ini belum terdaftar, serta penerapan pajak katering dalam rangka peningkatan pajak daerah.
- 3). Melakukan penyesuaian atas Perda tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai regulasi yang baru dan kebijakan nasional;
- 4). Meningkatkan manajemen aset daerah dan mengoptimalkan pemakaian kekayaan daerah melalui inovasi-inovasi pengelolaan aset daerah dan kerjasama dengan pihak ketiga/investasi;
- 5). Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pendanaan program/kegiatan dari sumber dana APBN, dana dekonsentrasi dan APBD Provinsi Jawa Tengah;
- 6). Pendanaan dari APBN diharapkan untuk mendanai program dan kegiatan yang sinkron dengan kebijakan Pemerintah Pusat;
- 7). Pendanaan dari APBD Provinsi Jawa Tengah diharapkan mendanai program dan kegiatan yang menjadi komitmen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 8). Kebijakan pembiayaan pembangunan melalui hutang kepada pemerintah dan pihak ketiga, utamanya terhadap prioritas pembangunan yang membutuhkan dana besar, seperti bidang infrastruktur dan sarana prasarana layanan dasar kepada masyarakat;
- 9). Meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk mendanai program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional, regional dan daerah. Oleh karena itu tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan melakukan analisis terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik di daerah, regional maupun tingkat nasional. Perspektif selama 5 tahun ke depan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes tahun 2017 -2022 didasarkan pada kondisi objektif saat ini dan masa lalu dan diprediksi kedepan. Prediksi dilakukan terhadap indikator-indikator pembangunan yang bersifat makro baik ekonomi, politik, maupun sosial. Perspektif Kabupaten Brebes untuk lima tahun kedepan dijabarkan kedalam permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis, yang akan diuraikan dalam uraian berikut.

4.1 Permasalahan Pembangunan

Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

- a. Keterjangkauan pendidikan pada jenjang PAUD masih rendah, ditunjukkan APM PAUD yang sangat rendah, hal ini disebabkan oleh rendahnya minat masyarakat menyekolahkan putra-putrinya pada lembaga PAUD;
- b. Keterjangkauan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar masih rendah, angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan dasar relatif tinggi, dan angka melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi relatif rendah, baik melanjutkan ke jenjang SMP/MTs maupun ke jenjang SMA/SMK/MA;
- c. Keterjangkauan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah masih rendah, serta angka putus sekolah pada jenjang SMA/MA relatif tinggi;
- d. Belum meratanya akses pendidikan yang berkualitas, dilihat dari masih kurangnya ketersediaan sarana prasarana pendukung pembelajaran tingkat SD/MI dan SMP/MTs, terutama ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan yang sesuai standar;
- e. Kurangnya jumlah tenaga pendidik pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs khususnya yang berstatus ASN, serta rendahnya persentase guru yang memenuhi kualifikasi D-IV/S1, dan sedikitnya jumlah guru yang memperoleh sertifikasi profesi;

- f. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pendidikan non formal.

2. Kesehatan

- a. Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), antara lain disebabkan oleh hipertensi, pendarahan, kurangnya kesiapsiagaan keluarga, dan deteksi kehamilan risiko tinggi;
- b. Masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA), antara lain disebabkan oleh masih kurangnya penanganan neonatus komplikasi (BBLR dan *asfeksia*) dan masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan dasar dan rujukan;
- c. Masih tingginya penularan penyakit, yaitu HIV/AIDs, TB, kusta, *filariasis*, *pneumonia* pada balita, DBD/cikungunya, diare, dan penyakit PD3I (Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi);
- d. Masih rendahnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebagai tindakan pencegahan penyakit;
- e. Masih tingginya kasus gizi buruk, gizi kurang dan *stunting*. Hal ini dikarenakan masih rendahnya pengetahuan masyarakat khususnya ibu dalam pemberian makanan pendamping ASI, masih kurangnya cakupan pemberian ASI eksklusif, dan masih tingginya angka kemiskinan.
- f. Masih kurangnya sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar dan tenaga kesehatan dibandingkan dengan jumlah penduduk, sehingga akses pelayanan kesehatan dasar belum terpenuhi secara merata.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Masih adanya jalan dan jembatan dalam kondisi rusak sedang maupun rusak berat;
- b. Rendahnya jaringan irigasi dalam kondisi baik;
- c. Masih rendahnya prosentase saluran drainase dalam kondisi baik, sehingga menyebabkan terjadinya genangan dan banjir;
- d. Masih banyaknya titik longsor di daerah aliran sungai yang belum terbangun dinding penahan.
- e. Banyaknya jumlah sumberdaya air berupa waduk/embung yang mengalami kerusakan;
- f. Belum optimalnya pengelolaan perijinan pemanfaatan ruang dan pengaturan pemanfaatan ruang.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- a. Masih cukup tingginya jumlah rumah tidak layak huni;
- b. Masih rendahnya kepemilikan rumah terutama dari rumah tangga miskin;
- c. Masih terdapatnya lingkungan permukiman kumuh;
- d. Masih kurangnya penyediaan rumah baik oleh pengembang maupun masyarakat;

- e. Masih rendahnya penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sehat perumahan, terlihat dari persentase rumah tangga berakses air minum dan bersanitasi layak yang masih rendah.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- a. Masih adanya kasus pelanggaran K3 (ketertiban, keamanan, dan keindahan);
- b. Masih cukup tingginya jumlah kriminalitas;
- c. Makin banyaknya muncul berita *hoax* dan *hate speech* di media sosial;
- d. Adanya potensi *cybercrime*, terorisme, radikalisme, dan intoleransi antar umat beragama;
- e. Belum optimalnya penegakkan Peraturan Daerah dan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah.

6. Sosial

- a. Belum optimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara menyeluruh;
- b. Belum optimalnya kinerja Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

- a. Masih banyaknya jumlah pengangguran di Kabupaten Brebes;
- b. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja disebabkan tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja yang rendah.
- c. Masih rendahnya kesempatan kerja dan belum optimalnya penempatan tenaga kerja.
- d. Kurang optimalnya pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk pelatihan peningkatan ketrampilan tenaga kerja.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Belum optimalnya kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, yang ditunjukkan dengan IPG dan IDG yang masih cukup rendah;
- b. Masih adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), antara lain karena kurangnya edukasi tentang perlindungan dan hak perempuan dan anak;
- c. Belum optimalnya penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan belum memadainya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
- d. Masih adanya tenaga kerja di bawah umur.

3. Ketahanan Pangan

- a. Terjadi tren penurunan produksi tanaman pangan utama, karena salah satunya adalah adanya perubahan fungsi lahan pertanian menjadi lahan industri;

- b. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas pola konsumsi pangan penduduk, karena pengetahuan, budaya dan kebiasaan makan masyarakat kurang mendukung konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman;
- c. Cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat masih terbatas, serta belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan lumbung pangan.

4. Pertanian

Belum efektifnya penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, disebabkan rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai administrasi pertanahan.

5. Lingkungan Hidup

- a. Belum optimalnya perlindungan terhadap kawasan lindung, daerah tangkapan air dan sumber mata air, serta penanganan wilayah rawan longsor;
- b. Masih rendahnya kemampuan pengelolaan sampah, hal ini terlihat dari cakupan penanganan sampah yang masih sangat kecil.
- c. Belum mencukupinya sarana prasarana dan pengelolaan persampahan secara merata;
- d. Belum optimalnya pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Belum optimalnya capaian Program KTP-el;
- b. Masih rendahnya cakupan kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Kemandirian dan keberdayaan masyarakat desa belum terwujud secara optimal, dapat diketahui dari tindak lanjut kegiatan pasca program pemberdayaan masyarakat belum mampu untuk melestarikan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.
- b. Belum terwujudnya secara optimal pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif masyarakat desa, dapat dilihat jumlah kelompok usaha dan kapasitas dalam pengembangan usaha ekonomi produktif masih rendah.
- c. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil, pengelolaan administrasi desa, dan pengelolaan keuangan desa.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk ber-KB, dapat dilihat dari tingginya *unmetneed*;
- b. Masih kurangnya partisipasi PUS untuk ber KB, terutama laki-laki;
- c. Masih rendahnya kesadaran penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

9. Perhubungan

- a. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana LLAJ untuk meningkatkan keamanan, keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan dan penumpang angkutan umum.
- b. Masih kurangnya pelayanan angkutan umum, ditandai belum semua wilayah tersedia jaringan transportasi umum, transportasi massal, terminal penumpang umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimum, dan dermaga penyeberangan di waduk malahayu dan waduk penjalin.

10. Komunikasi dan Informatika

- a. Belum semua perangkat daerah memiliki *website* resmi;
- b. Belum optimalnya kerjasama informasi pemerintah daerah dengan media massa dalam penyebarluasan program dan hasil pembangunan daerah.
- c. Terbatasnya jaringan komunikasi dan informatika di berbagai wilayah dalam menunjang akses masyarakat untuk memperoleh informasi melalui teknologi informasi.
- d. Belum meratanya ketersediaan SDM dalam bidang teknologi informasi dan terbatasnya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).

11. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

- a. Iklim usaha yang mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah belum kondusif, ditandai pelayanan perijinan UMKM yang belum optimal, dan sulitnya akses terhadap peluang pasar produk UMKM, dan persaingan usaha yang kurang sehat.
- b. Belum berkembangnya kelembagaan koperasi menjadi koperasi sehat dan aktif;
- c. Masih kurangnya ketersediaan penunjang usaha, terutama sarana pemasaran dan informasi pasar, ketersediaan bahan baku, dan sarana teknologi produksi.
- d. Masih lemahnya kelembagaan koperasi terutama menyangkut aspek legalitas usaha, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
- e. Masih rendahnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola koperasi mengenai manajemen pengelolaan koperasi.

12. Penanaman Modal

- a. Menurunnya investasi yang disebabkan belum optimalnya promosi terhadap potensi dan peluang investasi daerah, baik dalam penyediaan media promosi, kerjasama promosi, maupun strategi pemasaran investasi, serta belum terpadunya sistem informasi penanaman modal Kabupaten Brebes dengan pusat dan provinsi.
- b. Masih rendahnya iklim investasi dan realisasi investasi, diantaranya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Stop Service*) yang terkendala pada aspek landasan hukum dan teknis pelayanan akibat belum semua

perizinan ditangani oleh PTSP, dan belum optimalnya pelayanan perijinan usaha melalui elektronik (SPIPISE). Banyak dan kompleksnya perizinan yang dilayani oleh PTSP tidak diimbangi dengan jumlah/kuantitas dan kualitas SDM aparatur perizinan. Selain itu masih kurangnya fasilitas, sarana dan prasarana yang mendukung kenyamanan pemohon izin dan memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi perizinan.

- c. Terbatasnya sarana dan prasarana daerah penunjang investasi daerah untuk menarik minat investor menanamkan modalnya di Kabupaten Brebes.

13. Kepemudaan dan Olah Raga

- a. Belum tumbuhnya jiwa kewirausahaan di kalangan pemuda, disebabkan rendahnya kapasitas keterampilan usaha;
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga untuk menunjang aktivitas latihan dan pertandingan olahraga.

14. Statistik

- a. Terbatasnya ketersediaan data statistik daerah, belum mampu mengakomodir kebutuhan data untuk kepentingan perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan maupun untuk kepentingan lainnya.
- b. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD dalam pengelolaan data statistik untuk mendukung perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

15. Persandian

Terbatasnya sarana prasarana dan kuantitas SDM persandian.

16. Kebudayaan

- a. Belum optimalnya pengembangan nilai-nilai budaya daerah, terutama budaya lokal dan kearifan lokal;
- b. Belum optimalnya pemeliharaan, pengelolaan dan perlindungan kekayaan budaya, terutama benda-benda cagar budaya;
- c. Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian keragaman budaya daerah, disebabkan keterbatasan sarana dan jumlah pertunjukan seni budaya.

17. Perpustakaan

- a. Masih rendahnya minat baca masyarakat disebabkan belum terbentuknya budaya gemar membaca dan menurunnya jumlah keanggotaan baru perpustakaan.
- b. Masih terbatasnya koleksi buku baru di perpustakaan.
- c. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan perpustakaan.
- d. Belum optimalnya penambahan, penyelamatan dan pelestarian koleksi perpustakaan, disebabkan kesadaran masyarakat untuk menjaga koleksi perpustakaan dengan baik.

18. Kearsipan

- a. Pengelolaan arsip secara baku belum sepenuhnya diaplikasikan oleh SKPD, disebabkan sedikitnya cakupan SDM yang mendapatkan pelatihan kearsipan.
- b. Masih rendahnya cakupan penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah, disebabkan terbatasnya kuantitas arsiparis.
- c. Masih belum optimalnya pelayanan informasi kearsipan, tercermin dari terbatasnya sistem informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.
- d. Masih belum optimalnya pemanfaatan media elektronik dalam rangka preservasi kearsipan, terlihat dari penyimpanan (pengalihmediaan) arsip dalam media elektronik masih belum dilakukan.

Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

- a. Menurunnya hasil tangkapan akibat meningkatnya eksploitasi terhadap sumberdaya perairan laut dan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.
- b. Produktivitas usaha perikanan budidaya khususnya air payau masih kurang, disebabkan oleh degradasi lahan budidaya sebagai akibat dari eksploitasi berlebihan, terbatasnya keterampilan, sarana prasarana, akses modal, dan akses pemasaran hasil usaha.
- c. Terbatasnya sarana prasarana untuk menunjang peningkatan produksi perikanan tangkap.

2. Pariwisata

- a. Rendahnya jumlah pengunjung obyek wisata dengan yang rata-rata lama tinggalnya hanya 1 hari, sehingga belum mampu mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- b. Kurangnya promosi dan penyebaran informasi pariwisata secara intensif untuk mengenalkan potensi obyek wisata di Kabupaten Brebes.
- c. Terbatasnya sarana prasarana di obyek wisata unggulan daerah.
- d. Rendahnya keterlibatan masyarakat dan rendahnya kemitraan pemerintah daerah dengan dunia usaha dalam pengembangan pariwisata (agrowisata, ekowisata dan wisata bahari), termasuk dalam penyediaan produk industri dan jasa pariwisata.

3. Pertanian

- a. Belum optimalnya ketersediaan prasarana dan sarana produksi baik usaha pertanian maupun peternakan;
- b. Telur asin yang telah menjadi ikon produk olahan hasil ternak, masih “berjalan sendiri”, belum didukung produk-produk pertanian/peternakan lain baik sebagai produk penyela, pengikut, maupun periak pasar telur asin sehingga dapat memperkuat posisi pasarnya;

- c. Masih rendahnya produksi peternakan, terutama sapi potong dan sapi perah, sehingga belum mencukupi kebutuhan masyarakat Kabupaten Brebes;
- d. Masih kurangnya produksi hasil peternakan untuk mendukung swasembada daging dan susu, baik sebagai penambahan pendapatan masyarakat maupun untuk mendukung ketahanan pangan.

4. Perdagangan

- a. Masih terbatasnya jenis produk/komoditas ekspor, volume dan nilai realisasi ekspor dari Kabupaten Brebes.
- b. Belum terbangunnya sistem informasi perdagangan untuk mendukung distribusi barang kebutuhan masyarakat secara merata. Meningkatnya jumlah pedagang kaki lima sehingga menimbulkan ketidaknyamanan pengguna jalan.
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana pasar tradisional, sementara pasar retail semakin banyak.

5. Perindustrian

- a. Daya saing produk industri kecil dan menengah masih rendah dibandingkan produk sejenis dari luar daerah, disebabkan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam proses produksi industri kecil dan menengah non formal, dan belum adanya standardisasi mutu hasil industri.
- b. Belum optimalnya promosi dan pemasaran produk industri inovasi sistem produksi.
- c. Masih banyaknya industri kecil dan menengah yang belum memiliki legalitas usaha, sehingga belum dapat mengembangkan kemitraan usaha, dan mengakses kredit permodalan usaha dari perbankan.
- d. Belum optimalnya perkembangan sentra-sentra industri potensial dalam rangka peningkatan efisiensi dan peningkatan produktivitas, termasuk industri-industri kreatif.
- e. Belum tersedianya kawasan yang cukup untuk pengembangan industri karena terkendala regulasi tata ruang

Permasalahan Makro Pembangunan Daerah

a. Pertumbuhan Ekonomi Belum Optimal

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes dari tahun 2012 sampai dengan 2016 menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2012 sebesar 4,58%, meningkat pada tahun 2013 sebesar 5,91%, menurun pada tahun 2014 sebesar 5,30%, meningkat pada tahun 2015 sebesar 5,98%, dan menurun pada tahun 2016 sebesar 4,87%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes masih di bawah Jawa Tengah dan nasional.

b. Inflasi Tidak Stabil

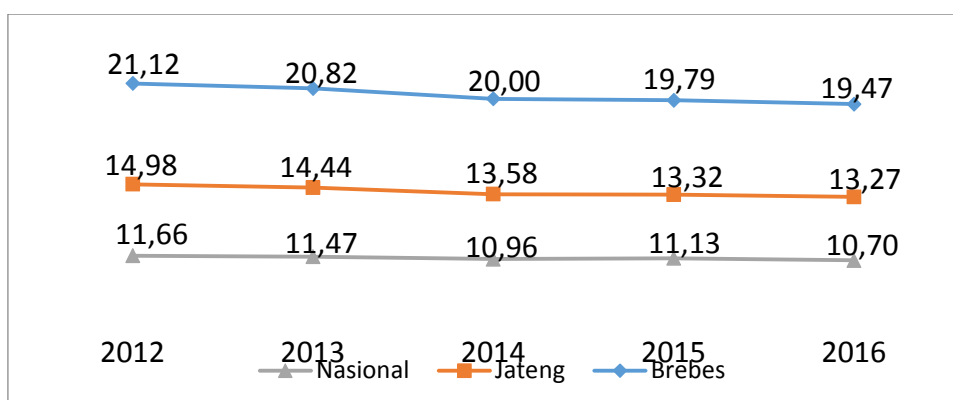
Perkembangan inflasi Kabupaten Brebes dari tahun 2012 sampai dengan 2016 menunjukkan tren membaik. Pada tahun 2012 sebesar 4,61%, meningkat pada tahun 2013 sebesar 9,83%, menurun pada tahun

2014 sebesar 6,20%, menurun pada tahun 2015 sebesar 3,09%, dan menurun lagi pada tahun 2016 sebesar 2,84%. Fluktuasi inflasi dikhawatirkan akan membawa pengaruh terhadap kondisi perekonomian daerah, meskipun kondisi tersebut tidak terlepas dari kondisi perekonomian nasional dan global seperti harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, tingkat suku bunga SBI, serta kebijakan fiskal maupun moneter. Pemerintah Kabupaten Brebes harus berupaya untuk menjaga stabilitas harga dengan melaksanakan pemantauan distribusi dan pengendalian harga komoditas dengan mengoptimalkan peran TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah).

c. Kemiskinan Masih Tinggi

Berdasarkan data kemiskinan makro bersumber BPS, tingkat kemiskinan Kabupaten Brebes dari tahun 2012 sampai dengan 2016 mengalami penurunan, namun masih di atas tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

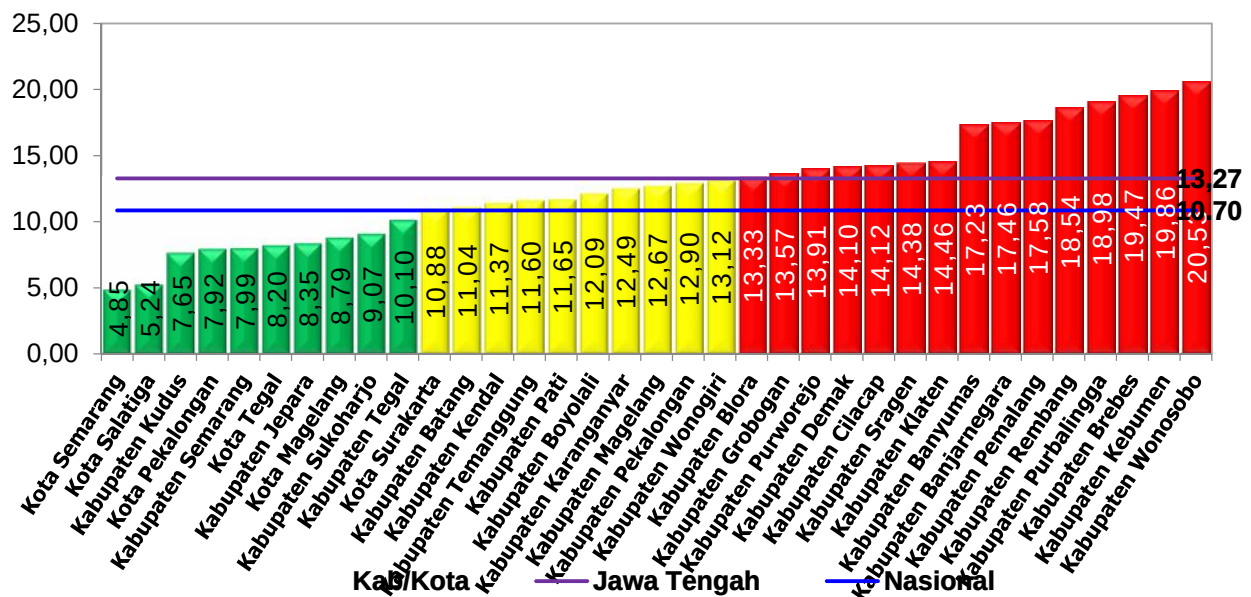
Gambar 4.1
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Brebes Tahun 2012-2016



Sumber : BPS Kabupaten Brebes, 2017

Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan kabupaten/kota lainnya di Jawa Tengah pada tahun 2016, Kabupaten Brebes menempati urutan ke 33 dari 35 kabupaten/kota, di atas Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Wonosobo.

Gambar 4.2
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016



Sumber : BPS Kabupaten Brebes, 2017

d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Masih Rendah

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan sebagai ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang meliputi tiga dimensi dasar, yaitu umur yang panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Berdasarkan data BPS tahun 2016, IPM Kabupaten Brebes adalah sebesar 63,98, masih di bawah IPM Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 69,98, serta berada pada posisi terendah di antara kabupaten/kota lainnya di Jawa Tengah.

Dilihat dari indikator komponennya yang terdiri dari bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan bidang ekonomi, menunjukkan bahwa kinerja pembangunan manusia di Kabupaten Brebes belum berjalan secara optimal. Di bidang kesehatan, Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Brebes sebesar 68,41 tahun, lebih rendah dari capaian Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 74,02 tahun. Di bidang pendidikan, Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Brebes adalah sebesar 11,37 tahun, masih di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 12,45 tahun. Sedangkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Brebes 6,17 tahun, masih di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 7,15 tahun. Serta rendahnya pengeluaran per kapita disesuaikan (*Purchasing Power Parity*) masyarakat Kabupaten Brebes yang mencapai Rp. 9.148.000,- berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah yang sebesar Rp. 10.153.000,-.

4.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

4.2.1. Isu-isu Global

Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, dapat ditemukan beberapa kondisi yang dapat mempengaruhi kebijakan yang akan ditempuh. Kondisi tersebut bersifat eksternal atau kondisi dari luar yang tidak dapat dikontrol sepenuhnya, namun dapat diantisipasi dampaknya ataupun dapat dioptimalkan peluang yang ditimbulkannya. Kondisi eksternal tersebut umumnya berlaku secara nasional maupun internasional dan berdampak secara langsung dan berdimensi waktu yang panjang yang akan mempengaruhi perjalanan pelaksanaan pembangunan, sehingga memerlukan perhatian khusus. Berikut beberapa kondisi ataupun isu global yang dipandang dapat mempengaruhi perjalanan kebijakan pembangunan di daerah.

Perubahan Iklim dan Bencana Alam

Paradigma masa lalu menyebutkan bahwa masalah lingkungan global lebih banyak dipengaruhi faktor alam, seperti iklim, yang mencakup temperatur, curah hujan, kelembaban, tekanan udara dll. Belakangan mulai disadari bahwa aktifitas manusia pun mempengaruhi iklim dan lingkungan secara signifikan. Sebagai gambaran bahwa penebangan hutan, mempengaruhi perubahan suhu dan curah hujan secara lokal. Ketika area hutan yang hilang semakin luas, maka akibat yang ditimbulkan bukan lagi lokal tapi sudah berskala regional. Pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak diimbangi oleh upaya penanggulangan yang mengatasnamakan kesejahteraan hidup manusia tampaknya akan berdampak negatif terhadap keberlangsungan lingkungan hidup. Hal ini tidak hanya mengancam keberlangsungan lingkungan alam, tetapi juga keberlangsungan hidup manusia sendiri. Isu pemanasan global dan perubahan iklim hanyalah sebagian dari sekian banyak isu lingkungan untuk diperhatikan yang tidak hanya bersifat lokal tetapi global, demikian halnya dengan Indonesia. Di Indonesia masih menghadapi tantangan besar di mana model pembangunan ekonomi yang dikembangkan telah menggerakkan pembangunan ekonomi yang cenderung bersifat ekstraktif atau mengandalkan eksploitasi sumber daya alam secara langsung. Bahkan ada kecenderungan besar di

mana upaya mempertahankan fungsi lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari masih jauh dari yang diharapkan.

Penyebab Pemanasan Global ini cukup kompleks, meliputi meningkatnya gas rumah kaca seperti CO₂ dan Metana yang berasal dari Industri, Kendaraan bermotor dan makhluk hidup penghasil metana alamiah seperti bakteri. Selain itu juga terjadinya kerusakan hutan alami akibat alih fungsi hutan menjadi pemukiman, industri, pertanian dan fungsi lainnya. Sehingga luas hutan setiap tahunnya terus berkurang yang berakibat meningkatnya jumlah gas rumah kaca karena fungsi hutan sebagai paru-paru dunia berkurang. Eksploitasi hutan yang dilakukan masyarakat sekitar kawasan hutan juga tidak luput dari factor kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, usaha untuk menghentikan perusakan hutan tidak cukup dilakukan hanya dengan menghentikan kegiatan yang sifatnya merusak saja, melainkan juga dituntut untuk melawan kecenderungan yang terjadi dengan berbagai macam usaha rehabilitasi lahan dan hutan yang telah rusak.

Untuk mengantisipasi berbagai dampak negatif yang ditimbulkan, maka sangat dibutuhkan adanya suatu sistem pengelolaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan yang efisien dan berwawasan lingkungan, yang mampu memanfaatkan potensi sumberdaya setempat secara optimal. Sehingga masyarakat memiliki kepedulian dan tanggung jawab dalam menjaga hutan tersebut.

Perdagangan Bebas

Globalisasi telah merambah hampir disemua ranah kehidupan masyarakat, baik itu bidang ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), budaya, pendidikan dan lain-lain. Walaupun istilah globalisasi telah menjadi suatu kosakata yang umum, tetapi suka atau tidak suka, masyarakat diseluruh pelosok dunia sekarang ini telah hidup dalam suatu habitat global, transparan, tanpa batas, saling mengait (*linkage*), dan saling ketergantungan (*interdependence*). Skenario liberalisasi melalui perjanjian perdagangan bebas memberikan dampak keseluruh pelosok negeri. Contoh globalisasi yang nyata dirasakan saat ini seperti masuknya barang-barang impor dari China dan negara-negara ASEAN lainnya akan menyerbu sampai ke desa-desa.

Indonesia sekarang ini berada didalam kondisi yang sangat terbuka dan sangat bersaing. Dengan diberlakukannya Perdagangan Bebas banyak memberi dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat. Dunia yang tanpa batas, keluar masuk barang yang intens serta interaksi dengan dunia luar disatu sisi memberikan dampak positif bagi perkembangan masyarakat melalui upaya

peningkatan kualitas dan inovasi produk lokal. Namun disisi yang lain, pemberlakuan ini dapat menambah penderitaan sebagian besar masyarakat Indonesia yang masih berada dibawah garis kemiskinan. Mereka digiring kepada sebuah dunia dimana kekuatan pasar menjadi panglima. Hilangnya subsidi dan peranan dari negara dalam bidang ekonomi berdampak *multiplier effect* pada kemiskinan yang meningkat dan akan mengarah pada tingginya angka kriminal. Hal ini mengakibatkan kerja keras pemerintah, yakni mengerjakan dua hal sekaligus, yakni perbaikan ekonomi dan sekaligus melakukan reformasi terhadap masalah-masalah sosial. Kondisi sosial ekonomi serta semua potensi yang ada pada masyarakat Kabupaten Brebes, diharapkan pemerintah dapat menempuh suatu kebijakan yang rasional untuk mengantar masuk dalam kancah perekonomian global.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Pada tahun 2016, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai diberlakukan, termasuk di Indonesia. MEA disebut juga dengan istilah ASEAN *Economic Community* (AEC). MEA atau AEC adalah bentuk kerjasama antar anggota negara-negara ASEAN yang terdiri dari Brunei, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Melalui MEA terjadi pemberlakuan perdagangan bebas di kawasan ASEAN.

Bagi Indonesia, keberadaan MEA menjadi babak awal untuk mengembangkan berbagai kualitas perekonomian di kawasan Asia Tenggara dalam perkembangan pasar bebas di akhir 2015. MEA menjadi dua sisi mata uang bagi Indonesia : satu sisi menjadi kesempatan yang baik untuk menunjukkan kualitas dan kuantitas produk dan sumber daya manusia (SDM) Indonesia kepada negara-negara lain dengan terbuka, tetapi pada sisi yang lain dapat menjadi *boomerang* untuk Indonesia apabila Indonesia tidak dapat memanfaatkannya dengan baik.

MEA akan menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan ekspor yang pada akhirnya akan meningkatkan GDP Indonesia.

Pada sisi investasi, kondisi ini dapat menciptakan iklim yang mendukung masuknya *Foreign Direct Investment* (FDI) atau Investasi Langsung Luar Negeri yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia (*human capital*) dan akses yang lebih mudah kepada pasar dunia.

Dari aspek ketenagakerjaan, terdapat kesempatan yang sangat besar bagi para pencari kerja karena dapat banyak tersedia lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan akan keahlian yang beraneka

ragam. Selain itu, akses untuk pergi keluar negeri dalam rangka mencari pekerjaan menjadi lebih mudah bahkan bisa jadi tanpa ada hambatan tertentu. MEA juga menjadi kesempatan yang bagus bagi para wirausahawan untuk mencari pekerja terbaik sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Namun demikian hal ini dapat memunculkan risiko ketenagakerjaan bagi Indonesia. Untuk itu diperlukan suatu uji kompetensi bagi setiap calon tenaga kerja yang akan bersaing. Bagi mereka yang lulus uji kompetensi diberikan sertifikat sesuai tingkat ketrampilan dan keahliannya.

Usaha yang perlu dilakukan Pemerintah Kabupaten Brebes dalam menghadapi MEA di bidang industri antara lain isu *eco labelling* utamanya dalam industri batik, perlindungan hak cipta bagi pelaku UMKM, kesiapan eksodus kawasan industri dari kota-kota di sekitar JABODETABEK ke kabupaten/kota di Jawa Tengah, serta promosi pameran investasi tingkat nasional. Sementara di bidang pariwisata, perlu adanya pemandu wisata bersertifikasi bagi para pelaku wisata di Kabupaten Brebes.

Di bidang penyediaan SDM yang siap bersaing di pasar bebas, Pemerintah Kabupaten Brebes sudah menginisiasi melalui berbagai pelatihan melalui sektor formal seperti pendidikan ketrampilan siswa SMK, memberikan kesempatan magang di perusahaan nasional, mengoptimalkan pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK) dengan memberikan pelatihan ketrampilan kerja sesuai kebutuhan perusahaan (*link and match*), serta pemberdayaan pemuda yang diarahkan pada konteks kewirausahaan. Upaya-upaya tersebut diarahkan untuk memenuhi standarisasi keahlian yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.

Isu bonus demografi menjadi peluang tersendiri bagi Kabupaten Brebes dalam menghadapi MEA. Menurut BPS Kabupaten Brebes, jumlah penduduk Kabupaten Brebes Tahun 2015 menurut kelompok umur masih didominasi pada kelompok umur 10-14 dan 15-19 yaitu 167.122 dan 165.750. Angka ini diproyeksikan dalam waktu 5 tahun ke depan menjadi kelompok usia angkatan kerja. Bonus demografi akan berdampak positif bila tersedia lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja pada usia produktif, sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas yang akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Dan sebaliknya akan berdampak negatif bahkan menjadi bencana jika usia produktif yang banyak tersebut tidak terserap lapangan kerja.

Sustainable Development Goals (SDGs)

Konsep SDGs diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca MDGs tahun 2015, terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia

sejak tahun 2000 mengenai isu berkurangnya sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, makanan dan energi, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) antara lain mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mendukung pencapaian SDGs sesuai dengan Peta Jalan (*Roadmap*) TPB Tahun 2017-2030.

SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target dengan 241 indikator. Adapun tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Tahun 2017-2030 adalah sebagai berikut :

- (1) Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimana-mana;
- (2) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosika pertanian berkelanjutan;
- (3) Pastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua segala usia;
- (4) Menjamin kualitas pendidikan inklusif, adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
- (5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
- (6) Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua;
- (7) Menjamin akses keenergi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
- (8) Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan ekonomi, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;
- (9) Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi insklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
- (10) Mengurangi kesenjangan didalam dan antar nagara;
- (11) Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
- (12) Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
- (13) Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
- (14) Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan samudra, laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
- (15) Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, berkelanjutan mengelola hutan, memerangi desertifikasi, dan menghantikan dan membalikkan

degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;

- (16) Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif disemua tingkatan;
- (17) Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

4.2.2.Isu-isu Nasional

RPJPN 2005-2025

Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan “INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR”.

RPJPN 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahapan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dengan rumusan arahan prioritas kebijakan. Sesuai dengan tahapan tersebut, pembangunan dalam RPJMN ke-3 (2015-2019) diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat.

Dari kebijakan RPJPN 2005-2025 tersebut memberikan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Brebes untuk meningkatkan daya saing daerah berbasis potensi lokal melalui keunggulan kompetitif perekonomian, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kemampuan IPTEK yang tinggi.

RPJMN 2015-2019

Kebijakan pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 diarahkan untuk mencapai visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 yaitu “TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”, yang dilakukan melalui 7 misi pembangunan antara lain :

- (1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

- (2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
- (3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
- (4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
- (5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
- (6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
- (7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, dirumuskan sembilan agenda prioritas pembangunan nasional. Kesembilan agenda prioritas itu disebut “NAWA CITA”, yaitu:

- (1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
- (2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
- (3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- (4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya,
- (5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
- (6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
- (7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- (8) Melakukan revolusi karakter bangsa.
- (9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

4.2.3. Isu-isu Regional (Provinsi Jawa Tengah)

RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2005-2025

Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah diarahkan pada upaya pencapaian visi pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2005–2025 yaitu : “JAWA TENGAH YANG MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA, DAN LESTARI”, yang dilakukan melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

- (1) Mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Jawa Tengah yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat, serta berbudaya;
- (2) Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan;
- (3) Mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintahan yang baik (good governance), demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh kompetensi dan profesionalitas aparatur, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta pengembangan jejaring;
- (4) Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan;
- (5) Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah;
- (6) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai, dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM serta kesetaraan dan keadilan gender.

4.2.4. Isu-isu Daerah

RPJPD Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025 adalah “Brebes yang Madani, Maju, dan Sejahtera”,.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025 tersebut, ditempuh melalui 6 (enam) Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025 sebagai berikut :

1. Mewujudkan pengamalan nilai-nilai agama dan kearifan lokal.
2. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
3. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis, dan partisipatif.
4. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal.
5. Mewujudkan peningkatan dan pemerataan pembangunan prasarana dan sarana daerah.
6. Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Penjelasan masing-masing misi:

Misi kesatu

Makin kuatnya karakter masyarakat yang berbasis pada agama dan nilai-nilai budaya, sehingga menjadi manusia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, bermoral, beretika berdasarkan pada falsafah Pancasila, yang akhirnya mampu berfikir, bersikap, dan bertindak sebagai manusia yang tangguh, kompetitif, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, menjunjung nilai-nilai luhur budaya bangsa, mengedepankan kearifan lokal, dan selalu berkembang secara dinamis.

Misi kedua

Makin meningkatnya kualitas pembangunan manusia, yang ditunjukkan dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, meratanya kesempatan memperoleh pendidikan yang layak; baiknya derajat kesehatan masyarakat didukung kemudahan akses, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan; menguatnya sumber daya manusia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang; meningkatnya daya saing sumber daya manusia pada kompetisi nasional dan global; berkurangnya kuantitas dan kualitas penyandang masalah kesejahteraan sosial; tercapainya penduduk rumbuh seimbang; meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan; berkurangnya tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin; meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan mantapnya situasi dan kondisi kehidupan bermasyarakat yang didukung penegakkan hukum.

Misi ketiga

Makin meningkatnya nilai dan etika aparatur pemerintah; meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan; meningkatnya profesionalisme aparatur daerah; meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai standar mutu pelayanan yang berorientasi terciptanya kepuasan masyarakat; berkembangnya sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik; meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah; kuatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pengembangan daerah; meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak pada tingkat lokal, nasional, dan internasional; meningkatnya komitmen dukungan, dan partisipasi stake holders dalam mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dan perbaikan pelayanan umum.

Misi keempat

Makin meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada peningkatan pendapatan perkapita penduduk; membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan lokal hingga mampu menghasilkan komoditi berkualitas yang berdaya saing global dan menjadi motor penggerak perekonomian; meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik; meningkatnya ketersediaan kebutuhan pokok berbasis pada ketahanan pangan; optimalnya pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber-sumber kekayaan daerah; meningkatnya kemampuan daerah dan masyarakat (termasuk pengusaha) dalam penyediaan lapangan kerja.

Misi kelima

Makin meningkatnya pembangunan dan pemantapan jaringan infrastruktur atau prasarana sarana wilayah yang andal; meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi; terbukanya isolasi daerah hingga terbentuknya pusat atau kawasan pertumbuhan baru; terpenuhinya kebutuhan perumahan rakyat layak huni dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukungnya; terpenuhi dan meratanya kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah pedesaan dan perkotaan.

Misi keenam

Makin meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup; peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ramah lingkungan; peningkatan kepedulian dan partisipasi stakeholders pada upaya pengurangan lajupemanasan global; meningkatnya kualitas dan pengelolaan kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing, dan modal pembangunan daerah; meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta mengurangi resiko bencana alam.

Memperhatikan permasalahan pembangunan daerah, serta lingkungan strategis global, nasional, dan regional, maka isu strategis pembangunan Kabupaten Brebes dalam lima tahun kedepan adalah:

1. Pengurangan Kemiskinan

Mengingat jumlah penduduk miskin di Kabupaten Brebes masih cukup banyak dan progres penurunannya cenderung lambat, maka upaya penanggulangan kemiskinan perlu lebih dipacu melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terutama pangan, pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi, dan perumahan. Dalam upaya

penanggulangan kemiskinan ada empat strategi utama yang ditempuh oleh pemerintah. Pertama, mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; kedua, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; ketiga, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil; keempat, mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia erat kaitannya dengan urusan pendidikan dan kesehatan. Pembangunan di bidang pendidikan mengupayakan agar setiap warga masyarakat memiliki hak yang sama dalam mendapatkan akses layanan dan mutu pendidikan. Untuk itu, akses layanan dan mutu pendidikan yang merata dan berkeadilan bagi semua lapisan masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi dalam rangka meningkatkan capaian target indikator pembangunan di bidang pendidikan.

Keberhasilan pembangunan bidang kesehatan juga berperan penting dalam meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya manusia. Untuk mencapai keberhasilan dalam pembangunan bidang kesehatan tersebut diselenggarakan berbagai upaya pelayanan kesehatan secara menyeluruh, berjenjang dan terpadu yang meliputi upaya promotif dan preventif, upaya kesehatan masyarakat, dan upaya kuratif dan rehabilitatif bagi semua warga masyarakat.

3. Peningkatan Perekonomian Daerah

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes masih belum optimal, kuat dan stabil, karena sangat terpengaruh kondisi ekonomi global dan nasional. Namun demikian penting ke depan untuk meletakkan pondasi perekonomian daerah yang kuat, berbasis sektor unggulan, dan ekonomi kerakyatan, dengan memperkuat inovasi daerah agar perekonomian Kabupaten Brebes lebih tangguh dan berdaya saing meskipun kondisi ekonomi global terguncang. Karena dengan perekonomian yang baik, dapat menghindarkan tumbuhnya kemiskinan dan pengangguran baru.

4. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Dalam rangka menjaga keberlanjutan sumberdaya alam sebagai suplai perekonomian daerah, maka penting untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup kedepan. Selain itu, dengan menjaga sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang baik, dapat mengurangi risiko bencana alam, yang dapat berdampak pada munculnya kemiskinan baru.

5. Pembangunan infrastruktur

Infrastruktur fisik merupakan komponen dasar perekonomian sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan aspek utama dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Termasuk dalam penyediaan infrastruktur adalah jalan, jembatan, drainase, penyediaan air minum

layak, penyediaan sanitasi layak, pengurangan luasan permukiman kumuh, dan lain-lain. Infrastruktur menjadi isu strategis yang perlu untuk diselesaikan dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan dan pemerataan pembangunan.

6. Pembangunan dan Pemberdayaan Gender serta Perlindungan Anak

Perempuan dan anak masih belum dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara adil. Sehingga kualitas hidup, kesejahteraan, perlindungan dan peran perempuan masih sangat memerlukan perhatian khusus. Masih tingginya tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi terhadap perempuan dan anak serta penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak merupakan permasalahan yang sangat mendesak untuk diselesaikan. Oleh karena itu diperlukan upaya yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan, peran perempuan dan anak serta didukung dengan penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender.

7. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Hal ini menjadi isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Brebes dalam lima tahun kedepan, karena pemerintahan yang baik dari tingkat pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa akan mendorong roda pembangunan ke arah yang lebih baik, menghindarkan pada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu juga membangun efisiensi dan efektivitas pembangunan yang dimulai dari perumusan kebijakan berbasis riset, perencanaan, dan penganggaran yang baik, agar tercipta akuntabilitas kinerja yang optimal.

8. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu dari sembilan agenda pembangunan nasional sebagai implementasi dari Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Desa sebagai unit pemerintahan otonomi terkecil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia terus diperkuat kapasitasnya oleh pemerintah, baik dari sisi kapasitas kewenangannya, kelembagaannya, dan pendanaannya. Alokasi pendanaan yang cukup besar berpotensi menimbulkan kerawanan dalam pengelolaannya. Oleh karena itu diperlukan penguatan tatakelola pemerintahan desa yang bersih dan baik. Permasalahan kapasitas Sumber Daya Manusia, kelembagaan tingkat desa dan masyarakat desa menjadi titik kritis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih, terutama dalam hal pengelolaan dana desa sejak penyusunan perencanaan dan penyelenggaraan pembanguna, pelaksanaan pembangunan hingga pelaporannya. Sehubungan dengan itu diperlukan peningkatan kapasitas perangkat desa dan kelembagaan desa serta pemberdayaan masyarakat desa agar penyelenggaraan pemerintah desa semakin responsif dan akuntabel.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022 merupakan dokumen penjabaran visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Brebes terpilih periode tahun 2017-2022, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

5.1. VISI

Pembangunan daerah Kabupaten Brebes tahun 2017-2022 adalah untuk mencapai visi pembangunan tahun 2017-2022:

“MENUJU BREBES UNGGUL, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN”

Visi tersebut merupakan sebuah cita-cita kondisi ideal yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Brebes dalam lima tahun kedepan. Makna filosofis dari visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Brebes Unggul

Frasa unggul diartikan sebagai “lebih tinggi (pandai, baik, cakap, kuat, awet, dan sebagainya) daripada yang lain-lain” (KKBI). Kabupaten Brebes Unggul dimaknai sebagai cita-cita pemerintah daerah untuk membangun Kabupaten Brebes menjadi lebih baik dan lebih unggul dibandingkan daerah lain di Jawa Tengah. Menciptakan keunggulan daerah diawali dengan membangun keunggulan kualitas sumber daya manusia Brebes, yang difokuskan pada pendidikan, keterampilan, keahlian, serta didukung dengan kualitas kesehatan yang semakin baik.

2. Brebes Sejahtera

Sejahtera dalam konteks pembangunan daerah Kabupaten Brebes adalah bagaimana pemerintah daerah mampu menyediakan ruang ekonomi seluas-luasnya bagi masyarakat Brebes. Dengan membangun perekonomian daerah inklusif dan berkelanjutan, yang kuat berbasis ekonomi kerakyatan, dan memperluas akses bekerja, maka diharapkan akan mampu menggerakkan pendapatan per kapita, meningkatkan daya beli masyarakat, mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Brebes sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan menyediakan infrastruktur dasar yang layak bagi masyarakat dan dunia usaha.

3. Brebes Berkeadilan

Berkeadilan dimaknai sebagai satu kewajiban pemerintah daerah untuk memperluas distribusi akses dan hasil pembangunan untuk seluruh

wilayah dan lapisan masyarakat. Tidak hanya distribusi secara kewilayahan, tetapi juga hasil pembangunan mampu dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat, lintas gender, lintas usia dan lintas generasi.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022 telah sejalan dengan visi RPJPD Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025, RPJMN Tahun 2015-2019, dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.



Gambar 5.1.

Korelasi Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2012-2022 Dengan Visi RPJPD Kabupaten Brebes, RPJMN, dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah

5.2. MISI

Visi pembangunan daerah tersebut tidak terlepas dari misi pembangunan daerah, sebagai bentuk penjabaran upaya pencapaian cita-cita pembangunan daerah Kabupaten Brebes dalam lima tahun kedepan. Misi tersebut adalah:

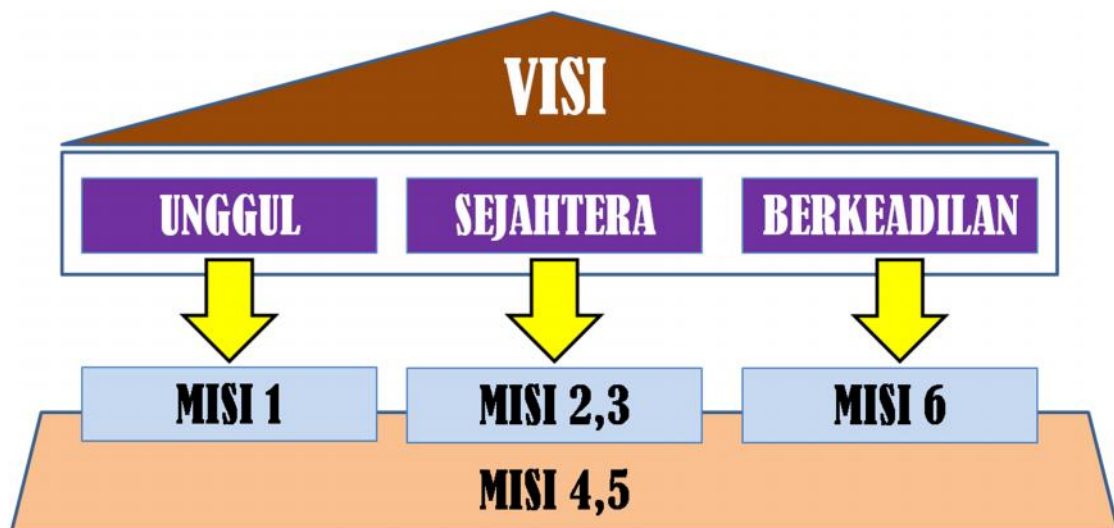
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas, sehat dan berdaya saing tinggi berbasis pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa melalui pendidikan dan kesehatan;
2. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai rencana tata ruang dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan;
3. Meningkatkan pengembangan pertanian, ekonomi kerakyatan dengan memperkuat inovasi daerah dan investasi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis kearifan lokal;
4. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, efektif dan efisien, serta menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban daerah;

5. Memantapkan tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi desa yang maju dan mandiri;
6. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, serta pemenuhan hak anak, dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta mewujudkan perlindungan sosial.

Gambaran pencapaian visi dan penjabarannya dalam misi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Brebes Unggul dijabarkan dan dilaksanakan melalui misi 1;
2. Brebes Sejahtera dijabarkan dan dilaksanakan melalui misi 2 dan misi 3;
3. Brebes Berkeadilan dijabarkan dan dilaksanakan melalui misi 6.

Ketercapaian visi yang dijabarkan dalam tiap misi tersebut, didukung dengan penguatan pada misi 4 dan misi 5. Meskipun demikian, secara keseluruhan pelaksanaan misi untuk mencapai visi pembangunan daerah lima tahun kedepan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antar satu misi dengan misi yang lain.



Gambar 5.2.
Keterkaitan Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes
Tahun 2019-2022

5.3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan, yang dijabarkan secara lebih operasional dari setiap misi. Tujuan kemudian dijabarkan dalam sasaran, yaitu sebuah rumusan kondisi yang dapat menggambarkan tercapainya sebuah tujuan. Penjabaran tujuan dan sasaran serta indikator dan targetnya pada setiap misi dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas, sehat dan berdaya saing tinggi berbasis pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa melalui pendidikan dan kesehatan.

Tujuan dari misi pertama adalah “Meningkatkan kualitas dan distribusi penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan untuk semua lapisan masyarakat”, dengan indikator tujuan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Sasaran terdiri dari:

- Meningkatnya akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan;
- Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Tabel 5.1.
Tujuan dan Sasaran Misi 1

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET					
					2017*	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan kualitas dan distribusi penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan untuk semua lapisan masyarakat	IPM			64,62	65,27	65,92	66,58	67,24	67,92
			Meningkatnya akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Harapan lama sekolah (tahun)	11,54	11,71	11,89	12,07	12,25	12,43
				Rata-rata lama sekolah (tahun)	6,36	6,55	6,74	6,94	7,15	7,37
			Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Usia harapan hidup (tahun)	68,42	68,43	68,44	68,45	68,46	68,47

2. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai rencana tata ruang dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Tujuan dari misi kedua adalah:

- a. Meningkatkan cakupan pemerataan pelayanan infrastruktur wilayah bagi masyarakat dan dunia usaha, dengan indikator tujuan adalah Cakupan Pelayanan Infrastruktur Wilayah.

Sasaran terdiri dari:

- 1) Meningkatnya cakupan jalan dalam kondisi baik;
- 2) Meningkatnya cakupan air minum layak untuk masyarakat;
- 3) Meningkatnya cakupan sanitasi;
- 4) Meningkatnya cakupan irigasi dalam kondisi baik;
- 5) Meningkatnya penyediaan rumah layak huni untuk masyarakat;
- 6) Menurunnya kawasan permukiman kumuh;

- b. Meningkatkan kualitas dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup, dengan indikator tujuan adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Sasaran terdiri dari:

- 1) Meningkatnya kualitas air;
- 2) Meningkatnya kualitas udara;
- 3) Meningkatnya tutupan lahan;

Tabel 5.2.
Tujuan dan Sasaran Misi 2

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET					
					2017*	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan cakupan pemerataan pelayanan infrastruktur wilayah bagi masyarakat dan dunia usaha	Cakupan pelayanan infrastruktur wilayah (%)			30,78	31,95	33,13	34,18	35,24	36,30
			Meningkatnya cakupan jalan dalam kondisi baik	Rasio jalan baik (%)	60	77	79	80	81	82
			Meningkatnya cakupan air minum layak untuk masyarakat	Cakupan akses air minum layak (%)	88,35	88,75	89,15	89,55	89,95	90,35
			Meningkatnya cakupan sanitasi	Cakupan akses jamban (%)	68,60	69,97	71,37	72,80	74,25	75,74
				Persentase kawasan bebas banjir Perkotaan (%)	90	92	94	96	98	100
				Presentase Penanganan Persampahan (%)	12,66	16,66	20,66	24,66	28,66	32,66
			Meningkatnya cakupan irigasi dalam kondisi baik	Rasio jaringan irigasi baik (%)	60,00	61,03	62,06	63,06	64,04	65,04
			Meningkatnya penyediaan rumah layak huni untuk masyarakat	Rasio rumah layak huni (%)	84,48	84,92	85,75	86,58	87,41	88,24
			Menurunnya kawasan permukiman kumuh	Persentase pemukiman kumuh (%)	93,16	74,53	55,90	37,27	18,64	0,00

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET					
					2017*	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Meningkatkan kualitas dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			63,00	64,04	65,03	66,02	67,01	68,00
			Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air	42,3	43,6	45	46,3	47,6	49,0
			Meningkatnya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara	79,2	80,5	81,8	83,1	84,4	85,7
			Meningkatnya tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	66,5	62	67,5	68	68,5	69

Keterangan: *) sesuai dengan RKPD

3. Meningkatkan pengembangan pertanian, ekonomi kerakyatan dengan memperkuat inovasi daerah dan investasi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis kearifan lokal.

Tujuan dari misi ketiga adalah “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan dan ekonomi kerakyatan yang berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, serta peningkatan kesejahteraan dan daya tampung lingkungan hidup”, dengan indikator kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan per Kapita yang disesuaikan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

Sasaran terdiri dari:

- Meningkatnya kontribusi sektor pertanian;
- Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan;
- Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan;
- Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata;
- Meningkatnya laju investasi daerah dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- Meningkatnya penguatan sistem inovasi daerah;
- Meningkatnya angkatan kerja yang bekerja.

Tabel 5.3.
Tujuan dan Sasaran Misi 3

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET					
					2017*	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan dan ekonomi kerakyatan yang berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, serta peningkatan kesejahteraan dan daya tampung lingkungan hidup	Pertumbuhan Ekonomi (%)			5,02	5,17	5,32	5,48	5,65	5,82
		Pengeluaran per kapita yang disesuaikan (ribu rupiah PPP)			9.199	9.320	9.442	9.563	9.685	9.806
			Meningkatnya kontribusi sektor pertanian	Kontribusi sektor pertanian (juta)	16.187.956	17.321.113	18.533.590	19.830.942	21.219.108	22.704.445
			Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan	Kontribusi sektor industri pengolahan (juta)	5.691.797	5.812.694	5.937.69	6.067.41	6.198.153	6.333.090
			Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan (juta)	6.091.182	6.091.182	6.148.182	6.208.182	6.271.182	6.336.182
			Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata (juta)	1.619.970	1.781.968	2.049.263	2.254.189	2.592.318	2.851.550
			Meningkatnya laju investasi daerah dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Laju kenaikan investasi (%)	1	1,5	1,5	2	2	2
				Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA/PMDN) (milyar rupiah)	1.291	1.310	1.330	1.357	1.384	1.411
			Meningkatnya penguatan sistem inovasi daerah	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan (%)	0	20	40	60	80	100

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET					
					2017*	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)			9,06	8,83	8,61	8,40	8,19	7,98
			Meningkatnya angkatan kerja yang bekerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	65,35	66,65	67,99	69,35	70,73	72,15
				Rasio penduduk yang bekerja (%)	61,11	62,34	63,58	64,85	66,15	67,47

Keterangan: *) sesuai dengan RKPD

4. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, efektif dan efisien, serta menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban daerah.

Tujuan dari misi keempat adalah:

- a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dengan indikator kinerja Nilai SAKIP.

Sasaran terdiri dari:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- 2) Membaiknya kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- 3) Meningkatkan kualitas aparatur yang profesional dan berkompeten;
- 4) Meningkatkan kualitas kelitbangan.

- b. Menciptakan keamanan dan ketertiban, serta kenyamanan lingkungan masyarakat yang partisipatif, dengan indikator Angka Kriminalitas.

Sasarannya adalah meningkatnya keamanan, ketentraman, dan keindahan, serta kenyamanan lingkungan masyarakat.

Tabel 5.4.
Tujuan dan Sasaran Misi 4

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target					
					2017*	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Nilai SAKIP			CC	B	B	B	B	B
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai SKM	76,83	77,06	77,29	77,52	77,75	77,98
			Membaiknya kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah	Indeks Nilai Evaluasi LPPD	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
				Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Meningkatnya kualitas aparatur yang profesional dan berkompeten	Indeks Profesionalitas ASN	61.24	61.41	62,41	63,11	63,45	64,00
			Meningkatnya kualitas kelitbangan	Persentase rekomendasi kebijakan hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah (%)	0	20	40	60	80	100
2	Menciptkan keamanan dan ketertiban, serta kenyamanan lingkungan masyarakat yang partisipatif	Angka kriminalitas			90	90	88	86	84	82
			Meningkatnya keamanan, ketertiban, dan keindahan, serta kenyamanan lingkungan masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	100	100	100	100	100	100

Keterangan: *) sesuai dengan RKPD

5. Memantapkan tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi desa yang maju dan mandiri.

Tujuan misi kelima adalah “Mementapkan desa dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemberdayaan desa yang baik”, dengan indikator Rasio desa dengan tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan desa yang baik.

Sasaran terdiri dari:

- Desa mampu menyusun RPJMDes tepat waktu;
- Desa mampu menyusun APBDes tepat waktu;
- Desa memiliki BUMDes.

Tabel 5.5.
Tujuan dan Sasaran Misi 5

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target					
					2017*	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Mementapkan desa dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemberdayaan desa yang baik	Rasio desa dengan tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan desa yang baik (%)			13,68	22,82	34,24	51,36	68,49	100
			Desa mampu menyusun RPJMDes dan RKPDes tepat waktu	Persentase desa yang menyusun RPJMDes dan RKPDes tepat waktu (%)	9,93	20,54	34,24	51,36	68,49	100
			Desa mampu menyusun APBDes tepat waktu	Persentase desa yang menyusun APBDes tepat waktu (%)	9,93	20,54	34,24	51,36	68,49	100
			Desa yang memiliki BUMDes	Rasio desa yang memiliki BUMDes (%)	21,2	27,39	34,24	51,36	68,49	100

Keterangan: *) sesuai dengan RKPDes

6. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, serta pemenuhan hak anak, dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta mewujudkan perlindungan sosial.

Tujuan dan sasaran misi keenam adalah:

- a. Membangun kesetaraan gender dan mendorong perempuan untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan, dengan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG).

Sasarannya adalah meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan.

- b. Memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara merata, dengan indikator Indeks Perlindungan Anak dan Indeks Identitas Anak.

Sasarannya adalah meningkatnya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara merata.

- c. Meningkatkan penanganan PMKS secara optimal, dengan indikator Persentase peningkatan penanganan PMKS (%).

Sasarannya adalah meningkatnya penanganan PMKS.

Tabel 5.6.
Tujuan dan Sasaran Misi 6

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target					
					2017*	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Membangun kesetaraan gender dan mendorong perempuan untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan	IPG			85,75	85,79	85,83	85,87	85,92	85,96
			Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan	HLS (tahun)	11,58	11,64	11,70	11,76	11,82	11,88
				RLS (tahun)	4,86	4,88	4,91	4,93	4,96	4,98
				AHH (tahun)	70,33	70,51	70,68	70,86	71,04	71,21
				Pengeluaran per kapita yang disesuaikan (ribu rupiah PPP)	6.378	6.397	6.416	6.436	6.455	6.474
				Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan (%)	1,97	2,02	2,07	2,12	2,17	2,23

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target					
					2017*	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Proporsi perempuan di lembaga pemerintahan ASN (%)	26,49	27,02	27,56	28,11	28,67	29,24
				Persentase penanganan korban KDRT (%)	100	100	100	100	100	100
2	Memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara merata	Indeks komposit kesejahteraan anak (%)	Meningkatnya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara merata		10	12	14	16	18	20
				Prevalensi anak bekerja (%)	0.0184	0.0184	0.0184	0.0182	0.0182	0.0182
				Rasio perkawinan anak (%)	0,44	0,43	0,43	0,42	0,42	0,42
				Cakupan anak memiliki akte (%)	66,09	85,00	89,00	93,00	97,00	100
				Persentase penanganan korban kekerasan pada anak (%)	100	100	100	100	100	100
3	Meningkatkan penanganan PMKS secara optimal	Persentase peningkatan penanganan PMKS			32	40	50	60	70	80
			Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PMKS yang mendapat bantuan sosial (%)	32	40	50	60	70	80
				Persentase PMKS penerima KUBE (%)	3	4	5	6	7	8

Keterangan: *) sesuai dengan RKPD

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022 yang telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pada bab sebelumnya akan tercapai apabila dilaksanakan dengan strategi dan program pembangunan daerah yang tepat. Untuk itu perlu dirumuskan strategi dan program pembangunan daerah yang didukung dengan arah kebijakan pada setiap tahunnya, sebagaimana uraian berikut.

6.1. STRATEGI

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tiap misi dijabarkan sebagai berikut.

- 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas, sehat dan berdaya saing tinggi berbasis pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa melalui pendidikan dan kesehatan.**

Tabel 6.1.
Tujuan, Sasaran, dan Strategi Misi 1

No	Tujuan	Sasaran	Strategi
1	Meningkatkan kualitas dan distribusi penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan untuk semua lapisan masyarakat	Meningkatnya akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Meningkatkan partisipasi anak untuk bersekolah melalui pemberian bantuan operasional untuk sekolah, serta beasiswa untuk seluruh siswa terutama untuk siswa miskin;
			Meningkatkan kapasitas prasarana dan sarana sekolah, serta distribusi sekolah secara merata;
			Mendorong peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang berkompetensi guru dan memiliki kualifikasi minimal S1/DIV;
			Mendorong kualitas dan kapasitas pendidikan non formal;
			Mengembangkan pendidikan vokasi link dan match dengan potensi ekonomi.
	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui perbaikan prasarana dan sarana kesehatan;
			Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui kegiatan preventif (pencegahan).
			Meningkatkan kesehatan ibu, bayi, dan anak melalui perbaikan gizi bagi ibu dan anak, serta pendampingan kepada ibu hamil terutama yang memiliki risiko tinggi;
			Meningkatkan kualitas tenaga kesehatan baik dokter, bidan, tenaga farmasi, dan ahli gizi.

2. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai rencana tata ruang dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Tabel 6.2.
Tujuan, Sasaran, dan Strategi Misi 2

No	Tujuan	Sasaran	Strategi
1	Meningkatkan cakupan pemerataan pelayanan infrastruktur wilayah bagi masyarakat dan dunia usaha	Meningkatnya cakupan jalan dalam kondisi baik	Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan melalui peningkatan jalan dan rehabilitasi jalan, terutama pada ruas jalan dalam kondisi rusak dan rusak berat.
		Meningkatnya cakupan air minum layak untuk masyarakat	Memperluas jaringan air minum layak untuk masyarakat.
			Perluasan jaringan air baku kerumah tangga
		Meningkatnya cakupan sanitasi	Memperluas akses sanitasi komunal terutama untuk masyarakat perdesaan dan perkotaan.
			Meningkatkan kualitas struktur jaringan drainase melalui perbaikan dan rehabilitasi jaringan drainase.
			Meningkatkan pengelolaan persampahan di wilayah perkotaan dan perdesaaan.
		Meningkatnya cakupan irigasi dalam kondisi baik	Meningkatkan kualitas jaringan irigasi kewenangan kabupaten melalui rehabilitasi dan perbaikan jaringan.
		Meningkatnya penyediaan rumah layak huni untuk masyarakat	Mendorong penyediaan rumah dan rumah layak huni terutama bagi masyarakat miskin melalui pemberian stimulan perbaikan rumah layak huni.
2	Meningkatkan kualitas dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup	Menurunnya kawasan permukiman kumuh	Perbaikan lingkungan kawasan permukiman kumuh, terutama prasarana dan sarana lingkungan permukiman.
		Meningkatnya kualitas air	Melakukan pemantauan dan pengendalian kualitas air baik air permukaan dan air bawah tanah secara rutin.
		Meningkatnya kualitas udara	Melakukan pemantauan dan pengendalian kualitas udara terutama di kawasan perkotaan secara rutin.
		Meningkatnya tutupan lahan	Meningkatkan tutupan lahan dan Ruang Terbuka Hijau di perkotaan, kawasan lindung setempat dan dibawahnya.

3. Meningkatkan pengembangan pertanian, ekonomi kerakyatan dengan memperkuat inovasi daerah dan investasi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis kearifan lokal.

Tabel 6.3.
Tujuan, Sasaran, dan Strategi Misi 3

No	Tujuan	Sasaran	Strategi
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan dan ekonomi kerakyatan yang berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, peningkatan kesejahteraan dan daya tampung lingkungan hidup	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian	Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian (pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan) melalui pemberian bantuan bibit dan benih, alsintan, pengembangan teknologi budidaya ramah lingkungan, pengolahan paska produksi, dan peningkatan keterampilan petani.
		Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan	Mengembangkan sentra-sentra industri kecil dan menengah;
			Mendorong pengembangan UMKM melalui fasilitasi bantuan modal dan pasar;
			Afirmasi kebijakan pengembangan kawasan industri melalui kebijakan tata ruang.
		Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan	Melakukan penataan sarana perdagangan seperti pasar, dan PKL;
			Mendorong penciptaan start up wirasusaha;
			Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan manajemen koperasi;
		Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata	Menciptakan destinasi wisata religi baru
			Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pariwisata
			Meningkatkan promosi wisata
		Meningkatnya laju investasi daerah dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Meningkatkan investasi melalui perbaikan sistem pelayanan perijinan (waktu dan prosedur), dan promosi investasi lebih luas
		Meningkatnya Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Meningkatkan hasil kelitbangan yang dapat diterapkan melalui hasil desa inovasi, klaster berbasis teknologi, pembinaan dan fasilitasi teknopreneur, pengembangan pilar-pilar tematik sida bekerja sama dengan perguruan tinggi/lembaga kelitbangan lainnya
		Meningkatnya angkatan kerja yang bekerja	Meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja;
			Memperluas lapangan kerja dan bursa kerja;
			Memfasilitasi perbaikan hubungan industrial.

4. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, efektif dan efisien, serta menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban daerah.

Tabel 6.4.
Tujuan, Sasaran, dan Strategi Misi 4

No	Tujuan	Sasaran	Strategi
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan seluruh jenis pelayanan publik sampai di tingkat kecamatan
		Membaiknya kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah	Meningkatkan kualitas proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi secara terpadu
			Memperkuat pengawasan pelaksanaan pembangunan dengan meningkatkan kualitas APIP dan SPIP
		Meningkatnya kualitas aparatur yang profesional dan berkompeten	Menciptakan aparatur yang kompeten dan bersertifikat, serta profesional, didukung dengan kinerja aparatur yang semakin optimal
2	Menciptakan keamanan dan ketertiban, serta kenyamanan lingkungan masyarakat yang partisipatif	Meningkatnya keamanan, ketentraman, dan keindahan, serta kenyamanan lingkungan masyarakat	Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan melalui peningkatan implementasi rekomendasi kebijakan kedalam perumusan kebijakn pemerintah daerah, penguatan dukungan manajemen dan jejaring kelitbangan serta meningkatkan penyebarluasan hasil kelitbangan dan publikasi ilmiah
			Mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan
			Meningkatkan kualitas dan kapasitas linmas dan ratih untuk ikut serta menciptakan K3
			Melakukan koordinasi yang rutin dengan penegak hukum dalam penciptaan K3

5. Memantapkan tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi desa yang maju dan mandiri.

Tabel 6.5.
Tujuan, Sasaran, dan Strategi Misi 5

No	Tujuan	Sasaran	Strategi
1	Mementapkan desa dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemberdayaan desa yang baik	Desa mampu menyusun RPJMDes dan RKPDes tepat waktu	Memperkuat kapasitas dan kemampuan
		Desa mampu menyusun APBDes tepat waktu	perencanaan dan penganggaran bagi para aparaturn pemerintah desa
		Desa yang memiliki BUMDes	Mendorong desa untuk mengembangkan dan menghidupkan BUMDes yang dimiliki

6. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, serta Pemenuhan hak anak, dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta mewujudkan perlindungan sosial.

Tabel 6.6.
Tujuan, Sasaran, dan Strategi Misi 6

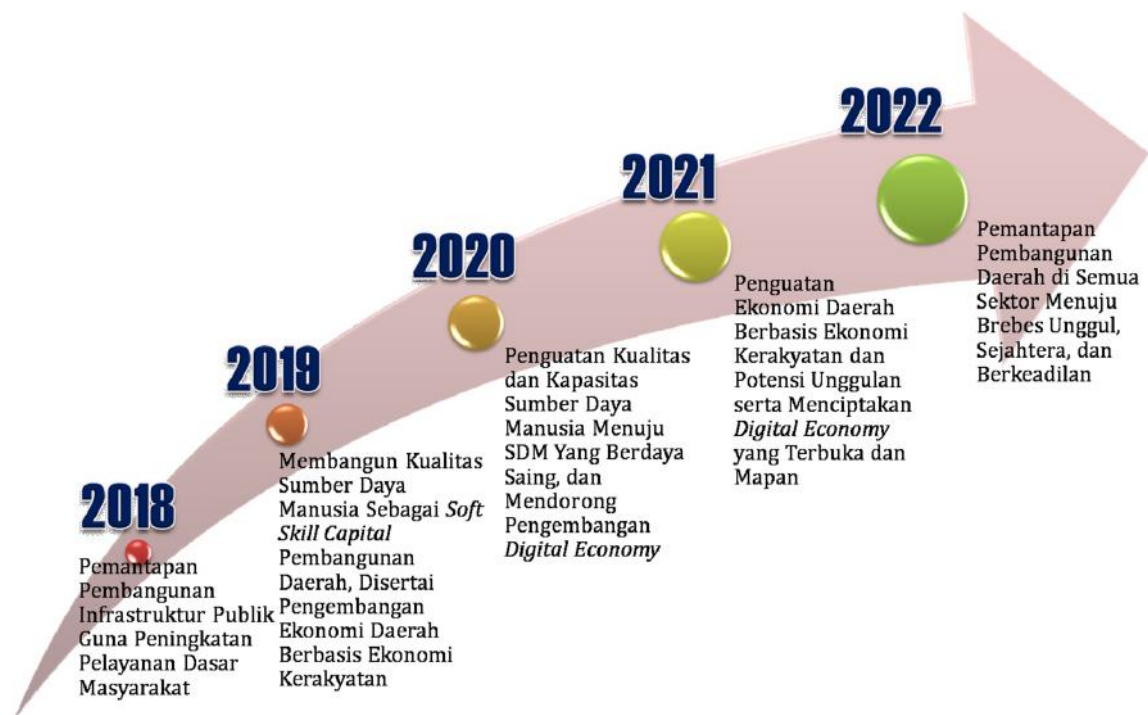
No	Tujuan	Sasaran	Strategi
1	Membangun kesetaraan gender dan mendorong perempuan untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan	Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan	Mendorong pengarusutamaan gender pada setiap program dan kegiatan pembangunan daerah terutama di bidang pendidikan dan kesehatan
			Memperkuat kemampuan dan kemandirian ekonomi perempuan
			Afirmasi kebijakan untuk penempatan perempuan di lembaga pemerintahan
			Meningkatkan edukasi dan advokasi kepada perempuan yang rawan KDRT melalui media kelompok atau organisasi masyarakat terkecil seperti dasa wisma dan PKK
2	Memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara merata	Meningkatnya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara merata	Meningkatkan edukasi dan advokasi kepada anak tentang pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak anak melalui media kelompok atau organisasi peduli anak seperti forum anak
			Mempermudah jangkauan akses bagi anak untuk memiliki akte kelahiran
			Melakukan pendampingan psikologi kepada anak yang mengalami tindak kekerasan
3	Meningkatkan penanganan PMKS secara optimal	Meningkatnya penanganan PMKS	Meningkatkan upaya penjangkauan PMKS dan memberikan bantuan pemulihan dalam panti rehabilitasi dan di kelompok- kelompok masyarakat
			Perkuatan PSKS

6.2. ARAH KEBIJAKAN

Untuk memberikan pedoman arah yang konkrit bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Brebes untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan, maka dirumuskan arah kebijakan pembangunan daerah. Arah kebijakan pembangunan daerah ini ditetapkan sebagai tahapan pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan, yang akan dilaksanakan dalam perencanaan pembangunan daerah tahunan.

Arah kebijakan pembangunan daerah ini juga menjadi pedoman dalam penentuan prioritas usulan pembangunan daerah yang bersumber dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Penelaahan hasil pokok-pokok pikiran DPRD selama masa Reses Anggota DPRD Kabupaten Brebes dan Renja Perangkat Daerah untuk setiap tahunnya.

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022 dapat dijabarkan sebagai berikut.



Gambar 6.1.
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Brebes Tahun 2017 - 2022

Tabel 6.7.
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022

2018	2019	2020	2021	2022
Pemantapan Pembangunan Infrastruktur Publik Guna Peningkatan Pelayanan Dasar Masyarakat	Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia Sebagai Soft Skill Capital Pembangunan Daerah, Disertai Pengembangan Ekonomi Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan	Penguatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Menuju SDM Yang Berdaya Saing, dan Mendorong Pengembangan Digital Economy	Penguatan Ekonomi Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Potensi Unggulan serta Menciptakan Digital Economy yang Terbuka dan Mapan	Pemantapan Pembangunan Daerah di Semua Sektor Menuju Brebes Unggul, Sejahtera, dan Berkeadilan
1. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan	1. Perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan, serta pengembangan pendidikan karakter	1. Perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan, serta pengembangan pendidikan karakter dan pendidikan vokasi	1. Perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan, serta penguatan pendidikan karakter dan pendidikan vokasi	1. Pemantapan perluasan akses dan mutu pendidikan, serta penguatan pendidikan karakter dan pendidikan vokasi
2. Peningkatan pelayanan kesehatan	2. Peningkatan pemerataan akses dan pelayanan kesehatan terutama prasarana dan sarana kesehatan	2. Peningkatan pemerataan akses dan pelayanan kesehatan terutama prasarana dan sarana kesehatan	2. Peningkatan pemerataan akses dan pelayanan kesehatan terutama sumberdaya kesehatan	2. Pemantapan pemerataan akses dan pelayanan kesehatan pada prasarana dan sarana serta sumberdaya kesehatan
3. Pengembangan produksi pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, dan potensi UMKM berbasis ekonomi kerakyatan	3. Perkuatan ekonomi Daerah yang inklusif dan berkelanjutan berbasis ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan produksi sektor dan komoditas unggulan daerah melalui peningkatan infrastruktur produksi, pengembangan inovasi serta membangun kualitas dan kapasitas tenaga kerja	3. Perkuatan ekonomi Daerah yang inklusif dan berkelanjutan berbasis ekonomi kerakyatan dengan mengembangkan digital economy yang didukung peningkatan infrastruktur produksi, perkuatan inovasi serta memperkuat kualitas dan kapasitas tenaga kerja	3. Perkuatan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan berbasis ekonomi kerakyatan dengan perkuatan inovasi, pengembangan digital economy, dan ekonomi kreatif, serta memperkuat kualitas dan kapasitas tenaga kerja, dan penciptaan start up bisnis baru	3. Pemantapan perkuatan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan berbasis ekonomi kerakyatan pada sektor dan komoditas unggulan daerah, pemantapan inovasi, digital economy, ekonomi kreatif, serta kualitas dan kapasitas tenaga kerja, dan penciptaan start up bisnis baru

2018	2019	2020	2021	2022
4. Pengembangan inovasi daerah, seni budaya, pariwisata, kreativitas muda, dan olahraga	4. Pemantapan infrastruktur wilayah terutama infrastruktur publik yang tangguh terhadap tekanan dan guncangan bencana dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup	4. Pemantapan infrastruktur wilayah terutama infrastruktur publik yang tangguh terhadap tekanan dan guncangan bencana dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup	4. Pemantapan infrastruktur wilayah terutama infrastruktur publik yang tangguh terhadap tekanan dan guncangan bencana dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup	4. Perkuatan pemantapan infrastruktur wilayah terutama infrastruktur publik yang tangguh terhadap tekanan dan guncangan bencana dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup
5. Pemantapan infrastruktur wilayah dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup	5. Peningkatan perlindungan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan dan pemenuhan hak anak	5. Peningkatan perlindungan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan dan pemenuhan hak anak	5. Peningkatan perlindungan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan dan pemenuhan hak anak	5. Pemantapan perlindungan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan dan pemenuhan hak anak
6. Peningkatan perlindungan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan anak	6. Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, hingga di tingkat pemerintahan desa, serta penciptaan kondusivitas daerah	6. Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, hingga di tingkat pemerintahan desa, serta penciptaan kondusivitas daerah	6. Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, hingga di tingkat pemerintahan desa, serta penciptaan kondusivitas daerah	6. Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, hingga di tingkat pemerintahan desa, serta penciptaan kondusivitas daerah
7. Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik serta penciptaan stabilitas daerah				
8. Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik serta penciptaan stabilitas daerah				

6.3. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Sebagai bentuk implementasi strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, ditetapkan program pembangunan daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022. Program pembangunan daerah ini adalah program yang sifatnya strategis dan diharapkan akan mendukung langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Penjabaran program pembangunan daerah pada tiap misi adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas, sehat dan berdaya saing tinggi berbasis pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa melalui pendidikan dan kesehatan.

Tabel 6.8.

Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Pada Misi 1

No	Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Meningkatkan kualitas dan distribusi penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan untuk semua lapisan masyarakat	IPM	64,62			65,92		66,58		67,24		67,92		67,92		
	Meningkatnya akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Harapan lama sekolah (tahun)	11,54	11,71		11,89		12,07		12,25		12,43		12,43		
		Rata-rata lama sekolah (tahun)	6,36	6,55		6,74		6,94		7,15		7,37		7,37		
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				16.036		16.036		18.199		20.642		24.438		95.350	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)	62,13	70		80		90		95		100		100		
		Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%)	80,33	85		90		95		100		100		100		

No	Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase Perpustakaan SD (%)	37	40		43		45		48		50		50		
		Persentase Perpustakaan SMP (%)	40	45		48		50		53		55		55		
		Persentase Ruang Komputer SMP (%)	63	65		67		70		75		77		77		
		Persentase Laboratorium SMP (%)	31	33		35		37		40		42		42		
		Rasio siswa per kelas SD	26	28		28		28		28		28		28		
		Rasio siswa per kelas SMP	31	32		32		32		32		32		32		
		Rasio Rombel per kelas SD	1,07	1		1		1		1		1		1		
		Rasio Rombel per kelas SMP	1,13	1		1		1		1		1		1		
	Program Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal				16.036		16.036		18.199		20.642		24.438		95.351	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		prosentase lembaga PAUD berijin operasional dan terakreditasi (lembaga)	-	47		67		90		120		150		150		
		Indeks Paritas Gender Jenjang SD/MI (indeks)	0,95	1		1		1		1		1		1		
		Indeks Paritas Gender Jenjang SMP/MTs (indeks)	1,24	1		1		1		1		1		1		
		Jumlah penduduk ankatan kerja (usia Produktif/15-44 th) memiliki kemampuan life skill (orang)	-	100		150		200		250		300		300		
	Program						30.984		30.787		30.618		33.639		126.028	Dinas

No	Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan															Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%)	46,99	50		55		60		65		70		70		
		Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%)	84,85	87		90		97		100		100		100		
		Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%)	94,77	95		96		98		100		100		100		
		Persentase guru PAUD bersertifikat pendidik (%)	25	30		32		35		40		45		45		
		Persentase guru SD bersertifikat pendidik (%)	52,36	55		60		65		70		75		75		
		Persentase guru SMP bersertifikat pendidik (%)	36,14	40		45		50		60		70		70		
		Rasio Guru PNS SD Negeri/20 siswa	36,14	28		28		28		28		28		28		
		Rasio Guru PNS SMP Negeri/20 siswa	39,55	32		32		32		32		32		32		
		Rasio guru terhadap murid sekolah SD	19,42	20		20		20		20		20		20		
		Rasio guru terhadap murid sekolah SMP	15,41	17		18		19		20		20		20		
	Meningkatnya pelayanan	Usia harapan hidup (tahun)	68,42	68,43		68,44		68,45		68,46		68,47		68,47		

No	Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	kesehatan bagi masyarakat															
	Program Kesehatan Masyarakat				46.733		48.133		48.900		49.833		50.550		244.148	Dinas Keshatan
		Penurunan prevalensi BB pada anak dengan BB rendah (persentase)	4,75	4,5		4,25		3,75		3,5		3		3		
		Penurunan prevalensi stunting (Persentase)	32,7	32		30		29		28		27		27		
		Bayi usia 0-6 bulan dapat Asi Eksklusif (Persentase)	80	81		82		83		84		85		85		
		Cakupan pelayanan balita (D/S) (Persentase)	85	86		87		88		89		90		90		
		Cakupan Keluarga sadar gizi (Persentase)	65	68		72		75		78		80		80		
		Penurunan prevalensi anak gizi buruk (Persentase)	0.7	0,65		0,6		0,55		0,5		0,45		0,45		
		Cakupan desa baik garam (Persentase)	98	99		100		100		100		100		100		
		Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (Persentase)	100	100		100		100		100		100		100		
		Cakupan balita naik BB (N/D) (persentase)	70	72		75		77		78		80		80		
		Bayi baru lahir mendapat IMD (Inisiasi Menyusu Dini) (Persentase)	50	51		52		53		54		55		55		
		Remaja putri mendapat TTD (Tablet Tambah Darah) (Persentase)	25	26		27		28		29		30		30		
		Cakupan bayi dapat Vitamin A	90	91		92		93		94		95		95		

No	Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		(Persentase)														
		Cakupan balita dapat Vitamin A (Persentase)	90	91		92		93		94		95		95		
		Cakupan ibu nifas dapat Vitamin A dan Fe 42 (Persentase)	85	86		88		91		93		95		95		
		Cakupan RT yang mengkonsumsi garam yodium (Persentase)	93	95		98		100		100		100		100		
		Pesentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ante natal care minimal 4 kali sesuai standar (11 T)/ANC Terpadu (%)	50	55		60		65		70		75		75		
		Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan Persalinan Sesuai Standar (%)	75	76		77		78		79		80		80		
		Prosentase Cakupan K1 (Persentase)	100	100		100		100		100		100		100		
		Prosentase Cakupan K4 (Persentase)	86	86		87		88		89		90		90		
		Prosentase KB Aktif (Persentase)	52	55		60		65		70		74		74		
		Prosentase Cakupan KF 1 (Persentase)	70	71		72		73		74		75		75		
		Prosentase Cakupan KF 3 (Persentase)	55	57		60		65		68		70		70		
		Prosentase persalinan di fasilitas pelayanan	70	72		74		76		78		80		80		

No	Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		kesehatan terstandar (Persentase)														
		Prosentase persalinan oleh tenaga kesehatan (Persentase)	90	91		92		93		94		95		95		
		Prosentase komplikasi Kebidanan yang tertangani (Persentase)	85	87		89		90		93		95		95		
		Prosentase puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil (Persentase)	100	100		100		100		100		100		100		
		Prosentase deteksi resiko dan komplikasi oleh masyarakat (Persentase)	30	34		38		42		46		50		50		
		Prosentase deteksi resiko dan komplikasi oleh tenaga kesehatan (Persentase)	80	82		84		86		88		90		90		
		Prosentase kunjungan neonatal pertama KN1 (Persentase)	75	78		80		83		88		90		90		
		Prosentase kunjungan neonatal lengkap KN3 (Persentase)	85	86		87		88		89		90		90		
		Prosentase Neonatal Komplikasi tertangani (Persentase)	90	91		92		93		94		95		95		
		Prosentase kunjungan bayi (Persentase)	90	91		92		93		94		95		95		
		Prosentase Bayi	100	100		100		100		100		100		100		

No	Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BBLR tertangani (Persentase)														
		Prosentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar (Presentase)	85	86		87		88		89		90		90		
		Prosentase Balita di MTBS (Persentase)	60	64		68		72		76		80		80		
		Prosentase pelayanan kesehatan usia lanjut (Persentase)	30	35		40		45		55		60		60		
		Prosentase PMT (Pemberian makanan Tambahan) Lansia (Persentase)	10	15		20		30		40		50		50		
		Prosentase Posyandu Lansia (Persentase)	50	55		60		65		70		75		75		
		Jumlah puskesmas Santun Lansia (Persentase)	100	100		100		100		100		100		100		
		Cakupan Desa Siaga Aktif (%)	68	75		78		80		82		84		84		
		presentase pelaksanaan pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas (persentase)	-	55		70		75		80		85		85		
		Cakupan Akses Jamban Sehat (%)	-	70		80		90		95		100		100		
		Persentase Desa Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	-	51		65		79		92		100		100		

No	Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022				
	Target			Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		presentase sarana air minum masyarakat yang memenuhi syarat kesehatan (Kepala Keluarga)	-	70		80		90		95		100		100		
		persentase tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan (presentase)	-	55		58		60		63		67		67		
	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit				1.583		2.159		2.320		2.444		2.670		11.175	Dinas Kesehatan
		AFP Rate (> 2 per 100.000 penduduk < 15 tahun)	2,75	2,75		2,75		2,75		2,75		2,75		2,75		
		persentase penurunan kasus penyakit yg dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) tertentu. - Campak - Difteri	-	5		7		9		11		13		13		
		Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon	60	60		65		70		75		80		80		
		Persentase pengungsi korban bencana yang mendapat pelayanan kesehatan	1	100		1		1		1		1		1		
		Prosentase anak sekolah SD/MI dan sederajat yang mendapatkan imunisasi (BIAS)	98	98		98		98		98		98		98		
		Persentase hasil	70	70		75		80		85		90		90		

No	Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		pemeriksaan kesehatan Jamah haji														
		Persentase desa / kelurahan yang mencapai 80% Imunisasi dasar lengkap (Desa UCI)	100	100		100		100		100		100		100		
		Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	92	92		92,5		93		93,5		94		94		
		Persentase anak usia 12-24 bulan mendapat imunisasi lanjutan (Boster)	50	55		60		65		70		75		75		
		Insiden Rate DBD	59,81	59		58		57		56		55		55		
		Case Fatality Rate DBD	0,65	0,64		0,62		0,6		0,58		0,56		0,56		
		Angka keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus (% succes rate)	61,79	70		75		80		85		90		90		
		Angka keberhasilan pengobatan pasien TB resistan obat (% succes rate)	60	65		0,7		0,75		0,8		0,85		0,85		
		Cakupan pengobatan semua kasus TB (% case detection rate / CDR)	54	60		62		64		68		70		70		
		Angka notifikasi semua kasus TB yg diobati (case notification rate / CNR) per 100.000 penduduk	63	70		75		80		85		90		90		
		Persentase pasien TB yang mengetahui status	47,5	55		60		65		70		75		75		

No	Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		HIV (%)														
		Cakupan penemuan kasus TB resisten obat (absolut)	50	60		65		70		75		80		80		
		Persentase angka kasus HIV yang diobati (on ART)	34	65		70		75		80		85		85		
		Cakupan Populasi beresiko yang diperiksa HIV	53	70		75		80		85		90		90		
		Angka Penemuan Kusta	15,59	10		10		10		10		10		10		
		persentase penemuan Pneumonia Balita	35,79	45		50		55		60		65		65		
		Persentase perempuan usia 30 sampai 50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara	0	50		60		70		80		100		100		
		Jumlah wanita usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	0	50		60		70		80		100		100		
		Cakupan minum obat filariasis(POPM/ pemberian obat pencegahan masal)	87,2	90		92		95		100						
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu	0	5		10		15		20		25		25		
		Persentase Desa/ Kelurahan yang melaksanakan kegiatan	26	50		70		100		100		100		100		

No	Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM														
		Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100		100		100		100		100		100		
		Persentase penyandang Diabetes Mellitus (DM) yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	0	50		70		100		100		100		100		
		Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	0	50		70		100		100		100		100		
	Program Pelayanan Kesehatan				16.530		15.013		8.795		11.900		8.205		60.443	Dinas Keshatan
		Cakupan pelayanan gigi bumil	79	100		100		100		100		100		100		
		Cakupan pelayanan gigi pada anak pra sekolah	52	50		50		50		50		50		50		
		Cakupan UKGS (Upaya Kesehatan Gigi Sekolah)	89	60		60		70		80		90		90		
		Persentase desa total coverage PIS PK	16	1		1		1		1		1		1		
		Jumlah kecamatan yg memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi	0	100		100		100		100		100		100		
		Presentase faskes yg memiliki ijin	0	100		100		100		100		100		100		

No	Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		pelayanan kesehatan														
		Persentase industri rumah tangga yang memiliki sertifikat	0	100		100		100		00		100		100		
		Cakupan masyarakat miskin memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan	0	100		100		100		100		100		100		
	Program Sumber Daya Kesehatan				1.960		70.162		65.169		25.249		8.452		244.148	Dinas Keshatan
		Persentase Ketersediaan Obat dan Perbelkes di Puskesmas yang tersedia	85	85		85		90		95		100		100		
		Tersedianya Data dan Informasi Bidang Kesehatan	100	100		100		100		100		100		100		
		Meningkatnya Sumber Daya Kesehatan	90	100		100		100		100		100		100		

2. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai rencana tata ruang dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan prinsip-prinsip Pembangunan berkelanjutan.

Tabel 6.9.
Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Pada Misi 2

No	Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact / outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Meningkatkan cakupan pemerataan pelayanan infrastruktur wilayah baik masyarakat dan dunia usaha	Cakupan pelayanan infrastruktur wilayah (%)	30,78	31,65		33,13		34,18		356,24		36,30		36,30		
	Meningkatnya cakupan jalan dalam kondisi baik	Rasio jalan baik (%)	60	77		79		80		81		82		82		
	Program Pembangunan/Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan				202.500		202.500		228.500		254.500		280.500		1.168.500	Dinas Pekerjaan Umum
		Meningkatnya Kondisi jalan dan jembatan baik dan mantap (%)	67	60		63		67		70		73		73		
	Meningkatnya cakupan air minum layak untuk masyarakat	Cakupan akses air minum layak (%)	88,35	88,75		89,15		89,55		89,95		90,35		90.35		
	Program Pembangunan, Pemeliharaan Infrastruktur Perkotaan dan Perdesaan				2350		2350		2.400		2.450		2.500		12.050	Dinas Pekerjaan Umum
		Meningkatnya	25	27										32		

No	Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact / outcome)	Kondi si Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Targe t	Rp (Juta)	
				Targe t	Rp (Juta)	Targe t	Rp (Juta)	Targe t	Rp (Juta)	Targe t	Rp (Juta)	Targe t	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Kondisi infrastruktur perkotaan (gedung)(%)				28		29		30		32				
		Meningkatnya Kondisi infrastruktur Drainase (%)	78	79		80		81		82		83		83		
		Meningkatnya Kondisi infrastruktur Air minum (%)	80	82		84		86		88		90		90		
		Meningkatnya Kondisi infrastruktur perdesaan (%)	70	72		74		76		78		80		80		
	Meningkatnya cakupan sanitasi	Cakupan akses jamban (%)	68,6	69,97		71,37		72,8		74,25		75,74		75,74		
		Persentase Kawasan Bebas Banjir Perkotaan (%)	90	92		94		96		98		100		100		
		Presentase Penanganan Persampahan (%)	12,66	16,66		20,66		24,66		28,66		32,66		32,66		
	Program Kesehatan Masyarakat				46.733		48.133		48.900		49.833		50.550		244.148	Dinas Keshatan
		Penurunan prevalensi BB pada anak dengan BB rendah (persentase)	4,75	4,5		4,25		3,75		3,5		3		3		
		Penurunan prevalensi stunting (Persentase)	32,7	32		30		29		28		27		27		
		Bayi usia 0-6 bulan dapat Asi Eksklusif	80	81		82		83		84		85		85		

No	Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact / outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022				
				Targe t	Rp (Juta)	Targe t	Rp (Juta)	Targe t	Rp (Juta)	Targe t	Rp (Juta)	Targe t	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		(Persentase)														
		Cakupan pelayanan balita (D/S) (Persentase)	85	86		87		88		89		90		90		
		Cakupan Keluarga sadar gizi (Persentase)	65	68		72		75		78		80		80		
		Penurunan prevalensi anak gizi buruk (Persentase)	0.7	0,65		0,6		0,55		0,5		0,45		0,45		
		Cakupan desa baik garam (Persentase)	98	99		100		100		100		100		100		
		Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (Persentase)	100	100		100		100		100		100		100		
		Cakupan balita naik BB (N/D) (persentase)	70	72		75		77		78		80		80		
		Bayi baru lahir mendapat IMD (Inisiasi Menyusu Dini) (Persentase)	50	51		52		53		54		55		55		
		Remaja putri mendapat TTD (Tablet Tambah Darah) (Persentase)	25	26		27		28		29		30		30		
		Cakupan bayi dapat Vitamin A (Persentase)	90	91		92		93		94		95		95		
		Cakupan balita dapat Vitamin A (Persentase)	90	91		92		93		94		95		95		
		Cakupan ibu nifas dapat Vitamin A dan	85	86		88		91		93		95		95		

No	Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact / outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022				
				Targe t	Rp (Juta)	Targe t	Rp (Juta)	Targe t	Rp (Juta)	Targe t	Rp (Juta)	Targe t	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Fe 42 (Persentase)														
		Cakupan RT yang mengonsumsi garam yodium (Persentase)	93	95		98		100		100		100		100		
		Pesentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ante natal care minimal 4 kali sesuai standar (11 T)/ANC Terpadu (%)	50	55		60		65		70		75		75		
		Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan Persalinan Sesuai Standar (%)	75	76		77		78		79		80		80		
		Prosentase Cakupan K1 (Persentase)	100	100		100		100		100		100		100		
		Prosentase Cakupan K4 (Persentase)	86	86		87		88		89		90		90		
		Prosentase KB Aktif (Persentase)	52	55		60		65		70		74		74		
		Prosentase Cakupan KF 1 (Persentase)	70	71		72		73		74		75		75		
		Prosentase Cakupan KF 3 (Persentase)	55	57		60		65		68		70		70		
		Prosentase persalinan di fasilitas pelayanan	70	72		74		76		78		80		80		

No	Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact / outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022				
				Targe t	Rp (Juta)	Targe t	Rp (Juta)	Targe t	Rp (Juta)	Targe t	Rp (Juta)	Targe t	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		kesehatan terstandar (Persentase)														
		Prosentase persalinan oleh tenaga kesehatan (Persentase)	90	91		92		93		94		95		95		
		Prosentase komplikasi Kebidanan yang tertangani (Persentase)	85	87		89		90		93		95		95		
		Prosentase puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil (Persentase)	100	100		100		100		100		100		100		
		Prosentase deteksi resiko dan komplikasi oleh masyarakat (Persentase)	30	34		38		42		46		50		50		
		Prosentase deteksi resiko dan komplikasi oleh tenaga kesehatan (Persentase)	80	82		84		86		88		90		90		
		Prosentase kunjungan neonatal pertama KN1 (Persentase)	75	78		80		83		88		90		90		
		Prosentase kunjungan neonatal lengkap KN3 (Persentase)	85	86		87		88		89		90		90		
		Prosentase Neonatal Komplikasi tertangani	90	91		92		93		94		95		95		

No	Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact / outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022				
				Targe t	Rp (Juta)	Targe t	Rp (Juta)	Targe t	Rp (Juta)	Targe t	Rp (Juta)	Targe t	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		(Persentase)														
		Prosentase kunjungan bayi (Persentase)	90	91		92		93		94		95		95		
		Prosentase Bayi BBLR tertangani (Persentase)	100	100		100		100		100		100		100		
		Prosentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar (Presentase)	85	86		87		88		89		90		90		
		Prosentase Balita di MTBS (Persentase)	60	64		68		72		76		80		80		
		Prosentase pelayanan kesehatan usia lanjut (Persentase)	30	35		40		45		55		60		60		
		Prosentase PMT (Pemberian makanan Tambahan) Lansia (Persentase)	10	15		20		30		40		50		50		
		Prosentase Posyandu Lansia (Persentase)	50	55		60		65		70		75		75		
		Jumlah puskesmas Santun Lansia (Persentase)	100	100		100		100		100		100		100		
		Cakupan Desa Siaga Aktif (%)	68	75		78		80		82		84		84		
		presentase pelaksanaan pelayanan kesehatan lingkungan di	-	55		70		75		80		85		85		

No	Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact / outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Puskesmas (persentase)														
		Cakupan Akses Jamban Sehat (%)	-	70		80		90		95		100		100		
		Persentase Desa Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	-	51		65		79		92		100		100		
		presentase sarana air minum masyarakat yang memenuhi syarat kesehatan (Kepala Keluarga)	-	70		80		90		95		100		100		
		persentase tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan (presentase)	-	55		58		60		63		67		67		
	Program Pembangunan, Pemeliharaan Infrastruktur Perkotaan dan Perdesaan				2350		2350		2.400		2.450		2.500		12.050	Dinas Pekerjaan Umum
		Meningkatnya Kondisi infrastruktur perkotaan (gedung)(%)	25	27		28		29		30		32		32		
		Meningkatnya Kondisi infrastruktur Drainase (%)	78	79		80		81		82		83		84		
		Meningkatnya	80	82												

No	Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact / outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp (Juta)	
				Targe t	Rp (Juta)	Targe t	Rp (Juta)	Targe t	Rp (Juta)	Targe t	Rp (Juta)	Targe t	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Kondisi infrastruktur Air minum (%)				84		86		88		90		90		
		Meningkatnya Kondisi infrastruktur perdesaan (%)	70	72		74		76		78		80		80		
	Program Pengembangan Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Pengendalian Pencemaran				33.850		33.850		39.840		46.533		54.036		208.109	Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah
		Persentase Layanan Penanganan Persampahan Perkotaan(%)	62,69	63		65		70		75		80		80		
		Persentase Pengurangan Sampah Perdesaan (%)	0	30		35		40		45		50		50		
		Presentase Penurunan jumlah indikasi pelanggaran (%)	0	5		10		15		20		25		25		
		Presentase usaha/kegiatan yang memenuhi peraturan bidang LH (%)	0	60		65		70		75		80		80		
	Meningkatnya cakupan irigasi dalam kondisi baik	Rasio jaringan irigasi baik (%)	60,02			62,06		63,06		64,04		65,04		65,04		
	Program Pengembangan				25.130		25.130		27.64		30.15		27.499		135.557	Dinas Pengairan

No	Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact / outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp (Juta)	
				Targe t	Rp (Juta)	Targe t	Rp (Juta)	Targe t	Rp (Juta)	Targe t	Rp (Juta)	Targe t	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Air Baku dan Jaringan Pengairan lainnya								3		5					Sumber Daya Alam dan Penataan Ruang
		Peningkatan Panjang Saluran irigasi dalam kondisi baik (m)	250.450	254.690		258.980		263.150		267.245		271.430		271.430		
	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni untuk masyarakat	Rasio rumah layak huni (%)	84,48			85,75		86,58		87,41		88,24		88,24		
	Program Perumahan Rakyat						14.300		16.500		17.680		19.050		67.530	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani (unit)	1.757	1.566		3.176		3.176		3.176		11.094		11.094		
	Menurunnya kawasan permukiman kumuh	Persentase pemukiman kumuh (%)	93,16			55,90		37,27		18,64		0		0		
	Program Kawasan Permukiman dan Pertanahan				8.150		8.150		9.405		11.405		11.710		48.820	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Menurunnya luasan kawasan permukiman kumuh (Ha)	207,45	172,88		138,26		103,64		69,02		34,4		34,4		
		Persentase tanah yang bersertifikat (%)	28	28,5		29		29,5		30		30,5		30,5		

No	Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact / outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Meningkatkan kualitas dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,00	64,04		65,03		66,02		67,01		68		68		
	Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air	42,3	43,6		45		46,3		47,6		49		49		
	Program Perencanaan dan Petaan Hukum Lingkungan				6950		6.950		9.350		11.350		14.550		49.150	Dinas Lingkugan Hidup dan Pengelolaan Sampah
		Persentase aduan masyarakat yang di tindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		100		
		Luasan tutupan lahan yang terkonservasi (Ha)	0	10		10		10		10		10		10		
	Meningkatnya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara	79,2	80,5		81,8		83,1		84,4		85,7		85,7		
	Program Perencanaan dan Petaan Hukum Lingkungan				6950		6.950		9.350		11.350		14.550		49.150	Dinas Lingkugan Hidup dan Pengelolaan Sampah
		Persentase aduan masyarakat yang di tindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		100		
		Luasan tutupan lahan yang terkonservasi (Ha)	0	10		10		10		10		10		10		
	Meningkatnya tutupan lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	60			63		65		66		68		68		
	Program Perencanaan dan				6950		6.950		9.350		11.35		14.55		49.150	Dinas Lingkugan

No	Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact / outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Penaatan Hukum Lingkungan										0		0			Hidup dan Pengelolaan Sampah
		Persentase aduan masyarakat yang di tindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		100		
		Luasan tutupan lahan yang terkonservasi (Ha)	0	10		10		10		10		10		10		

3. Meningkatkan pengembangan pertanian, ekonomi kerakyatan dengan memperkuat inovasi daerah dan investasi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis kearifan lokal.

Tabel 6.10.
Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Pada Misi 3

No	Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact / outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan dan ekonomi kerakyatan yang berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, serta peningkatan kesejahteraan dan daya tampung lingkungan hidup	1. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,02	5,17		5,32		5,48		5,65		5,82		5,82		
		2. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan (ribu rupiah PPP)	9.199	9.320		9.442		9.563		9.685		9.806		9.806		
	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian	Kontribusi sektor pertanian (%)	16.187.956	17.321.113		18.533.590		19.830.942		21.219.108		22.704.445		22.704.445		
	Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan				665		580		580		340		300		2.465	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Cakupan	40	42		44		46		48		50		20		

No	Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact / outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pembinaan Kelompok Tani (%)														
	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan				685		1.665		1.867		2.255		2.462		8.934	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		produktivitas tanaman padi (kw/ha)	55,77	55,80		55,90		55,95		56,00		56,10		56,10		
		produktivitas tanaman jagung (kw/ha)	65,84	66,00		66,25		66,50		66,75		67,00		67,00		
		produktivitas tanaman kedelai (kw/ha)		13,25		13,45		13,65		13,86		14,06		14,06		
		produktivitas tanaman kacang hijau (kw/ha)		11,30		11,35		11,40		11,45		11,50		11,50		
	Program Peningkatan Produksi Hortikultura dan Perkebunan						775		4.350		4.505		6.831		7.136	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		produktivitas hortikultura sayuran (bawang merah) (kw/ha)	99,55	100,00		100,50		101,00		101,50		102,00		102,00		
		produktivitas hortikultura buah-buahan (mangga) (kw/ha)		106,50		108,63		110,80		113,02		115,28		115,28		
		produktivitas perkebunan (kopi) (kw/ha)		210,00		214,20		218,48		222,85		227,31		227,31		
	Program Pengelolaan Sumber Daya Lahan dan				5.675		6.300		7.300		7.540		8.630		35.445,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan

No	Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact / outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Prasarana dan Sarana Pertanian															Hewan
		Indeks Pertanaman	1,93	1,99		2,06		2,12		2,19		2,25		2,25		
	Program Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veterner				1.000		1.010		1.020		1.030		1.040		4.100	
		Penurunan angka kematian ternak besar, ternak kecil dan unggas (Ekor)	5.000	400		3.000		2.500		2.000		1.750		1.750		
		Penurunan Kasus penyakit hewan menular (Ekor)	10.000	8.000		6.000		5.000		4.000		3.500		3.500		
		Peningkatan keamanan konsumsi Bahan Asal Hewan dan Produk Asal Hewan (Ekor)	2	7		12		17		22		27		27		
		Penurunan jumlah pemotongan betina produktif (Ekor)	1026	926		826		726		626		526		526		
	Program Pengembangan Sarana Prasarana dan Usaha Peternakan				1.800		1887		2015		2170		2275		8347	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Peningkatan Sarana	14	14		15		16		16		16		16		

No	Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact / outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Prasarana Pernakan dan Kesehatan Hewan (Unit)														
		Peningkatan Sarana Prasarana Pendukung Pernakan dan Kesehatan Hewan (Unit)	14	30		34		38		44		48		48		
		Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Jenis Produk Olahan Asal Ternak (Jenis)	-	3		4		5		6		7		7		
		Peningkatan Jumlah Kelompok yang melaksanakan Pengolahan Limbah Pernakan (kelompok)	2	3		4		5		6		7		7		
		Jumlah Kelompok Ternak Berprestasi Tingkat Provinsi	10	11		12		13		14		15		15		
		Jumlah Kelompok Ternak Berprestasi Tingkat Nasional	7	7		7		8		8		9		9		
	Program Pengembangan Budidaya Ternak						115 0		176 5		178 0		2075,00 0959		6770	Dinas Pernakan dan Kesehatan

No	Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact / outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																Hewan
		Bibit Ternak Ungul yang dihasilkan (Ekor)	1.700			1.700		1.700		1.700		1.700				
		Meningkatnya Jumlah Ternak yang Mendapat SKLB	450			500		550		600		650				
		Meningkatnya Kuantitas Pakan Ternak (%)	200			0		0		0		0				
		Jumlah kelompok yang melaksanakan manajemen peternakan (kelompok)	10			10		20		25		25				
	Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan				665		580		580		340		300		2.465	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Cakupan Pembinaan Kelompok Tani (%)	40	42		44		46		48		50		20		
	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan				685		1.665		1.867		2.255		2.462		8.934	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		produktivitas tanaman padi (kw/ha)	55,77	55,80		55,90		55,95		56,00		56,10		56,10		
		produktivitas tanaman jagung (kw/ha)	65,84	66,00		66,25		66,50		66,75		67,00		67,00		
		produktivitas tanaman		13,25		13,45		13,65		13,86		14,06		14,06		

No	Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact / outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		kedelai (kw/ha)														
		produktivitas tanaman kacang hijau (kw/ha)		11,30		11,35		11,40		11,45		11,50		11,50		
	Program Peningkatan Produksi Hortikultura dan Perkebunan						775		4.350		4.505		6.831		7.136	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		produktivitas hortikultura sayuran (bawang merah) (kw/ha)	99,55	100,00		100,50		101,00		101,50		102,00		102,00		
		produktivitas hortikultura buah-buahan (mangga) (kw/ha)		106,50		108,63		110,80		113,02		115,28		115,28		
		produktivitas perkebunan (kopi) (kw/ha)		210,00		214,20		218,48		222,85		227,31		227,31		
	Program Pengelolaan Sumber Daya Lahan dan Prasarana dan Sarana Pertanian				5.675		6.300		7.300		7.540		8.630		35.445,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Indeks Pertanaman	1,93	1,99		2,06		2,12		2,19		2,25		2,25		
	Program Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veterner				1.000		1.010		1.020		1.030		1.040		4.100	

No	Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact / outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Penurunan angka kematian ternak besar, ternak kecil dan unggas (Ekor)	5.000	400		3.000		2.500		2.000		1.750		1.750		
		Penurunan Kasus penyakit hewan menular (Ekor)	10.000	8.000		6.000		5.000		4.000		3.500		3.500		
		Peningkatan keamanan konsumsi Bahan Asal Hewan dan Produk Asal Hewan (Ekor)	2	7		12		17		22		27		27		
		Penurunan jumlah pemotongan betina produktif (Ekor)	1026	926		826		726		626		526		526		
	Program Pengembangan Sarana Prasarana dan Usaha Peternakan				1.800		1887		2015		2170		2275		8347	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Peningkatan Sarana Prasarana Peternakan dan Kesehatan Hewan (Unit)	14	14		15		16		16		16		16		
		Peningkatan Sarana Prasarana Pendukung Peternakan dan Kesehatan Hewan (Unit)	14	30		34		38		44		48		48		

No	Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact / outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Jenis Produk Olahan Asal Ternak (Jenis)	-	3		4		5		6		7		7		
		Peningkatan Jumlah Kelompok yang melaksanakan Pengolahan Limbah Peternakan (kelompok)	2	3		4		5		6		7		7		
		Jumlah Kelompok Ternak Berprestasi Tingkat Provinsi	10	11		12		13		14		15		15		
		Jumlah Kelompok Ternak Berprestasi Tingkat Nasional	7	7		7		8		8		9		9		
	Program Pengembangan Budidaya Ternak						1150		1765		1780		2075,000959		6770	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Bibit Ternak Ungul yang dihasilkan (Ekor)	1.700			1.700		1.700		1.700		1.700				
		Meningkatnya Jumlah Ternak yang Mendapat SKLB	450			500		550		600		650				
		Meningkatnya Kuantitas	200			0		0		0		0				

No	Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact / outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pakan Ternak (%)														
		Jumlah kelompok yang melaksanakan manajemen peternakan (kelompok)	10			10		20		25		25				
	Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan	Kontribusi sektor industri pengolahan (%)	5.691.797	5.812.694		5.937.690		6.067.410		6.198.153		6.333.090		6.333.090		
	Program Peningkatan Kapasitas teknologi dan Sistem Produksi Industri Logam, Sandang dan Aneka				375		445		505		565		625		2.515	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Prosentase Pertumbuhan industri Logam, Sandang dan Aneka (%)	0,35	0,40		0,45		0,50		0,55		0,60		2,50		
	Program Peningkatan Kapasitas Teknologi dan Sistem Produksi Industri				791,00		875,57		915,57		955,57		955,57		4.493	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

No	Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact / outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Agro,Kimia dan Hasil Hutan															
		Prosentase Pertumbuhan industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan (%)	0,35		0,53	0,71		0,89		0,107		0,125		0,125		
	Program Peningkatan Kapasitas teknologi dan Sistem Produksi Industri Logam, Sandang dan Aneka				375		445		505		565		625		2.515	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan (%)	6.091.182	6.091.182		6.148.182		6.208.182		6.271.182		6.336.182		6.336.182		
	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi				553		618		673		749		814		3.407	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
		Persentase Koperasi Aktif dan melaksanakan RAT (%)	40,71	38,46		40,17		41,83		43,44		45,01		45,01		
		Persentase Koperasi berpredikat sehat (%)	15,33	14,81		15,03		17,22		18,24		19,16		19,16		
	Program Pengembangan, Kemitraan, Pemberdayaan, dan Promosi				415		477		515		537		570		2.514	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan

No	Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact / outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Usaha Mikro															
		Persentase Peningkatan Omset Pelaku Usaha Mikro (%)	3	3		3		3		3		3		15		
		Persentase Usaha Mikro yang memiliki ijin Usaha (%)	5	6		7		8		9		10		10		
	Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Perdagangan Dalam Negeri				4.339		7.703		8.065		9.185		10.300		39.592	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan
		Persentase Pasar dalam kondisi baik (%)	3,85	7,69		11,54		15,38		19,23		23,08		23,08		
		Persentase Alat Dagang lolos Uji Metrologi (%)	10,8	10,8		10,8		10,8		10,8		10,8		10,8		
	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata (juta)	1.619.970	1.781.968		2.049.263		2.254.189		2.592.318		2.851.550		2.851.550		
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Kepariwisata						3.250		4.825		6.450		8.025		22.550	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		PAD sektor Wisata (Juta Rupiah)	1.776	1.900		2.100		2.400		2.700		3.000		12.100		
		Jumlah Kunjungan Wisatawan	450.000	550.000		700.000		800.000		900.000		1.000.000		3.950.000		

No	Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact / outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		(jiwa)														
	Meningkatnya laju investasi daerah	Laju kenaikan investasi (%)	1	1,5		1,5		2		2		2		2		
		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA/PMDN) (milyar rupiah)	1.291	1.310		1.330		1.357		1.384		1.411		1.411		
	Program perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal				339		340		1.135		1.290		1.755		4.520	DPMTSP
		Peraturan Daerah Penyelenggaraa n Penanaman Modal (Ada/Tidak)	0	0		1		1		1		1		4		
		Dokumen RencanaUmum Penanaman Modal(RUPM)(A da/Tidak)	0	0		1		1		1		1		4		
		Peningkatan jumlah Usaha	0	0	1	2		3		4		5		5		

No	Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact / outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Menengah Besar yang bermitra dengan Usaha Menengah Kecil														
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi				327		360		380		398		415		1.880	DPMTSP
		Jumlah Kegiatan Invstasi yang dipantau dan diawasi (Investor)	24	40		40		45		50		55		55		
	Program Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan				439		850		1700		2300		2900		8189	DPMTSP
		Meningkatnya kepuasan pelayanan permohonan perijinan (%)	0	80		80		85		90		100		100		
	Program Penyelenggaraan Informasi, Pengaduan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				520		551,75		581,75		611,75		641,75		641,75	DPMTSP
		Dokumen	0	1		1		1		1		1		1		

No	Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact / outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Informasi dan Pelaporan Perijinan dan non perijinan (dokumen)(Ada/ Tidak)														
		Persentase Pengaduan yang tertangani (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Meningkatnya penguatan sistem informasi daerah	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan (%)	0	20		40		60		80		100		100		
	Program Penelitian dan Pengembangan				836		1360		1445		1530		1600		6771	Badan Perencanaan, Penelitan da Pengembanga n Daerah
		Persentase desa inovasi terhadap desa miskin berpotensi produk unggulan daerah (%)		20		40		60		80		100		100		
		Persentase Klaster Produk Unggulan yang mendapatkan intervensi teknologi (%)				17		33		50		67		67		
		Jumlah inventor yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi technopreneurs hip	0	0		2		2		2		2		8		

No	Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact / outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		persentase hasil penelitian dan pengkajian yang ditindaklanjuti dengan rekomendasi				100		100		100		100		100		
		3. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	9,06	8,82		8,61		8,40		8,19		7,98		7,98		
	Meningkatnya angkatan kerja yang bekerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	65,35	66,65		67,99		69,35		70,73		72,15		72,15		
		Rasio penduduk yang bekerja (%)	61,11	62,34		63,58		64,85		66,15		67,47		67,47		
	Program Pengembangan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi				4.462		3.875		4.116		4.341		4.536		21.330,19	Dinas Peindustrian da Tenaga Kerja
		Persentase Tenaga Kerja Terlatih (%)	15	17		19		21		23		25		25		
		Prosentase Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja (%)	8	8		8		8		8		8		8		

4. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, efektif dan efisien, serta menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban daerah.

**Tabel 6.11.
Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Pada Misi 4**

No	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact / outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Nilai SAKIP	CC	B		B		B		B		B		B		
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai SKM	76,83			77,29		77,52		77,75		77,98		77,98		
	Membaiknya kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah	Indeks Nilai Evaluasi LPPD	Tinggi	Tinggi		Tinggi		Tinggi		Tinggi		Tinggi		Tinggi		
		Opini BPK	WTP			WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
	Program Aset Daerah				2.736		2.736		2.778		2.830		2.910		11.254	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Cakupan Sensus BMD (%)	85	95		100		100		100		100		100		
		Penilaian Aset (%)	-	25		35		50		75		100		100		
		Pencapaian target retribusi pemanfaatan BMD (juta rupiah)	-	310		310		310		310		310		1240		
	Program Peningkatan sistem pengendalian internal				3.158		3.474		3.821		4.203		4.624		19.280	Inspektorat
		Dokumen Perbup Kebijakan Pengawasan (Dokumen)	2			2		2		2		2		2		
		Dokumen Sistem	6			6		7		8		10		10		

No	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact / outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Prosedur Pengawasan (dokumen)														
		Nilai Evaluasi LKJIP OPD	CC			B		B		B		B		B		
		Dokumen Hasil Reviu LKJIP Kab. Brebes (Dokumen)	1			1		1		1		1		1		
	Meningkatnya kualitas aparatur yang profesional dan berkompeten	Indeks Profesionalitas ASN	61,24	61,41		62,41		63,11		63,45		64,00		64,00		
	Program Pembinaan, Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian				1.351		1.522		1.615		1.695		1.785		7.968	Badan Kepegawaian,Pegangan Sumber Daya Manusaia Daerah
		Persentase Kinerja Sasaran Kerja Pegawai	100	100		100		100		100		100		100		
		Angka Pelanggaran yang di tangani (PNS)	17	17		16		15		14		13		13		
		Terfasilitasinya Kesejahteraan bagi PNS (orang)	200	300		200		200		200		200		200		
		Sinkronisasi data dan faile kepegawaian yang falid (orang)	1.500	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		
	Program Pengelolaan Mutasi Kepegawaian				3.400		1169		1265		1351		1019,33			Badan Kepegawaian,Pegangan Sumber Daya Manusaia Daerah

No	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact / outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase Mutasi PNS/ASN (%)	90,9	91,5		92,3		93,8		94,4		95,1		95,1		
		Time Ratio Penerbitan SK Berkala Golongan II dan III (hari)	1	1		1		1		1		1		1		
		Persentase Kenaikan Pangkat PNS/ASN (%)	99	99,2		99,3		99,4		99,5		99,6		99,6		
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Formasi PNS/ASN (%)	99,23	99,35		99,4		99,51		99,62		99,73		99,73		
	Meningkatnya kualitas kelitbangan	Persentase rekomendasi kebijakan hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah (%)	0	20		40		60		80		100		100		
	Program Penelitian dan Pengembangan				836		1360		1445		1530		1600		6771	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Persentase desa inovasi terhadap desa miskin berpotensi produk unggulan daerah (%)		20		40		60		80		100		100		

No	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact / outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase Klaster Produk Unggulan yang mendapatkan intervensi teknologi (%)				17		33		50		67		67		
		Jumlah inventor yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi technopreneurs hip	0	0		2		2		2		2		8		
		persentase hasil penelitian dan pengkajian yang ditindaklanjuti dengan rekomendasi				100		100		100		100		100		
2.	Menciptakan keamanan dan ketertiban, serta kenyamanan lingkungan masyarakat yang partisipatif	Angka kriminalitas	90	90		88		86		84		82		82		
	Meningkatnya keamanan, ketentraman, dan keindahan, serta kenyamanan lingkungan masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Program Penegakkan Peraturan Daerah, Pemeliharaan Ketertiban Umum serta Peningkatan				2.338		2.745		2.965		3.260		3.800		15108	Satpol PP

No	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact / outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama															
		Cakupan Pelaksanaan patroli trantibum (%)	29,41	35,29		41,18		47,06		52,94		58,82		58,82		
	Program Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Pencegahan Bahaya Kebakaran				1.515		4.995		2.120		2.745		2.970		14.345	Satpol PP
		Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	100	100		100		100		100		100		100%		
	Program Kesatuan Bangsa dan Politik				1.481		1.628		1.791		1.954		2.117		2.119	Kesbangpol
		Persentase Penanganan Kasus Paham Ideologi dan konflik sosial (%)	100	100		100		100		100		100		100		
		Persentase Kehadiran Masyarakat dalam Pemilu (%)	-	65		70		70		70		70		70		

5. Memantapkan tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi desa yang maju dan mandiri.

Tabel 6.12.
Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Pada Misi 5

No	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022		

1	2	3	D	Targe t	Rp (Juta)	Targe t	Rp (Juta)	Targe t	Rp (Juta)	Targe t	Rp (Juta)	Targe t	Rp (Juta)	Targe t	Rp (Juta)	17
1	Memantapkan desa dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemberdayaan desa yang baik	Rasio desa dengan tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan desa yang baik (%)	13,68	22,82		34,24		51,36		68,49		100		100		
	Desa mampu menyusun RPJMDes dan RKPDes tepat waktu	Persentase desa yang menyusun RPJMDes dan RKPDes tepat waktu (%)	9,93	20,54		34,24		51,36		68,49		100		100		
	Desa mampu menyusun APBDes tepat waktu	Persentase desa yang menyusun APBDes tepat waktu (%)	9,93	20,54		34,24		51,36		68,49		100		100		
	Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipatif Masyarakat				3.864		4.085		4.314		4.539		4.759		21.562	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Persentase posyandu berstatus Madya (unit)	53	53		53		53		54		54		54		
		Persentase posyandu berstatus purnama (%)	23	23		23		23		23		23		24		
		Persentase posyandu berstatus mandiri (%)	3	3		3		3		3		3		3		
		Persentase masyarakat desa P2MBG yang mampu meningkatkan ekonomi keluarga (%)	3	4		5		6		7		8		8		
		Persentase anak sekolah	36	49		62		74		87		100		100		

No	Tujuan/Sasaran/ProgramPembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		yang terpenuhi gizinya (%)														
		Persentase perangkat desa yang mampu melakukan manajemen padat karya (%)	50	60		70		80		90		100		100		
		Presentase Desa yang memanfaatkan dan mengelola Dana Desa sesuai dengan perencanaan dan aturan (%)	100	100		100		100		100		100		100		
		Persentase Desa yang melakukan kerja sama dengan desa lainnya (%)	-	5		10		15		20		25		25		
		Persentase perangkat desa dan BPD yang memiliki kemampuan pengelolaan keuangan desa yang baik (%)	50	60		70		75		80		90		100		
		Persentase LPM aktif (%)	100	100		100		100		100		100		100		
		Persentase UP2K aktif (%)	51	54		65		77		88		100		100		
		Persentase TPKW aktif (%)	18	28		46		64		82		100		100		

No	Tujuan/Sasaran/ProgramPembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase karang taruna aktif (%)	12	29		47		64		81		100		100		
	Desa yang memiliki BUMDes	Rasio desa yang memiliki BUMDes (%)	21,2	27,39		34,24		51,36		68,49		100		100		
	Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			862			1.027		1.217		1.412		1.607		5.263	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Persentase personil pemerintah desa pengelola SID (%)	-	20		40		60		80		100		100		
		Persentase kepemilikan BUMDes aktif di setiap desa (unit)	21	55		66		77		89		100		100		
		Porsentase keberadaan Posyantek di setiap kecamatan	18	34		50		66		82		100		100		
		Persentase pelaku usaha yang mampu mengelolaUED	9	9		18		18		18		18		100		
		Peningkatan status dari peninjau menjadi peserta	50	50		50		100		100		100		100		
		Persentase kualifikasi perkembangan pembangunan	55	65		75		85		95		100		100		

N o	Tujuan/Sasaran/ProgramPembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impac t/ outcome	Kondi si Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp (Juta)	
				Targe t	Rp (Juta)	Targe t	Rp (Juta)	Targe t	Rp (Juta)	Targe t	Rp (Juta)	Targe t	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		desa (%)														

6. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, serta pemenuhan hak anak, dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta mewujudkan perlindungan sosial.

Tabel 6.13.
Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Pada Misi 6

No	Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Membangun kesetaraan gender dan mendorong perempuan untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan	IPG	85,75			85,83		85,87		85,92		85,96		85,96		
	Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan	HLS (tahun)	11,58			11,70		11,76		11,82		11,88		11,88		
		RLS (tahun)	4,86			4,91		4,93		4,96		4,98		4,98		
		AHH (tahun)	70,33			70,68		70,86		71,04		71,21		71,21		
		Pengeluaran per kapita yang disesuaikan (ribu rupiah PPP)	6.378			6.416		6.436		6.455		6.474		6.474		
		Persentase	1,97			2,07		2,12		2,17		2,23		2,23		

No	Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan (%)														
		Proporsi perempuan di lembaga pemerintahan ASN (%)	26,49			27,56		28,11		28,67		29,24		29,24		
		Persentase penanganan korbanKDRT (%)	100			100		100		100		100		100		
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				16.036		16.036		18.199		20.642		24.438		95.350	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)	62,13	70		80		90		95		100		100		
		Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%)	80,33	85		90		95		100		100		100		
		Persentase Perpustakaan SD (%)	37	40		43		45		48		50		50		
		Persentase Perpustakaan SMP (%)	40	45		48		50		53		55		55		
		Persentase Ruang Komputer SMP	63	65		67		70		75		77		77		

N o	Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja (tujuan/impac t/ outcome	Kondi si Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Targ et	Rp (Juta)	
				Targ et	Rp (Juta)	Targ et	Rp (Juta)	Targ et	Rp (Juta)	Targ et	Rp (Juta)	Targ et	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		(%)														
		Persentase Laboratorium SMP (%)	31	33		35		37		40		42		42		
		Rasio siswa per kelas SD	26	28		28		28		28		28		28		
		Rasio siswa per kelas SMP	31	32		32		32		32		32		32		
		Rasio Rombel per kelas SD	1,07	1		1		1		1		1		1		
		Rasio Rombel per kelas SMP	1,13	1		1		1		1		1		1		
	Program Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal				16.03 6		16.036		18.199		20.642		24.438		95.35 1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		prosentase lembaga PAUD berijin operasional dan terakreditasi (lembaga)	-	47		67		90		120		150		150		
		Indeks Paritas Gender Jenjang SD/MI (indeks)	0,95	1		1		1		1		1		1		
		Indeks Paritas Gender Jenjang SMP/MTs (indeks)	1,24	1		1		1		1		1		1		
		Jumlah penduduk ankatan kerja (usia Produktif/15-	-	100		150		200		250		300		300		

N o	Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja (tujuan/impac t/ outcome	Kondi si Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Targ et	Rp (Juta)	
				Targ et	Rp (Juta)	Targ et	Rp (Juta)	Targ et	Rp (Juta)	Targ et	Rp (Juta)	Targ et	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		44 th) memiliki kemampuan life skill (orang)														
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan						30.984		30.787		30.618		33.639		126.028	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%)	46,99	50		55		60		65		70		70		
		Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%)	84,85	87		90		97		100		100		100		
		Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%)	94,77	95		96		98		100		100		100		
		Persentase guru PAUD bersertifikat pendidik (%)	25	30		32		35		40		45		45		
		Persentase guru SD bersertifikat pendidik (%)	52,36	55		60		65		70		75		75		
		Persentase guru SMP bersertifikat	36,14	40		45		50		60		70		70		

N o	Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja (tujuan/impac t/ outcome	Kondi si Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Targ et	Rp (Juta)	
				Targ et	Rp (Juta)	Targ et	Rp (Juta)	Targ et	Rp (Juta)	Targ et	Rp (Juta)	Targ et	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		pendidik (%)														
		Rasio Guru PNS SD Negeri/20 siswa	36,14	28		28		28		28		28		28		
		Rasio Guru PNS SMP Negeri/20 siswa	39,55	32		32		32		32		32		32		
		Rasio guru terhadap murid sekolah SD	19,42	20		20		20		20		20		20		
		Rasio guru terhadap murid sekolah SMP	15,41	17		18		19		20		20		20		
	Program Kesehatan Masyarakat				46.733		48.133		48.900		49.833		50.550		244.148	Dinas Keshatan
		Penurunan prevalensi BB pada anak dengan BB rendah (persentase)	4,75			4,25		3,75		3,5		3		3		
		Penurunan prevalensi stunting (Persentase)	32,7			30		29		28		27		27		
		Bayi usia 0-6 bulan dapat Asi Eksklusif (Persentase)	80			82		83		84		85		85		
		Cakupan pelayanan balita (D/S) (Persentase)	85			87		88		89		90		90		
		Cakupan Keluarga sadar gizi	65			72		75		78		80		80		

No	Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja (tujuan/impac t/ outcome	Kondi si Awal RPJM D	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Targ et	Rp (Juta)	
				Targ et	Rp (Juta)	Targ et	Rp (Juta)	Targ et	Rp (Juta)	Targ et	Rp (Juta)	Targ et	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		(Persentase)														
		Penurunan prevalensi anak gizi buruk (Persentase)	0.7			0,6		0,55		0,5		0,45		0,45		
		Cakupan desa baik garam (Persentase)	98			100		100		100		100		100		
		Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (Persentase)	100			100		100		100		100		100		
		Cakupan balita naik BB (N/D) (persentase)	70			75		77		78		80		80		
		Bayi baru lahir mendapat IMD (Inisiasi Menyusu Dini) (Persentase)	50			52		53		54		55		55		
		Remaja putri mendapat TTD (Tablet Tambah Darah) (Persentase)	25			27		28		29		30		30		
		Cakupan bayi dapat Vitamin A (Persentase)	90			92		93		94		95		95		
		Cakupan balita dapat Vitamin A (Persentase)	90			92		93		94		95		95		
		Cakupan ibu nifas dapat Vitamin A dan Fe 42	85			88		91		93		95		95		

No	Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		(Persentase)														
		Cakupan RT yang mengkonsumsi garam yodium (Persentase)	93			98		100		100		100		100		
		Pesentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ante natal care minimal 4 kali sesuai standar (11 T)/ANC Terpadu (%)	50			60		65		70		75		75		
		Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan Persalinan Sesuai Standar (%)	75			77		78		79		80		80		
		Prosentase Cakupan K1 (Persentase)	100			100		100		100		100		100		
		Prosentase Cakupan K4 (Persentase)	86			87		88		89		90		90		
		Prosentase KB Aktif (Persentase)	52			60		65		70		74		74		
		Prosentase Cakupan KF 1 (Persentase)	70			72		73		74		75		75		
		Prosentase Cakupan KF 3 (Persentase)	55			60		65		68		70		70		
		Prosentase persalinan di fasilitas pelayanan	70			74		76		78		80		80		

N o	Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja (tujuan/impac t/ outcome	Kondi si Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Targ et	Rp (Juta)	
				Targ et	Rp (Juta)	Targ et	Rp (Juta)	Targ et	Rp (Juta)	Targ et	Rp (Juta)	Targ et	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		kesehatan terstandar (Persentase)														
		Prosentase persalinan oleh tenaga kesehatan (Persentase)	90			92		93		94		95		95		
		Prosentase komplikasi Kebidanan yang tertangani (Persentase)	85			89		90		93		95		95		
		Prosentase puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil (Persentase)	100			100		100		100		100		100		
		Prosentase deteksi resiko dan komplikasi oleh masyarakat (Persentase)	30			38		42		46		50		50		
		Prosentase deteksi resiko dan komplikasi oleh tenaga kesehatan (Persentase)	80			84		86		88		90		90		
		Prosentase kunjungan neonatal pertama KN1 (Persentase)	75			80		83		88		90		90		
		Prosentase	85			87		88		89		90		90		

N o	Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja (tujuan/impac t/ outcome	Kondi si Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Targ et	Rp (Juta)	
				Targ et	Rp (Juta)	Targ et	Rp (Juta)	Targ et	Rp (Juta)	Targ et	Rp (Juta)	Targ et	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		kunjungan neonatal lengkap KN3 (Persentase)														
		Prosentase Neonatal Komplikasi tertangani (Persentase)	90			92		93		94		95		95		
		Prosentase kunjungan bayi (Persentase)	90			92		93		94		95		95		
		Prosentase Bayi BBLR tertangani (Persentase)	100			100		100		100		100		100		
		Prosentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar (Presentase)	85			87		88		89		90		90		
		Prosentase Balita di MTBS (Persentase)	60			68		72		76		80		80		
		Prosentase pelayanan kesehatan usia lanjut (Persentase)	30			40		45		55		60		60		
		Prosentase PMT (Pemberian makanan Tambahan) Lansia (Persentase)	10			20		30		40		50		50		
		Prosentase Posyandu Lansia	50			60		65		70		75		75		

N o	Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja (tujuan/impac t/ outcome	Kondi si Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Targ et	Rp (Juta)	
				Targ et	Rp (Juta)	Targ et	Rp (Juta)	Targ et	Rp (Juta)	Targ et	Rp (Juta)	Targ et	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		(Persentase)														
		Jumlah puskesmas Santun Lansia (Persentase)	100			100		100		100		100		100		
		Cakupan Desa Siaga Aktif (%)	68			78		80		82		84		84		
		presentase pelaksanaan pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas (persentase)	-			70		75		80		85		85		
		Cakupan Akses Jamban Sehat (%)	-			80		90		95		100		100		
		Persentase Desa Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	-			65		79		92		100		100		
		presentase sarana air minum masyarakat yang memenuhi syarat kesehatan (Kepala Keluarga)	-			80		90		95		100		100		
		persentase tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat	-			58		60		63		67		67		

N o	Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja (tujuan/impac t/ outcome	Kondi si Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Targ et	Rp (Juta)	
				Targ et	Rp (Juta)	Targ et	Rp (Juta)	Targ et	Rp (Juta)	Targ et	Rp (Juta)	Targ et	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		kesehatan (presentase)														
	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit				1.583		2.159		2.320		2.444		2.670		11.175	Dinas Kesehatan
		AFP Rate (> 2 per 100.000 penduduk < 15 tahun)	2,75			2,75		2,75		2,75		2,75		2,75		
		persentase penurunan kasus penyakit yg dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) tertentu. - Campak - Difteri	-			0,07		0,09		0,11		0,13		0,13		
		Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon	0,6			0,65		0,7		0,75		0,8		0,8		
		Persentase pengungsi korban bencana yang mendapat pelayanan kesehatan	1			1		1		1		1		1		
		Prosentase anak sekolah SD/MI dan sederajat yang	0,98			0,98		0,98		0,98		0,98		0,98		

N o	Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja (tujuan/impac t/ outcome	Kondi si Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Targ et	Rp (Juta)	
				Targ et	Rp (Juta)	Targ et	Rp (Juta)	Targ et	Rp (Juta)	Targ et	Rp (Juta)	Targ et	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		mendapatkan imunisasi (BIAS)														
		Persentase hasil pemeriksaan kesehatan Jamah haji	70			75		80		85		90		90		
		Persentase desa / kelurahan yang mencapai 80% Imunisasi dasar lengkap (Desa UCI)	100			100		100		100		100		100		
		Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	92			92,5		93		93,5		94		94		
		Persentase anak usia 12- 24 bulan mendapat imunisasi lanjutan (Boster)	50			60		65		70		75		75		
		Insinden Rate DBD	59,81			58		57		56		55		55		
		Case Fatality Rate DBD	0,65			0,62		0,6		0,58		0,56		0,56		
		Angka keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus (% succes rate)	61,79			75		80		85		90		90		
		Angka	60			0,7		0,75		0,8		0,85		0,85		

No	Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Targ et	Rp (Juta)	
				Targ et	Rp (Juta)	Targ et	Rp (Juta)	Targ et	Rp (Juta)	Targ et	Rp (Juta)	Targ et	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		keberhasilan pengobatan pasien TB resistan obat (% succes rate)														
		Cakupan pengobatan semua kasus TB (% case detection rate / CDR)	54			62		64		68		70		70		
		Angka notifikasi semua kasus TB yg diobati (case notification rate / CNR) per 100.000 penduduk	63			75		80		85		90		90		
		Persentase pasien TB yang mengetahui status HIV (%)	47,5			60		65		70		75		75		
		Cakupan penemuan kasus TB resistan obat (absolut)	50			65		70		75		80		80		

N o	Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja (tujuan/impac t/ outcome	Kondi si Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Targ et	Rp (Juta)	
				Targ et	Rp (Juta)	Targ et	Rp (Juta)	Targ et	Rp (Juta)	Targ et	Rp (Juta)	Targ et	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase angka kasus HIV yang diobati (on ART)	34			70		75		80		85		85		
		Cakupan Populasi beresiko yang diperiksa HIV	53			75		80		85		90		90		
		Angka Penemuan Kusta	15,59			10		10		10		10		10		
		persentase penemuan Pneumonia Balita	35,79			50		55		60		65		65		
		Persentase perempuan usia 30 sampai 50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara	0			60		70		80		100		100		
		Jumlah wanita usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	0			60		70		80		100		100		
		Cakupan minum obat filariasis(POPM / pemberian obat pencegahan masal)	87,2			92		95		100						
		Persentase Puskesmas	0			10		15		20		25		25		

N o	Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja (tujuan/impac t/ outcome	Kondi si Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Targ et	Rp (Juta)	
				Targ et	Rp (Juta)	Targ et	Rp (Juta)	Targ et	Rp (Juta)	Targ et	Rp (Juta)	Targ et	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu														
		Persentase Desa/ Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM	26			70		100		100		100		100		
		Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100			100		100		100		100		100		
		Persentase penyandang Diabetes Mellitus (DM) yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	-			70		100		100		100		100		
		Persentase penderita hipertensi	-			70		100		100		100		100		

N o	Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja (tujuan/impac t/ outcome	Kondi si Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Targ et	Rp (Juta)	
				Targ et	Rp (Juta)	Targ et	Rp (Juta)	Targ et	Rp (Juta)	Targ et	Rp (Juta)	Targ et	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar														
	Program Pelayanan Kesehatan				16.530		15.013		8.795		11.900		8.205		60.443	Dinas Keshatan
		Cakupan pelayanan gigi bumil	79	100		100		100		100		100		100		
		Cakupan pelayanan gigi pada anak pra sekolah	52	50		50		50		50		50		50		
		Cakupan UKGS (Upaya Kesehatan Gigi Sekolah)	89	60		60		70		80		90		90		
		Persentase desa total coverage PIS PK	16	1		1		1		1		1		1		
		Jumlah kecamatan yg memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi	-	100		100		100		100		100		100		
		Presentase faskes yg memiliki ijin pelayanan kesehatan		100		100		100		100		100		100		
		Persentase industri rumah tangga yang memiliki sertifikat		100		100		100		100		100		100		
		Cakupan masvarakat		100		100		100		100		100		100		

N o	Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja (tujuan/impac t/ outcome	Kondi si Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Targ et	Rp (Juta)	
				Targ et	Rp (Juta)	Targ et	Rp (Juta)	Targ et	Rp (Juta)	Targ et	Rp (Juta)	Targ et	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		miskin memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan														
	Program Sumber Daya Kesehatan				1.960		70.162		65.169		25.249		8.452		244.1 48	Dinas Keshatan
		Persentase Ketersediaan Obat dan Perbelkes di Puskesmas yang tersedia		85		85		90		95		100		100		
		Tersedianya Data dan Informasi Bidang Kesehatan	100	100		100		100		100		100		100		
		Meningkatnya Sumber Daya Kesehatan	90	100		100		100		100		100		100		
2	Memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara merata	Indeks komposit kesejahteraan anak (%)	10			14		16		18		20		20		
	Meningkatn ya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara	Prevalensi anak bekerja (%)	0,018 4			0,018 4		0,018 2		0,018 2		0,018 2		0,018 2		

N o	Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja (tujuan/impac t/ outcome	Kondi si Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Targ et	Rp (Juta)	
				Targ et	Rp (Juta)	Targ et	Rp (Juta)	Targ et	Rp (Juta)	Targ et	Rp (Juta)	Targ et	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	merata															
		Rasio perkawinan anak (%)	0,44			0,43		0,42		0,42		0,42		0,42		
		Cakupan anak memiliki akte (%)	66,09			89,00		93,00		97,00		100				
		Persentase penanganan korban kekerasan pada anak (%)	100			100		100		100		100				
	Program Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan anak						4245		4305		4425		4575		21240	DP3KB
		Persentase meningkatnya Implementasi Pengarusutam aan Gender dan Kabupaten Layak Anak (KLA) (%)				12		14		16		18		18		
		Cakupan pembentukan forum anak desa dibanding jumlah desa (%)	15,15			30,3		35,35		40,4		45,45		45,45		
		Cakupan penanganan kasus kekerasan	100			100		100		100		100		100		

No	Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp (Juta)	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		perempuan dan anak dibanding kasus terlapor (%)														
	Program Pelayanan Catatan Sipil						650		650		650		650		2600	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Rasio Penduduk 0 - 18 Tahun Memiliki Akte (%)	80			90		92,5		95		97,5		97,5		
3	Meningkatkan penanganan PMKS secara optimal	Persentase peningkatan penanganan PMKS														
	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PMKS yang mendapat bantuan sosial (%)	32			50		60		70		80		80		
		Persentase PMKS penerima KUBE (%)	3			5		6		7		8		8		
	Program Peningkatan Pelaksanaan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial						799,8495		862,045075		912,246926		967,37081		4.270	Dinas Sosial
		Prosentase Anak Terlantar, Anak Dengan Disbailitas.	96,00			98,00		99,00		100,00		100,00		100,00		

N o	Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja (tujuan/impac t/ outcome	Kondi si Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Targ et	Rp (Juta)	
				Targ et	Rp (Juta)	Targ et	Rp (Juta)	Targ et	Rp (Juta)	Targ et	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Anak Nakal dan Anak Jalanan, Lanjut Usia Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya dan Dapat Menjalankan fungsi sosialnya (%)														
		Presentase Meningkatnya Penyandang Disabilitas, dan PMKS Lainnya yang terpenuhi hak dasar dan dapat menjalankan fungsi sosialnya (%)	48			70		75		80		85		85		
	Program Pelayanan Bantuan, Perlindungan dan Pemberdayaa n Sosial						2931,386 15		3224,5247 65		3446,9772 42		3901,6752 56			Dinas Sosial
		Presentase Meningkatkan Aksesibilitas RTSM (Rumah Tangga Miskin) dan PMKS lainnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar	68,00			75,00		80,00		85,00		90,00		90,00		

N o	Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja (tujuan/impac t/ outcome	Kondi si Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Targ et	Rp (Juta)	
				Targ et	Rp (Juta)	Targ et	Rp (Juta)	Targ et	Rp (Juta)	Targ et	Rp (Juta)	Targ et	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Presentase PSKS Yang Aktif Berpartisipasi Dalam Penanganan Dan Penyelenggara an Kesejahteraan Sosial	41,00			50,00		55,00		60,00		70,00		70,00		

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan kerangka program prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan pada sebelumnya, dengan indikator kinerja program (*outcome*), kondisi kinerja pada awal RPJMD, target dan pagu indikatif setiap tahun selama lima tahun, Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD dan Perangkat Daerah penanggung jawabnya.

Perumusan indikasi rencana program prioritas pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Keberhasilan capaian suatu program mendukung keberhasilan program lainnya. Perumusan program prioritas pembangunan daerah sangat penting karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang kongkrit dalam bentuk program prioritas. Urgensi lain adalah juga karena perumusan program pembangunan daerah adalah inti dari perencanaan strategis itu sendiri yang mendefinisikan tujuan strategis dalam 5 (lima) tahun. Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah.

Suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya. Suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun atau periode sebaliknya, menjadi operasional di periode berikutnya.

Dalam hal suatu urusan atau program/kegiatan di dalamnya menjadi strategis, maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena pengaruhnya yang sangat luas dan *urgent sehingga* merupakan prioritas untuk diselenggarakan.

Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis, menjadi tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategis, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau diabaikan.

Kerangka program dalam RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022 terdiri dari rencana program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi kepala daerah dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis PD.

Selanjutnya guna memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan atau program, maka dalam proses penyusunan RPJMD Kabupaten Brebes tahun 2017-2022 telah dilakukan Kajian terhadap RPJMD.. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terbagi ke dalam) urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.

Tabel. 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017 – 2022
Kabupaten Brebs

Kode	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	KAPASITAS RIIL KEUANGAN						
2	BELANJA	2.950.823.242.000	2.991.258.323.000	3.125.315.850.000	2.991.818.900.000	3.083.384.375.000	3.187.703.455.000
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.574.029.681.000	1.683.787.163.000	1.671.270.000.000	1.624.053.500.000	1.637.094.575.000	1.651.596.228.000
2.1.1	Belanja Pegawai	1.068.385.408.000	1.083.674.000.000	1.084.520.000.000	1.086.201.000.000	1.088.787.000.000	1.092.349.000.000
2.1.2	Belanja Bunga	0	3.600.000.000	20.700.000.000	15.300.000.000	9.900.000.000	4.500.000.000
2.1.3	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0
2.1.4	Belanja Hibah	28.427.700.000	34.655.800.000	35.000.000.000	35.000.000.000	36.050.000.000	37.131.500.000
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	21.421.874.000	19.904.750.000	15.000.000.000	20.000.000.000	20.600.000.000	21.218.000.000
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	11.292.080.000	10.247.000.000	10.050.000.000	10.552.500.000	11.047.575.000	11.566.428.000
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	439.502.619.000	526.705.613.000	500.000.000.000	450.000.000.000	463.500.000.000	477.405.000.000
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	5.000.000.000	6.000.000.000	7.000.000.000	7.210.000.000	7.426.300.000
2.2	BELANJA LANGSUNG	1.376.793.561.000	1.307.471.160.000	1.454.045.850.000	1.367.765.400.000	1.446.289.800.000	1.536.107.227.000
2.2.1	Belanja Pegawai	74.154.418.000	49.695.000.000	50.000.000.000	52.000.000.000	53.560.000.000	55.166.800.000
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	632.545.948.000	522.776.160.000	554.045.850.000	560.765.400.000	589.299.800.000	624.475.427.000
2.2.3	Belanja Modal	670.093.195.000	735.000.000.000	850.000.000.000	755.000.000.000	803.430.000.000	856.465.000.000

Sumber: DPPK Kab. Brebes, 2017 - 2022 (data diolah)

Tabel. 7.2
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2017 – 2022
Kabupaten Brebes

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indkator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangka t Daerah
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Wajib Pelayanan Dasar															
1.1	Pendidikan															
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				16.036		16.036		18.199		20.642		24.438		95.350	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)	62,13	70		80		90		95		100		100		
		Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%)	80,33	85		90		95		100		100		100		
		Persentase Perpustakaan SD (%)	37	40		43		45		48		50		50		
		Persentase Perpustakaan SMP (%)	40	45		48		50		53		55		55		
		Persentase Ruang Komputer SMP (%)	63	65		67		70		75		77		77		
		Persentase Laboratorium SMP (%)	31	33		35		37		40		42		42		
		Rasio siswa per kelas SD	26	28		28		28		28		28		28		
		Rasio siswa per kelas SMP	31	32		32		32		32		32		32		
		Rasio Rombel per kelas SD	1,07	1		1		1		1		1		1		
		Rasio Rombel per kelas SMP	1,13	1		1		1		1		1		1		

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indkator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangka t Daerah
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal				16.036		16.036		18.199		20.642		24.438		95.351	Dinas Pendidika n Pemuda dan Olahraga
		prosentase lembaga PAUD berijin operasional dan terakreditasi (lembaga)	-	47		67		90		120		150		150		
		Indeks Paritas Gender Jenjang SD/MI (indeks)	0,95	1		1		1		1		1		1		
		Indeks Paritas Gender Jenjang SMP/MTs (indeks)	1,24	1		1		1		1		1		1		
		Jumlah penduduk ankatan kerja (usia Produktif/15-44 th) memiliki kemampuan life skill (orang)	-	100		150		200		250		300		300		
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				30.984		30.984		30.787		30.618		33.639		126.028	Dinas Pendidika n Pemuda dan Olahraga
		Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%)	46,99	50		55		60		65		70		70		
		Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%)	84,85	87		90		97		100		100		100		
		Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%)	94,77	95		96		98		100		100		100		

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indkator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangka t Daerah
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase guru PAUD bersertifikat pendidik (%)	25	30		32		35		40		45		45		
		Persentase guru SD bersertifikat pendidik (%)	52,36	55		60		65		70		75		75		
		Persentase guru SMP bersertifikat pendidik (%)	36,14	40		45		50		60		70		70		
		Rasio Guru PNS SD Negeri/20 siswa	36,14	28		28		28		28		28		28		
		Rasio Guru PNS SMP Negeri/20 siswa	39,55	32		32		32		32		32		32		
		Rasio guru terhadap murid sekolah SD	19,42	20		20		20		20		20		20		
		Rasio guru terhadap murid sekolah SMP	15,41	17		18		19		20		20		20		
1.2	Kesehatan															
	Program Kesehatan Masyarakat				46.733		48.133		48.900		49.833		50.550		244.148	Dinas Keshatan
		Penurunan prevalensi BB pada anak dengan BB rendah (persentase)	4,75	4,5		4,25		3,75		3,5		3		3		
		Penurunan prevalensi stunting (Persentase)	32,7	32		30		29		28		27		27		
		Bayi usia 0-6 bulan dapat Asi Eksklusif (Persentase)	80	81		82		83		84		85		85		
		Cakupan pelayanan balita (D/S) (Persentase)	85	86		87		88		89		90		90		
		Cakupan Keluarga sadar gizi (Persentase)	65	68		72		75		78		80		80		
		Penurunan prevalensi anak gizi buruk (Persentase)	0.7	0,65		0,6		0,55		0,5		0,45		0,45		

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indkator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangka t Daerah
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Cakupan desa baik garam (Persentase)	98	99		100		100		100		100		100		
		Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (Persentase)	100	100		100		100		100		100		100		
		Cakupan balita naik BB (N/D) (persentase)	70	72		75		77		78		80		80		
		Bayi baru lahir mendapat IMD (Inisiasi Menyusu Dini) (Persentase)	50	51		52		53		54		55		55		
		Remaja putri mendapat TTD (Tablet Tambah Darah) (Persentase)	25	26		27		28		29		30		30		
		Cakupan bayi dapat Vitamin A (Persentase)	90	91		92		93		94		95		95		
		Cakupan balita dapat Vitamin A (Persentase)	90	91		92		93		94		95		95		
		Cakupan ibu nifas dapat Vitamin A dan Fe 42 (Persentase)	85	86		88		91		93		95		95		
		Cakupan RT yang mengonsumsi garam yodium (Persentase)	93	95		98		100		100		100		100		
		Pesentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ante natal care minimal 4 kali sesuai standar (11 T) /ANC Terpadu (%)	50	55		60		65		70		75		75		
		Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan Persalinan Sesuai Standar (%)	75	76		77		78		79		80		80		
		Prosentase Cakupan K1 (Persentase)	100	100		100		100		100		100		100		

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indkator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangka t Daerah
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Prosentase Cakupan K4 (Persentase)	86	86		87		88		89		90		90		
		Prosentase KB Aktif (Persentase)	52	55		60		65		70		74		74		
		Prosentase Cakupan KF 1 (Persentase)	70	71		72		73		74		75		75		
		Prosentase Cakupan KF 3 (Persentase)	55	57		60		65		68		70		70		
		Prosentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan terstandar (Persentase)	70	72		74		76		78		80		80		
		Prosentase persalinan oleh tenaga kesehatan (Persentase)	90	91		92		93		94		95		95		
		Prosentase komplikasi Kebidanan yang tertangani (Persentase)	85	87		89		90		93		95		95		
		Prosentase puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil (Persentase)	100	100		100		100		100		100		100		
		Prosentase deteksi resiko dan komplikasi oleh masyarakat (Persentase)	30	34		38		42		46		50		50		
		Prosentase deteksi resiko dan komplikasi oleh tenaga kesehatan (Persentase)	80	82		84		86		88		90		90		
		Prosentase kunjungan neonatal pertama KN1 (Persentase)	75	78		80		83		88		90		90		
		Prosentase kunjungan neonatal lengkap KN3 (Persentase)	85	86		87		88		89		90		90		

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indkator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangka t Daerah
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Prosentase Neonatal Komplikasi tertangani (Persentase)	90	91		92		93		94		95		95		
		Prosentase kunjungan bayi (Persentase)	90	91		92		93		94		95		95		
		Prosentase Bayi BBLR tertangani (Persentase)	100	100		100		100		100		100		100		
		Prosentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar (Presentase)	85	86		87		88		89		90		90		
		Prosentase Balita di MTBS (Persentase)	60	64		68		72		76		80		80		
		Prosentase pelayanan kesehatan usia lanjut (Persentase)	30	35		40		45		55		60		60		
		Prosentase PMT (Pemberian makanan Tambahan) Lansia (Persentase)	10	15		20		30		40		50		50		
		Prosentase Posyandu Lansia (Persentase)	50	55		60		65		70		75		75		
		Jumlah puskesmas Santun Lansia (Persentase)	100	100		100		100		100		100		100		
		Cakupan Desa Siaga Aktif (%)	68	75		78		80		82		84		84		
		presentase pelaksanaan pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas (persentase)	-	55		70		75		80		85		85		
		Cakupan Akses Jamban Sehat (%)	-	70		80		90		95		100		100		

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indkator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangka t Daerah
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase Desa Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	-	51		65		79		92		100		100		
		presentase sarana air minum masyarakat yang memenuhi syarat kesehatan (Kepala Keluarga)	-	70		80		90		95		100		100		
		persentase tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan (presentase)	-	55		58		60		63		67		67		
	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit				1.583		2.159		2.320		2.444		2.670		11.175	Dinas Kesehatan
		AFP Rate (> 2 per 100.000 penduduk < 15 tahun)	2,75	2,75		2,75		2,75		2,75		2,75		2,75		
		persentase penurunan kasus penyakit yg dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) tertentu. - Campak - Difteri	-	5		7		9		11		13		13		
		Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon	60	60		65		70		75		80		80		
		Persentase pengungsi korban bencana yang mendapat pelayanan kesehatan	100	100		100		100		100		100		100		

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indkator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangka t Daerah
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Prosentase anak sekolah SD/MI dan sederajat yang mendapatkan imunisasi (BIAS)	98	98		98		98		98		98		98		
		Persentase hasil pemeriksaan kesehatan Jamah haji	70	70		75		80		85		90		90		
		Persentase desa / kelurahan yang mencapai 80% Imunisasi dasar lengkap (Desa UCI)	100	100		100		100		100		100		100		
		Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	92	92		92,5		93		93,5		94		94		
		Persentase anak usia 12-24 bulan mendapat imunisasi lanjutan (Boster)	50	55		60		65		70		75		75		
		Insiden Rate DBD	59,81	59		58		57		56		55		55		
		Case Fatality Rate DBD	0,65	0,64		0,62		0,6		0,58		0,56		0,56		
		Angka keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus (% succes rate)	61,79	70		75		80		85		90		90		
		Angka keberhasilan pengobatan pasien TB resistan obat (% succes rate)	60	65		70		75		80		85		85		
		Cakupan pengobatan semua kasus TB (% case detection rate / CDR)	54	60		62		64		68		70		70		

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indkator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangka t Daerah
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Angka notifikasi semua kasus TB yg diobati (case notification rate / CNR) per 100.000 penduduk	63	70		75		80		85		90		90		
		Persentase pasien TB yang mengetahui status HIV (%)	47,5	55		60		65		70		75		75		
		Cakupan penemuan kasus TB resistan obat (absolut)	50	60		65		70		75		80		80		
		Persentase angka kasus HIV yang diobati (on ART)	34	65		70		75		80		85		85		
		Cakupan Populasi beresiko yang diperiksa HIV	53	70		75		80		85		90		90		
		Angka Penemuan Kusta	15,59	10		10		10		10		10		10		
		persentase penemuan Pneumonia Balita	35,79	45		50		55		60		65		65		
		Persentase perempuan usia 30 sampai 50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara	0	50		60		70		80		100		100		
		Jumlah wanita usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	0	50		60		70		80		100		100		
		Cakupan minum obat filariasis(POPM/ pemberian obat pencegahan masal)	87,2	90		92		95		100						

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indkator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangka t Daerah	
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu	0	5		10		15		20		25		25			
		Persentase Desa/ Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM	26	50		70		100		100		100		100			
		Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100		100		100		100		100		100			
		Persentase penyandang Diabetes Mellitus (DM) yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	-	50		70		100		100		100		100			
		Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	-	50		70		100		100		100		100			
	Program Pelayanan Kesehatan				16.530		15.013		8.795		11.900		8.205		60.443	Dinas Keshatan	
		Cakupan pelayanan gigi bumil	79	100		100		100		100		100		100			
		Cakupan pelayanan gigi pada anak pra sekolah	52	50		50		50		50		50		50			
		Cakupan UKGS (Upaya Kesehatan Gigi Sekolah)	89	60		60		70		80		90		90			
		Persentase desa total coverage PIS PK	16	1		1		1		1		1		1			

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indkator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangka t Daerah	
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Jumlah kecamatan yg memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi	-	100		100		100		100		100		100			
		Presentase faskes yg memiliki ijin pelayanan kesehatan		100		100		100		100		100		100			
		Persentase industri rumah tangga yang memiliki sertifikat		100		100		100		100		100		100			
		Cakupan masyarakat miskin memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan		100		100		100		100		100		100			
	Program Sumber Daya Kesehatan				1.960		70.162		65.169		25.249		8.452		170.992	Dinas Keshatan	
		Persentase Ketersediaan Obat dan Perbelkes di Puskesmas yang tersedia		85		85		90		95		100		100			
		Tersedianya Data dan Informasi Bidang Kesehatan	100	100		100		100		100		100		100			
		Meningkatnya Sumber Daya Kesehatan	90	100		100		100		100		100		100			
	Program Pelayanan Medis, Rujukan dan Kemitraan				2.790		3.348		4.018		4.821		5.785		20.762	RSUD Brebes	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Medis dan Rujukan ≥ 80%	-	80		80		80		80		80		80			

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangka t Daerah
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Pelayanan Keperawatan				1.251		1.502		1.802		2.162		2.595		9.312	RSUD Brebes
		Indeks Kepuasan Pelayanan Keperawatan ≥ 80%	-	80		80		80		80		80		80		
	Program Pelayanan Penunjang				49.071		58.886		70.663		84.796		101.755		365.171	RSUD Brebes
		Indeks Kepuasan Pelayanananan Penunjang ≥ 80%	-	80		80		80		80		80		80		
	Program Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Rumah Sakit				71000		71.000		23.400		27.080		32.096		224.576	
		Jumlah Pendapatan (Rp. Juta)	0	16.500		24.750		29.700		35.640		42.768				RSUD Bumiayu
		Peningkatan Jumlah Kunjungan Pasien	14.795	17.754		21.305		25.566		30.679		33.747				
1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang															
	Pekerjaan Umum:															
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Ke-Puan				8300		8300		300		3300		300			
		Persentase Jumlat Alat Berat Siap Pakai (%)	80	80		80		80		80		80		80		

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indkator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangka t Daerah
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Perencanaan dan Pengendalian				5.600		5.600		5.900		6.500		12.100		35.700	Dinas Pekerjaan Umum
		Persentase Kesesuaian Perencanaan dengan hasil Pembangunan	100	100		100		100		100		100		100		
	Program Pembangunan/Pen ingkatan dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan				202.50 0		202.50 0		228.50 0		254.500		280.50 0		1.168.5 00	Dinas Pekerjaan Umum
		Meningkatnya Kondisi jalan dan jembatan baik dan mantap (%)	67	60		63		67		70		73		73		
	Program Pembangunan, Pemeliharaan Infrastruktur Perkotaan dan Perdesaan				2350		2350		2.400		2.450		2.500		12.050	Dinas Pekerjaan Umum
		Meningkatnya Kondisi infrastruktur perkotaan (gedung)(%)	25	27		28		29		30		32		32		
		Meningkatnya Kondisi infrastruktur Drainase (%)	78	79		80		81		82		83		84		
		Meningkatnya Kondisi infrastruktur Air minum (%)	80	82		84		86		88		90		90		
		Meningkatnya Kondisi infrastruktur perdesaan (%)	70	72		74		76		78		80		80		

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangka t Daerah
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Air Baku dan Jaringan Pengairan lainnya				25.130		25.130		27.643		30.155		27.499		135.557	Dinas Pengairan Sumber Daya Alam dan Penataan Ruang
		Peningkatan Panjang Saluran irigasi dalam kondisi baik (m)	250.450	254.690		258.980		263.150		267.245		271.430		271.430		
	Program Pengelolaan, Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Air				4.550		42.550		46.805		51.060		56.466		201.431	Dinas Pengairan Sumber Daya Alam dan Penataan Ruang
		Prosentase jumlah sungai yang berfungsi optimal (%)	5,21	10,42		16,67		21,88		27,08		32,29		32,29		
	Penataan Ruang:															
	Program Penataan Ruang				1700		1.700		1.765		1.830		2.101		9.096	Dinas Pengairan Sumber Daya Alam dan Penataan Ruang
		Persentase Kesesuaian Penyelenggaraan enatan Ruan dengan dokumen RTRW (%)	0	5		10		15		20		25		25		

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangka t Daerah
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman															
	Program Perumahan Rakyat						14.300		16.500		17.680		19.050		67.530	Dinas Perumaha n dan Kawasan Permukim an
		Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani (unit)	1.757	1.56 6		3.17 6		3.17 6		3.17 6		11.0 94		11.0 94		
	Program Kawasan Permukiman dan Pertanahan				8.150		8.150		9.405		11.405		11.710		48.820	Dinas Perumaha n dan Kawasan Permukim an
		Menurunnya luasan kawasan permukiman kumuh (Ha)	207,45	172, 88		138. ,26		103, 64		69,0 2		34,4		34,4		
		Persentase tanah yang bersertifikat (%)	28	28,5		29		29,5		30		30,5		30,5		

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indkator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangka t Daerah
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat															
	Program Penegakkan Peraturan Daerah, Pemeliharaan Ketertiban Umum serta Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama				2.338		2.745		2.965		3.260		3.800		15108	Satpol PP
		Cakupan Pelaksanaan patroli trantibum (%)	29,41	35,2 9		41,1 8		47,0 6		52,9 4		58,8 2		58,8 2		
	Program Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Pencegahan Bahaya Kebakaran				1.515		4.995		2.120		2.745		2.970		14.345	Satpol PP
		Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	100	100		100		100		100		100		100 %		
	Program Kesatuan Bangsa dan Politik				1.481		1.628		1.791		1.954		2.117		2.119	Kesbangp ol
		Persentase Penanganan Kasus Paham Ideologi dan konflik sosial (%)	100	100		100		100		100		100		100		
		Persentase Kehadiran Masyarakat dalam Pemilu (%)	-	65		70		70		70		70		70		

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indkator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangka t Daerah
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)				895		920		943		966		986		4.710,9 2	BNK
		Jumlah desa bebas narkoba	-	-		17		34		51		68		68		
		Jumlah Sekolah Bebas Narkoba (Unit)	-	-		10		20		30		40		40		
	Program pencegahan dan Kesiapsiagaan				835		1.495		885		945		975		5.135	BPBD
		Cakupan Desa Tangguh Bencana (%)	5,00	-	10,00	12,5 0		20,0 0		27,5 0		35,0 0		35,0 0		
		Pengurangan Persentase korban terdampak bencana (%)	30	25	25	20		15		10		5		5		
	Program Kedaruratan dan Logistik				440		500		550		600		600		2.690	BPBD
		Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	-	100		100		100		100		100		100		
		Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (%)	-	60		65		70		75		80		80		

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indkator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangka t Daerah	
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi				200		200		200		200		200		1.000	BPBD	
		Persentase Jumlah Sarana dan Prasaran yang Tertangani Pasca Bencana (%)	15	20		25		30		35		40		40			
1.6	Sosial																
	Program Peningkatan Pelaksanaan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial				427		800		862		912		967		4.269,7 6	Dinas Sosial	
		Prosentase Anak Terlantar, Anak Dengan Disbailitas, Anak Nakal dan Anak Jalanan, Lanjut Usia Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya dan Dapat Menjalankan fungsi sosialnya (%)	96	97		98		99		100		100		100			
		Presentase Meningkatnya Penyandang Disabilitas, dan PMKS Lainnya yang terpenuhi hak dasar dan dapat menjalankan fungsi sosialnya (%)	48	67		70		75		80		85		85			

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indkator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangka t Daerah
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Pelayanan Bantuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial				2.074		2.931		3.225		3.447		3.902			Dinas Sosial
		Presentase Meningkatn Aksesibilitas RTSM (Rumah Tangga Miskin) dan PMKS lainnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar	68	70		75		80		85		90		90		
		Presentase PSKS Yang Aktif Berpartisipasi Dalam Penanganan Dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	41	54		50		55		60		70		70		
2	Wajib Bukan Pelayanan Dasar															
2.1	Tenaga Kerja															
	Program Pengembangan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi				4.462		3.875		4.116		4.341		4.536		21.330, 19	Dinas Peindustri an da Tenaga Kerja
		Persentase Tenaga Kerja Terlatih (%)	15	17		19		21		23		25		25		
		Prosentase Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja (%)	8	8		8		8		8		8		8		

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangka t Daerah
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak															
	Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak				3.690		4.245		4.305		4.425		4.575		21.240	DP3KB
		Persentase meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender dan Kabupaten Layak Anak (KLA) (%)	-	10		12		14		16		18		18		
		Cakupan pembentukan forum anak desa dibanding jumlah desa (%)	15,15	25,2 5		30,3 0		35,3 5		40,4 0		45,4 5		0,45		
		Cakupan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak dibanding kasus terlapor (%)	100	100		100		100		100		100		100		
2.3	Pangan															
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan				1.590		1.670		1.670		1.430		1.315		7.675	Dinas Pertanian dan Ketahana n Pangan
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Susenas)	75,6	75,7		75,8		75,9		76		76,2		76,2		
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Reguller)	87,8	87,9		88		88,1		88,2		88,3		88,3		

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indkator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangka t Daerah
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.4	Pertanahan															
	Program Kawasan Permukiman dan Pertanahan				8.150		8.150		9.405		11.405		11.710		48.820	Dinas Perumaha n dan Kawasan Permukim an
		Menurunnya luasan kawasan permukiman kumuh (Ha)	207,45	172, 88		138. ,26		103, 64		69,0 2		34,4		34,4		
		Persentase tanah yang bersertifikat (%)	28	28,5		29		29,5		30		30,5		30,5		
2.5	Lingkungan Hidup															
	Program Perencanaan dan Penaatan Hukum Lingkungan				6950		6.950		9.350		11.350		14.550		49.150	Dinas Lingkuga nHidup dan Pengelola n Sampah
		Persentase aduan masyarakat yang di tindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		100		
		Luasan tutupan lahan yang terkonservasi (Ha)	0	10		10		10		10		10		10		
	Program Pengembangan Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Pengendalian Pencemaran				33.850		33.850		39.840		46.533		54.036		208.109	Dinas Lingkuga nHidup dan Pengelola n Sampah
		Persentase Layanan Penanganan Persampahan Perkotaan(%)	62,69	63		65		70		75		80		80		

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indkator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangka t Daerah
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase Pengurangan Sampah Perdesaan (%)	0	30		35		40		45		50		50		
		Presentase Penurunan jumlah indikasi pelanggaran (%)	0	5		10		15		20		25		25		
		Presentase usaha/kegiatan yang memenuhi peraturan bidang LH (%)	0	60		65		70		75		80		80		
2.6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil															
	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk				2.390		2.390		2.390		2.390		2.390		11.950	Dinas Kependud ukan dan Pencatata n Sipil
		Cakupan Penduduk yang memiliki KTP (%)	81,01	83,5 1		86,0 1		88,9 1		90,7 1		93,2 1		93,2 1		
		Cakupan Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (%)	85,00	87,5 0		90,0 0		92,5 0		95,0 0		97,5 0		97,5 0		
	Program Pelayanan Catatan Sipil			650		650		650		650		650		650	2.600	Dinas Kependud ukan dan Pencatata n Sipil
		Rasio Penduduk 0 - 18 Tahun Memiliki Akte (%)	80	85		90		93		95		98		98		

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indkator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangka t Daerah
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						734		738		744		750		2.966	Dinas Kependud ukan dan Pencatata n Sipil
		Database Kependudukan	1	1		1		1		1		1		1		
	Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan			335			335		335		335		335		1.340	Dinas Kependud ukan dan Pencatata n Sipil
		Perolehan ISO 9000	0	0		1		1		1		1		4		
		Tersedianya data warehouse pemanfaatan data	0	1		1		1		1		1		5		
2.7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa															
	Program Pengembangan Desa dan Sosial Budaya				2.197		2.843		3.526		4.119		4.164		16.848	Dinas Pemberda yaan Masyarak at Desa
		Persentase Desa yang memiliki BP SPAMS (%)	34	39		43		47		51		55		55		
		Persentase desa TTMD yang memiliki infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat (%)	2	2		2		2		2		2		2		
		Persentase kelengkapan dokumen RKO	100	100		100		100		100		100		100		
		Persentase kelengkapan dokumen inventarisasi RTLH	20	36		52		64		76		100		100		

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indkator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangka t Daerah
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase desa berkembang menjadi desa cepat berkembang	20	36		52		64		76		100		100		
		Pesentase desa yang melestarikan budaya adat	1	1		1		1		1		1		1		
		Persentase kelengkapan dokumen Ex PNPM aktif	38	44		50		56		63		69		69		
	Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			862			1.027		1.217		1.412		1.607		5.263	Dinas Pemberda yaan Masyarak at Desa
		Persentase personil pemerintah desa pengelola SID (%)	-	20		40		60		80		100		100		
		Persentase kepemilikan BUMDes aktif di setiap desa (unit)	21	55		66		77		89		100		100		
		Porsentase keberadaan Posyantek di setiap kecamatan	18	34		50		66		82		100		100		
		Persentase pelaku usaha yang mampu mengelolaUED	9	9		18		18		18		18		100		
		Peningkatan status dari peninjau menjadi peserta	50	50		50		100		100		100		100		
		Persentase kualifikasi perkembangan pembangunan desa (%)	55	65		75		85		95		100		100		

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangka t Daerah	
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipatif Masyarakat				3.864		4.085		4.314		4.539		4.759		21.562	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	
		Persentase posyandu ber status Madya (unit)	53	53		53		53		54		54		54			
		Persentase posyandu ber status purnama (%)	23	23		23		23		23		23		24			
		Persentase posyandu ber status mandiri (%)	3	3		3		3		3		3		3			
		Persentase masyarakat desa P2MBG yang mampu meningkatkan ekonomi keluarga (%)	3	4		5		6		7		8		8			
		Persentase anak sekolah yang terpenuhi gizinya (%)	36	49		62		74		87		100		100			
		Persentase perangkat desa yang mampu melakukan manajemen padat karya (%)	50	60		70		80		90		100		100			
		Presentase Desa yang memanfaatkan dan mengelola Dana Desa sesuai dengan perencanaan dan aturan (%)	100	100		100		100		100		100		100			
		Persentase Desa yang melakukan kerja sama dengan desa lainnya (%)	-	5		10		15		20		25		25			

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indkator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangka t Daerah
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase perangkat desa dan BPD yang memiliki kemampuan pengelolaan keuangan desa yang baik (%)	50	60		70		75		80		90		100		
		Persentase LPM aktif (%)	100	100		100		100		100		100		100		
		Persentase UP2K aktif (%)	51	54		65		77		88		100		100		
		Persentase TPKW aktif (%)	18	28		46		64		82		100		100		
		Persentase karang taruna aktif (%)	12	29		47		64		81		100		100		
2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana															
	Program Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan				546		785		939		1.048		1.189		4.507	Dinas Perberd ayaan Perempua n, Perlindun gan Anak dan Keluarga Berencan a
		Profil KKBPK (Buku Profil)	0	1		1		1		1		1		1		
		Grand Design KKBPK (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		1		

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indkator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangka t Daerah
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				3.103		3.164		3.225		3.286		3.347		16.125	Dinas Perberd ayaan Perempua n, Perlindun gan Anak dan Keluarga Berencan a
		Cakupan Peserta KB Aktif (%)	71,88	71,13		72,65		73,41	74,44			75,72		75,72		
		Cakupan Kelompok Bina Keluarga Paripurna (%)	31,57	53,95		57,89		64,47		71,05		77,63		77,63		
2.9	Perhubungan															
	Program Manajemen, Rekayasa, Pengendalian dan Inspeksi Keselamatan Lalu lintas				5.275		8.575		5.575		5.275		5.275		29.975	Dinas Perhuubu ngan
		Peningkatan Kinerja Lalu-lintas	0,60	0,60		0,60		0,57		0,56		0,55		0,55		
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor				4.300		2.300		2.300		2.300		2.300		13.500	Dinas Perhuubu ngan
		Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) (unit)	8.900	8.950		9.000		9.050		9.100		9.150		9.150		
		Rasio Ijin Trayek (%)	8	8		8		8		9		9		10		

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indkator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangka t Daerah	
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Program Sarana dan Prasarana Perhubungan						10.800		11.300		12.250		13.200		47.550	Dinas Perhuubu ngan	
		Persentase sarana dan prasarana perhubungan (%)	25	30		35		40		45		50		50			
		Persentase perlengkapan jalan yang terpasang (%)	40	50		60		70		80		90		90			
		Persentase perlengkapan jalan yang terpelihara (%)	60	65		70		75		80		85		85			
2.1 0	Komunikasi dan Informatika																
	Program Informatika dan Statistik															Dinas Komunika si, Informatik a, Data dan Statistik	
	Program Informatika dan Statistik				1.968		3.857		3.074		3.240		3.240		350		
		Dokumen Master Plan TIK Kab. Brebes (Dokumen)	0	1		0		0		0		0		1			
		Tersedianya Single Data Kabupaten	0	0		0		0		0		1		1			
		Tersedianya Buku Brebes dalam Angka	1	1		1		1		1		1		5			
		Tersedianya Buku PDRB Kabupaten Brebes	1	1		1		1		1		1		5			
		Jumlah sandiman (orang)	0	1		2		3		4		5		5			
		Persentase Perangkat Daerah memiliki Website (%)	35,71	35,7		44,6		55,7		69,7		87,1		100			

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indkator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangka t Daerah
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase Peningkatan Kunjungan Website Pemerintah Daerah (%)	0	20		20		20		20		20		20		
2.1 1	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah															
	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi				553		618		673		749		814		3.407	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
		Persentase Koperasi Aktif dan melaksanakan RAT (%)	40,71	38,46		40,17		41,83		43,44		45,01		45,01		
		Persentase Koperasi berpredikat sehat (%)	15,33	14,81		15,03		17,22		18,24		19,16		19,16		
	Program Pengembangan, Kemitraan, Pemberdayaan, dan Promosi Usaha Mikro				415		477		515		537		570		2.514	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
		Persentase Peningkatan Omset Pelaku Usaha Mikro (%)	3	3		3		3		3		3		15		
		Persentase Usaha Mikro yang memiliki ijin Usaha (%)	5	6		7		8		9		10		10		

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indkator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangka t Daerah	
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
2.1 2	Penanaman Modal																
	Program perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal				339		340		1.135		1.290		1.755		4.520	DPMTPSP	
		Peraturan Daerah Penyelenggaraan Penanaman Modal (Ada/Tidak)	0	0		1		1		1		1		4			
		Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal(RUPM)(Ada/Tidak)	0	0		1		1		1		1		4			
		Peningkatan jumlah Usaha Menengah Besar yang bermitra dengan Usaha Menengah Kecil	0	0	1	2		3		4		5		5			
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi				327		360		380		398		415		1.880	DPMTPSP	
		Jumlah Kegiatan Invstasi yang dipantau dan diawasi (Investor)	24	40		40		45		50		55		55			
	Program Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan				439		850		1700		2300		2900		8189	DPMTPSP	
		Meningkatnya kepuasan pelayanan permohonan perijinan (%)	0	80		80		85		90		100		100			

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indkator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangka t Daerah
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Penyelenggaraan Informasi, Pengaduan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				520		551,75		581,75		611,75		641,75		641,75	DPMTSP
		Dokumen Informasi dan Pelaporan Perijinan dan non perijinan (dokumen)(Ada/Tidak)	0	1		1		1		1		1		1		
		Persentase Pengaduan yang tertangani (%)	100	100		100		100		100		100		100		
2.1 3	Kepemudaan dan Olah Raga															
	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga				13.405		16.975		14.512		15.036		15.604		75.532	Dinas Pendidika n Pemuda dan Olahraga
		Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan manajemen dan perencanaan program	18	18		18		18		18		18		18		
		Jumlah pemuda kader kewirausahaan		50		55		60		65		70		70		
		jumlah pembina pramuka penegak dan pandega yang mendapat fasilitasi pelayanan kepemudaan		500		525		550		600		650		650		
		Cakupan pembinaan olahraga (%)	30	45		45		50		55		65		65		

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indkator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangka t Daerah
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (%)	15	40		40		40		50		50		50		
		Cakupan pembinaan atlet muda (%)	-	40		40		50		50		55		55		
		Jumlah atlet berprestasi (orang)	-	18		29		30		42		55		55		
2.1 4	Statistik															
	Program Informatika dan Statistik				1.968		3.857		3.074		3.240		3.240		350	
		Dokumen Master Plan TIK Kab. Brebes (Dokumen)	0	1		0		0		0		0		1		
		Tersedianya Single Data Kabupaten	0	0		0		0		0		1		1		
		Tersedianya Buku Brebes dalam Angka	1	1		1		1		1		1		5		
		Tersedianya Buku PDRB Kabupaten Brebes	1	1		1		1		1		1		5		
		Jumlah sandiman (orang)	0	1		2		3		4		5		5		
		Persentase Perangkat Daerah memiliki Website (%)	35,71	35,71		44,6375		55,796875		69,74609375		87,18261719		100		
		Persentase Peningkatan Kunjungan Website Pemerintah Daerah (%)	0	20		20		20		20		20		20		

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indkator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangka t Daerah
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.1 5	Persandian															
	Program Informatika dan Statistik				1.968		3.857		3.074		3.240		3.240		22,5	
		Dokumen Master Plan TIK Kab. Brebes (Dokumen)	0	1		0		0		0		0		1		
		Tersedianya Single Data Kabupaten	0	0		0		0		0		1		1		
		Tersedianya Buku Brebes dalam Angka	1	1		1		1		1		1		5		
		Tersedianya Buku PDRB Kabupaten Brebes	1	1		1		1		1		1		5		
		Jumlah sandiman (orang)	0	1		2		3		4		5		5		
		Persentase Perangkat Daerah memiliki Website (%)	36	36		45		56		70		87		100		
		Persentase Peningkatan Kunjungan Website Pemerintah Daerah (%)	0	20		20		20		20		20		20		
2.1 6	Kebudayaan															
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Kebudayaan				13,735		13.735		14.420		13.105		8.750		50.010	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	11,27	15,49		19,72		23,94		28,17		32,39		32,39		
		Persentase Kelompok Seni yang Terbina (%)	43,49	52,17		60,85		69,52		78,20		86,88		86,88		

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indkator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangka t Daerah
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.1 7	Perpustakaan															
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan				155		380		400		410		480		1.825	Dinas Arsip dan Perpustakaan
		Meningkatnya Jumlah Pengunjung Perpustakaan (orang)	13.217	13.481		13.785		14.125		14.500		14.915		14.915		
2.1 8	Kearsipan															
	Program Penyelenggaraan Kearsipan				130		380		450		550		620		2.130	Dinas Arsip dan Perpustakaan
		Meningkatnya jumlah OPD, SMP dan Desa yang melaksanakan pengelolaan kearsipan dinamis secara baku (unit kerja)	69	74		79		84		89		94		94		
		Prosentase Aparatur bersertifikat yang melaksanakan pengelolaan kearsipan (%)	10	10		15		15		15		50		50		
3	Urusan Pilihan															
3.1	Kelautan dan Perikanan															
	Program pengembanan Perikanan Tangkap				600		1.040		1.040		1.040		1.040		4.760	Dinas Perikanan
		Produksi Perikanan Tangkap di Laut (ton)	2.820	2.961		3.109		3.420		3.591		3.770		3.770		
		Produksi Perikanan Tangkap di Waduk (ton)	111	116		122		128		135		141		141		

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indkator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangka t Daerah
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan				17.095		13.039		13.039		13.039		13.039		69.251	Dinas Perikanan
		Produksi Perikanan Budidaya air payau (ton)	72.569	61.6 84		64.7 68		68.0 06		71.4 07		74.9 77		74.9 77		
		Produksi Perikanan Budidaya air tawar (ton)	3.061	2.75 5		2.89 3		3.03 7		3.18 9		3.34 9		3.34 9		
		Pendapatan Pembudidaya Air Payau (Ribu RUpiah./Kapita/Th)	45.850	41.2 65		42.0 90		43.3 53		45.5 20		47.7 96		47.7 96		
		Pendapatan Pembudidaya Air Tawar (Ribu Rupiah./Kapita/Th)	15.000	15.4 50		15.9 13		16.3 90		16.8 82		17.3 89		17.3 89		
	Program Pengemangan Usaha Perikanan				633		766		799		832		865		#REF!	Dinas Perikanan
		Tingkat Konsumsi ikan (kg/kapita/ tahun)	18	20		21		22		23		24		24		
		Nilai Produksi olahan ikan per Tahun (Juta Rupiah)	137.995	140. 600		145. 780		148. 000		150. 590		153. 735		153. 735		
		Produksi Garam Krosok (ton)	15.000			57.0 00		59.0 00		60.0 00		61.0 00		61.0 00		
		Pendapatan Petani Garam - Kualitas I (Ribu Rupiah./Ha/Musim)	3.800	2.30 0		2.50 0		2.70 0		2.90 0		3.20 0		3.20 0		
		Pendapatan Petani Garam - Kualitas II dan III (Ribu Rupiah./Ha/Musim)	1.750	1.60 0		1.75 0		1.90 0		2.10 0		2.30 0		2.30 0		

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indkator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangka t Daerah
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.2	Pariwisata															
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Kepariwisataan				3.250		3.250		4.825		6.450		8.025		22.550	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		PAD sektor Wisata (Juta Rupiah)	1.776	1.900		2.100		2.400		2.700		3.000		12.100		
		Jumlah Kunjungan Wisatawan (jiwa)	450.000	550.000		700.000		800.000		900.000		1.000.000		3.950.000		
3.3	Pertanian															
	Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan				665		580		580		340		300		2.465	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Cakupan Pembinaan Kelompok Tani (%)	40	42		44		46		48		50		20		
	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan				685		1.665		1.867		2.255		2.462		8.934	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		produktivitas tanaman padi (kw/ha)	55,77	55,80		55,90		55,95		56,00		56,10		56,10		
		produktivitas tanaman jagung (kw/ha)	65,84	66,00		66,25		66,50		66,75		67,00		67,00		
		produktivitas tanaman kedelai (kw/ha)		13,25		13,45		13,65		13,86		14,06		14,06		
		produktivitas tanaman kacang hijau (kw/ha)		11,30		11,35		11,40		11,45		11,50		11,50		

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indkator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangka t Daerah
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Peningkatan Produksi Hortikultura dan Perkebunan						775		4.350		4.505		6.831		7.136	Dinas Pertanian dan Ketahana n Pangan
		produktivitas hortikultura sayuran (bawang merah) (kw/ha)	99,55	100, 00		100, 50		101, 00		101, 50		102, 00		102, 00		
		produktivitas hortikultura buah- buahan (mangga) (kw/ha)		106, 50		108, 63		110, 80		113, 02		115, 28		115, 28		
		produktivitas perkebunan (kopi) (kw/ha)		210, 00		214, 20		218, 48		222, 85		227, 31		227, 31		
	Program Pengelolaan Sumber Daya Lahan dan Prasarana dan Sarana Pertanian				5.675		6.300		7.300		7.540		8.630		35.445, 00	Dinas Petrnaka n dan Kesehatan Hewan
		Indeks Pertanaman	1,93	1,99		2,06		2,12		2,19		2,25		2,25		
	Program Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veterner				1.000		1.010		1.020		1.030		1.040		4.100	
		Penurunan angka kematian ternak besar, ternak kecil dan unggas (Ekor)	5.000	400		3.00 0		2.50 0		2.00 0		1.75 0		1.75 0		
		Penurunan Kasus penyakit hewan menular (Ekor)	10.000	8.00 0		6.00 0		5.00 0		4.00 0		3.50 0		3.50 0		

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indkator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangka t Daerah	
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Peningkatan keamanan konsumsi Bahan Asal Hewan dan Produk Asal Hewan (Ekor)	2	7		12		17		22		27		27			
		Penurunan jumlah pemotongan betina produktif (Ekor)	1026	926		826		726		626		526		526			
	Program Pengembangan Sarana Prasarana dan Usaha Peternakan				1.800		1887		2015		2170		2275		8347	Dinas Peternak an dan Kesehatan Hewan	
		Peningkatan Sarana Prasarana Peternakan dan Kesehatan Hewan (Unit)	14	14		15		16		16		16		16			
		Peningkatan Sarana Prasarana Pendukung Peternakan dan Kesehatan Hewan (Unit)	14	30		34		38		44		48		48			
		Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Jenis Produk Olahan Asal Ternak (Jenis)	-	3		4		5		6		7		7			
		Peningkatan Jumlah Kelompok yang melaksanakan Pengolahan Limbah Peternakan (kelompok)	2	3		4		5		6		7		7			
		Jumlah Kelompok Ternak Berprestasi Tingkat Provinsi	10	11		12		13		14		15		15			
		Jumlah Kelompok Ternak Berprestasi Tingkat Nasional	7	7		7		8		8		9		9			

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indkator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangka t Daerah
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Pengembangan Budidaya Ternak				1.384		1.150		1.765		1.780		2.075		6770	Dinas Petrnaka n dan Kesehatan Hewan
		Bibit Ternak Ungul yang dihasilkan (Ekor)	1.700	1.700		1.700		1.700		1.700		1.700				
		Meningkatnya Jumlah Ternak yang Mendapat SKLB	450	450		500		550		600		650				
		Meningkatnya Kuantitas Pakan Ternak (%)	200	200		0		0		0		0				
		Jumlah kelompok yang melaksanakan manajemen peternakan (kelompok)	10	10		10		20		25		25				
3.6	Perdagangan															
	Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Perdagangan Dalam Negeri				4.339		7.703		8.065		9.185		10.300		39.592	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan
		Persentase Pasar dalam kondisi baik (%)	3,85	7,69		11,54		15,38		19,23		23,08		23,08		
		Persentase Alat Dagang lolos Uji Metrologi (%)	10,8	10,8		10,8		10,8		10,8		10,8		10,8		

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indkator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangka t Daerah
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.7	Perindustrian															
	Program Peningkatan Kapasitas teknologi dan Sistem Produksi Industri Logam, Sandang dan Aneka				375		445		505		565		625		2.515	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Prosentase Pertumbuhan industri Logam, Sandang dan Aneka (%)	0,35	0,40		0,45		0,50		0,55		0,60		2,50		
	Program Peningkatan Kapasitas Teknologi dan Sistem Produksi Industri Agro,Kimia dan Hasil Hutan				791,00		875,57		915,57		955,57		955,57		4.493	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Prosentase Pertumbuhan industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan (%)	0,35		0,53	0,71		0,89		0,107		0,125		0,125		
4	Uusan Pemerintahan Fungsi Penunjang															
4.1	Administrasi Pemerintahan															
	Program Tata Pemerintahan				3.275		4.100		4.100		4.475		5.250		21.200	Bagian Tata Pemerintahan Setda
		Prosentase Jumlah Kecamatan yang pelaksanaan penyelenggaraan Administrasi Kecamatan dan PATEN berjalan baik	100	100		100		100		100		100		100		

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indkator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangka t Daerah
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Pemerintahan Desa				1.416		1.511		2.102		1.542		1.817		8.388	Bagian Pemerinta han Desa Setda
		Peningkatan Jumlah Desa tertib administrasi	262	268		274		280		286		292		292		
	Program Penanggulangan Kemiskinan				590		3.293		3.342		3.667		4.041		14.342	Bagian Penanggul angan Kemiskin an Setda
		Tersusunnya Database penanggulangan kemiskinan	0	0		1		1		1		1		1		
	Program Kesejahteraan Rakyat				16.968		17.819		18.711		19.649		20.662		93.809	Bagian Kesejahtr aan Rakyat Setda
		Peningkatan Prestasi bidang keagamaan dalam ajang MTQ Nasional (Peringkat)	30	15		15		10		10		5		5		
		Penurunan Biaya Non KBIH Kab. Brebes		293. 000		285. 000		280. 000		275. 000		270. 000		270. 000		
	Program Perekonomian						1.062		1.062		1.327		1.055		5.106	Bagian Perekono mian Setda
		Peningkatan laba BUMD Kab. Brebes (Miliar Rupiah)	10,0	10,5		11,0		11,5		12,0		12,5		57,5		

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indkator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangka t Daerah
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Layanan Pengadaan				1.230		4230	100	4230	100	4230	100	4230	100	16920	Bagian Layanan Pengadaa n Setda
		Persentase proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang berhasil. (%)	98	98		98		99		99		100		100		
	Program Penyusunan, Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan			902			1250		1375		1512,5		1663,7 5		5801,25	Bagian Pembang unan Setda
		Persentase ketepatan waktu OPD dalam melaporkan realisasi fisik dan keuangan (%)	80	90		95		100		100		100		100		
	Program Perumusan Peraturan Perundangan, Publikasi dan Dokumentasi Produk Hukum			1.15 0			3.105		3.210		3.315		3.420		13.050	Bagian Hukum Setda
		Peningkatan Peringkat untuk Penghargaan Kab/Kota Peduli HAM Tingkat Nasional (Peringkat)	10	10		10		7		5		5		5		
		Peningkatan Peringkat Tingkat Provinsi dalam Penilaian Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) (Peringkat)	30	25		25		20		15		10		10		

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indkator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangka t Daerah	
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Program Penataan Kelembagaan OPD dan Kinerja Aparatur				1.095		2.085		2.085		2.015		1.935		9.215	Bagian Organisas i Setda	
		Persentase OPD yang dievaluasi kelembagaan dan kinerja (%)	80	80		80		80		80		80		80			
		Persentase OPD yang mempunyai dokumen inforjab (%)	15	20		30		35		40		50		50			
	Program Perencanaan dan Pengawasan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah				7.736		8.123		8.530		8.956		9.404		42.749	Sekretaria t DPRD	
		Dokumen Pokok Pikiran DPRD		2		2		2		2		2		2			
		Dokumen Hasil Pengawasan Pembangunan Daerah		2		2		2		2		2		2			
	Program Rapat dan Perundang-Undangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah				480		593		513		530		548		2663	Sekretaria t DPRD	
		Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang difasilitasi		15		15		15		15		15		15			
		Jenis Bintek Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD yang dilaksanakan		11		11		11		11		11		11			

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indkator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangka t Daerah
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Humas dan Keprotokolan				11.000		12.100		13.310		14.641		16.105		67.156	Sekretaria t DPRD
		Jenis Dokumen Kehumasan dan Protokoler		16		16		16		16		16		16		
	Program Peningkatan Pelayanan Umum				18.972		20.298		24.616		29.444		34.680		128.010	
		Pelaksanaan tugas umum pemerntahan dan pelaksanaan pelimpahan (%)	0	0		95,8		96		97		98		98		
		IKM Paten	7,5	7,6		7,6		7,7		7,8		7,8		7,8		Kecamata n Brebes, Jatibanra ng, Wanasari, Songgom, bulakamb a, Tanjung, Losari, Kersana, Ketangu ngan, Banjarhar jo, Larangan, Tonjong, Bumiayu, Paguyang an, Sirampog, Bantarka wung, Salem, Kelurahan Brebes, Pasarbata ng,
		Persentase Peningkatan Pelunasan PBB	83	85		86		87		88		90		90		
		Persentase Pelunasan Raskin/Rasta (%)	100			100		100		100		100		100		

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indkator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangka t Daerah
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
																Gandasuli , Limbanga n Wetan, Limbanga n Kulon
4.2	Pengawasan															
	Program Peningkatan sistem pengendalian internal				3.158		3.474		3.821		4.203		4.624		19.280	Inspektor at
		Dokumen Perbup Kebijakan Pengawasan (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		2		
		Dokumen Sistem Prosedur Pengawasan (dokumen)	6			6		7		8		10		10		
		Nilai Evaluasi LKJIP OPD	CC	B		B		B		B		B		B		
		Dokumen Hasil Reviu LKJIP Kab. Brebes (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1		
4.3	Perencanaan Pembangunan															
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				1.573		1.900		1.793		1.783		1.813		8.862	Badan Perencana an, Penelit an da Pengemba ngan Daerah
		Persentase program RPJMD yang dijabarkan ke RKPD (%)	-	100		100		100		100		100		100		

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indkator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangka t Daerah
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase program RPJMD yang dijabarkan ke Renstra	-	100		100		100		100		100		100		
		Persentase program Renstra yang dijabarkan ke Renja (%)	-	100		100		100		100		100		100		
		Persentase pencapaian kegiatan sesuai perencanaan	-	100		100		100		100		100		100		
		Persentase indikator kinerja SKPD yang tercapai (%)	-	100		100		100		100		100		100		
		Persentase partisipasi stakeholder dalam perencanaan pembangunani (%)	-	100		100		100		100		100		100		
		Persentase usulan yang direkomendasi (%)	-	100		100		100		100		100		100		
	Program Perencanaan Ekonomi dan Infrastruktur				704		1.580		1.625		1.675		1.720		7.304	Badan Perencanaan, Penelit an da Pengemba ngan Daerah
		persentase keselarasan Renstra PD, Renja PD terhadap RPJMD di bidang ekonomi dan infrastruktur wilayah (%)	-	100		100		100		100		100		100		
		melakukan pendampingan dan bimtek Renstra dan Renja	-	9		9		9		9		9		9		
		jumlah OPD yang didampingi	-	9		9		9		9		9		9		

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indkator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangka t Daerah
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		jumlah dokumen yang dianalisa	-	10		14		14		14		14		14		
	Program Pemerintahan Sosial dan Budaya						2.575		2.650		2.950		3.150		11.325	Badan Perencanaan, Penelitan dan Pengembangan Daerah
		persentase keselarasan Renstra PO, Renja PD terhadap RPJMD di bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya	-	100		100		100		100		100		100		
		melakukan pendampingan dan bimtek Renstra dan Renja	-	9		9		9		9		9		9		
		jumlah OPD yang didampingi	-	19		19		19		19		19		19		
		jumlah dokumen yang dianalisa	-	6		33		33		33		33		33		
4.4	Keuangan															
	Program Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah				3.092		3.316		3.470		3.610		3.764		17.252	Badan Pendapatan, Pengelola an Keangan dan Aset Daerah
		Potensi dan Angka Ketetapan Pajak Daerah (Miliar Rupiah)	69,228	88,124		92,625		97,256		102,119		107,225				

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangka t Daerah
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Penagihan dan Pelaporan Pendapatan Daerah				1.219		2.108		2.199		2.291		2383		10.200	Badan Pendapat an, Pengelola an Keangan dan Aset Daerah
		Target penerimaan pendapatan daerah (Miliar Rupiah)	510	356		373		392		412		432		454		
	Program Perbendaharaan dan Kas Daerah				982		1028		1115		1190		1270		5.585	Badan Pendapat an, Pengelola an Keangan dan Aset Daerah
		Time Ratio Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (hari)	2	2		1		1		1		1		1		
		Time Ratio Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) (hari)	2	2		1		1		1		1		1		
	Program Penyusunan Anggaran Daerah				2.017		2.017		2.082		2.150		2.220		10.485	Badan Pendapat an, Pengelola an Keangan dan Aset Daerah
		Perbup tentang APBD (Perbup)	1	1		1		1		1		1		1		

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indkator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangka t Daerah
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Perda tentang APBD (Perda)	1	1		1		1		1		1		1		
	Program Aset Daerah				2.736		2.736		2.778		2.830		2.910		11.254	Badan Pendapat an, Pengelola an Keangan dan Aset Daerah
		Cakupan Sensus BMD (%)	85	95		100		100		100		100		100		
		Penilaian Aset (%)	-	25		35		50		75		100		100		
		Pencapaian target retribusi pemanfaatan BMD (juta rupiah)	-	310		310		310		310		310		124 0		
	Program Akuntansi dan Pelaporan				528		582		801		961		1.332		4205	Badan Pendapat an, Pengelola an Keangan dan Aset Daerah
		Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Perda)	1	1		1		1		1		1		1		
4.5	Kepegawaian															
	Program Pembinaan, Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian				1.351		1.522		1.615		1.695		1.785		7.968	Badan Kepegawa ian,Pegem angan Sumber Daya Manusaia Daerah
		Persentase Kinerja Sasaran Kerja Pegawai	100	100		100		100		100		100		100		

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indkator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangka t Daerah
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Angka Pelanggaran n yang di tangani (PNS)	17	17		16		15		14		13		13		
		Terfasilitasinya Kesejahteraan bagi PNS (orang)	200	300		200		200		200		200		200		
		Sinkronisasi data dan faile kepegawaian yang falid (orang)	1.500	2.00 0		2.00 0		2.00 0		2.00 0		2.00 0		2.00 0		
	Program Pengelolaan Mutasi Kepegawaian				3.400		1169		1265		1351		1019,3 25			
		Persentase Mutasi PNS/ASN (%)	90,9	91,5		92,3		93,8		94,4		95,1		95,1		
		Time Ratio Penerbitan SK Berkala Golongan II dan III (hari)	1	1		1		1		1		1		1		
		Persentase Kenaikan Pangkat PNS/ASN (%)	99	99,2		99,3		99,4		99,5		99,6		99,6		
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Formasi PNS/ASN (%)	99,23	99,3 5		99,4		99,5 1		99,6 2		99,7 3		99,7 3		
4.6	pendidikan dan pelatihan															
	Program Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				3.514		3.745		3.830		3.930		4.105		19.124	Badan Kepegawa ian,Pegem angan Sumber Daya Manusaia Daerah
		Capaian PNS/ASN yang memiliki kompetensi manajerial dan kompetensi teknis (%)	6,1	6,1		10		15		20		25		25		

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indkator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangka t Daerah
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	Tar get	Rp. (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4.7	Penelitian dan pengembangan															
	Program Penelitian dan Pengembangan				836		1360		1445		1530		1600		6771	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Persentase desa inovasi terhadap desa miskin berpotensi produk unggulan daerah (%)	0	20		40		60		80		100		100		
		Persentase Klaster Produk Unggulan yang mendaptkan intervensi teknologi (%)	0	17		17		33		50		67		67		
		Jumlah inventor yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi technopreneurship	0	0		2		2		2		2		8		
		persentase hasil penelitian dan pengkajian yang ditindaklanjuti dengan rekomendasi	0	100		100		100		100		100		100		

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Pada bagian ini diuraikan hubungan antara urusan pemerintah dengan OPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab OPD. Serta disajikan pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan dan dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang berkoordinasi dengan pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Sedangkan program prioritas adalah program yang menjadi prioritas oleh pemerintah daerah karena harus dilaksanakan, untuk mengatasi masalah yang sangat krusial, serta sangat dibutuhkan oleh pemerintah dan masyarakat tanpa mengesampingkan program yang lain. Agar program tersebut betul-betul memenuhi kriteria prioritas dan akuntabel, perlu disertai target capaian yang terukur dan kebutuhan atau kerangka pendanaan. Kerangka pendanaan dalam hal ini bersifat indikatif, sesuai dengan misi yang akan dilaksanakan dan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

Tabel 8.1**Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Brebes**

ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Awal	Target Pada Tahun Ke-				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
IPM	64,62	65,27	65,92	66,58	67,24	67,92
Harapan lama sekolah (tahun)	11,54	11,71	11,89	12,07	12,25	12,43
Rata-rata lama sekolah (tahun)	6,36	6,55	6,74	6,94	7,15	7,37
Usia harapan hidup (tahun)	68,42	68,43	68,44	68,45	68,46	68,47
Rasio jalan baik (%)	60,00	77,00	79,00	80,00	81,00	82,00
Cakupan akses air minum layak (%)	88,35	88,75	89,15	89,55	89,95	90,35
Cakupan akses jamban (%)	68,60	69,97	71,37	72,80	74,25	75,74
Rasio jaringan irigasi baik (%)	60,02	61,03	62,06	63,06	64,04	65,04
Rasio rumah layak huni (%)	84,48	84,92	85,75	86,58	87,41	88,24
Persentase pemukiman kumuh (%)	93,16	74,53	55,90	37,27	18,64	0
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,00	64,04	65,03	66,02	67,01	68,00
Indeks Kualitas Air	42,3	43,6	45	46,3	47,6	49,0
Indeks Kualitas Udara	79,2	80,5	81,8	83,1	84,4	85,7
Indeks Kualitas Tutupan Hutan	66,5	62	67,5	68	68,5	69
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,02	5,17	5,32	5,48	5,65	5,82
Pengeluaran per kapita yang disesuaikan (ribu rupiah PPP)	9.199	9.320	9.442	9.563	9.685	9.806,00
Kontribusi sektor pertanian (%)	40,72	40,92	41,13	41,23	41,33	41,44
Kontribusi sektor industri pengolahan (%)	15,22	15,52	15,83	16,15	16,47	16,8
Kontribusi sektor perdagangan (%)	16,11	16,19	16,27	16,35	16,43	16,52
Laju kenaikan investasi (%)	1	1,5	1,5	2	2	2
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA/PMDN) (milyar rupiah)	1.291	1.310	1.330	1.357	1.384	1.411
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	9,06	8,83	8,61	8,40	8,19	7,98
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	65,35	66,65	67,99	69,35	70,73	72,15
Rasio penduduk yang bekerja (%)	61,11	62,34	63,58	64,85	66,15	67,47
Nilai SKM	76,83	77,06	77,29	77,52	77,75	77,98
Nilai SAKIP	CC	B	B	B	B	B
Indeks Nilai Evaluasi LPPD	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Awal	Target Pada Tahun Ke-				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Profesionalitas ASN	61.24	61.41	62,41	63,11	63,45	64
Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (%)	-	20	20	20	20	20
Angka kriminalitas	90	90	88	86	84	82
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	100	100	100	100	100	100
Rasio desa dengan tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan desa yang baik (%)	13,68	22,82	34,24	51,36	68,49	100
Persentase desa yang menyusun RPJMDes dan RKPDes tepat waktu (%)	9,93	20,54	34,24	51,36%	68,49%	100%
Persentase desa yang menyusun APBDes tepat waktu (%)	9,93	20,54	34,24	51,36%	68,49%	100%
Rasio desa yang memiliki BUMDes (%)	21,20	27,39	34,24%	51,36%	68,49%	100%
IPG	85,75	85,79	85,83	85,87	85,92	85,96
HLS (tahun)	11,58	11,64	11,70	11,76	11,82	11,88
RLS (tahun)	4,86	4,88	4,91	4,93	4,96	4,98
AHH (tahun)	70,33	70,51	70,68	70,86	71,04	71,21
Pengeluaran per kapita yang disesuaikan (ribu rupiah PPP)	6.378	6.397	6.416	6.436	6.455	6.474
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan (%)	1,97	2,02	2,07	2,12	2,17	2,23
Proporsi perempuan di lembaga pemerintahan ASN (%)	26,49	27,02	27,56	28,11	28,67	29,24
Persentase penanganan korbanKDRT (%)	100	100	100	100	100	100
Indeks komposit kesejahteraan anak (%)	10	12	14	16	18	20
Prevalensi anak bekerja (%)	0.0184	0.0184	0.0184	0.0182	0.0182	0.0182
Rasio perkawinan anak (%)	0,44	0,43	0,43	0,42	0,42	0,42
Cakupan anak memiliki akte (%)	66,09	85,00	89,00	93,00	97,00	100
Persentase penanganan korban kekerasan pada anak (%)	100	100	100	100	100	100
Persentase PMKS yang mendapat bantuan sosial (%)	32	40	50	60	70	80
Persentase PMKS penerima KUBE (%)	3	4	5	6	7	8

Tabel 8.2**Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**

ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Awal	Target Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,02	5,17	5,32	5,48	5,65	5,82	5,82
Pengeluaran per Kapita (ribu rupiah PPP)	9.199,00	9.320,00	9.442,00	9.563,00	9.685,00	9.806,00	9.806,00
Inflasi (%)	3 – 3,5	3 – 3,5	3 – 3,5	3 – 3,5	3 – 3,5	3 – 3,5	3 – 3,5
PDRB per Kapita (ribu rupiah)	24.408,64	26.150,73	27.892,81	29.634,89	31.376,97	33.119,06	33.119,06
Gini Ratio	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30
Tingkat Kemiskinan (%)	19,18	18,89	18,61	18,33	18,05	17,78	17,78
Fokus Kesejahteraan Sosial							
Pendidikan							
Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,54	11,71	11,89	12,07	12,25	12,43	12,43
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	6,36	6,55	6,74	6,94	7,15	7,37	7,37
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	99,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs	89,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	84,53	85,00	87,00	90,00	92,00	95,00	95,00
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	64,13	64,50	65,00	70,00	75,00	80,00	80,00
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,13	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05	0,05
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,33	0,30	0,25	0,20	0,15	0,12	0,12
Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Awal	Target Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	94,29	94,50	95,00	97,00	98,00	99,00	99,00
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK	74,95	75,00	77,00	80,00	82,00	85,00	85,00
APK PAUD (laki-laki dan perempuan) (%)	57,17	60,00	65,00	70,00	75,00	75,00	75,00
Angka Kelulusan Paket A (%)	98,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Angka Kelulusan Paket B (%)	99,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Angka Kelulusan Paket C (%)	98,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Angka Melek Huruf Usia 15 s.d. 59 Tahun Laki-laki dan Perempuan (%)	94,15	95,00	96,20	96,50	97,00	97,50	97,50
Kesehatan							
Usia Harapan Hidup (tahun)	68,42	68,43	68,44	68,45	68,46	68,47	68,47
Pelayanan Kesehatan Ibu hamil (%)	-	88,00	90,00	92,00	94,00	96,00	96,00
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (%)	-	94,00	95,00	96,00	97,00	98,00	98,00
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%)	-	94,00	95,00	96,00	97,00	98,00	98,00
Pelayanan Kesehatan Balita (%)	-	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	94,00
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar (%)	-	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00	88,00
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (%)	-	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	80,00
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut (%)	-	40,00	42,00	44,00	46,00	50,00	50,00
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (%)	-	50,00	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus(%)	-	50,00	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00

ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Awal	Target Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (%)	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB (%)	-	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (%)	-	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	85,00
Angka Kematian Bayi per 1.000 KLH	-	35,00	34,00	33,00	32,00	31,00	31,00
Angka Kematian Ibu per 100.000 KLH	-	340,00	335,00	330,00	325,00	320,00	320,00
Ketenagakerjaan							
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	9,06	8,83	8,61	8,40	8,19	7,98	7,98
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	65,35	66,65	67,99	69,35	70,73	72,15	72,15
Rasio Penduduk yang Bekerja (%)	61,11	62,34	63,58	64,85	66,15	67,47	67,47
Persentase Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja (%)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Fokus Seni Budaya dan Olahraga							
Kebudayaan							
Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	11,27	15,49	19,72	23,94	28,17	32,39	32,39
Persentase Kelompok Seni yang Terbina (%)	43,49	52,17	60,85	69,52	78,20	86,88	86,88
Olahraga							
Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan manajemen dan perencanaan program	18	18	18	18	18	18	18
Jumlah pemuda kader kewirausahaan	-	50	55	60	65	70	70

ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Awal	Target Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Jumlah pembina pramuka penegak dan pandega yang mendapat fasilitasi pelayanan kepemudaan	-	500	525	550	600	650	650
Cakupan pembinaan olahraga (%)	30,00	45,00	45,00	50,00	55,00	65,00	65,00
Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (%)	15,00	40,00	40,00	40,00	50,00	50,00	50,00
Cakupan pembinaan atlet muda (%)	-	40,00	40,00	50,00	50,00	55,00	55,00
Jumlah atlet berprestasi (orang)	-	18	29	30	42	55	55
ASPEK PELAYANAN UMUM							
Fokus Pelayanan Urusan Wajib							
Pendidikan							
Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah							
Rasio Ketersediaan Sekolah SD/ MI							
Rasio Ketersediaan Sekolah SMP/ MTs							
Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	62,13	70,00	80,00	90,00	95,00	100,00	100
Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	80,33	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00	100
Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah SD	19,42	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20
Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah SMP	15,41	17,00	18,00	19,00	20,00	20,00	20
Rasio Rombongan Belajar (Rombel) Terhadap Ruang Kelas SD	1,07	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1
Rasio Rombongan Belajar (Rombel) Terhadap Ruang Kelas SMP							
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	57,17	60,00	65,00	70,00	75,00	75,00	75,00

ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Awal	Target Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Angka Melek Huruf (Usia 15 - 59 Tahun) (%)	94,15	95,00	96,20	96,50	97,00	97,50	97,50
Persentase Lembaga PAUD Berizin Operasional dan Terakreditasi (Lembaga)	-	47,00	67,00	90,00	120,00	150,00	150,00
Indeks Paritas Gender Jenjang SD/MI (indeks)	0,95	1	1	1	1	1	1
Indeks Paritas Gender Jenjang SMP/MTs (indeks)	1,24	1	1	1	1	1	1
Jumlah Penduduk Angkatan Kerja (Usia Produktif 15 - 44 Tahun) Memiliki Kemampuan <i>Life Skill</i> (Orang)	-	100	150	200	250	300	300
Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%)	46,99	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	70,00
Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%)	84,85	87,00	90,00	97,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%)	94,77	95,00	96,00	98,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Guru PAUD bersertifikat pendidik (%)	25,00	30,00	32,00	35,00	40,00	45,00	45,00
Persentase Guru SD bersertifikat pendidik (%)	52,36	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	75,00
Persentase Guru SMP bersertifikat pendidik (%)	36,14	40,00	45,00	50,00	60,00	70,00	70,00
Kesehatan							
Penurunan prevalensi BB pada anak dengan BB rendah (%)	4,75	4,50	3,75	3,75	3,50	3,00	3,00
Penurunan prevalensi stunting (%)	32,70	32,00	29,00	29,00	28,00	27,00	27,00
Bayi usia 0-6 bulan dapat Asi Eksklusif (%)	80,00	81,00	83,00	83,00	84,00	85,00	85,00
Cakupan pelayanan balita (D/S) (%)	85,00	86,00	88,00	88,00	89,00	90,00	90,00
Cakupan Keluarga sadar gizi (%)	65,00	68,00	75,00	75,00	78,00	80,00	80,00
Penurunan prevalensi anak gizi buruk (%)	0,70	0,65	0,55	0,55	0,50	0,45	0,45

ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Awal	Target Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Cakupan desa baik garam (%)	98,00	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cakupan balita naik BB (N/D) (%)	70,00	72,00	77,00	77,00	78,00	80,00	80,00
Bayi baru lahir mendapat IMD (%)	50,00	51,00	53,00	53,00	54,00	55,00	55,00
Remaja putri mendapat TTD (%)	25,00	26,00	28,00	28,00	29,00	30,00	30,00
Cakupan bayi dapat Vitamin A (%)	90,00	91,00	93,00	93,00	94,00	95,00	95,00
Cakupan balita dapat Vitamin A (%)	90,00	91,00	93,00	93,00	94,00	95,00	95,00
Cakupan ibu nifas dapat Vitamin A dan Fe 42 (%)	85,00	86,00	91,00	91,00	93,00	95,00	95,00
Cakupan RT yang mengkonsumsi garam yodium (%)	93,00	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ante natal care minimal 4 kali sesuai standar (11 T)/ANC Terpadu (%)	50,00	55,00	65,00	65,00	70,00	75,00	75,00
Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan Persalinan Sesuai Standar (%)	75,00	76,00	78,00	78,00	79,00	80,00	80,00
Persentase Cakupan K1 (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Cakupan K4 (%)	86,00	86,00	88,00	88,00	89,00	90,00	90,00
Persentase KB Aktif (%)	52,00	55,00	60,00	60,00	65,00	70,00	70,00
Persentase Cakupan KF 1 (%)	70,00	71,00	73,00	73,00	74,00	75,00	75,00
Persentase Cakupan KF 3 (%)	55,00	57,00	65,00	65,00	68,00	70,00	70,00
Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan terstandar (%)	70,00	72,00	76,00	76,00	78,00	80,00	80,00
Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan (%)	90,00	91,00	93,00	93,00	94,00	95,00	95,00

ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Awal	Target Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Persentase komplikasi Kebidanan yang tertangani (%)	85,00	87,00	90,00	90,00	93,00	95,00	95,00
Persentase puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase deteksi resiko dan komplikasi oleh masyarakat (%)	30,00	34,00	42,00	42,00	46,00	50,00	50,00
Persentase deteksi resiko dan komplikasi oleh tenaga kesehatan (%)	80,00	82,00	86,00	86,00	88,00	90,00	90,00
Persentase kunjungan neonatal pertama KN1 (%)	75,00	78,00	83,00	83,00	88,00	90,00	90,00
Persentase kunjungan neonatal lengkap KN3 (%)	85,00	86,00	88,00	88,00	89,00	90,00	90,00
Persentase Neonatal Komplikasi tertangani (%)	90,00	91,00	93,00	93,00	94,00	95,00	95,00
Persentase kunjungan bayi (%)	90,00	91,00	93,00	93,00	94,00	95,00	95,00
Persentase Bayi BBLR tertangani (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar (Presentase)	85,00	86,00	88,00	88,00	89,00	90,00	90,00
Persentase Balita di MTBS (%)	60,00	64,00	72,00	72,00	76,00	80,00	80,00
Persentase pelayanan kesehatan usia lanjut (%)	30,00	35,00	45,00	45,00	55,00	60,00	60,00
Persentase PMT Lansia (%)	10,00	15,00	30,00	30,00	40,00	50,00	50,00
Persentase Posyandu Lansia (%)	50,00	55,00	65,00	65,00	70,00	75,00	75,00
Jumlah puskesmas Santun Lansia (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cakupan Desa Siaga Aktif (%)	68,00	75,00	80,00	80,00	82,00	84,00	84,00
AFP Rate	12 kasus	> 2 per 100.000 pdk < 15 th	> 2 per 100.000 pdk < 15 th	> 2 per 100.000 pdk < 15 th	> 2 per 100.000 pdk < 15 th	> 2 per 100.000 pdk < 15 th	> 2 per 100.000 pdk < 15 th
Persentase penurunan kasus penyakit yg dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) tertentu	5,00	0,10	0,20	0,25	0,20	0,22	0,22

ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Awal	Target Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon	65,00	0,67	0,75	0,83	0,75	0,80	0,80
Persentase pengungsi korban bencana yang mendapat pelayanan kesehatan	100,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Persentase anak sekolah SD/MI dan sederajat yang mendapatkan imunisasi (BIAS)	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
Persentase hasil pemeriksaan kesehatan Jamah haji	70,00	70,00	80,00	90,00	80,00	85,00	85,00
Persentase desa/ kelurahan yang mencapai 80% Imunisasi dasar lengkap (Desa UCI)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	90,00	92,00	93,00	94,00	93,00	93,50	93,50
Persentase anak usia 12-24 bulan mendapat imunisasi lanjutan (Boster)	40,00	55,00	65,00	75,00	65,00	70,00	70,00
Insiden Rate DBD	59,80	59,00	57,00	55,00	57,00	56,00	56,00
Case Fatality Rate DBD	0,65	0,64	0,60	0,56	0,60	0,58	0,58
Angka keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus (% succes rate)	61,79	70,00	80,00	90,00	80,00	85,00	85,00
Angka keberhasilan pengobatan pasien TB resistan obat (% succes rate)	60,00	0,65	0,75	0,85	0,75	0,80	0,80
Cakupan pengobatan semua kasus TB (% case detection rate/ CDR)	54,00	60,00	64,00	70,00	64,00	68,00	68,00
Angka notifikasi semua kasus TB yg diobati (case notification rate/ CNR) per 100.000 penduduk	63,00	70,00	80,00	90,00	80,00	85,00	85,00
Persentase pasien TB yang mengetahui status HIV (%)	47,50	55,00	65,00	75,00	65,00	70,00	70,00
Cakupan penemuan kasus TB resistan obat (absolut)	50,00	60,00	70,00	80,00	70,00	75,00	75,00
Persentase angka kasus HIV yang diobati (on ART)	34,00	65,00	75,00	85,00	75,00	80,00	80,00

ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Awal	Target Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Cakupan Populasi beresiko yang diperiksa HIV	53,00	70,00	80,00	90,00	80,00	85,00	85,00
Angka Penemuan Kusta	15,59	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Persentase penemuan Pneumonia Balita	35,79	45,00	55,00	65,00	55,00	60,00	60,00
Persentase perempuan usia 30 sampai 50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara	-	50,00	70,00	100,00	70,00	80,00	80,00
Jumlah wanita usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	-	50,00	70,00	100,00	70,00	80,00	80,00
Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu	-	5,00	15,00	25,00	15,00	20,00	20,00
Persentase Desa/ Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM Pos	26,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cakupan Minum Obat Filariasis Pemberian Obat Pencegahan Masal (POPM)	87,20	90,00	95,00	-	95,00	100,00	100,00
Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase penyandang Diabetes Mellitus (DM) yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	-	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	-	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cakupan pelayanan gigi bumil	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cakupan pelayanan gigi pada anak pra sekolah	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Cakupan UKGS (Upaya Kesehatan Gigi Sekolah)	45,00	50,00	50,00	60,00	80,00	80,00	80,00

ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Awal	Target Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Persentase desa total coverage PIS PK	40,00	50,00	50,00	75,00	100,00	100,00	100,00
Jumlah kecamatan yg memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi	25,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Presentase faskes yg memiliki ijin pelayanan kesehatan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase industri rumah tangga yang memiliki sertifikat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cakupan masyarakat miskin memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pekerjaan Umum							
Tersusunnya dokumen perencanaan dan laporan pengendalian dinas PU.							
Persentase Kesesuaian Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan Dokumen RTRW (%)	-	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	25,00
Jalan							
Meningkatnya Kondisi infrastruktur perkotaan (gedung)	25,00	26,25	27,56	28,94	30,39	31,91	31,91
Meningkatnya Kondisi infrastruktur perdesaan	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00
Drainase							
Peningkatan Panjang Saluran irigasi dalam kondisi baik (m)	250.450,00	254.690,00	258.980,00	263.150,00	267.245,00	271.430,00	271.430,00
Prosentase jumlah sungai yang berfungsi optimal (%)	5,21	10,42	16,67	21,88	27,08	32,29	32,29
Perumahan							
Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani (unit)	1.757	1.566	3.176	3.176	3.176	11.094	11.094

ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Awal	Target Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Menurunnya luasan kawasan permukiman kumuh (Ha)	207,45	172,88	138,26	103,64	69,02	34,40	34,40
Persentase tanah yang bersertifikat (%)	28,00	28,50	29,00	29,50	30,00	30,50	30,50
Persampahan							
Persentase Layanan Penanganan Persampahan Perkotaan(%)	62,69	-	65,00	70,00	75,00	80,00	80,00
Persentase Pengurangan Sampah Perdesaan (%)	-	-	35,00	40,00	45,00	50,00	50,00
Persentase Penurunan jumlah indikasi pelanggaran (%)	-	-	10,00	15,00	20,00	25,00	25,00
Persentase usaha/kegiatan yang memenuhi peraturan bidang LH (%)	-	-	65,00	70,00	75,00	80,00	80,00
Akses Air Minum							
Meningkatnya Kondisi infrastruktur perkotaan (air minum)	21,14	21,97	25,07	28,59	31,69	34,79	34,79
Perencanaan Pembangunan							
Perda RPJMD atau Perubahanya	Ada		Ada			Ada	
Pesentase Konsistensi Pogram RPJMD terhadap RKPD (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Pesentase Konsistensi Program RKPD terhadap APBD (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Tingkat keselarasan Renstra PO, Renja PD terhadap RPJMD di bidang ekonomi dan infrastruktur wilayah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Tingkat keselarasan Renstra PO, Renja PD terhadap RPJMD di bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Awal	Target Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Perhubungan							
Peningkatan Kinerja Lalu-lintas	0,60	0,60	0,60	0,57	0,56	0,55	0,55
Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) (unit)	8.900	8.950	9.000	9.050	9.100	9.150	9.150
Rasio Ijin Trayek (%)	8,00	8,00	8,00	9,00	9,00	10,00	10,00
Rasio PJU dengan total Jalan Kabupaten (%)	76,67	79,35	82,13	85,00	87,98	91,06	91,06
Persentase Cermin Terpasang di Tikungan Rawan (%)	2,22	7,78	13,33	18,89	24,44	30,00	30,00
Lingkungan Hidup							
Persentase aduan masyarakat yang di tindaklanjuti (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Meningkatnya Indeks Kualitas Air			55,00	60,00	62,00	65,00	65,00
Meningkatnya Indeks Kualitas Udara			85,00	86,00	90,00	92,00	92,00
Luasan tutupan lahan yang terkonservasi (Ha)	-	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00
Kependudukan dan Catatan Sipil							
Cakupan Penduduk yang memiliki KTP (%)	81,01	82,81	84,61	86,41	88,21	90,00	90,00
Cakupan Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rasio Penduduk 0 - 18 Tahun Memiliki Akte (%)	66,09	69,78	73,65	77,43	81,21	85,00	0,85
Database Kependudukan	1	1	1	1	1	1	1
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
Persentase meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender dan Kabupaten Layak Anak (KLA)							

ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Awal	Target Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Cakupan pembentukan forum anak desa dibanding jumlah desa	15,15	25,25	30,30	35,35	40,40	45,45	45,45
Cakupan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak dibanding kasus terlapor	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk							
Profil KKBPK (Buku Profil)	0	1	1	1	1	1	5
Grand Design KKBPK (Dokumen)	0	1	1	1	1	1	5
Cakupan Peserta KB Aktif (%)	71,88	72,13	72,65	73,41	74,44	75,72	75,72
Cakupan Kelompok Bina Keluarga Paripurna (%)	31,58	53,95	57,89	64,47	71,05	77,63	77,63
Sosial							
Prosentase Anak Terlantar, Anak Dengan Disabilitas, Anak Nakal dan Anak Jalanan, Lanjut Usia Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya dan Dapat Menjalankan fungsi sosialnya	96	97	98	99	100	100	100
Presentase Meningkatnya Penyandang Disabilitas, dan PMKS Lainnya yang terpenuhi hak dasar dan dapat menjalankan fungsi sosialnya (%)	48	67	70	75	80	85	85
Presentase Meningkatn Aksesibilitas RTSM (Rumah Tangga Miskin) dan PMKS lainnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar	68	70	75	80	85	90	90
Presentase PSKS Yang Aktif Berpartisipasi Dalam Penanganan Dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	41	45	50	55	60	70	70

ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Awal	Target Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Koperasi dan Usaha Kecil							
Persentase Koperasi Aktif dan Sehat (%)	10,96	13,70	16,44	19,18	21,92	24,66	24,66
Persentase Peningkatan Omset Pelaku UMKM (%)							
Persentase UMKM memiliki Ijin Usaha (%)							
Penanaman Modal							
Peningkatan jumlah Usaha Menengah Besar yang bermitra dengan Usaha Menengah Kecil	-	1	2	3	4	5	5
Jumlah Kegiatan Investasi yang dipantau dan diawasi (Investor)	24	-	40	45	50	55	55
Meningkatnya kepuasan pelayanan permohonan perijinan (%)	-	-	80	85	90	100	100
Dokumen Informasi dan Pelaporan Perijinan dan non perijinan (dokumen)	1	1	1	1	1	1	5
Persentase Pengaduan yang tertangani (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Keamanan, Ketertiban, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri							
Penurunan Persentase Pelanggaran Perda (%)	50,00	52,00	49,00	46,00	43,00	40,00	40,00
Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten/ Kota	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)							
Kasus Paham Radikal (Kasus)	-	-	-	-	-	-	-
Persentase Kehadiran Masyarakat dalam Pemilu (%)	-	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Jumlah desa bebas narkoba	-	-	17,00	34,00	51,00	68,00	68,00
Jumlah Sekolah Bebas Narkoba	-	-	10,00	20,00	30,00	40,00	40,00

ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Awal	Target Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Cakupan Desa Tangguh Bencana (%)	5,00	-	12,50	20,00	27,50	35,00	35,00
Pengurangan Persentase korban terdampak bencana (%)	30,00	25,00	20,00	15,00	10,00	5,00	5,00
Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (%)	-	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	80,00
Persentase Jumlah Sarana dan Prasaran yang Tertangani Pasca Bencana (%)	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	40,00
Ketahanan Pangan							
Skor Pola Pangan (Susenas)	75,60	75,70	75,80	75,90	76,00	76,20	76,20
Skor Pola Pangan (Reguler)	87,80	87,90	88,00	88,10	88,20	88,30	88,00
Pemberdayaan Masyarakat							
Persentase Desa yang memiliki BP SPAMS (%)	34,00	39,00	43,00	47,00	51,00	55,00	55,00
Persentase desa TTMD yang memiliki infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Persentase kelengkapan dokumen RKO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase kelengkapan dokumen inventarisasi RTLH	20,00	36,00	52,00	64,00	76,00	100,00	100,00
Persentase desa tertinggal menjadi mandiri	20,00	36,00	52,00	64,00	76,00	100,00	100,00
Pesentase desa yang melestarikan budaya adat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Persentase kelengkapan dokumen Ex PNPM aktif	38,00	44,00	50,00	56,00	63,00	69,00	100,00
Persentase personil pemerintah desa pengelola SID (%)	-	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00

ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Awal	Target Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Persentase kepemilikan BUMDes aktif di setiap desa (unit)	21,00	55,00	66,00	77,00	89,00	100,00	100,00
Porsentase keberadaan Posyantek di setiap kecamatan	18,00	34,00	50,00	66,00	82,00	100,00	100,00
Persentase pelaku usaha yang mampu mengelola UED	9,00	-	18,00	18,00	18,00	18,00	100,00
Peningkatan status dari peninjau menjadi peserta	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase posyandu pratama yang naik status ke Madya (%)	53,00	53,00	53,00	54,00	10,00	10,00	10,00
Persentase posyandu madya yang naik status ke purnama (%)	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	24,00	24,00
Persentase posyandu purnama yang naik status ke mandiri (%)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Persentase masyarakat desa P2MBG yang mampu meningkatkan ekonomi keluarga (%)	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	5,00	5,00
Persentase anak sekolah yang terpenuhi gizinya (%)	36,00	49,00	62,00	74,00	87,00	100,00	100,00
Persentase perangkat desa yang mampu melakukan manajemen padat karya (%)	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00
Presentase Desa yang memanfaatkan dan mengelola Dana Desa sesuai dengan perencanaan dan aturan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Desa yang melakukan kerja sama dengan desa lainnya (5%)	-	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00
Persentase perangkat desa dan BPD yang memiliki kemampuan pengelolaan keuangan desa yang baik (%)	50,00	60,00	70,00	75,00	80,00	90,00	100,00
Persentase LPM aktif (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase UP2K aktif (%)	51,00	54,00	65,00	77,00	88,00	100,00	100,00
Persentase TPKW aktif (%)	18,00	28,00	46,00	64,00	82,00	100,00	100,00
Persentase karang taruna aktif (%)	12,00	29,00	47,00	64,00	81,00	100,00	100,00

ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Awal	Target Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Statistik							
Tersedianya Buku Brebes dalam Angka (Buku)	1	1	1	1	1	1	1
Tersedianya Buku PDRB Kabupaten Brebes (Buku)	1	1	1	Ada	1	1	1
Kearsipan							
Meningkatnya jumlah OPD, SMP dan Desa yang melaksanakan pengelolaan kearsipan dinamis secara baku (SKPD)	69	74	79	84	89	94	94
Persentase Aparatur yang melaksanakan pengelolaan kearsipan (%)	-	10	10	15	15	50	50
Dokumen Master Plan TIK Kab. Brebes (Dokumen)	0	1	0	0	0	0	1
Tersedianya Single Data Kabupaten	0	0	0	0	0	1	1
Tersedianya Buku Brebes dalam Angka	1	1	1	1	1	1	5
Tersedianya Buku PDRB Kabupaten Brebes	1	1	1	1	1	1	5
Jumlah sandiman (orang)	0	1	2	3	4	5	5
Persentase Perangkat Daerah memiliki Website (%)	36	36	45	56	70	87	100
Persentase Peningkatan Kunjungan Website Pemerintah Daerah (%)	0	20	20	20	20	20	20
Perpustakaan							
Peningkatan Jumlah Pengunjung Perpustakaan (orang)	13.217	13.481	13.750	14.025	14.385	14.591	14.591

ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Awal	Target Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Fokus Layanan Urusan Pilihan							
Pertanian							
Cakupan Pembinaan Kelompok Tani (%)	40,00	42,00	44,00	46,00	48,00	50,00	0,50
Peningkatan produktivitas tanaman pangan (%)	3,00	3,26	3,52	3,78	4,04	4,30	4,30
Peningkatan produktivitas hortikultura dan perkebunan (%)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,10
Indeks Pertanaman	1,93	1,99	2,06	2,12	2,19	2,25	2,25
Pariwisata							
PAD Sektor Wisata (Rp. Ribu)	1.776.000	1.900.000	2.100.000	2.400.000	2.700.000	3.000.000	12.100.000
Jumlah Kunjungan Wisatawan (jiwa)	450.000	550.000	700.000	800.000	900.000	1.000.000	1.000.000
Kelautan dan Perikanan							
Produksi Perikanan Tangkap di Laut (ton)	2.819,7	2.960,7	3.108,7	3.419,6	3.590,6	3.770,1	3.770,1
Produksi Perikanan Tangkap di Waduk (ton)	110,8	116,4	122,2	128,3	134,7	141,5	141,5
Produksi Perikanan Budidaya Air Payau (ton)	72.569,0	61.684,0	64.768,0	68.006,0	71.407,0	74.977,0	74.977,0
Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar (ton)	3.061,0	2.755,0	2.893,0	3.037,0	3.189,0	3.349,0	3.349,0
Pendapatan Pembudidaya Air Payau (Rp./Kapita/Th)	45.850.000	41.265.000	42.090.300	43.353.009	45.520.659	47.796.692	47.796.692
Pendapatan Pembudidaya Air Tawar (Rp./Kapita/Th)	15.000.000	15.450.000	15.913.500	16.390.905	16.882.632	17.389.111	17.389.111
Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/ Th)	18	20	21	22	23	24	24
Nilai Produksi Olahan Ikan per Tahun (Rp. Ribu)	137.995.760	140.600.000	145.780.000	148.000.000	150.590.000	153.735.000	153.735.000
Produksi Garam Krosok (ton)	15.000	54.000	57.000	59.000	60.000	61.000	61.000
Pendapatan Petani Garam - Kualitas I (Rp./Ha/Musim)	3.800.000	2.300.000	2.500.000	2.700.000	2.900.000	3.200.000	-

ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Awal	Target Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Perdagangan							
Persentase Pasar dalam kondisi Baik (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Peningkatan PAD (%)	6,67	6,77	7,32	7,45	7,61	7,61	7,61
Persentase Alat Dagang Lolos Uji Metrologi (%)							
Perindustrian							
Persentase Pertumbuhan industri Logam, Sandang dan Aneka (%)	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55	0,60	0,65
Persentase Pertumbuhan industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan (%)	0,35	0,53	0,71	0,89	1,07	1,25	1,43
ASPEK DAYA SAING DAERAH							
Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur							
Meningkatnya Kondisi jalan dan jembatan baik dan mantap (%)	67,00	69,00	72,00	74,00	76,00	78,00	78,00
Meningkatnya Aksesibilitas perekonomian dan pariwisata (%)	66,88	68,88	71,88	73,88	75,88	77,88	77,88
Fokus Iklim Berinvestasi							
Persentase Tenaga Kerja Terlatih (%)	15,00	17,00	19,00	21,00	23,00	25,00	25,00
Persentase Penanganan Konflik Sosial dan Unjuk Rasa (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Peraturan Daerah							
Penyelenggaraan Penanaman Modal (Perda)	1	1	1	1	1	1	1
Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1

BAB IX

PENUTUP

RPJMD Kabupaten Brebes tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. RPJMD ini menjadi pedoman bagi setiap Perangkat Daerah (PD) di lingkungan pemerintah daerah dalam menyusun Renstra PD. RPJMD ini akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. PD berkewajiban menyusun Renstra PD yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan PD sesuai tugas pokok dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dengan periodisasi yang sama (tahun 2017-2022), selanjutnya Renstra PD akan dijadikan pedoman dalam menyusun Renja PD.
2. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda/ Baperlitbangda Kabupaten Brebes berkewajiban melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap penjabaran RPJMD ke dalam Renstra PD dan RKPD untuk menjamin konsistensi dan sinergitas program dan kegiatan perangkat daerah dalam upaya pencapaian visi dan misi kepala daerah.
3. Dalam rangka menjaga konsistensi dan sinkronisasi kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah, BPPKAD Kabupaten Brebes berkewajiban menyesuaikan seluruh kebijakan pengelolaan keuangan daerah, termasuk nomenklatur kode rekening program perangkat daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah terkait Dokumen RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022 dan nomenklatur kode rekening kegiatan perangkat daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Brebes terkait Dokumen Renstra PD Tahun 2017-2022.
4. RPJMD ini pada akhir masa jabatan Bupati-Wakil Bupati akan menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) Bupati-Wakil Bupati.
5. RPJMD ini menjadi dasar bagi PD, DPRD dan warga masyarakat dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah, serta melakukan penilaian kinerja pemerintah daerah.
6. RPJMD ini memiliki jangka waktu 5 tahun, maka dapat dilakukan evaluasi paruh waktu (*mid term evaluation*) untuk mengetahui sejauhmana tingkat pencapaian tujuan, sasaran, program terhadap target kinerja yang telah ditetapkan.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan perencanaan pembangunan setelah RPJMD berakhir, maka RPJMD Tahun 2017-2022 dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi sebagai pedoman penyusunan RKPD tahun 2023 sebelum tersusunnya RPJMD periode berikutnya yang memuat visi dan misi bupati terpilih. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD.

BUPATI BREBES,
IDZA PRIYANTI